



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
5. Daerah adalah Kabupaten Ende.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bupati adalah Bupati Ende.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(7) Bupati

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Bab VII Penutup
- (4) Isi dan Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan RKPD
 - b. Penyusunan Rancangan awal RKPD
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
 - d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - e. penetapan RKPD
- (2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSMANUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 26. TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENDE 2025

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DAFTAR ISI		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GRAFIK		viii
DAFTAR LAMPIRAN		
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3.	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.5.	Sistematika Dokumen RKPD	I-4
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.1.3.	Kawasan Rawan Bencana Alam	II-16
2.1.1.4.	Demografi	II-19
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-20
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-25
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-28
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-28
2.1.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-28
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-40
2.1.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-47
2.1.3.4.	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-53
2.1.3.5.	Fokus Layanan Urusan Kewilyahan	II-58
2.1.3.6.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum	II-58
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-59
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-59
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II-61
2.1.4.3. I	Fokus Iklim Berinvestasi	II-63
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-64
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2021	II-65
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-137
2.3.1.	Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	II-137
2.3.2.	Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-138
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Sampai Tahun 2022	III-1
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-5
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6

3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-6
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2.	Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT	IV-3
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende	IV-3
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-6
4.2.1	Perumusan Prioritas Pembangunan	IV-6
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2023	IV-12
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1.	6.1. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	VI-1
6.1.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator Kinerja kunci (IKK) Daerah.....	VI-2
6.1.2.	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	VI-5
BAB VII		
PENUTUP		VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE



RANCANGAN AKHIR

RKPD KABUPATEN ENDE

TAHUN 2025

BHINNEKA TUNGGAL IKA

**"PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM
UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN"**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RKPD 2025 dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk penjabaran teknis perencanaan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tema RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025, adalah: **"PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM UNTUK Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan"**. Tema ini memiliki makna perwujudan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan, menurunnya angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

RKPD Tahun 2025 yang menghasilkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, bottom up-top down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2024 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistik yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama dalam "Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan", dapat terwujud. "Terwujudnya Masyarakat Ende yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" " Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

25 Juni 2024,
BUPATI ENDE, 

AGUSTINUS G. NGASU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-4
BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.1.3.Kawasan Rawan Bencana Alam	II-15
2.1.1.4.Demografi	II-18
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-19
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-25
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-29
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-40
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-47
2.1.3.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-53
2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan.....	II-56
2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum	II-56
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-57
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II-59
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-62
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-62

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2023	II-63
2.2.1. Capaian Target Makro RPJMD 2019-2024	II-63
2.2.2. Capaian Pelaksanaan Program	II-64
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-116
2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	II-116
2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-117
BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Sampai Tahun 2023	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-7
BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2. Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
4.1.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
4.1.4. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT	IV-3
4.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025.....	IV-3
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-5
4.2.1. Sasaran Pembangunan	IV-5
4.2.2. Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025.....	IV-6
4.2.3. Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2025	IV-12
4.3.4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting, Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi	IV-14
4.3.5. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Produk Lokal	IV-15
BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	VI-1
6.1.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja kunci (IKK) Daerah	VI-2
6.1.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	VI-5
BAB VII: PENUTUP	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	I-3
Gambar 2.1. Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Menurunkan Beban Pengeluaran)	II-24
Gambar 2.2. Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Meningkatkan Pendapatan)	II-25
Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021	II-61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan.....	II-1
Tabel 2.2. Kecamatan dan Desa Pemekaran.....	II-2
Tabel 2.3. Kategori Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangannya	II-3
Tabel 2.4. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan	II-8
Tabel 2.5. Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan	II-11
Tabel 2.6. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende.....	II-11
Tabel 2.7. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per-Kecamatan	II-12
Tabel 2.8. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende	II-12
Tabel 2.9. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende	II-13
Tabel 2.10. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende.....	II-16
Tabel 2.11 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende.....	II-17
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, Ratio, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Ende Tahun 2010-2022	II-19
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2021 - 2023.....	II-19
Tabel 2.14 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2021-2023	II-20
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan (%) Sektor Ekonomi 2019-2023.....	II-20
Tabel 2.16 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB Kurun Waktu 2017 – 2023	II-21
Tabel 2.17 PDRB Pengeluaran ADHK 2016-2023.....	II-21
Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ende, 2019-2023	II-22
Tabel 2.19 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2023.....	II-23
Tabel 2.20 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023	II-24
Tabel 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2015-2023	II-25
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2023	II-25
Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2023.....	II-25
Tabel 2.24 Persentase Penduduk Kabupaten Ende Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, 2015 – 2022	II-25
Tabel 2.25 Angka Kerja Kabupaten Ende Tahun 2019-2023	II-26
Tabel 2.26 Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang Bekerja Kerja Menurut Lapangan Usaha 2020-2023.....	II-26
Tabel 2.27 Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023	II-27
Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023	II-27
Tabel 2.29 Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan	II-31
Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah	II-56
Tabel 2.31 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2023	II-58
Tabel 2.32 Hasil Analisis Shift Share (SS) Kabupaten Ende dengan Wilayah Referensi Provinsi NTT (2016)	II-59
Tabel 2.33 Kondisi Jalan dan Alat Transportasi di Kabupaten Ende	II-60
Tabel 2.34 Persentase Penduduk menurut Penggunaan dan Kepemilikan Telepon Seluler Tahun 2021.....	II-60
Tabel 2.35 Banyaknya Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Ende Tahun 2016-2018	II-62
Tabel 2.36 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Ende Tahun 2019-2021	II-62

Tabel 2.37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-63
Tabel 2.38 Persentase Penduduk Kabupaten Ende 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018-2022	II-64
Tabel 2.39 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2014-2022.....	II-64
Tabel 2.40 Target Makro RPJMD 2019-2024 dan Capaiannya sampai dengan Tahun 2023.....	II-64
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023).....	II-65
Tabel 2.42 Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 menurut Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Tahun 2023	II-67
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Sasaran masing-masing Misi RPJMD 2020-2024.....	II-70
Tabel 2.44 Pencapaian Target SDGs 1 di Kabupaten Ende Tahun 2019/2023	II-97
Tabel 2.45 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-103
Tabel 2.66 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	II-105
Tabel 3.1 Presentase Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap Target RPMJ 2019-2024	III-7
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2020-2023 dan Target Pendapatan Tahun 2023-2024	III-8
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah pada Penetapan APBD Tahun 2020-2023	III-9
Tabel 3.4 Realisasi dan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024	III-15
Tabel 3.5 Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2024	III-16
Tabel 3.6 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024	III-18
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024	III-19
Tabel 3.8 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024	III-20
Tabel 4.1. Hubungan Visi Misi RPJMD 2019-2024 dengan arahan RPJP2005-2025	IV-4
Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende	IV-5
Tabel 4.3. Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2024	IV-6
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Langsung Tahun 2025 per Misi	V-2
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025	VI-2
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	VI-3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2025	VI-4
Tabel 6.4. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Tahun 2025	VI-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021	II-61
Grafik 2.2. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2022)	II-64
Grafik 5.1. Proyeksi Proporsi BL Tahun 2025 per Misi	V-2
Grafik 6.1. Capaian Kinerja Per Misi Pembangunan Kabupaten Ende kondisi sampai dengan Tahun 2023..	VI-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Lampiran 2: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN USULAN MASYARAKAT MELALUI PIDES PIKEL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Lampiran 3: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende untuk menjadi RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025. Secara substansi memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan suatu daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi NTT, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama **pelaksanaan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026**. Sejalan dengan kedudukan perencanaan serta memerhatikan isu dan perkembangan terkini dirumuskan **Tema Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025**, yaitu: **"PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM UNTUK Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan"**. Tema ini mengandung makna bahwa **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, memiliki makna perwujudan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan, (meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, karakter serta prestasi olahraga). Bidang kesehatan (peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola penduduk, terutama penurunan angka stunting dan gizi buruk serta AKI dan AKB), yang pada akhirnya menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang sehat, cerdas dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 dan era society 5.0. **Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**, memiliki makna menurunnya angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat. **Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**, memiliki makna pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.



Dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan kini harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kemendagri.

Memerhatikan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 73-103), **Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan**, yaitu: 1) persiapan penyusunan, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) Perumusan Rancangan Akhir, dan 6) Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Ende. **Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD** ini merupakan tahap kedua setelah tahapan persiapan penyusunan. Pada **Tahapan persiapan penyusunan RKPD** meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD ini, untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi ke Gubernur Provinsi NTT, dan hasil rekomendasi Gubernur dijadikan bahan penyempurnaan menjadi RKPD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan **Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025** ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengetasan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

27. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025. Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional, memerhatikan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, rancangan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025, Rancangan tekhnokratis RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKP Tahun 2025. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, diharmonisasikan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025.

Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjamin keberlangsungan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta menjaga kesinambungan dan sinergi keseluruhan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.

2. Tujuan

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Acuan dalam pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi kepada Gubernur Provinsi NTT terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** **Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
- BAB II** **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dan 2023, Realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.
- BAB III** **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.
- BAB IV** **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD 2025-2026, dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.
- BAB V** **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi Perangkat Daerah.
- BAB VI** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- BAB VII** **Penutup**, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2025.



Bagian ini secara substansi menggambarkan Kondisi Umum Kabupaten Ende, Capaian Kinerja Pembangunan dan Permasalahan yang masih dihadapi. Uraian bagian ini menjadi penting, karena merupakan basis data/informasi bagi perumusan program dan kegiatan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki wilayah seluas 2085,19km², dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Sikka
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo

Secara administrasi wilayah Kabupaten Ende terdiri atas **21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan**. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Wewaria (14,05%), diikuti Maukaro (10,39 %), Kotabaru (10,33 %) dan Nangapanda (8,99%), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ende Tengah (0,27%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang seluruh wilayahnya merupakan Desa dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan

No.	Kecamatan	Nama Ibukota	Jarak ke Ibukota Kab. (km)	Luas wilayah		Jumlah		
				(km ²)	%	Desa	Kel.	Dusun
1	Wewaria	Welamosa	53,00	292,94	14,05	22	-	73
2	Maukaro	Maukaro	97,00	216,66	10,39	11	-	35
3	Kotabaru	Kotabaru	117,00	199,70	9,58	13	-	38
4	Nangapanda	Ndorurea	29,00	190,31	9,13	28	1	89
5	Ende	Nangaba	9,00	164,99	7,91	32	-	91
6	Maurole	Maurole	84,00	155,14	7,44	13	-	39
7	Detusoko	Detusoko	33,00	144,27	6,92	20	1	74
8	Datukeli	Watunggere	57,00	112,29	5,39	13	-	41
9	Lepembusu Keliboke	Peibenga	58,00	150,88	7,24	14	-	41
10	Ndona	Ndona	8,00	93,52	4,48	12	2	37
11	Wolowaru	Bokasape	65,00	64,53	3,09	16	1	57
12	Uo Timur	Watuneso	92,00	53,93	2,59	12	1	48
13	Ndona Timur	Demulaka	45,00	52,84	2,53	7	-	21
14	Kelinsutu	Wolara	52,00	54,03	2,59	8	-	30
15	Wolajita	Wolajita	72,00	39,77	1,91	5	1	24
16	Ndori	Maubasa	87,00	26,71	1,28	10	-	29
17	Ende Timur	Wolowona	4,55	19,63	0,94	3	3	24
18	Ende Selatan	Tetandera	1,49	19,57	0,94	-	5	24
19	Ende Utara	Kotaraja	0,02	17,52	0,84	6	4	39
20	Pulau Ende	Rendocatenusa	17,87	10,22	0,49	8	-	26
21	Ende Tengah	Paupire	3,50	5,75	0,28	-	4	13
Total				2.085,19	100	255	23	893

Sumber Data : Ende Dalam Angka 2024, Data Desa Kelurahan DPMD (Dahan Bappeda)

Pada Tahun 2019, telah dipersiapkan proses pemekaran Desa untuk diusulkan ke pusat, yaitu sebanyak 9 Desa di 7 Kecamatan dan sampai dengan saat ini masih berstatus Desa Persiapan dan sedang dalam proses pengusulan ke tingkat Provinsi dan Pusat, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kecamatan dan Desa Pemekaran

Kecamatan	Desa Persiapan	Desa Induk
Wolojita	Waga	Pora
Kelimutu	Woloara Barat	Woloara
Wolowaru	Mbuliweragheta	Nakambara
Wewaria	Mautenda Selatan	Mautenda
Nangapanda	Maurongga	Raporendu
	Rendorua	Raporendu
	Tanarangga	Bheramari dan Jegharangga
Kotabaru	Kotabaru Tengah	Kotabaru
Ende	Tomberabu III	Tomberabu I

Sumber Data: DPMD Kabupaten Ende 2020

2. Letak, Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Pelayanan

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Ende terletak disebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21'6,44" sampai dengan koordinat 122° 1'28, 1604" Bujur Timur dan 08°55'28,35" sampai dengan 08°26'4,10" Lintang Selatan.

b. Posisi Geostrategik

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain:

- 1) **Terletak di tengah-tengah Pulau Flores**, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapit 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Provinsi Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores.
- 2) Merupakan **jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia**, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu.
- 3) Kabupaten Ende berada pada **lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores**, dengan *focalpoint* keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores.
- 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Ende menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan **tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila**.

c. Kondisi/Kawasan

Secara geografis dan topografis, kondisi kawasan yang ada di Kabupaten Ende, terdiri dari:

1) Wilayah Pedalaman

Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndonga, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur.

2) Wilayah Terpencil

Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu: Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndonga, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndonga Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke.

3) Kawasan Pesisir/Kepulauan

Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu:

- Kawasan Pesisir Utara, meliputi: Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan Kotabaru.
- Kawasan Pesisir Selatan, meliputi: Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndonga, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende.
- Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu: Pulau Ende.

4) Kawasan Pegunungan

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2

(dua) gunung berapi aktif, yaitu: Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemang Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada di Kabupaten Ende.

Dilihat dari Tingkat Perkembangannya, dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende dikategorikan sebagai: **1) Desa Sangat Tertinggal**, sebanyak 6 Desa atau sebesar 2,35%; **2) Desa Tertinggal**, sebanyak 174 Desa atau sebesar 68,23 %; **3) Desa Berkembang**, sebanyak 70 Desa atau sebesar 27,45%, dan **4) Desa Maju**, sebanyak 5 Desa atau sebesar 1,96%, dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Kategori Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangannya

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
1) Ende Timur		1) Desa Kedibodu 2) Desa Tiwutiwa	1) Desa Ndungga	
2) Nangapanda		1) Desa Watumite 2) Desa Kerinea 3) Desa Zozone 4) Desa Tiwerea 5) Desa Sanggarhorho 6) Desa Ndeturea 7) Desa Ondorea Barat 8) Desa Romarea 9) Desa Timbazia 10) Desa Anaraja 11) Desa Malwani 12) Desa Tenda Ondo 13) Desa Jemburea 14) Desa Uzuozo 15) Desa Tendambepa 16) Desa Kekandere	1) Desa Tendarea 2) Desa Jagharangga 3) Desa Rapowawo 4) Desa Nggoroa 5) Desa Raporendu 6) Desa Bheramari 7) Desa Ndeturea I 8) Desa Penggajawa 9) Desa Mbotihenga 10) Desa Tanazozo 11) Desa Embusoro	1) Desa Ondorea
3) Pulau Ende		1) Desa Aejeti 2) Desa Rorungga 3) Desa Redodori 4) Desa Kazokapo 5) Desa Rengamenge	1) Desa Puutara 2) Desa Paderape 3) Desa Ndoriwoi 4) Desa Rendoraterua	
4) Ende		1) Desa Tinabani 2) Desa Embu Nggena 3) Desa Nakuramba 4) Desa Embutheru 5) Desa Wawonato 6) Desa Nembo Ramba 7) Desa Ndetundora I 8) Desa Uturamba 9) Desa Wolokaro 10) Desa Randoramba 11) Desa Iejaraja 12) Desa Randotonda 13) Desa Wologai 14) Desa Ndetundora III 15) Desa Worhopapa 16) Desa Ndetundora II 17) Desa Ranoramba 18) Desa Peozakaramba 19) Desa Uturamba Barat 20) Desa Wologai II 21) Desa Raburia 22) Desa Tomberabu I 23) Desa Ja Moke Asa 24) Desa Emburia 25) Desa Tendambonggi 26) Desa Nusja	1) Desa Wajakra Jaya 2) Desa Tonggopapa 3) Desa Rukuramba 4) Desa Tomberabu II 5) Desa Riaraja 6) Desa Mbotutenda	
3) Ndonga	1) Desa Kekasewa 2) Desa Wolokota	1) Desa Wolotopo 2) Desa Ngajupolo 3) Desa Ngajuroga	1) Desa Manulondo 2) Desa Wolotopo Timur 3) Desa Puutuga	1) Desa Nanganesa

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
		4) Desa Nila		
		5) Desa Kelikuku		
		6) Desa Reka		
6) Detusoko		1) Desa Randoria	1) Detusoko Barat	
		2) Desa Wolomasi	2) Desa Wolotolo	
		3) Desa Ranga	3) Desa Wolotolo Tengah	
			4) Desa Roa	
			5) Desa Sega	
			6) Desa Niwula	
			7) Desa Wolofeo	
			8) Desa Nua One	
			9) Desa Wologai	
			10) Desa Oile	
			11) Desa Ndito	
			12) Desa Sipijena	
			13) Desa Turunaku	
			14) Desa Wologai Tengah	
			15) Desa Wolomage	
			16) Desa Rateroru	
			17) Desa Golulada	
7) Wewaria		1) Desa Mautenda	1) Desa Welamosa	
		2) Desa Mautenda Barat	2) Desa Mukusaki	
		3) Desa Wewaria		
		4) Desa Tanali		
		5) Desa Detubele		
		6) Desa Fataatu Timur		
		7) Desa Aelipo		
		8) Desa Ekoo		
		9) Desa Aemuri		
		10) Desa Ratewati		
		11) Desa Mbitulaka		
		12) Desa Numba		
		13) Desa Kelitambu		
		14) Desa Ratewati Selatan		
		15) Desa Ekolea		
		16) Desa Ae Ndoko		
		17) Desa Nuangenda		
		18) Desa Fataatu		
		19) Desa Waka		
		20) Desa Wolooja		
8) Wolowaru	1) Desa Likanaka	1) Desa Bokusape Timur	1) Desa Jopu	
		2) Desa Mbuliloo	2) Desa Lisedetu	
		3) Desa Rindiwawo		
		4) Desa Wolokoli		
		5) Desa Mbuliwaralau		
		6) Desa Mbuliwaralau Utara		
		7) Desa Nualise		
		8) Desa Wolosoko		
		9) Desa Lisifowobora		
		10) Desa Nakambara		
		11) Desa Niramesi		
		12) Desa Tana Lo'o		
		13) Desa Lise Pu'u		
9) Wolojita		1) Desa Tenda	1) Desa Nggeia	
		2) Desa Wiwipemo		
		3) Desa Pora		
		4) Desa Nuamulu		
10) Maurole		1) Desa Ranokolo	1) Desa Aewora	1) Desa Maurole
		2) Desa Detuwulu	2) Desa Mausambi	2) Desa Watukamba
		3) Desa Otogedu	3) Desa Ranokolo Selatan	
		4) Desa Woloju	4) Desa Keliwumbu	
		5) Desa Ngatukoja		
		6) Desa Niranusa		
		7) Desa Uludala		

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
11) Maukaro		1) Desa Kibirangga Selatan		1) Desa Kibirangga
		2) Desa Kamubheka		
		3) Desa Magelapa		
		4) Desa Boafeo		
		5) Desa Nabe		
		6) Desa Mundinggasa		
		7) Desa Kotikapa		
		8) Desa Kibirangga Tengah		
		9) Desa Natanangge		
		10) Desa Kobaleba		
12) Lio Timur	1) Desa Tanaroga	1) Desa Woloara		
		2) Desa Detupera		
		3) Desa Wololela A		
		4) Desa Iarabeke		
		5) Desa Fatamari		
		6) Desa Nua Lima		
		7) Desa Hobatur		
		8) Desa Bu Tanalaga		
		9) Desa Wolosambi		
		10) Desa Ranggatalo		
		11) Mbewawora		
13) Kotabaru		1) Desa Tou	1) Desa Kotabaru	
		2) Desa Ndondo	2) Desa Loboniki	
		3) Desa Niopanda	3) Desa Tou Timur	
		4) Desa Hangalande		
		5) Desa Tou Barat		
		6) Desa Liselande		
		7) Desa Rangalaka		
		8) Desa Pise		
		9) Desa Neotonda		
		10) Desa Nuanaga		
14) Kelimutu		1) Desa Nduara	1) Desa Koanara	
		2) Desa Nuamuri	2) Desa Woloara	
		3) Desa Nuamuri Barat	3) Desa Watunika	
		4) Desa Detuena	4) Desa Pemo	
		5) Desa Wolokele		
15) Detukeli		1) Desa Nggesa	1) Desa Detukeli	
		2) Desa Kebesani	2) Desa Nggesabiri	
		3) Desa Wolomuku	3) Desa Watunggere Marilonga	
		4) Desa Watunggere	4) Desa Jao Du'a	
		5) Desa Nida		
		6) Desa Maurole Selatan		
		7) Desa Detumbewa		
		8) Desa Kanganara		
		9) Desa Unggu		
16) Ndona Timur	1) Desa Kurulumbu Selatan	1) Desa Kurulumbu		
		2) Desa Sokoria		
		3) Desa Demulaka		
		4) Desa Raga		
		5) Desa Sokoria Selatan		
		6) Desa Ngguwa		
17) Ndori	1) Desa Mole	1) Desa Maubasa Timur	1) Desa Maubasa	
		2) Desa Wonda		
		3) Desa Lungaria		
		4) Desa Aebara		
		5) Desa Rafemangga		
		6) Desa Maubasa Barat		
		7) Desa Serandori		
		8) Desa Kelisamba		
18) Ende Utara			1) Desa Gheoghoma	
			2) Desa Berokanda	
			3) Desa Watuipi	
			4) Desa Mbomba	

KECAMATAN	DESA SANGAT TERTINGGAL	DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU
			5) Desa Embundoo	
			6) Desa Raterue	
19) Lepembusu Kellsoke		1) Desa Mukureku	1) Desa Ngumbelaka	
		2) Desa Tiwusora	2) Desa Wologai Timur	
		3) Desa Nelloksoapu	3) Desa Ndenggarongge	
		4) Desa Tanirwode	4) Desa Kuru	
		5) Desa Tanalang	5) Desa Kuruware	
		6) Desa Uebuara		
		7) Desa Lisekuru		
		8) Desa Rutujeja		
		9) Desa Mukureku Sa'ate		
TOTAL	6 Desa Sangat Tertinggal	174 Desa Tertinggal	70 Desa Berkembang	5 Desa Maju

Sumber: DPMD, Indeks Desa Membangun Tahun 2020 Kabupaten Ende

d. Pembagian Wilayah Pelayanan

Pembagian Wilayah Pelayanan berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
1.	NANGAPANDA		Pedalaman	
	1) Kelurahan Ndoorua		Pedalaman	
	2) Desa Ondorea		Pedalaman	
	3) Desa Nggonia		Pedalaman	
	4) Desa Raporandu		Pedalaman	
	5) Desa Bheramari		Pedalaman	
	6) Desa Kerinea			Terpencil
	7) Desa Tendarea			Terpencil
	8) Desa Tendambepa			Terpencil
	9) Desa Rapowawo		Pedalaman	
	10) Desa Watumite			Terpencil
	11) Desa Zozozoa		Pedalaman	
	12) Desa Ndoorua I		Pedalaman	
	13) Desa Ndeturea		Pedalaman	
	14) Desa Sanggarhorho		Pedalaman	
	15) Desa Tiwerea			Terpencil
	16) Desa Jegharangga		Pedalaman	
	17) Desa Penggajawa		Pedalaman	
	18) Desa Ondorea Barat		Pedalaman	
	19) Desa Uruozo			Terpencil
	20) Desa Timbazia		Pedalaman	
	21) Desa Mbobhenga		Pedalaman	
	22) Desa Malawaru			Terpencil
	23) Desa Anaraja		Pedalaman	
	24) Desa Kekandoro		Pedalaman	
	25) Desa Tanazoco		Pedalaman	
	26) Desa Tenda Ondo			Terpencil
	27) Desa Jembura			Terpencil
	28) Desa Embuzozo		Pedalaman	
	29) Desa Romarea			Terpencil
2.	PULAU ENDE		Pedalaman	
	1) Desa Roruranga		Pedalaman	
	2) Desa Puutara		Pedalaman	
	3) Desa Ajeji		Pedalaman	
	4) Desa Paderape		Pedalaman	
	5) Desa Ndorywoy		Pedalaman	
	6) Desa Rendoraterua		Pedalaman	
	7) Desa Redodory		Pedalaman	
	8) Desa Kazo Kapo		Pedalaman	

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	9) Desa Renga Menge		Pedalaman	
3.	ENDE		Pedalaman	
	1) Desa Rukuramba		Pedalaman	
	2) Desa Riaraja		Pedalaman	
	3) Desa Mbotutenda			Terpencil
	4) Desa Wologai			Terpencil
	5) Desa Ndetundora I		Pedalaman	
	6) Desa Ndetundora II		Pedalaman	
	7) Desa Tomberabu I		Pedalaman	
	8) Desa Tomberabu II			Terpencil
	9) Desa Nakuramba		Pedalaman	
	10) Desa Wolokaro		Pedalaman	
	11) Desa Ia Mokaesa			Terpencil
	12) Desa Emburia		Pedalaman	
	13) Desa Randotonda		Pedalaman	
	14) Desa Raburia			Terpencil
	15) Desa Tinabani			Terpencil
	16) Desa Ndetundora III		Pedalaman	
	17) Desa Uzuramba			Terpencil
	18) Desa Tonggopapa		Pedalaman	
	19) Desa Embutheru		Pedalaman	
	20) Desa Nua Ia		Pedalaman	
	21) Desa Wawonato			Terpencil
	22) Desa Jejaraja			Terpencil
	23) Desa Nemboramba		Pedalaman	
	24) Desa Embu Ngena		Pedalaman	
	25) Desa Rhandorama		Pedalaman	
	26) Desa Tendabonggi		Pedalaman	
	27) Desa Wologai Dua			Terpencil
	28) Desa Worhopapa		Pedalaman	
	29) Desa Ranoramba		Pedalaman	
	30) Desa Pezakaramba		Pedalaman	
	31) Desa Uzuramba Barat			Terpencil
	32) Desa Wajakra Jaya		Pedalaman	
4.	ENDE SELATAN	Kota		
	1) Kelurahan Paupanda	Kota		
	2) Kelurahan Rukunima	Kota		
	3) Kelurahan Mbongawani	Kota		
	4) Kelurahan Tetandara	Kota		
	5) Kelurahan Tanjung	Kota		
5.	NDONA	Kota	Pedalaman	
	1) Kelurahan Lokoboko	Kota		
	2) Kelurahan Onelako	Kota		
	3) Desa Nanganesa	Kota		
	4) Desa Manulondo	Kota		
	5) Desa Wolotopo		Pedalaman	
	6) Desa Wolotopo Timur		Pedalaman	
	7) Desa Ngakuraga		Pedalaman	
	8) Desa Ngakupolo		Pedalaman	
	9) Desa Kekasawa			Terpencil
	10) Desa Nila			Terpencil
	11) Desa Poutuga		Pedalaman	
	12) Desa Wolokota			Terpencil
	13) Desa Kefikiku		Pedalaman	
	14) Desa Reka		Pedalaman	
6.	DETUSOKO		Pedalaman	
	1) Kelurahan Detusoko		Pedalaman	
	2) Desa Nuaone		Pedalaman	
	3) Desa Ranga		Pedalaman	
	4) Desa Wolomaga		Pedalaman	
	5) Desa Golulada		Pedalaman	
	6) Desa Kateroru		Pedalaman	
	7) Desa Dile		Pedalaman	
	8) Desa Roa		Pedalaman	
	9) Desa Wolotolo		Pedalaman	
	10) Desa Wolotolo Tengah		Pedalaman	
	11) Desa Randoria		Pedalaman	
	12) Desa Wolomasi		Pedalaman	
	13) Desa Saga		Pedalaman	

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	14) Desa Ndito		Pedalaman	
	15) Desa Niowula		Pedalaman	
	16) Desa Wolofo		Pedalaman	
	17) Desa Sipijana		Pedalaman	
	18) Desa Detusoko Barat		Pedalaman	
	19) Desa Wologai		Pedalaman	
	20) Desa Wologai Tengah		Pedalaman	
	21) Desa Turunatu		Pedalaman	
7.	WEWARIA		Pedalaman	
	1) Desa Mukusaki		Pedalaman	
	2) Desa Asmuni		Pedalaman	
	3) Desa Ekoze		Pedalaman	
	4) Desa Wewaria		Pedalaman	
	5) Desa Fataatu Timur		Pedalaman	
	6) Desa Fataatu		Pedalaman	
	7) Desa Wolamosa		Pedalaman	
	8) Desa Nuangenda		Pedalaman	
	9) Desa Detubela		Pedalaman	
	10) Desa Tanali		Pedalaman	
	11) Desa Ratewati		Pedalaman	
	12) Desa Mautenda Barat			Terpencil
	13) Desa Mbotulaka			Terpencil
	14) Desa Mautenda		Pedalaman	
	15) Desa Kelitembu		Pedalaman	
	16) Desa Numba			Terpencil
	17) Desa Aglipo			Terpencil
	18) Desa Ratewati Selatan			Terpencil
	19) Desa Waka			Terpencil
	20) Desa Wolooja			Terpencil
	21) Desa Ekolea		Pedalaman	
	22) Desa Aendoko		Pedalaman	
8.	WOLOWARU		Pedalaman	
	1) Kelurahan Bokasape		Pedalaman	
	2) Desa Mbulwaralau		Pedalaman	
	3) Desa Mbulloo		Pedalaman	
	4) Desa Jopu		Pedalaman	
	5) Desa Rindiwawo		Pedalaman	
	6) Desa Usedetui		Pedalaman	
	7) Desa Mbulwaralau Utara		Pedalaman	
	8) Desa Bokasape Timur		Pedalaman	
	9) Desa Nualisa		Pedalaman	
	10) Desa Liselowoibora		Pedalaman	
	11) Desa Likanaka			Terpencil
	12) Desa Wolokoli		Pedalaman	
	13) Desa Wolosoko		Pedalaman	
	14) Desa Niramasi			Terpencil
	15) Desa Nakambara		Pedalaman	
	16) Desa Tana Lo'o		Pedalaman	
	17) Desa Iise Pu'u		Pedalaman	
9.	WOLOJITA		Pedalaman	
	1) Kelurahan Wolojita		Pedalaman	
	2) Desa Nuamulu		Pedalaman	
	3) Desa Nggela		Pedalaman	
	4) Desa Pora		Pedalaman	
	5) Desa Tenda		Pedalaman	
	6) Desa Wilepemo		Pedalaman	
10.	MAUROLE		Pedalaman	
	1) Desa Maurole		Pedalaman	
	2) Desa Mausambi		Pedalaman	
	3) Desa Watukamba		Pedalaman	
	4) Desa Agwora		Pedalaman	
	5) Desa Keluwumbu		Pedalaman	
	6) Desa Ranokolo		Pedalaman	
	7) Desa Ranokolo Selatan		Pedalaman	
	8) Desa Otagedu			Terpencil
	9) Desa Detuwulu			Terpencil
	10) Desa Woloau		Pedalaman	
	11) Desa Ngakukoja		Pedalaman	
	12) Desa Niramusa		Pedalaman	

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	13) Desa Uudala		Pedalaman	
11.	MAUKARO		Pedalaman	
	1) Desa Kamubhoka		Pedalaman	
	2) Desa Kebirangga		Pedalaman	
	3) Desa Kebirangga Selatan			Terpencil
	4) Desa Nabe		Pedalaman	
	5) Desa Kobaleba		Pedalaman	
	6) Desa Boalefo			Terpencil
	7) Desa Magekapa		Pedalaman	
	8) Desa Mundinggasa		Pedalaman	
	9) Desa Kolikapa		Pedalaman	
	10) Desa Kebirangga Tengah		Pedalaman	
	11) Desa Natanangge		Pedalaman	
12.	LO TIMUR		Pedalaman	
	1) Kelurahan Watunoso		Pedalaman	
	2) Desa Hobatuwa		Pedalaman	
	3) Desa Wolosambi		Pedalaman	
	4) Desa Woloaro		Pedalaman	
	5) Desa Detupera			Terpencil
	6) Desa Wololefe A			Terpencil
	7) Desa Liabeke		Pedalaman	
	8) Desa Fatamari			Terpencil
	9) Desa Ranggatalo		Pedalaman	
	10) Desa Nualima		Pedalaman	
	11) Desa Tanaraga		Pedalaman	
	12) Desa Bu Tanalagu			Terpencil
	13) Desa Mbeawora			Terpencil
13.	KOTA BARU		Pedalaman	
	1) Desa Kotabaru		Pedalaman	
	2) Desa Tou		Pedalaman	
	3) Desa Tou Timur		Pedalaman	
	4) Desa Loboniki		Pedalaman	
	5) Desa Hangalande			Terpencil
	6) Desa Ndondo		Pedalaman	
	7) Desa Niopanda			Terpencil
	8) Desa Tiwusora			Terpencil
	9) Desa Tou Barat		Pedalaman	
	10) Desa Liselande			Terpencil
	11) Desa Rangelaka		Pedalaman	
	12) Desa Pise			Terpencil
	13) Desa Neotonda		Pedalaman	
	14) Desa Nuanaga		Pedalaman	
14.	KELIMUTU		Pedalaman	
	1) Desa Ndunira		Pedalaman	
	2) Desa Nuamuri		Pedalaman	
	3) Desa Nuamuri Barat		Pedalaman	
	4) Desa Woloara		Pedalaman	
	5) Desa Koanara		Pedalaman	
	6) Desa Pomo		Pedalaman	
	7) Desa Watunaka		Pedalaman	
	8) Desa Detuena		Pedalaman	
	9) Desa Woloketo		Pedalaman	
15.	DETUKELI			Terpencil
	1) Desa Maurole Selatan			Terpencil
	2) Desa Detumbewa			Terpencil
	3) Desa Nggesa			Terpencil
	4) Desa Watunggere			Terpencil
	5) Desa Nida			Terpencil
	6) Desa Kanganara			Terpencil
	7) Desa Kebesani			Terpencil

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	8) Desa Detukeli			Terpencil
	9) Desa Wolomoku			Terpencil
	10) Desa Unggu			Terpencil
	11) Desa Nagesa Biri			Terpencil
	12) Desa Watunggere Marilonga			Terpencil
	13) Desa Jero Du'a			Terpencil
16.	NDONA TIMUR			Terpencil
	1) Desa Kunulumbu			Terpencil
	2) Desa Sokoria			Terpencil
	3) Desa Bemulaka			Terpencil
	4) Desa Raga			Terpencil
	5) Desa Kunulumbu Selatan			Terpencil
	6) Desa Nggawa			Terpencil
	7) Desa Sokoria Selatan			Terpencil
17.	NDORI			Terpencil
	1) Desa Wonda			Terpencil
	2) Desa Maubasa			Terpencil
	3) Desa Serandori			Terpencil
	4) Desa Kelisamba			Terpencil
	5) Desa Maubasa Timur			Terpencil
	6) Desa Mole			Terpencil
	7) Desa Lunggarla			Terpencil
	8) Desa Aebara			Terpencil
	9) Desa Ratemangga			Terpencil
	10) Desa Maubasa Barat			Terpencil
18.	ENDE UTARA	Kota		
	1) Kelurahan Kotaratu	Kota		
	2) Kelurahan Kotaraja	Kota		
	3) Kelurahan Roworena	Kota		
	4) Kelurahan Roworena Barat	Kota		
	5) Desa Borokanda	Kota		
	6) Desa Watusiipi		Pedalaman	
	7) Desa Gheoghoma	Kota		
	8) Desa Mbomba	Kota		
	9) Desa Embundoe	Kota		
	10) Desa Raterua	Kota		
19.	ENDE TENGAH	Kota		
	1) Kelurahan Potulando	Kota		
	2) Kelurahan Onokone	Kota		
	3) Kelurahan Kelimuta	Kota		
	4) Kelurahan Paupira	Kota		
20.	ENDE TIMUR	Kota		
	1) Kelurahan Mautapaga	Kota		
	2) Kelurahan Rewarangga	Kota		
	3) Kelurahan Rewarangga Selatan	Kota		
	4) Desa Ndungga		Pedalaman	
	5) Desa Tiwutewa		Pedalaman	
	6) Desa Kedebodu		Pedalaman	
21.	LEPEMBUSU KELISOKE			Terpencil
	1) Desa Wolaga Timur			Terpencil
	2) Desa Ngumbelaka			Terpencil
	3) Desa Mukureku			Terpencil
	4) Desa Kuru			Terpencil
	5) Desa Ndenggarongge			Terpencil
	6) Desa Ndikosapu			Terpencil

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KLASIFIKASI DESA		
		DALAM KOTA	PEDALAMAN	TERPENCIL
	7) Desa Tanalangi			Terpencil
	8) Desa Taniwoda			Terpencil
	9) Desa Detuara			Terpencil
	10) Desa Kuru Sane			Terpencil
	11) Desa Use Kuru			Terpencil
	12) Desa Ritu Joja			Terpencil
	13) Desa Mukereku Sa Ate			Terpencil
JUMLAH DESA & KELURAHAN		25	163	90

Sumber Data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015

3. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pegunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan, sementara dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60% wilayah Kabupaten Ende (421km²) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).

Tabel 2.5. Ketinggian Rata rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah menurut Ketinggian per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Laut (m)	% Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL				Total Luas Wilayah (km ²)
			0-25 m	25-100 m	100-500 m	>500 m	
1	Nangapanda	441	0,71	15,55	50,91	32,83	213,17
2	Pulau Ende	229	-	-	-	-	63,03
3	Masikaro	589	-	-	-	-	102,6
4	Ende	589	1,78	7,73	45,80	44,69	179,5
5	Ende Selatan	306					12,65
6	Ende Timur	351	1 003	1 971	384	64	38,76
7	Ende Tengah	317					7,43
8	Ende Utara	351	1 003	1 971	384	64	48,55
9	Ndona	698	7,80	10,58	31,44	50,18	106,47
10	Ndona Timur	1148	7,80	10,58	31,44	50,18	40,24
11	Wolowaru	777	-	0,51	72,77	26,72	66,84
12	Wolojita	847	-	26,90	71,77	1,39	32,9
13	Lio Timur	814	-	14,08	75,62	10,30	46,79
14	Kelimutu	988					58,94
15	Ndori	319					5,94
16	Maurole	587	9,9	12,15	33,6	44,33	155,94
17	Kotabaru	783	7,80	10,58	31,44	40,18	179,81
18	Detukeli	911	-	8,08	12,16	90,24	196,81
19	Lepembusu Kelisoke	913					136,2
20	Detusoko	891	-	5,46	36,62	57,92	194,07
21	Wewaria	506	-	25,47	52,61	21,91	157,95

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka 2024 dan Bappeda Kab. Ende 2024

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40% atau ±1.195 km²) berada pada kemiringan diatas 40%. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)							
		0- slope		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope	
		%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)
1	Nangapanda	5,20	11,08	6,56	13,08	83,81	178,66	4,43	9,44
2	Pulau Ende	5,50	3,47	7,01	4,42	5,34	3,37	82,15	51,78

No	Kecamatan	Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)							
		0- slope		3-12% slope		12-40% slope		>40% slope	
		%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)	%	Luas (km ²)
3	Maukaro	2,30	2,36	4,12	4,23	23,55	24,16	70,03	71,85
4	Ende	2,41	4,33	8,49	15,24	8,68	15,58	80,42	144,55
5	Ende Selatan	6,60	0,83	22,08	2,79	36,11	4,57	35,21	4,45
6	Ende Timur	4,71	1,83	15,26	5,91	17,58	6,81	62,45	24,21
7	Ende Tengah	7,97	0,59	34,44	7,56	22,62	1,68	34,97	2,60
8	Ende Utara	4,71	2,04	15,23	7,39	13,03	6,33	67,53	32,79
9	Ndona	0,41	0,44		0,00	22,73	24,20	76,86	81,83
10	Ndona Timur	0,28	0,11		0,00	21,31	8,58	78,41	31,55
11	Wolowaru	-	0,00	3,38	2,26	17,73	11,85	78,89	52,73
12	Wolojita	-	0,00	3,43	1,13	22,32	7,34	74,25	24,43
13	Lio Timur	-	0,00	3,28	1,53	17,40	8,14	79,32	37,11
14	Kelimutu	-	0,00	5,11	3,01	26,20	15,44	68,89	40,60
15	Ndori	-	0,00	2,94	0,17	29,76	1,77	67,30	4,00
16	Maurole	3,94	6,14	5,78	9,01	42,72	66,62	47,56	74,17
17	Kotabaru	0,33	0,59	5,62	10,11	46,59	83,77	47,46	85,34
18	Detukeli	6,60	13,12	8,21	16,32	17,45	34,69	67,74	134,67
19	Lepembusu Kelisoke	1,32	1,80	4,28	5,63	12,39	16,88	82,01	111,70
20	Detusoko	3,21	6,23	6,14	11,92	40,58	78,75	50,07	97,17
21	Wewaria	3,61	5,70	6,49	10,25	40,10	63,65	49,60	78,34
Total Luasan (km ²)			60,67		128,08		662,84		1195,12
% Terhadap Total Wilayah			2,96		6,26		32,39		58,40

Sumber: Ende Dalam Angka 2024 dan Bappeda Kab. Ende 2024

4. Geologi

Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0–30 cm; dan 11,32% memiliki kedalaman tanah efektif 30–60 cm; serta 30,22% memiliki kedalaman tanah efektif 60–90 cm; sementara itu 5,5% wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende di dominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99% tekstur tanah sedang, 57,11% tekstur tanah kasar, 3,70% tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90% tidak dikategorikan.

Tabel 2.7. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Tekstur			Total Luas Wilayah (km ²)
		Sedang	Kasar	Halus	
1	Nangapanda	35,13	33,69	31,18	213,17
2	PuluEnde	35,28	33,71	31,01	63,03
3	Maukaro	33,05	34,19	32,67	102,6
4	Ende	50,09	49,91	-	179,5
5	EndeSelatan	49,92	50,08	-	12,63
6	EndeTimur	49,89	50,11	-	38,76
7	EndeTengah	50,14	49,86	-	7,43
8	EndeUtara	49,90	50,10	-	48,55
9	Ndona	49,67	50,33	-	106,47
10	Ndona Timur	40,64	50,36	-	40,24
11	Wolowaru	49,70	50,30	-	66,84
12	Wolojita	49,71	50,29	-	32,9
13	Lio Timur	49,71	50,29	-	46,79
14	Kelimutu	49,63	50,37	-	58,94
15	Ndori	49,71	50,29	-	5,96
16	Maurola	50,00	50,00	-	155,94
17	Kotabaru	50,00	50,00	-	179,82
18	Detukeli	50,00	50,00	-	198,81
19	Lepembusu Kelisoke	33,42	33,55	33,03	136,2
20	Detusoko	33,30	33,56	33,14	194,07
21	Wewaria	33,35	33,61	33,04	157,99

Sumber: Ende Dalam Angka 2024 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)

5. Hidrologi

Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain Kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun

mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4-17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya : Mata Air Woloare, Aekipa, Aepana, Nangapanda, Ae Ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fiko dan Lio Lo'o telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan kebutuhan, air bersih masyarakat Kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.

Tabel 2.8. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Nama Sungai (DAS)	Nama Mata Air (debit-liter/detik)	Keterangan
1	Nangapanda	Lowo Nangapanda	Mata Air Nangapanda (10)	PDAM Nangapanda
2	Pulau Ende			
3	Maukaro	Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo		
4	Ende	Lowo Nangaba		PDAM / IKK Nangaba
5	Ende Selatan			
6	Ende Timur	Lowo Wolowona	Mata Air Aewanda	
7	Ende Tengah			
8	Ende Utara	Manungae	Mata air Woloare (4), Mata air Aemuri (5)	PDAM Kota Ende
9	Ndona	Lowo Wolotopo dan Ngalupolo	Mata air aepana (19), Mata air Aekipa (12)	PDAM Kota Ende dan Ndona
10	Ndona Timur	Lowo Aebai, LowoRia		
11	Wolowaru	Lowo Ae Bara, Lowo Ae bepa	Mata Air Lio Lu'o(7), Seke Mele(-)	PDAM Wolowaru
12	Wolojita	Lowo Aebai		
13	Lio Timur	Lowo Lise		
14	Kelimutu	Lowo Aebara, Lowo Ria	Mata air Moni (4)	
15	Ndori	Lowo Ria		
16	Maurole	Lowo bejo	Mata Air Ae Ino(7)	PDAM Maurole
17	Kotabaru	Lowo Ndonda, Lowo Lande		
18	Detukele	Lowo Laka, Lowo Pemoria		
19	Lepembusu Kelsoke	Lowo Lise, Lowo Pombo		
20	Detusoko	Lowo Ria	Mata Air Kena Fiko	PDAM Detusoko
21	Wewaria	Lowo Rea		

Sumber: Ende Dalam Angka 2024

6. *Klimatologi*

Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22,5–34^oC. Curah hujan berkisar antara 0-549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,4 gr/m³, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7gr/m³dan maksimum sebesar 89 gr/m³.

7. *Penggunaan Lahan*

Penggunaan lahan di KabupatenEnde diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 dan hasil peninjauan kembali. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi: Kawasan Lindung seluas 77.669,33 ha (37,95%) dan Kawasan Budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05%), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende

NO	Penggunaan Lahan		Luas (km ²)	%
1	Kawasan Lindung		77,669.33	37,95
	1	Kawasan Hutan Lindung	31,689.95	15.48

NO	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	%
	* Hutan Lindung	24,193.34	11.82
	* Cagar Alam	1,958.24	0.96
	* Taman Nasional	5,538.37	2.71
2	Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	33,295.46	16.27
	* Kawasan Resapan Air	26,236.67	12.82
	* Sempadan Pantai	1,971.28	0.96
	* Sempadan Sungai	4,484.47	2.19
	* Hutan Bakau (Mangrove)	603.04	0.29
3	Kawasan Perlindungan Setempat	12,683.92	6.20
	* Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	390.91	0.19
	* Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah	12,293.01	6.01
II	Kawasan Budidaya	126,990.72	62.05
1	Daerah Permukiman	12,935.72	6.32
2	Kawasan Kebun Campuran	14,365.98	7.02
3	Lahan Penggembalaan	9,279.23	4.53
4	Pertanian Lahan Basah	1,935.55	0.95
5	Pertanian Lahan Kering	38,236.64	18.68
6	Hutan Produksi		
	* Hutan Produksi	35,290.94	17.24
	* Hutan Produksi Terbatas	6,150.63	3.01
	* Hutan Produksi Konversi	1,186.03	0.58
7	Pertambangan	7,610	3.72
	TOTAL I+II	204,660.05	100

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.

Potensi sektor menurut Rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende meliputi 5 (lima) Wilayah Pengembangan, sebagai berikut:

a) Wilayah Pengembangan I (WP I)

Wilayah Pengembangan I, meliputi: Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil.

b) Wilayah Pengembangan II (WP II)

Wilayah Pengembangan II, meliputi: Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata pemandian air panas Detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat Wolotopo dan Wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarmasi (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur.

c) Wilayah Pengembangan III (WP III)

Wilayah Pengembangan III, meliputi: Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata,

pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, didukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisional di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao.

d) Wilayah Pengembangan IV (WP IV)

Wilayah Pengembangan IV, meliputi: Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. **Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan.** Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jagapo di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.

e) Wilayah Pengembangan V (WP V)

Wilayah Pengembangan V, meliputi: Kecamatan Maurole, Wewaria, Kotabaru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. **Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan.** Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata di kembangkan wisata pantai seperti Enabara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores.

Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung, yang meliputi:

- Dalam skala wilayah nasional, **Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**, yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu;
- Dalam skala regional Provinsi NTT, termasuk dalam **Wilayah Pengembangan II**, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis;
- Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan dibidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru;
- Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam

a) Gempa Bumi

Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepian zona subduksi atau jalur patahan (*fault*) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala Villidan IX- (MMI) Scale.



Tabel 2.10 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende

Zonasi	Wilayah Kecamatan	Gambaran Bahaya Gempa Bumi
Bahaya Gempa sangat Tinggi	Ende, Nduna, Detusoko, Wewaris, Maurole, dan Detukeli	Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan likuifaksi
Bahaya Gempa Tinggi	Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara	Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhnya batuan, jatuhnya bahan rombakan, incuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi
Bahaya/kerentanan gempa Sedang	Maukaro, Ende, Detusoko, Wewaris, Maurole,	Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi
Bahaya Gempa Sedang-Rendah	Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu,	Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, gliciran rombakan)
Bahaya Gempa Rendah	Nangapanda, Maukaro, Ende, Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur,	Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

b) Tsunami dan Gelombang Pasang

Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai Kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gempa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain:



Tabel 2.11 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Nangapanda	Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea I, Ngoreo, Penggajawa
2	Pulau Ende	Desa Puutara, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy, Redodori dan Paderape
3	Ende	Desa Rukuramba
4	Ende Selatan	Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan KelurahanTanjung
5	Ende Utara	Kelurahan Kota Raja, Kota Ratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma
6	Ende Timur	Kelurahan Mautapaga
7	Ndona	Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngakupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluoga
8	Wewaria	Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria
9	Maukaro	Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kibirangga, dan Desa Nabe
10	Maurole	Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu
11	Kotabaru	Desa Loboniki dan Desa Kotabaru
12	Wolowaru	Desa Mbuliwaralau
13	Lio Timur	Desa Hobatua
14	Ndori	Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

c) Letusan Gunung Berapi

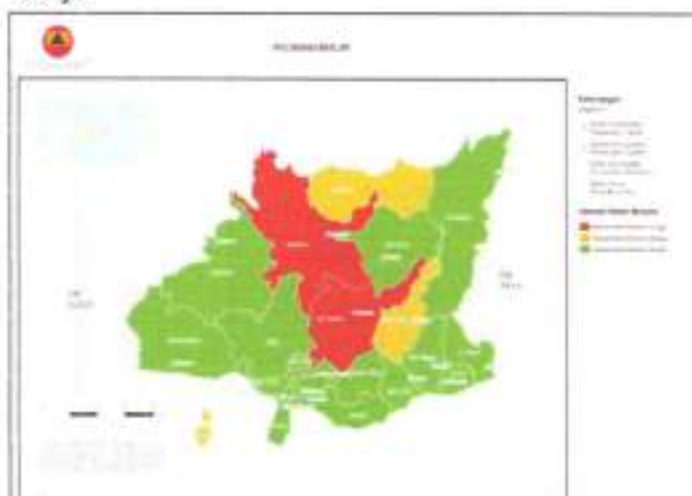
Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya, yaitu: Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita;



d) Debris Flow

Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya *debris flow* selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi mengalami *debris flow*, kecuali Kecamatan Ende Tengah;

e) Banjir



Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworeo.

f) **Tanah Longsor**

Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsor pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah.

g) **Kekeringan**



Kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende Timur, Ende Selatan, Ende Utara, dan Kecamatan Ende.

Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah *semiarid* yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember- maret) dan musim kemarau langsung selama 8-9 bulan (April- November). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah Kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi

h) **Angin Ribut**

Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Kecamatan Maurole.



i) **Abrasi**

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Abrasi sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende khususnya di wilayah sepanjang pesisir pantai. Daerah yang sering mengalami abrasi antara lain Kecamatan Ndori, Nangapanda, Ndona, Maukaro, Kotabaru, Maurole, Lio Timur, Ende, Ende Selatan, dan Ende Utara.

2.1.1.4. Demografi

a. **Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk**

Publikasi BPS Ende (*Ende Dalam Angka Tahun 2024*), menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2023 mencapai 278.581 jiwa terdiri atas 136.536 jiwa penduduk laki-laki dan 142.045 penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2021 (SP 2021), terjadi peningkatan sebesar 6.503 jiwa dari keadaan 272.078 jiwa pada

tahun 2021.

Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan ($\pm 27,33\%$), terutama di Kecamatan Ende Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut mempengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Selatan sebanyak 26.481 jiwa, disusul Kecamatan Ende Tengah sebanyak 24.142 jiwa dan Nangapanda sebanyak 23.703 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur, yaitu sebanyak 5.106 jiwa.

Dengan luas wilayah 2.067,75 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende Tahun 2023 adalah sebesar 133,60 jiwa/km². Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (4.198,61 jiwa/km²), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Lepembusu Kelisoke dengan tingkat kepadatan 36,09 jiwa/km². Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (*sexratio*) keadaan Tahun 2023 adalah sebesar 96,12%.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk, Rasio jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk Tahun 2021 – 2023

KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk	% Penduduk
01. Nangapanda	23.703	99,72	8,51	8,51
02. Pulau Ende	8.863	95,52	3,18	3,18
03. Maukaro	8.000	101,16	2,87	2,87
04. Ende	18.001	94,61	6,46	6,46
05. Ende Selatan	26.481	93,14	9,51	9,51
06. Ende Timur	19.736	92,77	7,08	7,08
07. Ende Tengah	24.142	92,38	8,67	8,67
08. Ende Utara	18.562	96,22	6,66	6,66
09. Ndona	14.262	95,75	5,12	5,12
10. Ndona Timur	5.106	102,78	1,83	1,83
11. Wolowaru	16.606	93,18	5,96	5,96
12. Wolojita	6.361	93,34	2,28	2,28
13. Lio Timur	8.191	96,90	2,94	2,94
14. Kelimutu	7.228	91,47	2,60	2,60
15. Ndori	5.968	91,53	2,14	2,14
16. Maurole	11.807	93,68	4,24	4,24
17. Kotabaru	10.632	98,28	3,82	3,82
18. Detukeli	6.948	98,12	2,49	2,49
19. Lepembusu Kelisoke	5.445	94,95	1,96	1,96
20. Detusoko	14.621	106,22	5,25	5,25
21. Wewaria	17.918	102,01	6,43	6,43
2022	273.553	95,80	131,19	100
2021	272.078	95,85	131,76	100
2020				
2019				

Sumber Data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2022, 2023 dan 2024

Sebanyak 47,35% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ende adalah penduduk usia produktif/dewasa (15-49 tahun). Proporsi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yang sebesar 53,44%.

Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Tahun 2021- 2023

Kelompok Umur	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023			
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	L	10B02	Total	%
0-4 10	10,824	10,248	21,072	7,74%	10,773	10,206	20,979	7,67%	10,824	10,412	21,236	7,62%
5-9 12	12,955	12,334	25,289	9,29%	12,947	12,325	25,272	9,24%	12,131	11,510	23,641	8,49%
10-14	12,163	11,319	23,482	8,63%	12,213	11,419	23,632	8,64%	12,762	11,993	24,755	8,89%
15-19	11,843	11,290	23,133	8,50%	11,759	11,183	22,942	8,39%	11,873	11,132	23,005	8,26%
20-24	12,371	11,926	24,297	8,93%	12,165	11,691	23,857	8,72%	12,166	11,731	23,897	8,56%
25-29	11,720	11,289	23,009	8,46%	11,832	11,304	23,136	8,46%	12,206	11,797	24,003	8,62%

30-34	10,482	10,491	20,973	7.71%	10,668	10,600	21,268	7.77%	10,961	10,802	21,763	7.81%
35-39	9,471	10,045	19,516	7.17%	9,558	10,110	19,668	7.19%	9,896	10,132	20,028	7.19%
40-44	8,541	9,727	18,268	6.71%	8,635	9,800	18,435	6.74%	8,965	9,815	18,780	6.74%
45-49	7,642	9,038	16,680	6.13%	7,731	9,158	16,889	6.17%	8,027	9,306	17,333	6.22%
50-54	6,665	8,174	14,839	5.45%	6,766	8,299	15,065	5.51%	7,011	8,450	15,461	5.55%
55-59	5,670	7,068	12,738	4.68%	5,761	7,205	12,966	4.74%	5,972	7,434	13,406	4.81%
60-64	4,465	5,752	10,217	3.76%	4,534	5,897	10,431	3.81%	4,846	6,170	11,016	3.95%
65-69	3,395	4,336	7,731	2.84%	3,460	4,455	7,915	2.89%	3,611	4,755	8,366	3.00%
70-74	2,459	2,945	5,404	1.99%	2,504	3,027	5,531	2.02%	2,571	3,230	5,801	2.08%
75+	2,490	2,940	5,430	2.00%	2,542	3,025	5,567	2.04%	2,714	3,376	6,090	2.19%
Total	133,156	138,922	272,078	100%	133,848	139,705	273,553	100%	136,536	142,045	278,581	100%

Sumber Data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Dosmestik Regional Bruto

Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan Tahun 2023 mencapai 7,374 Trilyun Rupiah, dimana didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar kurang lebih 2,336 Trilius atau 31,69%, diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparrasi mobil dan sepeda motor sebesar kurang lebih 1,193 Miliar (16,18%).

Sementara itu Berdasarkan Harga Konstan (ADHK) 2010, angka PDRB Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari Rp.4,162 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp.4,291 Miliar di Tahun 2022 dan menjadi Rp.4,457 Miliar pada Tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2019–2023 sangat fluktuatif, dimana pada Tahun 2019 ekonomi bertumbuh sebesar 5,08%, menurun drastis menjadi -1,33% pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid 19, kemudian perlahan naik kembali menjadi 2,13% pada tahun 2021, tahun 2022 naik menjadi 3,09% dan di tahun 2023 kembali naik menjadi 3,87%.

Tabel 2.14. Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Nilai PDRB (dalam miliar)			
• Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.314,75	6.792,62	7.374,38
• Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	4.162,98	4.291,79	4.457,69
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	2,13	3,09	3,87

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024, PDRB Kab. Ende 2019-2023

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Tabel 2.15.Laju Pertumbuhan (%) Sektor Ekonomi 2019-2023

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,57	2,49	5,14	5,06	4,60
B. Pertambangan dan Penggalian	5,40	-1,89	0,49	1,68	2,46
C. Industri Pengolahan	13,41	-4,32	-0,87	9,95	8,47
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	10,83	1,46	6,75	11,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,46	6,98	6,50	4,01	2,79
F. Konstruksi	4,04	-9,88	2,17	-0,79	4,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,13	-6,22	2,27	7,41	5,64
H. Transportasi dan Pergudangan	3,35	-12,60	0,79	3,93	2,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	-24,94	3,72	17,05	15,34
J. Informasi dan Komunikasi	4,28	12,29	5,48	4,42	5,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	9,39	2,80	1,05	1,96
L. Real Estate	-0,23	-0,90	0,87	0,79	3,84
M. Jasa Perusahaan	2,54	-40,46	-17,29	3,93	5,56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65	4,46	-1,44	-1,68	0,25

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
P. Jasa Pendidikan	4,03	2,12	-1,92	-0,76	1,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,54	4,44	5,28	2,09	4,28
R. Jasa lainnya	8,14	-17,19	-3,53	0,72	3,99
Laju Pertumbuhan PDRB	5,08	-1,33	2,13	3,09	3,87

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka Tahun 2024, Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten 2019–2023

Sektor utama di Kabupaten Ende yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 31,69% pada Tahun 2023, bertumbuh 0,19% dari tahun lalu. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil/Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 16,19, sedangkan Lapangan Usaha Konstruksi yang jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 9,11%.

Tabel 2.16 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB Kurun Waktu 2017 – 2023

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,84	28,29	28,26	29,50	30,71	31,50	31,60
B. Pertambangan dan Penggalian	1,35	1,28	1,76	1,25	1,22	1,10	1,14
C. Industri Pengolahan	1,50	1,48	1,60	1,56	1,56	1,69	1,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah/ Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
F. Konstruksi	10,62	10,68	10,63	9,59	9,53	9,25	9,11
G. Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil/Sepeda Motor	15,95	14,84	15,30	14,81	14,81	15,55	16,19
H. Transportasi dan Pergudangan	6,73	6,74	6,66	5,64	5,48	5,69	5,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,36	0,35	0,27	0,26	0,29	0,37
J. Informasi dan Komunikasi	4,69	4,55	4,45	5,00	5,08	4,96	4,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	3,99	3,93	4,29	4,42	4,48	4,29
L. Real Estate	2,94	2,83	2,63	2,61	2,50	2,54	2,65
M, N. Jasa Perusahaan	0,42	0,40	0,38	0,24	0,20	0,19	0,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,63	9,78	9,90	10,36	9,88	9,08	8,70
P. Jasa Pendidikan	10,67	10,50	10,33	10,78	10,36	9,76	9,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	1,72	1,74	1,92	1,97	1,88	1,95
R, S, T, U. Jasa lainnya	2,45	2,42	2,44	2,06	1,91	1,88	1,85
PDRB (ADHB)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan PDRB Pengeluaran terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kabupaten Ende, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) dan pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar.

Tabel 2.17. PDRB Pengeluaran ADHK 2019-2023

Komponen	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	2.955,85	2.904,15	2.961,76	3.019,17	3.105,26
Konsumsi LAMPBT	114,95	110,79	115,06	119,66	124,35
Konsumsi Pemerintah	983,06	874,69	836,03	768,20	784,91
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.117,79	1.923,88	2.007,87	1.994,26	2.110,29
Perubahan Inventori	31,31	34,28	35,02	34,97	34,09
Ekspor Barang dan Jasa	-2.075,70	-1.771,37	-1.783,32	-1.654,46	-1.705,91

Komponen	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (miliar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Domestik Regional Bruto	4.131,22	4.076,21	4.162,98	4.291,79	4.457,69

Sumber: Publikasi Website BPS Ende (Ende Dalam Angka 2024)

2. Laju inflasi

Data inflasi Kabupaten Ende untuk Tahun 2021-2023 tidak dipublikasikan, sehingga mengacu pada inflasi provinsi secara keseluruhan. Sesuai data publikasi BPS untuk Provinsi NTT dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2024 Inflasi Provinsi NTT unt kurun waktu dari tahun 2021-2023 sangat fluktuatif yaitu tahun 2021 sebesar 1,67, 2022 sebesar 6,65 dan ditahun 2023 sebesar 2,142.

3. PDRB Perkapita

Publikasi BPS "Kabupaten Ende Dalam Angka 2024" menunjukkan adanya trend kenaikan PDRB Perkapita di Kabupaten Ende dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2019, PDRB perkapita ADHB adalah sebesar Rp. 22.293,- Angka ini kemudian sedikit menurun menjadi Rp.22.126,- di Tahun 2020, tetapi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.22.13,- di Tahun 2021 dan Rp.24.63,- di Tahun 2022 dan pada Tahun 2024 mencapai Rp.26.47. Sementara untuk harga konstan, PDRB Perkapita ADHK pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp.15.082,- dan sedikit mengalami penurunan menjadi Rp.14.845,- di Tahun 2020 kemudian kembali meningkat menjadi Rp.15.25,- di Tahun 2021 dan menjadi Rp.15.56,- di Tahun 2022, serta meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi Rp.16.00,-.

Tabel 2.18. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ende, 2016-2020

Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB/ at current price	6.106.571	6.075.666	6.314,75	6.792,62	7.374,38
ADHK/ at 2010 Constant Price	4.131.297	4.076.360	4.162,98	4.291,79	4.457,69
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
ADHB/ at current price	22.293	22.126	23,13	24,63	26,47
ADHK/ at 2010 Constant Price	15,082	14.845	15,25	15,56	16,00
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)/Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price (persen)	4,74	-1,57	2,76	2,03	2,83
Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (Thousand People)	274	270	272	274	274
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)	0,34	0,24	1,15	0,59	1,04

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka 2024.

4. Indeks Gini

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut :

- $0 < G \leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang
- $G \geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Besarnya indeks gini Kabupaten Ende dilihat dengan pendekatan Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai 0,325. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai level rendah. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan diharapkan akan semakin merata. Indeks Gini Kabupaten Ende pada tahun 2022 sebesar 0,306. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan besaran Indeks Gini Provinsi NTT, yang berarti bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Ende menunjukkan ketimpangan sedang.

5. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (52 komoditi) dan bukan makanan (51 komoditi perkotaan dan 47 komoditi perdesaan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi **Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan**. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Berdasarkan data susenas, diketahui jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebesar 51.700 (23,01%), selanjutnya pada Tahun 2015 penduduk miskin kembali meningkat pada angka 23,49%. Pada Tahun 2018 prosentase penduduk miskin Kabupaten Ende mengalami peningkatan sebesar 24,20%, sementara kondisi pada Tahun 2019 jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Ende mengalami penurunan menjadi 63.450 (23,18%) dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 23,76% dan kembali mengalami lonjakan tahun 2021 sebesar 24,13%. Tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende mengalami penurunan sebesar 23,00% dan kembali mengalami penurunan ditahun 2023 yaitu sebesar 22,86%.

Tabel 2.19 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2010-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp /kap/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin(%)	
	Ende	NTT	Ende	NTT	Ende	NTT
2010	182.800	193.298	51,7	1.021	23,01	21,77
2011	206.900	198.553	56,4	1.013	21,65	21,23
2012	230.100	222.507	54,5	1.000	20,37	20,41
2013	255.800	251.080	55,3	1.007	20,71	20,24
2014	286.030	268.536	54,74	992	20,37	19,60
2015	291.770	307.224	63,23	1.160,53	23,49	22,58
2016	315.909	322.947	64,65	1.149,92	23,89	22,19
2017	341.219	343.396	65,11	1.150.790	23,95	21,85
2018	358.986	354.898	66,01	1.142.167	24,20	21,35
2019	363.508	373.922	63,45	1.129.460	23,18	20,62
2020	392.591	403.005	65.22	1.153,76	23.76	20,90
2021	428.328	415.116	66.38	1.169,31	24,13	20,99
2022	473.403	460.823	63,40	1.131,62	23,00	20,05
2023	518.939	507.203	63,10	1.141,11	22,86	19,96

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka 2024 dan Provinsi NTT Dalam Angka 2024

• **Kemiskinan Ekstrim**

a. **Pengertian Kemiskinan Ekstrem**

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 1,12 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2023 adalah 9,36 persen.

b. **Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Ende**

Data BPS pada tahun 2023, kondisi Kabupaten Ende memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 13,53 persen dengan besaran jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 37.130 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Ende tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 22,86 persen atau 63,10 ribu jiwa. Sementara itu,, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,93 persen atau sebanyak 19,96 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 19,96 persen atau 1,14 juta jiwa.

Tabel 2. 20 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

KETERANGAN	ENDE	NUSA TENGGARA TIMUR	INDONESIA
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)	13,53	3,93	1,12
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	37.130	19,96	3,3 juta
Tingkat Kemiskinan (persen)	22,86	19,96	9,36
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	63,10	1,14 juta	25,90 juta

Sumber: Susenas Maret 2023, BPS

c. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni dengan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Gambar 2.1 Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
(Menurunkan Beban Pengeluaran)



Gambar 2.2 Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
(Meningkatkan Pendapatan)



2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dimana keadaan terakhir Tahun 2023 sebesar 68,63 menduduki ranking 2 IPM Kabupaten/Kota se-NTT. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020.

Tabel 2.21. Perkembangan IPM Kabupaten Ende 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uda Harapan Hidup	64,37	64,42	64,48	64,75	n/a	n/a	65,43	65,76	66,12
Angka Harapan Lama Sekolah	13,73	13,74	13,75	13,76	n/a	n/a	13,79	13,81	13,81
Rata2 Lama Sekolah	7,37	7,38	7,63	7,79	n/a	n/a	8,03	8,09	8,20
Pengeluaran Riil Perkapita	8678,65	8.801	8.841	8.995	n/a	n/a	8.021	9.413	9.739
IPM Ende	65,54	65,74	66,11	66,62	67,20	67,04	67,30	67,97	68,63
IPM NTT	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40

Sumber: Publikasi BPS NTT dan Ende Dalam Angka 2024

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM di Kabupaten Ende untuk semua tingkat pendidikan cenderung fluktuatif kurun 2016-2023. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2016-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.22. Angka Partisipasi Kasar SD/MI,SMP/MTs Tahun 2016-2023

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	APK SD/MI	112,96	110,18	112,73	102,34	104,26	102,97	102,47	110,54
2	APK SMP/MTs	96,52	84,51	86,93	93,52	87,00	99,71	99,71	87,71
4	APM SD/MI	92,20	92,26		87,38	90,86	91	91	95,86
5	APM SMP/MTs	64,01	62,70		67,50	66,41	69,45	69,45	69,55

Sumber: LKPI Kab. Ende Tahun 2024 da Ende Dalam Angka Tahun 2024

3. Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu Tahun 2016-2023 APSSD/MI,SMP/MTs mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada Tahun 2023 Angka Putus Sekolah (APs) pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,12, sementara itu untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga sama sebesar 0,12.

Tabel. 2.23. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2023

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APS SD/MI	0,03	0,02	0,17	0,061	0,00	0,03	0,08	0,12
2.	APS SMP/MTs	0,07	0,06	0,17	0,14	0,00	0,01	0,08	0,12

Sumber: LKPI Kab.Ende Tahun 2023.

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan tertentu. Data Susenas menunjukan pada Tahun 2022 di Kabupaten Ende masih banyak penduduk yang tidak punya ijazah yaitu sebanyak 23,61%.

Tabel. 2.24. Persentase Penduduk Kabupaten Ende Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, 2015 – 2023

No.	Ijazah Tertingg Yang Dimiliki	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Punya	30,01	34,81	31,77	33,39	25,00	28,30	25,82	23,61
2	Sekolah Dasar	28,02	30,77	26,38	30,29	27,70	26,53	25,76	25,81
3	SMP	13,42	9,81	15,80	13,98	13,52	16,74	17,66	20,72
4	SMA dan SMK	14,87	16,60	17,31	15,29	23,02	19,68	19,44	17,73
5	Diploma I/II	0,60	0,78	0,90	0,41	0,26	0,43	0,45	0,57
6	Diploma III	2,15	0,91	1,60	1,21		1,26	2,15	1,96
7	Diploma IV/S1/S2/S3	6,95	6,34	6,24	5,48	0,82	7,06	8,73	8,89

5. Angka Kematian Bayi

Angka kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun) di Kabupaten Ende masih cukup tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 terdapat 69 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 4.527 jumlah bayi yang lahir hidup. Pada Tahun 2016 terjadi 74 orang bayi yang meninggal kurang dari 1 tahun dari 3.693 jumlah bayi yang lahir hidup. Sementara pada Tahun 2017 dari 6.201 bayi yang lahir, 57 orang diantaranya meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun dan pada tahun 2018 dari 4.196 bayi yang lahir, 13 orang diantaranya meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun dan pada tahun 2019 jumlah bayi yang meninggal meningkat menjadi 45 orang dari 4.199 jumlah bayi yang lahir hidup. Sedangkan Tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 51 orang bayi dari 4.347 jumlah kelahiran hidup. Pada tahun 2021 Angka Kematian Bayi Menurun menjadi sebesar 3/1000 kelahiran Hidup. Pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi kembali meningkat menjadi 52 kasus.

6. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kasus kematian ibu adalah Jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Khusus pada indikator ini kematian ibu yang terjadi sebagai akibat dari kelainan atau resiko kehamilan, persalinan dan nifas. Pada tahun 2022 kasus kematian ibu yang terjadi sebanyak 10 kasus.

7. Angkatan Kerja

Pada Tahun 2023, total jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Ende adalah sebanyak 209.528 orang dengan rincian 156.503 orang angkatan kerja dan 53.025 orang bukan angkatan kerja. Lebih dari 50% dari total PUK adalah perempuan, sedangkan sisanya PUK berjenis kelamin laki-laki.

Tabel. 2.25. Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

Jenis Kelamin	Tahun									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laki-laki	68.460	49,87	75.079	51,05	79375	50,04	77.222	49,80	77.838	49,74
Perempuan	68.813	50,13	71.997	48,95	79258	49,96	77.842	50,20	78.665	50,26
L+P	137.273	100	147.076	100	158.633	100	155.065	100	156.503	100

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

Tabel. 2.26. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang Bekerja Kerja Menurut Lapangan Usaha 2020-2023

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun											
		2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Sektor Primer (Pertanian)	24,13	19,37	43,51	38,63	29,87	44,33	36,294	32,039	68,333	36,258	32,945	69,203
2.	Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik & Air minum, dan Bangunan)	8,04	14,87	22,91	13,12	21,07	22,13	12,828	20,933	33,761	9,452	16,841	26,293
3.	Sektor Tersier (Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa)	18,96	14,62	33,58	25,62	26,19	33,53	26,473	23,304	49,777	30,725	26,226	56,951

Sumber: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

Data Sakernas juga menunjukan bahwa dari keseluruhan Angkatan Kerja pada Tahun 2023 sebagian besar menekuni sektor Primer 45,39% yang sedikit mengalami peningkatan, diikuti sektor tersier yang juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 37,36% dan sektor sekunder sebesar 17,25%.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK di Kabupaten Ende secara keseluruhan pada Tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 data menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Ende selalu mengalami peningkatan hanya saja pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari 75,53%

ditahun 2022 menjadi 74,69%.

Tabel. 2.27. Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

Jenis kelamin	TPAK (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	80,12	80,11	79,37	81,73	76,98
Perempuan	66,51	65,49	79,13	70,25	72,566
L+P	71,65	72,22	75,40	75,53	74,69

Sumber : Kabupaten Ende dalam Angka 2024

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Data BPS mengindikasikan angka TPT di Kabupaten Ende sebesar 2,06 pada keadaan Tahun 2022, dan meningkat menjadi 2,59 di Tahun 2023. Secara umum, angka pengangguran yang relatif rendah (di bawah 10%) tidak bisa dijadikan indikator bahwa tidak ada masalah dalam pasar kerja.

Tabel. 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2019-2023

Jenis kelamin	TPT (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	1,99	1,42	2,00	02,11	1,80
Perempuan	3,87	1,53	2,12	20,01	3,37
L+P	2,98	2,95	2,01	2,06	2,59

Sumber : BPS, Sakernas 2019-2023, Kabupaten Ende dalam Angka 2024

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya

Sejalan dengan pengembangan di Bidang Pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap yaitu **Upacara Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata didanau Kelimutu**. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 20 komunitas adat yang bermukim disekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2023 terdapat 20 situs/cagar budaya yang intensif dibina yakni Perkampungan megalithik Wolotopo, Kampung Unggu Kanganara, Mumi Kaki More Wolondopo, Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah adat Bhisu One Jopu, Rumah adat Wiwipemo, Sa'o Ria Raja Nggaji-Wolajita, Museum Tenun Ikut, Museum Bahari, Situs Kampung Adat Kanganara, Makam Ibu Amsi, Kampung Adat Delukeli, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Camat Ende Utara, Kantor Detasemen POM Ende, Kantor Kodim Ende, Gedung Imaculata, Situs Gereja Kathedral Ende serta Masjid A-Rabitha. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikutsertakan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2023, sebanyak 74 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk melestarikan dan keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : **Upacara Adat Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata**, **Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata**, **Festival Pesta Danau Kelimutu**, **Sail Indonesia dengan titik singgah di Kecamatan Maurole**, **Gebyar Wisata Nusantara di TMII** dan **Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi**.

b. Olahraga

Dalam rangka pengembangan olah raga sepak bola telah ditingkatkan fasilitas Stadion Marilonga, baik kapasitas stadion, maupun pemasangan lampu yang memungkinkan dilaksanakan pertandingan pada malam hari. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga melaksanakan kegiatan O2SN dalam rangka pembinaan olahraga bagi siswa SD dan SMP.

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

1. Rata-rata Kompetensi Literasi SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 1,17, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1,81 maka baru mencapai 64,64% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

2. Rata-rata Kompetensi Literasi SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2022 yakni 1,45, yang merupakan nilai kemampuan literasi SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1.95 maka baru mencapai 74,36% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SMP masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

3. Rata-rata Kompetensi Numerasi SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 0,71, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1,64 maka baru mencapai 43,29% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi numerasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

4. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 1,51, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 2,29 maka baru mencapai 65,94% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SD telah berada di kategori berkembang.

5. Rata-rata Indeks Karakter SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2022 yakni 1,51, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 2,29 maka baru mencapai 65,94% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SD telah berada di kategori berkembang.

6. Rata-rata Indeks Karakter SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2022 yakni 1,61, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 2,28 maka baru mencapai 70,61% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SMP telah berada di kategori berkembang.

7. Rata-rata Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Presentasi siswa yang mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada jenjang PAUD pada Tahun 2023 yaitu 50,65%. Ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa jenjang PAUD terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ende.

8. Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI

Rasio Guru berbanding Murid SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 593,86 per 10.000 Murid SD/MI, yang merupakan perbandingan jumlah Guru jenjang SD/MI yang berstatus PNS dengan jumlah seluruh tenaga guru jenjang SD/MI.

9. Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs

Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 563,37 per 10.000 Murid SMP, angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 746,93, maka baru mencapai 75,42% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini menggambarkan untuk 10.000 murid SMP dilayani oleh 563 guru PNS.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI pada Tahun 2023 yaitu 1075,93 SD per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari perkalian Jumlah SD dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12.

11. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs.

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs pada Tahun 2023 yaitu 5285,41 SMP per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari perkalian Jumlah SMP dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 13-15.

12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 100,30%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah siswa SD/MI dengan Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 tahun).

13. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 84,33%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa SMP dengan jumlah usia jenjang pendidikan SMP.

14. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada jenjang pendidikan sekolah dasar/MI pada tahun 2023 yaitu 89,39%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Berusia 7-12 tahun terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun.

15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs pada tahun 2023 yaitu 66,78%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP Usia 13-15 Tahun dengan Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun

16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Paket A pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar /MI pada tahun 2023 yaitu 93,65%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah dasar terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Paket B pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2023 yaitu 74,23%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah menengah pertama terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

18. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada jenjang pendidikan sekolah SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2023 yaitu 92,38%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa Tingkat 1/Kelas 7 Jenjang SMP terhadap Jumlah Lulusan SD pada Tahun 2023.

19. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada jenjang pendidikan sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0,12%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa SD/MI.

20. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 0,12%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP yang Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa SMP/MTs.

21. Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 83,74%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SD yang berpendidikan S1/D4 terhadap jumlah seluruh Guru SD.

22. Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 92,76%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SMP yang berpendidikan S1/D4 terhadap jumlah seluruh Guru SMP.

23. Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi

Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SD yang telah mengikuti Diklat Kompetensi dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SD.

24. Tenaga Kependidikan SMP/MTs yang Mengikuti Diklat Kompetensi

Tenaga Kependidikan SMP/MTs yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SMP/MTs yang telah mengikuti Diklat Kompetensi dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SMP/MTs.

25. Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan

Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 44,52%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan dengan Jumlah Warisan Budaya yang Ada. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 18,31%, maka mencapai 243,15% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa semua warisan budaya yang ada di Kabupaten Ende telah dilestarikan.

26. Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan

Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 100%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dengan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Ada. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 65,22%, maka telah mencapai 153,33% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 5 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Ende semuanya telah dilestarikan.

27. Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan

Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 21,74%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 100%, maka telah mencapai 21,74% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa Cakupan Cagar Budaya di Kabupaten Ende yang telah dilestarikan sebesar 21,74% dari total 115 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Ende.

Tabel 2.29 Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Program	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian s.d 2023 terhadap Target (%)	Target Akhir RPJMD 2024
1	2	3	4 Target	5 Realisasi	6	7
1	Rata-rata Kompetensi Literasi SD	0	1,81	1,17	64,64%	1,91
2	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	0	1,95	1,45	74,36%	2,05
3	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD	0	1,64	0,71	43,29%	1,74
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	0	1,96	0,87	44,39%	2,06
5	Rata-rata Kompetensi Karakter SD	0	2,29	1,51	65,94%	2,39
6	Rata-rata Kompetensi Karakter SMP	0	2,28	1,61	70,61%	2,38
7	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,86%	91,20%	50,65%	55,54%	94,20%
8	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SD/MI	110,00	107,53	1075,93	1000,58%	107,53
9	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	54,00	50,11	5285,41	105,48%	50,11
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104%	109%	100,30%	92,02%	108%
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	85%	85,40%	84,33%	98,75%	84,63%
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	90,86%	98,12%	89,39%	91,06%	98,59%
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90,86%	73,21%	66,28%	91,21%	98,59%
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	93,55%	96,86%	93,65%	96,69%	96,91%
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,87%	85,84%	74,23%	86,48%	91,69%
16	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	89,36%	100,00%	92,38%	92,38%	100,00%
17	Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
18	Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
19	Guru SD yang berkualifikasi S1/D4	70,99%	80,99%	83,74%	103,40%	85,99%
20	Guru SMP yang berkualifikasi S1/D4	82,42%	92,42%	92,76%	100,37%	97,42%
21	Tenaga Kependidikan SD yang mengikuti Diklat Kompetensi	14,50%	40,99%	0,00%	0,00%	47,61%

Sumber : LKPJ Bupati Ende Tahun 2023

2. Kesehatan

1) Presentasi Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pada tahun 2023, target Data presentase ketersediaan Obat dan Vaksin dipelayanan Kesehatan (Puskesmas) adalah 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa jumlah ketersediaan obat dan vaksin pada Puskesmas dalam kondisi yang baik dan tercukupi untuk obat esensialnya.

2) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

Pada tahun 2023 target jumlah pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 100%. Jumlah Usia produktif yang dilayani dalam periode tahun 2023 sebesar 160.300 pasien dari 185.477 total usia produktif di Kabupaten Ende, sehingga capaian pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2023 sebesar 86.43%.

- 3) **Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**
 Pada tahun 2023 Target Jumlah Murid SD dan Setingkat yang di periksa kesehatannya oleh nakes atau tenaga terlatih sebesar 100 % . Capaian target tahun 2023 sebesar 57,58 % dimana sebanyak 19.772 orang Jumlah Murid SD dan Setingkat yang mendapat pemeriksaan kesehatan dari 30.867 Orang. Dari realisasi tersebut, cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat belum semua diperiksa.
- 4) **Cakupan Kepesertaan JKN.**
 Target tahun 2023 kepesertaan JKN adalah 93 % , capaian kinerja tahun 2023 sebesar 77,49 % dimana dari 216.667 Jiwa yang memiliki kartu JKN dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende sebanyak 279.592 Jiwa.
- 5) **Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi**
 Sebanyak 25 puskesmas di kabupaten Ende sudah terakreditasi dari total 26 puskesmas (96,15%) untuk Tahun 2023.
- 6) **Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin**
 Pada tahun 2023, Target pelayanan masyarakat miskin di Kabupaten Ende sebesar 100 % . Capaian tahun 2023 sebesar 100% dimana sebanyak 673 yang mendapatkan pelayanan dari total 673 jumlah seluruh masyarakat miskin yang dirujuk.
- 7) **Presentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja**
 Pada tahun 2023 sebanyak 26 Puskesmas di kabupaten Ende melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dasar pekerja dari 26 Puskesmas, jadi cakupannya menjadi 100% dari target sebesar 95%. Sehingga capaiannya sebesar 105% melampaui target.
- 8) **Jumlah Pos UKK di Setiap Wilayah Puskesmas**
 Pada Tahun 2023 target Jumlah Pos UKK di setiap Wilayah sebesar 9,35 % , realisasi sebesar 9,35% dimana 26 desa memiliki pos UKK dari 278 desa/kelurahan sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.
- 9) **Presentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga**
 Target puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga tahun 2023 sebesar 75%. pada tahun 2023 semua puskesmas di Kabupaten Ende sudah melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kelompok olahraga, sehingga cakupannya 100%.
- 10) **Presentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi (Obat, Makan dan Kosmetik)**
 Target sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi tahun 2023 sebesar 75% dengan realisasi 52,70% dimana 39 sarana produksi yang memenuhi syarat dari jumlah seluruh sarana sebanyak 74. Hal ini menunjukkan bahwa sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi belum mencapai target sehingga perlu ditingkatkan pengawasan.
- 11) **Cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS**
 Target Rumah Tangga ber-PHBS tahun 2023 sebesar 43,72% dengan realisasi sebesar 48,75% dimana jumlah rumah tangga ber-PHBS sebanyak 24.936 dari jumlah seluruh rumah sebanyak 51.154 rumah tangga. Hal ini menunjukkan cakupan rumah tangga yang ber-PHBS sudah melampaui target atau sebesar 111,5 %.
- 12) **Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan**
 Target SDM yang mempromosikan kesehatan tahun 2023 sebesar 97,70% dengan realisasi 96,25% dimana 334 strata dilakukan promosi kesehatan dari jumlah seluruh strata sebanyak 347 strata. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan SDM yang mempromosikan kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98,52%.
- 13) **Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**
 Pada tahun 2023 target Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 96,26% dimana terdapat 335 balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan difasilitas kesehatan puskesmas, dari total balita gizi buruk yaitu 348 jiwa. Hal ini

menunjukkan bahwa cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

- 14) **Presentasi Balita Gizi Buruk**
Balita Gizi buruk adalah balita yang dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS (Kartu Menuju Sehat). Pada Tahun 2023 Target Jumlah Balita dengan Gizi Buruk sebesar 0,46 %, Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 3,91 % dimana terdapat 713 orang Balita dengan Gizi yang ditangani dari total 18.225 Balita yang ditangani.
- 15) **Prevalensi Balita Gizi Kurang**
Target Jumlah Balita dengan Gizi Kurang Tahun 2023 sebesar 14,09% dengan realisasi sebesar 7,39 % dimana 1.347 orang balita Gizi Kurang dari Total balita 18.225 orang . Hal ini menunjukan kasus gizi kurang tidak mencapai target dan berarti baik dan tidak melewati batas toleransi.
- 16) **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada awal dibawah dua tahun/Baduta**
Tahun 2023 Angka Prevalensi stunting pada bayi dua tahun (BADUTA) mencapai 10,28 % dimana sebanyak 2.663 orang Baduta stunting dari total 25.903 orang baduta. Angka ini melewati batas toleransi yang di targetkan 9,3%.
- 17) **Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita**
Angka prevalensi stunting pada bayi lima tahun (BALITA) mencapai 1,44% (262 balita stunting dari total 18.225 balita yang ditimbang). Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan pada stunting balita yaitu 9,3 %.
- 18) **Prosentase Desa yang melaksanakan STBM**
Angka prevalensi stunting pada bayi lima tahun (BALITA) mencapai 1,44% (262 balita stunting dari total 18.225 balita yang ditimbang). Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan pada stunting balita yaitu 9,3 %.
- 19) **Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan**
Target jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar 64,30% dengan realisasi 50% (14.847 jumlah sarana air minum yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan dari total 29.694 jumlah seluruh sarana air minum).
- 20) **Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan / Minuman yang Memenuhi Syarat**
Target jumlah sarana sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar 97,48% dengan realisasi 100% (367 jumlah sarana sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman yang memenuhi syarat kesehatan dari total 367 jumlah seluruh sarana sanitasi).
- 21) **Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**
Target jumlah desa/kelurahan dengan universal child immunization (UCI) tahun 2023 sebesar 99% dengan capaian target sebesar 71,94% (200 desa dari total 278 kelurahan/desa). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dipacu untuk jadi perhatian dan intervensi.
- 22) **Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam**
Target jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu sebesar 100% dengan capaian tahun 2023 sebesar 0%. hal ini menunjukkan tidak ada desa/kelurahan yang mengalami KLB.
- 23) **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**
Target jumlah penemuan penderita penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Penderita penyakit DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP sebanyak 57 orang dari total 57 orang penderita DBD ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus DBD di Kabupaten Ende semua diatasi dan mencapai target.
- 24) **Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani**
Target jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani tahun 2023 sebesar 37,51%, sementara hasil penanganan penyakit pneumonia tahun 2023 sebesar 53,16% (724 orang balita pneumonia dari total 1.362 perkiraan balita dengan pneumonia). Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

- 25) Presentasi Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Rubella**
Target anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak rubella tahun 2023 sebesar 98% dengan realisasi sebesar 80,25% (3.843 anak yang diimunisasi campak rubella dari total 4.789 jumlah bayi). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 anak yang diimunisasi campak rubella sudah mencapai target dan tetap mendapat perhatian dan pengawasan.
- 26) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**
Angka prevalensi tuberkulosis mencapai 2561 perseratus ribu dimana 7.159 adalah pasien TBC BTA+ yang ditemukan dan ditangani dari 279.592 jumlah penduduk. Angka ini tidak melewati batas toleransi yang ditargetkan yaitu 466,9 perseratus ribu.
- 27) Presentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapat Pelayanan Deteksi Dini HIV/AIDS sesuai Standar.**
Target jumlah kasus HIV/AIDS yang diberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sebesar 100% di tahun 2023. Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 5.783 (74,31%) dari total jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di suatu wilayah kerja 7.782. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum mencapai target..
- 28) Non Polio AFP Rate per 100.000 pendudu**
Cakupan penemuan kasus AFP Non Polio yang ditemukan tahun 2023 sebesar 29.083/100.000 penduduk. Pada tahun 2023 tidak ada kasus non polio AFP yang ditemukan..
- 29) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**
Target jumlah pelayanan penderita hipertensi pada tahun 2023 sebesar 88%. Penderita hipertensi yang dilayani dalam periode tahun 2023 sebesar 93,07% yaitu total pasien hipertensi yang dilayani 64.070 dari 68.842 total pasien penderita hipertensi di Kabupaten Ende..
- 30) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA**
Target jumlah penemuan baru penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% (487 orang penderita baru TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati dari total 487 orang seluruh penderita TBC BTA+ yang ditemukan). Hal ini berarti pencapaian tercapai 100%.
- 31) Angka Kejadian Malaria**
Target jumlah kasus malaria yang terjadi tahun 2023 sebesar 0,45 perseribu penduduk dengan realisasi sebesar 0,215 perseribu penduduk yaitu 6 jumlah penderita malaria positif dari total 279.592 jiwa penduduk.
- 32) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**
Target jumlah pelayanan penderita diabetes melitus pada tahun 2023 sebesar 90%. Penderita diabetes mellitus yang dilayani dalam periode tahun 2023 sebesar 96,61% yaitu total pasien diabetes mellitus yang dilayani 2.677 dari 2.771 total pasien penderita hipertensi di Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sudah melewati target yang ditentukan.
- 33) Cakupan Penderita Diare yang Ditangani**
Target jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2023 sebesar 47,11%. Capaian target tahun 2023 sebesar 32,50% yaitu 1.745 yang penanganan penderita diare dari jumlah 5.369 total perkiraan penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target.
- 34) Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**
Target jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang datang dan dilayani di sarana kesehatan tahun 2023 sebesar 92%, capaian target tahun 2023 sebesar 100% yaitu 965 orang yang penanganan penderita gangguan jiwa berat dari jumlah 965 total penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang datang dilayani di sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai target.
- 35) Rasio Tenaga Dokter per satuan Penduduk**
Ratio tenaga dokter yang dimaksud adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Target rasio tenaga dokter tahun 2023 sebesar 0,205 per 1000 penduduk.

Pencapaian target tahun 2023 sebesar 0,204% dengan jumlah dokter sebanyak 57 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 279.592 pada tahun 2023.

36) Rasio Tenaga Paramedis

Rasio tenaga paramedis yang dimaksud adalah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Target rasio tenaga paramedis tahun 2023 sebesar 2,42 per 1000 penduduk. Pencapaian target tahun 2023 sebesar 2.665 per 1000 dengan jumlah paramedis sebanyak 745 dari total jumlah penduduk sebanyak 279.592 orang pada tahun 2023.

37) Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Target Ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Ende adalah 0,01 per 1000 penduduk. Capaian kinerja terhadap ratio puskesmas per satuan penduduk yaitu 0,093 dimana 26 puskesmas dibanding dengan 279.592 jiwa. Artinya sudah melewati standar, bahwa 1 puskesmas dapat melayani 10.647 jiwa penduduk. Pada tahun 2023 ada peningkatan status dari pustu menjadi puskesmas yaitu Puskesmas Mukusaki, walaupun sudah melebihi standar akan tetapi kendala yang dihadapi adalah letak geografis dari Kabupaten Ende itu sendiri yang membuat akses pelayanan kesehatan menjadi sulit.

38) Rasio Pustu per Satuan Penduduk

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa target ratio puskesmas pembantu 0,01 per 1000 penduduk dengan jumlah pustu 56 unit dengan hasil 0,20 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ratio puskesmas pembantu sudah melebihi target dari jumlah puskesmas 26 unit.

39) Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama

Pada tahun 2023 Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama telah dianggarkan dan dilaksanakan kegiatannya.

40) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Target jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan sesuai standar minimal 8 kali tahun 2023 sebesar 99% (20.509 balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 26.250 jumlah seluruh sasaran anak balita). Capaian target tahun 2023 sebesar 78,13%, hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

41) Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia

Target jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan sesuai standar minimal 8 kali tahun 2023 sebesar 99% (20.509 balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 26.250 jumlah seluruh sasaran anak balita). Capaian target tahun 2023 sebesar 78,13%, hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

42) Meningkatkan Kualitas Hygiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan/Minuman

Target jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100% dimana 367 jumlah sarana yang memenuhi syarat kesehatan dari total 367 jumlah seluruh TPM, Angka ini sudah mencapai target yang ditentukan.

43) Menurunnya Kasus Kematian Ibu

Batas toleransi tahun 2023 adalah 3 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus, yaitu terdiri dari kematian ibu hamil 1 orang dari total 2.959 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan dan kematian ibu nifas 7 orang dari total 3.682 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan. Angka kematian ibu ini termasuk tinggi dari batas toleransi yaitu 3 Orang dan hal tersebut tetap dalam pengawasan dan intervensi dari semua sektor terkait..

44) Cakupan Kompilasi Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Target tahun 2023 adalah 100%. Jumlah kasus komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sebesar 245. Pencapaian tahun 2023 sebesar 100% dari 245 kasus komplikasi yang ditemukan dan ditangani secara definitif.

45) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, yang memiliki Kompetensi Kebidanan.

Target jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2023 sebesar 100%. Jumlah ibu bersalin 3.682 dari 5.043 sasaran ibu

bersalin. Capaian target tahun 2023 sebesar 73,01%. Dari cakupan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pelayanan.

46) Cakupan K4

Target jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 tahun 2023 sebesar 87,72%. Capaian tahun 2023 sebesar 56,01% (2.959 orang ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 dari 5.283 sasaran ibu hamil). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 belum mencapai target yang akan menjadi perhatian serius kedepannya sebab indikator ini merupakan indikator SPM.

47) Cakupan Pelayanan Nifas

Target jumlah kunjungan ibu nifas yang telah mendapatkan 3 kali pelayanan nifas sesuai standar sebesar 100% pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 sebesar 73,09% (3.686 total ibu nifas mendapat pelayanan 3 kali dari 5.043 sasaran ibu nifas tahun 2023). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu nifas belum mencapai target dan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pelayanan.

48) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Batas toleransi angka kelangsungan hidup bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun 2023 sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2023 sebesar 11,97 per 1000 kelahiran hidup (23 orang bayi dari 1.922 jumlah kelahiran hidup). Hal ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi masih batas normal, tidak melewati batas toleransi.

49) Angka Kematian Neonatus

Batas toleransi angka kematian neonatal (bayi 0-28 hari) sebesar 3,43 per 1000 kelahiran hidup (9 orang bayi yang meninggal kurang dari 0-28 hari dari 1.922 jumlah kelahiran hidup). Capaian tahun 2023 sebesar 4,68 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa kematian sangat tinggi pada masa neonatal dari batas toleransi dan sangat perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

50) Pelayanan Kesehatan Neonatus

Target pelayanan kesehatan neonatus yang memperoleh pelayanan sesuai standar tahun 2023 sebesar 98% (2.747 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan 4 kali dan lengkap dari 4.803 jumlah sasaran bayi baru lahir). Capaian tahun 2023 sebesar 57,19%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai target pelayanan kesehatan bayi baru lahir lengkap.

51) Cakupan Kunjungan Bayi

Target jumlah pelayanan bayi yang memperoleh pelayanan sesuai standar tahun 2023 sebesar 100% (3.493 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan 4 kali dan lengkap dari 3.657 jumlah seluruh bayi baru lahir). Capaian tahun 2023 sebesar 95,52%. Hal ini menunjukkan bahwa belum mencapai target pelayanan kesehatan bayi baru lahir lengkap dan sangat perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

52) Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani

Target jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan sesuai standar sebesar 100% (185 orang bayi dengan komplikasi yang ditangani dari 185 jumlah seluruh bayi dengan komplikasi yang ditangani). Capaian tahun 2023 sebesar 100% seluruh bayi dengan komplikasi yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa neonatal dengan komplikasi yang ditangani mencapai target dan perlu dilakukan pengawasan dan intervensi.

Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain:

1) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Capaian indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sebesar 96,85%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target pada Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu sebesar 98,28% maka belum mencapai target.

2) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS

Capaian indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV sebesar 89,16%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target pada Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu sebesar 97,43% maka belum melampaui target atau pencapaiannya sebesar 91,51%.

3) Bed Occupancy Rate (BOR)

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit / prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Prosentase capaian BOR Tahun 2023 sebesar 45,67%. Angka ini jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu 69,76%, maka belum mencapai target yang ditetapkan . Dengan demikian capaian Indikator BOR jika dibandingkan dengan standar Nasional Kementerian Kesehatan RI yaitu 65,47%. Maka masih dibawah rentang nilai prosentase tersebut atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu di RSUD Ende masih rendah .

4) Average Length of Stay (ALOS)

Rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan pengamatan yang lebih lanjut. Average Long of Stay (ALOS) Tahun 2023 yaitu sebanyak 3,26 hari dan turun 0,03 hari dari Tahun 2022 yaitu 3,32 hari. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD pencapaian indikator ALOS pada Tahun 2023 sebanyak 3,98 hari, maka belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 0,66 hari. Pencapaian ini juga apabila disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu sebanyak 6-9 hari, maka pencapaian tersebut masih dibawah standar yang ditetapkan atau dapat dikatakan bahwa rata lama seorang di rawat belum mencapai angka ideal yang ditetapkan.

5) Bed Turn Over (BTO)

Yaitu Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO RSUD Ende Tahun 2023 yaitu sebanyak 25,63 kali. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 62,96 kali, maka mengalami penurunan 12,4 kali. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebanyak 69,61 kali, maka belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 19,05 kali. Pencapaian angka indikator tersebut diatas jika disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu berkisar antara 40 – 50 kali, maka melampaui dari angka ideal yang ditetapkan tersebut artinya bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende lebih tinggi dari target nasional .

6) Turn Over Interval (TOI)

Indikator ini menunjukkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya. Indikator ini juga menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Pencapaian indikator pada Tahun 2023 sebanyak 14,43 hari. Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2022 sebanyak 5,98 hari, maka naik 8,45 hari. Pencapaian ini juga apabila dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 1,56 hari, maka melampaui target yang ditetapkan. Dan apabila disandingkan dengan angka ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu kisaran 1-3 hari, maka pencapaian ini berada di atas angka ideal yang ditetapkan tersebut. Disampaikan bahwa pada indikator ini untuk interpretasinya dilakukan terbalik artinya bahwa semakin kecil interval tempat tidur tidak ditempati maka dari prespektif RSUD dapat disampaikan bahwa tingkat penggunaan tempat tidur semakin tinggi.

7) Gross Death Rate (GDR)

Angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Indikator Gross Death Rate (GDR) pada Tahun 2023 sebesar 82,91%, Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2023 yaitu sebesar 38,52%, maka melampaui target yang ditetapkan tersebut. Pencapaian ini masih dalam batas toleransi karena masih dibawah nilai Gross Death Rate yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Deprtemen Kesehatan RI Tahun 2005 yaitu < 45 per 1000 penderita keluar.

8) Net Death Rate (NDR)

Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/ pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Pencapaian indikator Net Death Rate (NDR) Tahun 2023 sebesar 82,91%. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2023 sebesar 210,84%, maka belum mencapai target yang ditetapkan. Perlu disampaikan bahwa secara nasional untuk indikator Net Death Rate (NDR) ini, perhitungan dilakukan terhadap 1.000 orang pasien. Nilai ini telah melampaui batas toleransi karena berada di atas nilai Net Death Rate yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun 2005 yaitu kurang dari < 25% penderita keluar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Pekerjaan Umum

Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

1. Persentase jalan dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Panjang jalan Kabupaten Ende 815 Km Berdasarkan SK Bupati Ende Nomor 161/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Di Kabupaten Ende ada 97 ruas jalan yang tersebar di 21 kecamatan dalam kabupaten. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan , Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 407,12 Km Jalan dalam kondisi baik sehingga realisasinya sebesar 49,95%.

2. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat.

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula Panjang drainase yang dikerjakan di bagi Total panjang drainase yang seluruhnya. Pada Tahun 2023 target panjang drainase 83.431,1 M yang sudah dikerjakan 46.330,7 M (55,53 %).

3. Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Pada Tahun 2023 jumlah lokasi Pembangunan Turap di wilayah Jalan Penghubung, Sungai Rawan Longsor sebanyak 285 sedangkan lokasi rawan longsor sebanyak 557 (51,17%).

4. Proposal Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.

Indikator ini di ukur dengan menggunakan Formula Jumlah Rumah Tangga Terakses Air Minum di bagi jumlah Rumah Tangga Seluruhnya. Pada Tahun 2023 Dinas PUPR sudah memiliki Dokumen Rispam sehingga sesuai data Dokumen tersebut Jumlah Rumah sebanyak 64.117 dan Rumah yang sudah terakses Air Minum Layak 36.341 SR/Rumah (56,68%).

5. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik.

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik per Total Luas Irigasi kabupaten. Pada Tahun 2023 Luas Irigasi dalam Kondisi baik yang dikerjakan hanya peningkatan dan rehabilitasi Saluran Irigasi Primer dan Sekunder pada Luasan yang sama, setelah dihitung oleh Bidang Pengairan tidak bertambah luasan dan capaian Luas tetap seperti Tahun 2022 yaitu seluas 2.621 Ha sedangkan total luas irigasi kabupaten 4.876 Ha (53,75%).

6. Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik di bagi panjang Lingkungan Seluruhnya. Pada Tahun 2023 panjang jalan lingkungan 63.227M (67,01%) sedangkan panjang Lingkungan Seluruhnya 94.358,47 M.

7. Prosentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula Jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada Tahun 2023 Jumlah ketaatan RTRW sebanyak 681 Keterangan Kesesuaian Ruang dari Jumlah total keterangan kesesuaian ruang yang dikeluarkan 723 rekomendasi (94,19%).

8. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun Pencapaian SPM dibagi Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luas RTH publik yang tersedia sebanyak 4,05 ha dibagi Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia sebanyak 289,016 ha (1,40%).

• Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya. Keadaan sampai Tahun 2023 menunjukkan bahwa **ratio Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan sebesar 1,46 persen**. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP. Sementara itu untuk **penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH)**, tidak ada penambahan Luasan RTH Publik. Kondisi ruang terbuka hijau yang ada ini sedapat mungkin dipertahankan agar tidak beralih fungsi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan pada urusan Perumahan Rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

1. Persentase KK Korban Bencana Alam atau Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni

Formula indikator yang digunakan adalah Jumlah KK Korban Bencana atau Relokasi yang Memperoleh RLH/Jumlah Total Rumah Layak Huni. Pada Tahun 2023 Jumlah Rumah Layak Huni bagi korban Bencana oleh DPRKPP Kabupaten Ende adalah sebanyak 46.550 Unit dari Total Rumah Layak Huni sebanyak 64.628 unit (72,03%).

2. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula luas permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh seluruhnya. Sampai dengan Tahun 2022 dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 14,11 Ha atau 11,92% dari total luas permukiman kumuh 118,41 Ha. Tahun 2023, belum dilakukan penanganan kawasan kumuh dikarenakan keterbatasan dana sehingga total kawasan kumuh tertangani masih sama dengan tahun sebelumnya yakni 14,11 Ha (11,92%).

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Formula indikator yang digunakan jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah seluruhnya pada tahun n. Pada tahun 2023, jumlah rumah tinggal bersanitasi 33.614 buah dari total jumlah seluruh rumah 64.628 (52,01%).

4. Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah seluruhnya pada tahun n. Pada tahun 2023, jumlah rumah layak huni 46.529 buah dari total jumlah seluruh rumah 64.628 (72%). Peningkatan jumlah.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa

Pada tahun 2023 ditargetkan Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilakukan sebanyak 10 Kegiatan yang menghasilkan 8 Dokumen diantaranya:

1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) Tahun 2023
2. Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2023
3. Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan
4. Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2023
5. Kegiatan Bela Negara
6. Kegiatan UP2WK
7. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Kegiatan Paskibraka

Namun karena keterbatasan anggaran, makanya realisasi untuk kegiatan tersebut hanya mencapai 6 kegiatan atau 62,50 % yaitu Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni), Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus, Kegiatan Apel Kesadaran 17 bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember, Kegiatan Paskibraka, Kegiatan Bela Negara.

2) Jumlah Parpol yang dibina

Jumlah partai politik yang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu tahun 2019 – 2024 . Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

3) Presentase Ormas yang dibina

Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2023 sudah terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain.jumlah Ormas yang dibina sebanyak 30 ormas sehingga capaiannya sebesar 38,96%

4) Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pembinaan Kemasyarakatan melalui Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melakukan penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Selama tahun 2023 ada 3 konflik sosial yang terjadi di tahun 2023 adalah :

1. Konflik Perkelahian antara pemuda di Desa Kotabaru Kecamatan Kotabaru
2. Konflik Hak Ulayat tanah di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur
3. Konflik Tawuran antar pelajar antara siswa SMK 1 dan siswa SMK 2 Ende di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur

Dari ketiga konflik yang terjadi ada 2 konflik yang sudah diselesaikan yaitu konflik Hak ulayat tanah di Desa Detupera dan Konflik Tawuran antar pelajar di kecamatan Ende Timur. Sehingga Prosentase untuk Cakupan pembinaan Agama, kemasyarakatan dan ekonomi adalah sebesar 66,67%.

5) Persentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Pada tahun 2022 target Porsentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 100% . capaian terhadap indikator ini adalah 166,67% dimana jumlah deteksi dini sebanyak 5 kasus dibagi Jumlah Penanganan konflik sosial sebanyak 3 kasus.

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Layanan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan indikator Cakupan Kegiatan Antisipasi Penanganan Konflik Sosial, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), Menurunnya Kasus Konflik Sosial Sosial yang Terjadi, Cakupan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Presentase Penegakan Perda, Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK).

1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Target Capaian Kinerja yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dimana sebanyak 7 kasus pelanggaran K3 yang tertangani dari 7 Kasus Pelanggaran K3 yang terjadi.

2) Persentase Pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar

Pada tahun 2023 Jumlah Kasus di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani sebanyak 13 kasus dari 13 kasus kebakaran dalam jangkauan waktu WMK sehingga capaiannya 100 % .

3) Presentase Penegakan Perda

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan sebesar 100% dimana sebanyak 3 kasus pelanggaran perda dapat diselesaikan.

4) Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK)

Pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100 % dimana dalam penanganan masalah kebakaran yang terjadi dilakukan secara cepat dan tepat dengan durasi waktu tanggap dibawah 15 menit..

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung

tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu; "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana

Pada tahun 2023 target Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana sebesar 30,57%. Capaian terhadap indikator ini adalah 50,87 % dimana Jumlah Desa Siaga Bencana yang aktif pada tahun 2023 sebanyak 88 Desa/Kelurahan dari 173 Desa Rawan Bencana di Kabupaten Ende.

6. Sosial

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Sosial dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu ; "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

Pada tahun 2023 jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 137 jiwa (Pendamping PKH 74 jiwa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 21 orang dan Taruna Siaga Bencana 42 orang) semuanya diberdayakan sehingga capaiannya 100%.

2) Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani/diberdayakan

Pada tahun 2023 jumlah PPKS yang tertangani sebanyak 18.897 jiwa dengan total PPKS sebanyak 35.920 jiwa sehingga realisasi sebesar 52,61 %. Penurunan jumlah jiwa PPKS yang tertangani disebabkan bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN (Kementerian Sosial) sudah dialihkan ke Badan Pangan Nasional (Bappanas) dan berkurangnya data kemiskinan melalui Verifikasi dan Validasi Data DTKS Desa/Kelurahan (Aplikasi SIKS NG Desa/Kelurahan). Permasalahan yang dialami pada urusan Sosial di Kabupaten Ende adalah masih banyak Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdaftar dalam DTKS belum terintervensi bantuan sosial.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Tenaga Kerja** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Pada Tahun 2023 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi belum mencapai target 54,39 %. dengan realisasinya 52,98 % . Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar sebanyak 168 orang sedangkan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 89 orang.

2. Meningkatkan kesempatan Kerja

Pada tahun 2023 di targetkan 82,51 % dengan realisasi belum mencapai target sebesar 52,98% dikarenakan ada Pencari Kerja yang melakukan pendaftaran untuk di data secara terdaftar sebanyak 137 orang secara online. Data pencari kerja tersebut tidak semua mereka datang untuk melaporkan diri sebagai pencari kerja yang di tempatkan sehingga yang terdaftar untuk di tempatkan yang terlapor dan tercatat adalah mencari kerja yang hendak berangkat ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah hanya 40 orang. Ada Pencari kerja yang di tempatkan yaitu Antar Kerja Antar Negara 10 orang dan Antar Kerja Antar Daerah 30 Orang sedangkan Antar Kerja Lokal tidak di ketahui karena tidak dilaporkan setelah mendapatkan pekerjaan.

3. Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan

pada tahun 2023 bisa melebihi target 81,82 %, Jumlah kasus yang dilaporkan tertulis ada 11 kasus namun dapat di selesaikan hanya 9 kasus 2 kasus diselesaikan pada tahun berikutnya karena pekerja dan pemberi kerja masih menyelesaikan kesepakatan bersama. Jumlah Kasus

ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di target 58,33 % namun pada tahun 2023 bisa melebihi target 81,82 %, Jumlah kasus yang dilaporkan tertulis ada 11 kasus namun dapat di selesaikan hanya 9 kasus 2 kasus diselesaikan pada tahun berikutnya karena pekerja dan pemberi kerja masih menyelesaikan kesepakatan bersama.

4. Jumlah Kepesertaan Program Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah pekerja yang menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan sudah mencapai target 84,27 dari target yang direncanakan 77,05%. Di mana ada sebanyak 5.375 pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari jumlah seluruh pekerja yang tercatat 6.378 orang.

5. Besaran Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi(UMP)

Besaran Perusahaan yang menerapkan Upah minimum Propinsi (UMP) adalah 60 Perusahaan dari 540 Perusahaan yang terdaftar. Indikator ini mencapai target 11,11 % dari yang di targetkan 9,60 % di tahun 2022. Walaupun belum semua perusahaan bisa menerapkan UMP namun sudah sebagian Perusahaan yang sudah bisa menerapkan UMP secara baik sesuai dengan Pendapatan yang diterima.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan Indikator Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan Data Gender, Presentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan, Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak dan Cakupan Perlindungan Khusus Anak.

1. Rasio KDRT

Pada Tahun 2023 jumlah kasus KDRT yang terlayani di Kabupaten Ende sebanyak 23 kasus dari jumlah Seluruh Rumah Tangga yang ada yaitu 143.464 jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 0,02 % Pencapaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka penurunan kasus KDRT.

2. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Pada Tahun 2023 jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang terlayani di Kabupaten Ende sebanyak 76.276 jiwa dari jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang ada yaitu 77.842 jiwa sehingga realisasi kinerja sebesar 97,99%. Pencapaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan program kesetaraan Gender dalam pembangunan guna mendukung perekonomian keluarga.

3. Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia

Jumlah Dokumen Penyajian Data Gender dan anak yang tersedia adalah sebanyak 2 Dokumen yaitu Dokumen Data Gender dan Dokumen Data Anak

4. Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan

Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap korban kekerasan adalah sebesar 100 % , atau 1 lembaga yang melaksanakan layanan terhadap korban kekerasan dari jumlah keseluruhan lembaga yang berjumlah 1 UPTD layanan terhadap korban kekerasan, yang mana layanan UPTD PPA sebanyak hanya 1 UPTD yang ada di Kabupaten Ende.

5. Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak yang aktif sebanyak 18 lembaga dari jumlah seluruhnya lembaga pemenuhan Hak Anak yaitu sebanyak 18 lembaga pemenuhan hak anak. Dari Jumlah seluruh lembaga pemenuhan hak anak semuanya aktif dalam hal pemenuhan hak anak yang ada di Kabupaten Ende.

6. Cakupan Perlindungan Khusus Anak

Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 32 kasus dari jumlah total pengaduan kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2023 yaitu 32 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yaitu sebesar 100%.

3. Pangan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pangan** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif

Pada tahun 2023 target lumbung pangan masyarakat yang aktif sebanyak 33 unit Realisasi sebesar 31 unit sehingga Capaiannya sebesar 93,94%. Sasaran kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat adalah kegiatan yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah membangun fisik Lumbung Pangan dan desa - desa

yang mengalami Rawan Pangan Berat, Rawan Pangan Sedang dan desa – desa yang mengalami Stunting, dengan tujuan :

- Meningkatkan keberdayaan Kelompok Tani dalam pengelolaan dan pengembangan usaha lumbung pangan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan peran kelembagaan Lumbung Pangan selain berperan sebagai fungsi sosial dalam penyediaan Cadangan Pangan Masyarakat, diharapkan juga berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitar desa sasaran;
- Meningkatkan volume stok cadangan pangan dikelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupana pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan;
- Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Peningkatan jumlah Kelompok tani pengelola pemanfaatan pekarangan

Target tahun 2023 sebanyak 51 kelompok Realisasinya sebanyak 1 Kelompok sehingga capaiannya sebesar 1,96%. Pemberdayaan Kelompok Tani/ Dasa Wisma dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui Pemanfaatan Pekarangan disekitar rumah sangat dibutuhkan selain itu, dapat menunjang pendapatan kelompok tani melalui penghematan pengeluaran untuk konsumsi pangan rumah tangga, menekan perkembangan gagal tumbuh (stunting) pada anak – anak dengan meningkatnya frekuensi konsumsi sayur buah dan protein hewani.

3. Penanganan Desa/Kelurahan Rawan Pangan

Target tahun 2023 sebanyak 50 desa/kelurahan Realisasi 70 desa sehingga capaiannya 140 %. Dalam pengambilan data desa/kelurahan yang rawan pangan oleh petugas / staf pengambil data yang bertugas ke lapangan atau desa sasaran, juga diambil data pada desa / kelurahan yang dilewati pada saat menuju desa sasaran, sehingga dari target 50 desa / kelurahan sasaran data yang terkumpul dari 70 desa / kelurahan. Tersedianya data Laporan Pemantauan Situasi Pangan masyarakat Kabupaten Ende Tahun 2023, yang memuat kondisi desa/kelurahan yang terindikasi Rawan Berat (RB), sebanyak 71 desa, Rawan Ringan (RR) sebanyak 30 Desa, Rawan Sedang (RS) sebanyak 46 desa dan Tidak Rawan (TR) sebanyak 131 desa.

4. Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Tahun 2023 Target Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 76 % realisasinya sebesar 93,75%. Kegiatan yang dilakukan berupa pengawasan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan baik di pasar maupun di petani, yakni melakukan pemeriksaan uji cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit dengan jumlah sampel sebanyak 80 sampel sayuran dari target total sampel yang wajib diuji sebanyak 180 sampel sehingga realisasi indikator pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku sayuran dari hasil uji cepat tersebut, sebanyak 75 sampel yang aman dan bebas residu sedangkan 5 sampel sayuran yang terpapar residu pestisida

Faktor Keberhasilan : 1. Hasil Pengujian menunjukan bahwa jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman lebih banyak daripada sampel pangan segar asal tumbuhan yang tidak aman; 2. Pelaku Usaha (Petani) telah menerapkan budidaya yang baik / Good Agriculture Practice; 3. Penggunaan pestisida oleh pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mendapat pelayanan/ penyusutan telah sesuai anjuran.

Faktor Kegagalan : Meningkatnya populasi hama sehingga frekuensi penggunaan pestisida akan meningkat dan berpengaruh pada keamanan PSAT, Masih terbatasnya sistem Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah

4. Pertanian

Capaian kinerja Program Urusan Pertanian dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1) Persentase Bidang Tanah Pemda yang Tersertifikat

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator Jumlah luas tanah PEMDA yang disertifikat dibagi Jumlah luas tanah PEMDA seluruhnya. Pada Tahun 2023 luas tanah pemda yang disertifikat sebesar 2.115.376 m² (20,59%) dari total luas tanah PEMDA seluruhnya

sebesar 10.273.760 m². Kondisi ini masih kurang dari target yang ditetapkan sebesar 78,21%. Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023 pada perubahan RPJMD yaitu: $(20,59/78,21) \times 100\% = 26,33\%$.

5. Lingkungan Hidup

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Lingkungan Hidup** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Keempat yaitu: "Membangun, Manata dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

- 1) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH
- 2) Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani
- 3) Persentase B3 dan Limbah B3 yang ditangani
- 4) Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
- 5) Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten
- 6) Persentase lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH
- 7) Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup
- 8) Persentase Pengurangan Sampah
- 9) Persentase Penanganan Sampah

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Persentase Penduduk berKartu Keluarga

Pada Tahun 2023 target Persentase Penduduk berKartu Keluarga 43,97%, capaian kinerja sebesar 81,05% atau sebanyak 75.754 orang yang telah memiliki KK (kartu Keluarga) dari 93.471 kepala keluarga pada tahun 2023.

2. Persentase Penduduk ber KTP-el

Pada Tahun 2023 target Persentase Penduduk ber KTP-el sebesar 99,30% , capaian kinerja sebesar 99,30% atau sebanyak 207.331 Orang yang telah memiliki KTP dari 208.792 orang Yang wajib memiliki KTP Elektronik pada tahun 2023.

3. Persentase anak memiliki KIA

Pada Tahun 2023 target Persentase anak memiliki KIA sebesar 68,58% , capaian kinerja sebesar 63,88% atau sebanyak 47.256 orang yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada Tahun 2023 dari 68.911 orang yang Wajib memiliki KIA .

4. Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran

Pada Tahun 2023 target Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran sebesar 70,58%, capaian kinerja sebesar 92,34 % atau sebanyak 73.785 orang yang telah memiliki Akta Kelahiran pada Tahun 2023 dari 79.904 orang yang berusia 0 s/d 17 tahun.

5. Cakupan ketersediaan profil kependudukan

Pada Tahun 2023 target Cakupan ketersediaan profil kependudukan sebanyak 1 dokumen capaian kinerja sebesar 100 % atau sebanyak 7 dokumen profil kependudukan yang diterbitkan.

6. Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dilaksanakan

Pada Tahun 2023 target Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) sebanyak 23 Inovasi. Jumlah Inovasi serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dilaksanakan 23 inovasi sehingga capaian Kinerja sebesar 100 % pada Tahun 2023.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditunjukan dengan 5 indikator dengan gambaran tingkat capaian sampai dengan keadaan tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penataan Desa

Pada Tahun 2023 pada Program Penataan Desa Jumlah Desa yang terealisasi Penataan Desa sebanyak 9 Desa dari target 9 Desa yang diusulkan untuk Penataan Desa sehingga capaiannya sebesar 100 %.

2. Persentase Peningkatan Kerjasama Pedesaan

Tahun 2023 pada Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Jumlah Desa yang didampingi 8 Desa dari Jumlah seluruh Desa yang melakukan kerja sama 91 Desa sehingga capaiannya sebesar 8,79 %.

3. Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi

Tahun 2023 pada Program Administrasi Pemerintah Desa Jumlah Desa yang tertib Administrasi sebanyak 150 Desa dari Jumlah 255 Desa sehingga capaiannya sebesar 58,82 %.

4. Persentase BUMDes Berkembang

Tahun 2023 pada Program Administrasi Pemerintah Desa Jumlah BUMDes berkembang sebanyak 10 BUMDes dari Jumlah 96 BUMDes terbentuk sehingga capaiannya sebesar 10,42 %.

5. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2023 pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2.905 lembaga dari Jumlah 3.706 Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sehingga capaiannya sebesar 78,39 % dari target Kinerja 80,95 %.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1) Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk

Persentase pemanfaatan kebijakan bangga kencana, diukur dengan rumusan jumlah kebijakan bangga kencana provinsi yang dilaksanakan di kabupaten dibagi dengan jumlah kebijakan bangga kencana provinsi. Target yang ditetapkan sebesar 85,5%, realisasi 100%, menunjukan bahwa semua kebijakan bangga kencana provinsi telah dilaksanakan kabupaten. kebijakan tersebut terkait distribusi alat dan obat kontrasepsi, tribina, usaha peningkatan pendapatan kelompok akseptor (UPPKA), PIK R, Pendataan Keluarga 21, Aplikasi New Siga, Komunikasi dan Informasi (KIE) dan Penanganan Stunting.

2) Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Untuk tahun 2023, persentase penggunaan KB metode kontrasepsi jangka panjang sebanyak 45,31% (6015 peserta KB MKJP dari 13276 peserta KB aktif) lebih besar dari target yang ditetapkan 45,31 %.

3) Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)

Indikator ini menunjukan perbandingan antara jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah peserta KB aktif. jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 1.790 jiwa sedangkan Jumlah akseptor KB sebanyak 13.276 jiwa sehingga Capaian kinerjanya 13,48%, masih sangat jauh dari target yang diharapkan sebesar 10,5%.

4) Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Tahun 2023 target rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah 24 tahun sedangkan realisasinya adalah 27 tahun. Masih ada anggapan tentang tidak pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan persiapan kehidupan berkeluarga dari berbagai aspek sehingga dinas berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja (PKBR)..

9. Perhubungan

Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Capaian Indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks pelayanan transportasi darat

Indeks Pelayanan Transportasi Darat dengan realisasi 46,55 % dari target 88,82%.

2. Persentase Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut.

Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Layanan Angkutan Laut dengan realisasi 100% target 100%.

10. Komunikasi dan Informasi

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika** mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1. Persentase diseminasi informasi publik

Pada Tahun 2023 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja sebesar 107,08% dari target 100%. Capaian kinerja yang diperoleh melebihi target yang sudah ditentukan, hal ini disebabkan oleh terpublikasinya hampir setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di semua channel resmi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, baik itu yang dirilis dan diupdate melalui Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Ende dengan domain : www.endekab.go.id dan beberapa platform media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yaitu Channel Youtube : "Tiwu Telu Media", Facebook dan Instragram.

2. Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik meliputi Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dilaksanakan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah telah terhubung atau terkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende sebanyak 19 (lambelas) OPD dan 16 (enambelas) bukan OPD (Kantor desa dan Fasilitas Umum). Target kinerja yang ditetapkan adalah 53 opd atau 100%, baru dapat direalisasikan sebesar 66,03%, dengan demikian capaian kinerja baru mencapai 66,03%.

3. Persentase Sistem Informasi yang Tercover NOC dan Data Center

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Sistem Informasi yang Tercover NOC dan Data Center meliputi Kegiatan Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dilaksanakan oleh Bidang Layanan Elektronik Government. Pada tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan melakukan pengembangan aplikasi dan pengelolaan website OPD Lingkup Pemkab Ende. Target kinerja pengelolaan website adalah untuk 32 (tiga puluh dua) OPD Lingkup Pemkab Ende dan sudah direalisasikan untuk ke 32 (tiga puluh dua) OPD tersebut. Sedangkan untuk pengembangan aplikasi telah dikembangkan 2 (dua) aplikasi yaitu Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Aplikasi Trans Ende (Aplikasi untuk Taksi Online) dengan demikian realisasi capaian kinerja adalah 100%.

4. Persentase Penyediaan Data Statistik Sektor

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan penyediaan data statistik sektoral lingkup Pemerintah Kabupaten Ende. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia. Target Kinerja dari Penyediaan data statistik sektoral adalah tersedianya data statistik sektoral pada OPD Lingkup Pemkab Ende sebanyak 20 (dua puluh) OPD Lingkup Pemkab Ende. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukan hasil tersedianya data statistik sektoral oleh 8 (delapan) OPD di lingkup Pemda Kabupaten Ende. Dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40,00%.

11. Koperasi dan UMKM

Layanan Urusan Koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Capaian indikator kinerja Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang

Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang adalah 125 koperasi realisasinya sebanyak 3 koperasi yang diterbitkan izin usaha simpan pinjam dan 2 kantor cabang sehingga capaiannya 0,040 %.

2. Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa

Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa adalah 15 koperasi realisasinya sebanyak 25 koperasi sehingga capaiannya 167 %.

3. Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan

Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Standar Kesehatan adalah 28 koperasi realisasinya sebanyak 28 koperasi sehingga capaiannya 100 %

4. Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Pada tahun 2023 target Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian adalah 109 orang realisasinya sebanyak 152 orang sehingga capaiannya 139 %.

5. Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan

Pada tahun 2023 target Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan adalah 14 koperasi realisasinya sebanyak 21 koperasi sehingga capaiannya 150 %.

6. Presentase UMKM yang difasilitasi dan berdayasaing

Pada tahun 2023 target UMKM yang difasilitasi dan berdayasaing adalah 22,33% . UMKM yang difasilitasi dan berdayasaing sebanyak 55 UMKM dibanding dengan UMKM yang terdata sebanyak 5.039 UMKM sehingga capaiannya 1,09 %.

12. Penanaman Modal

Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi yang mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata serta kerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

1) Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti

2) Jumlah investor baru

Untuk Indikator Kinerja Peningkatan Investor (PMDN/ PMA), capaian pada tahun 2022 sebesar 30% dari target yang telah ditetapkan. Capaian Jumlah Investor PMDN/PMA sebanyak 3 Perusahaan dari target sebanyak 10 Perusahaan (kurang dari target sebanyak 80%).

3) Persentase Jumlah Permohonan izin yang terlayani

4) Persentase pengaduan yang terselesaikan tepat waktu

5) Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten Ende

Pada tahun 2023 angka realisasi penanaman modal sebesar Rp. 537.262.834.284 atau 53.726,2834244%. Sedangkan realisasi penanaman modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.430.323.869.187, atau 243.032,3869187% Untuk nilai realisasinya tidak mengalami penurunan dari target realisasi investasi yang ditetapkan sebesar 1 Milyar tiap tahunnya sebelum perubahan indikator sasaran. Untuk capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 189.306,1034943% dari tahun 2022.

6) Persentase izin yang terselesaikan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksanakan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator ini menunjukan Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif pada tahun 2023 sebanyak 84 dibanding dengan Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan seluruhnya sebanyak 88 dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 95,45%.

2. Persentase Wirausaha Muda

Indikator ini menunjukkan Jumlah Wirausaha Muda pada tahun 2023 sebanyak 150 dibanding dengan Jumlah seluruh Wirausaha sebanyak 222 dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 67,57%. Tujuan dari indikator ini adalah membangkitkan kewirausahaan pemuda untuk melahirkan wirausaha-wirausaha muda yang mampu membuka lapangan kerja sendiri, sehingga dapat membangkitkan partisipasi pemuda dalam kegiatan wirausaha pemuda, yang berdampak pada meningkatnya prosentase pemuda yang berpartisipasi dalam wirausaha pemuda serta meningkatnya prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

3. Jumlah Atlet Yang Memperoleh Medali Dalam,Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan olahraga Pendidikan pada Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional

Indikator ini menunjukkan Jumlah Atlet yang Memperoleh Medali Dalam Kejuaraan pada tahun 2023 sebanyak 147 orang dibanding dengan Jumlah Atlet Yang Mengikuti Kejuaraan Seluruhnya sebanyak 371 orang dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 39,62%. Partisipasi atlet Kabupaten Ende dalam setiap kejuaraan yang dilaksanakan di Tingkat Propinsi seperti olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat ditandai dengan perolehan medali sbb : Olahraga Pendidikan : POPDA yang mendapat medali 20 orang, POPROV yang mendapat medali 59 orang, ETMC Lembata yang mendapat medali Juara I 25 orang, Soeratin CUP yang mendapat medali Juara II 35 orang, Kejuaraan Atletik yang mendapat medali 5 orang, Kejuaraan Karate yang mendapat medali 3 orang.

4. Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Yang Dilaksanakan

Indikator ini menunjukkan Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan dibanding dengan rencana Kegiatan Kepramukaan sebanyak 12 kegiatan dikalikan dengan seratus persen. Capaian terhadap indikator ini sebesar 16,67%. Pelaksanaan kegiatan pramuka seperti Jambore Nasional dan Jambore Daerah dapat meningkatkan kualitas diri dan keterampilan generasi muda Indonesia.

14. Persandian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Persandian mendukung pencapaian sasaran kinerja Misi Kelima yaitu: Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Persentase pengamanan data dan informasi daerah

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi. Target Kinerja dari Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi adalah 4 (empat) produk hukum. Dari target 4 (empat) produk hukum tersebut telah dihasilkan 1 (satu) produk hukum yaitu SK Bupati Ende Nomor : 81 / KEP / HK / 2023 Tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, dan Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi tentang Peran PPID Utama dan PPID Pembantu ke semua OPD Lingkup Pemkab Ende. Dari target 4 (empat) Produk Hukum tersebut telah terealisasi 1 (satu) Produk Hukum, sehingga realisasi dari target capaian kinerja tersebut adalah 25%.

15. Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukkan capaian yang cukup baik. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Persentase Pembinaan Perpustakaan Daerah, Kelurahan dan Desa

Tahun 2023 Target Persentase Pembinaan Perpustakaan Daerah, Kelurahan dan Desa sebesar 90% realisasi sebesar 37,36% dimana Jumlah Perpustakaan yang dibina sebanyak 89.478 dari jumlah perpustakaan yang ada sebanyak 239.471 perpustakaan.

2) Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat Perangkat Daerah dan Desa

Tahun 2023 Target Persentase Pengelolaan Arsip secara baku di tingkat Perangkat Daerah dan Desa sebesar 55% realisasi sebesar 44,16 % dimana Jumlah PD dan Desa yg mengelola arsip secara baku sebanyak 136 Perpustakaan dari total Perangkat Daerah dan Desa sebanyak 308 Perpustakaan.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam mencapai pelaksanaan program dan

kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui capaian indikator program yang meliputi:

1) Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap

Produksi hasil Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 sebesar 11.780,213 Ton dibagi dengan Potensi Lestari Perikanan Tangkap sebesar 19.299,4 Ton (61,04%) sehingga realisasinya mengalami penurunan produksi sebesar 0,05% dari target pada Perubahan RPJMD Kab. Ende Tahun 2019-2024 sebesar 61,09 % yang berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan.

2) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi hasil Perikanan Budidaya pada Tahun 2023 sebesar 9.593 Ton (76,68%) dari target Produksi budidaya sebesar 12,35 ton, namun target realisasi capaian Target Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 sebesar 83,40% . Dimana produksi ikan budidaya tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebesar 6,62 % dari target yang ditetapkan yang berpengaruh pada produktivitas hasil budidaya.

2. Pariwisata

Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan untuk pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama Urusan Pariwisata demi mendukung tercapainya sasaran pada Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

- 1) Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kab. Ende;
- 2) Prosentase Promosi / Pemasaran Pariwisata;
- 3) Meningkatnya Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif;
- 4) Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan.

3. Pertanian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Pilihan Pertanian** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga, yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan" yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya

a. Padi Sawah

Capaian indikator produktivitas padi sawah adalah sebesar 6.48 ton/ha dari target 7,02 ton per/ha. Tidak tercapainya produktivitas ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu : adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang sehingga debit air menurun, Minimnya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani sawah, untuk diketahui bantuan benih hanya bersumber dari APBN untuk 760 hektar dari total luas tanam seluas 6.100,22 hektar, sekitar 5.340,22 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri, Berkurangnya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 7.871 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 6.100,22 hektar ada selisi 1.770,78 hektar yang tidak dilakukan penanaman. Sebagian besar bantuan Sarana dan Prasarana budidaya komoditi tanaman padi bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2023.

b. Padi Ladang

Capaian indikator kinerja produktivitas padi ladang adalah 3,01 ton/ha dari target 3,02 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas padi ladang pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,01 ton/ha maka tidak terjadi peningkatan produktivitas. Tidak terjadi peningkatan target tapi produktivitas disebabkan beberapa faktor yaitu : adanya anomali iklim elnino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit. Tidak adanya bantuan benih padi unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani, dari total luas tanam seluas 2.235,70 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri atau benih lokal. Akibat dari anomali iklim (elnino) sehingga Berkurangnya luas tanam,

tahun 2022 luas tanam seluas 2.810 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 2.235,70 hektar.

c. Jangung

Capaian indikator produktivitas jagung adalah sebesar 3,89 ton/ha dari target 4,03 ton/ha atau, jika dibandingkan dengan produktivitas jagung pada tahun 2022 yang sebesar 4,01 ton/ha, maka terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,12 ton/ha. Adanya Penurunan produktivitas dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya anomali iklim el nino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober – Maret. Minimnya bantuan benih jagung unggul (benih label biru) serta pupuk pada tingkat petani, untuk diketahui bantuan benih bersumber dari APBN untuk 500 hektar dan APBD II Seluas 20 Hektar. dari total luas tanam seluas 4.825 hektar, sekitar 4.305 hektar petani tidak menggunakan benih label unggul, yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh petani sendiri. Berkurangnya luas tanam, tahun 2022 luas tanam seluas 4.825 hektar sedangkan tahun 2023 seluas 2.881,8 hektar. ada selisi 1.943,2 hektar.

d. Ubi Kayu

Capaian indikator produktivitas ubi kayu sebesar 25.47 ton/ha dari target 26.00 ton/ha atau tidak mencapai target dengan selisi sebesar 0.53 ton/ha. Adanya penurunan target kinerja produktivitas tersebut disebabkan oleh: adanya anomali iklim el nino yaitu memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum yang menyebabkan kemarau panjang / curah hujan sedikit pada musim tanam Oktober – Maret. Minimnya bantuan bibit ubi yang unggul, bibit ubi kayu selama ini yang diusahakan oleh petani adalah bibit lokal yang dihasilkan secara turun temurun karena tidak ada intervensi anggaran untuk pemulihan bibit tanaman ubi kayu di kabupaten Ende. Dominan ubi kayu yaitu ubi kayu nuabosi yang didominasi ubi terigu sebagai ubi unggul sedangkan ada juga ubi kayu tana ai dan thoko Reko yang tersebar di kawasan Nuabosi. Untuk luas tanam ubi kayu di Kecamatan Ende seluas 128 hektar.

e. Ubi Jalar

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 8,91 ton/ha dari target 10,40 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas ubi jalar pada tahun 2022 sebesar 10,00 ton/ha, maka produktivitas mengalami penurunan di tahun 2023. Tidak tercapai target ini disebabkan hampir sama dengan komoditi ubi kayu. Luas tanam terbesar ada di Kecamatan Kelimutu yaitu seluas 27 hektar.

f. Kacang Kedelai

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1.50 ton/ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang kedelai pada tahun 2021 sebesar 1,70 ton/ha. minimnya produksi pada tahun 2022 disebabkan karena selama tahun 2022 jumlah tanam hanya 2 hektar, hal ini disebabkan karena tidak adanya bantuan benih baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II serta minat petani untuk menanam kedelai masih rendah.

g. Kacang Tanah

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1,39 ton/ ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang tanah pada tahun 2022 sebesar 1,39 ton/ha, maka tidak ada kenaikan atau penurunan produktivitas. Belum Tercapainya target produktivitas kacang tanah sangat dipengaruhi oleh penggunaan dan dukungan sarana produksi. Selama ini untuk komoditi kacang tanah tidak ada intervensi dari Pemerintah, Petani melakukan budidaya kacang tanah secara mandiri dengan di damping oleh PPL.

h. Kacang Hijau

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 1,54 ton/ ha dari target 1,70 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas kacang hijau pada tahun 2022 sebesar 1,70 ton/ha, maka terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,16 Ton/Ha. Tidak Tercapainya target produksi kacang hijau sangat dipengaruhi oleh kualitas benih dan ketersediaan air, selama ini pertanaman kacang hijau dilakukan secara mandiri oleh petani tanpa adanya intervensi dari Pemerintah.

i. Sorghum

Capaian indikator kinerja sorghum adalah sebesar 0,54 ton/ ha dari target 2.10 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produktivitas sorghum pada tahun 2022 sebesar 1.98 ton/ha maka ada Penurunan produktivitas sebesar 1,44 ton/ha. Tidak Tercapainya target produksi sorghum sangat dipengaruhi pada saat proses budidaya sorghum terutama pemilihan varietas dan proses panen dimana minimnya alat prosesing yang ada ditingkat petani sehingga kehilangan bulir sorghum cukup tinggi pada saat panen, hal ini dilihat dari menurunnya produktivitas sorghum, serta factor iklim yang tidak menentu dan penggunaan bibit lokal. 2 kecamatan terbesar yang masih membudidaya sorghum yaitu Kecamatan Lepembusu Kelisoke dan kotabaru seluas 35 Hektar.

2) Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura

a. Cabe Rawit

Capaian indikator komoditi cabe rawit yaitu produktivitas sebesar 1,40 ton/ha dari target peningkatan produktivitas per tahun sebesar 1,39 ton/ha atau meningkat 0.01% .

b. Cabe Besar

Capaian indikator komoditi Cabe Besar tahun 2023 yaitu produktivitas sebesar 1,73 ton/ha dari target produktivitas tahun 2023 sebesar 1,59 ton/ha, meningkat 0.14% dari target yang ditetapkan.

c. Bawang Merah

Capaian indikator Komoditi Bawang Merah yaitu produktivitas sebesar 2,66 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 2,45 ton/ha atau meningkat 0,21 ton/ha dari target yang ditetapkan.

d. Bawang Putih

Capaian indikator Komoditi Bawang Putih yaitu produktivitas sebesar 2,60 ton/ha dari target peningkatan produksi per tahun sebesar 2,29 ton/ha atau meningkat 0,31 ton/ha dari target yang ditetapkan.

e. Wortel

Capaian indikator komoditi Wortel yaitu produktivitas sebesar 0,92 ton/ha dari target ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti adanya pendampingan rutin dari PPL dilapangan untuk budidaya wortel ditingkat kelompok tani / petani.

f. Kentang

Capaian indikator komoditi Kentang produktivitas sebesar 9,74 ton/ha dari target tahun 2023 sebesar 8,92 ton/ha atau meningkat 0,82 ton/ha.

g. Kubis/Kol

Capaian indikator komoditi Kubis/Kol tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 1,65 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,49 ton/ha atau meningkat 0,16 ton/ha.

h. Petsai/Sawi

Capaian indikator komoditi Petsai/Sawi tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 1,83 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,70 ton/ha atau meningkat 0,13 ton/ha dari target yang ditetapkan.

i. Tomat

Capaian indikator komoditi Tomat tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 2,58 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,55 ton/ha, atau meningkat 0,03 ton/ha dari target yang ditetapkan.

j. Pisang

Capaian indikator komoditi Pisang tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 8,56 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,55 ton/ha, atau meningkat 0,01 ton/ha dari target yang ditetapkan.

k. Mangga

Capaian indikator komoditi Mangga tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 6,99 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 6,99 ton/ha.

l. Pepaya

Capaian indikator komoditi pepaya tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 9,83 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,75 ton/ha. atau menurun 1,08 ton/ha.

m. Jahe

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini jahe tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 13,51 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 12,75 ton/ha atau menurun 0,76 ton/ha dari target yang ditetapkan.

n. Kunyit

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kunyit tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 7,70 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 7,70 ton/ha.

o. Kencur

Capaian indikator komoditi Biofarmaka dalam hal ini kencur tahun 2023 berupa produktivitas sebesar 8,15 ton/ha dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 8,15 .

3) Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (7 komoditi unggulan daerah)

a. Kelapa

Capaian indikator produksi komoditi Kelapa tahun 2023 sebesar 1,04 % dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,20% atau kurang 0,16% dari target yang ditetapkan.

b. Kakao

Capaian indikator produksi komoditi kakao tahun 2023 sebesar 0,83% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,78% atau kurang 0,95% dari target yang ditetapkan.

c. Jambu Mete

Capaian indikator produksi komoditi Jambu Mete tahun 2023 sebesar 0,26 % dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 0,80%, atau kurang 0,54% dari target yang ditetapkan.

d. Kopi

Capaian indikator produksi komoditi Kopi tahun 2023 sebesar -0,98% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 0,90% atau kurang 1,88% dari target yang ditetapkan.

e. Kemiri

Capaian indikator produksi komoditi Kemiri tahun 2023 sebesar 0,04% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,85% atau kurang 1,81% dari target yang ditetapkan.

f. Cengkeh

Capaian indikator produksi komoditi Cengkeh tahun 2023 sebesar 0,39% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,30% atau kurang 0,91% dari target yang ditetapkan. Produksi Cengkeh pada tahun 2023 sebesar 448,59 ton dan tahun 2022 sebesar 449,85 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 1,26 ton.

g. Pala

Capaian indikator produksi komoditi Cengkeh tahun 2023 sebesar -0,02% dari target RPJMD tahun 2022 sebesar 0,60% atau menurun sebesar 0,62% dari target yang ditetapkan. Produksi pala pada tahun 2023 sebesar 259,30 ton dan tahun 2021 sebesar 262,55 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 3,25 ton.

4) Meningkatnya Produksi Hasil Ternak

a. Sapi

Capaian indikator produksi daging sapi tahun 2023 sebesar 2,01% dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,50%. atau menurun sebesar 0,49 % dari target yang ditetapkan

b. Kerbau

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak kambing sebesar 0,40 % dari target sebesar 1%. Menurun sebesar 0,60% dengan produksi daging sebanyak 44.961 Kg menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebanyak 45.322 kg atau menurun 361 Kg.

c. Babi

Capaian indikator kinerja produksi daging ternak babi sebesar 2,09 % lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 2,00%, ada peningkatan dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan tingkat konsumsi daging cukup tinggi di tingkat konsumen. Untuk diketahui pada tahun 2023 tingkat konsumsi daging mencapai 693.486 kg. populasi ternak babi di kabupaten Ende sebanyak 73.665 ekor yang tersebar di 21 kecamatan, dengan populasi tertinggi ada di Kecamatan Detusoko dengan populasi ternak babi sebanyak 5.112 ekor.

d. Kambing

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak kambing sebesar 0,40 % dari target sebesar 1%. Menurun sebesar 0,60% dengan produksi daging sebanyak 44.961 Kg menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebanyak 45.322 kg atau menurun 361 Kg.

e. Ayam

Capaian indikator kinerja produksi daging untuk ternak ayam sebesar 3,16 % lebih rendah dari target yaitu 3%, atau meningkat 0,16% dengan produksi daging sebanyak 220.602 Kg, adanya peningkatan ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi daging ayam ditingkat konsumen/masyarakat.

f. Telur

Capaian indikator kinerja untuk produksi telur adalah 2,79 % , capaian ini melebihi mencapai target RPJMD Tahun 2023 sebesar 2,75% dengan produksi telur pada tahun 2023 sebanyak 277.664 Kg Peningkatan capaian indikator ini disebabkan beberapa hal antara lain tinggi konsumsi telur serta Adanya peningkatan populasi ternak ayam petelur di tingkat pengusaha ternak ayam di Kab. Ende.

b. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Perdagangan** mendukung tercapainya sasaran- sasaran Misi Ketiga yaitu: "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

- 1) Jumlah Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan
- 3) Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Distribusi Perdagangan
- 4) Jumlah Laporan Stabilisasi Harga Barang dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 5) Persentase Kegiatan Promosi Dagang Ekspor Yang difasilitasi
- 6) Terlaksananya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Urusan Perindustrian** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Ketiga yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan ", sebagai berikut:

- 1) Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri
- 2) Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 3) Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi

c. Transmigrasi

Indikator Capaian kinerja Program dan kegiatan urusan Transmigrasi adalah :

- 1) **Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)**
Pada tahun 2023 ada 1 Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang disiapkan dengan untuk menjadi pedoman penyusunan Satuan Pemukiman Baru.
- 2) **Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun/kembangkan**
Pada tahun 2023 Jumlah Kawasan transmigrasi yang dibangun/kembangkan ada 1 Lokasi di kembangkan lagi di Tugasaki. Lokasi tersebut dilakukan pendekatan untuk persiapan pemukiman baru.
- 3) **Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan**
Pada tahun 2023 ada 10 Kepala Keluarga di lokasi Kawasan transmigrasi aimuri di berikan pembinaan untuk meningkatkan usaha sesuai hasil pelatihan di tahun 2020 untuk mengembangkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat transmigrasi lokal.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Perencanaan, untuk mendukung tercapainya sasaran- sasaran Misi Kelima yaitu : "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahun 2023 target Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah 100 % realisasi capaiannya sebesar 96,71%. Pencapaian indikator ini menggambarkan capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari beberapa kegiatan yang mendukung yakni Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan

Pencapaian indikator ini menggambarkan ketersediaan data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan yaitu tidak dilakukannya penelitian karena keterbatasan anggaran sehingga capaiannya 0 %.

3) Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2023 target Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 100 % realisasi capaiannya sebesar 96,69%. Pencapaian indikator ini menggambarkan capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dari beberapa kegiatan yang mendukung yakni Koordinasi Perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2) Urusan Administrasi Pemerintahan, Keuangan, Pengawasan, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi: Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Pengawasan, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1) Persentase Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan

Target Persentase Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar 75%. Jumlah Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 4 sub kegiatan dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 8 sub kegiatan, sehingga capaian indikatornya sebanyak 50%. Adapun alasan mendasar sehingga tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2023.

2) Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD

Target Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tahun 2023 sebesar 100%. Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang Dibahas dan Disetujui Bersama Tahun 2023 sebanyak 6 dokumen dibagi dengan Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang seharusnya Dibahas dan Disetujui sebanyak 6 dokumen, sehingga capaian indikatornya sebanyak 100% sesuai target.

3) Persentase ranperda dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang dibahas

Pada Tahun 2023 Target Persentase Ranperda dalam propemperda yang dibahas sebesar 60%. Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Dibahas pada Tahun 2023 sebanyak 7 perda dibagi dengan Jumlah Raperda dalam Propemperda yang seharusnya Dibahas pada Tahun 2023 sebanyak 16 perda, sehingga capaian indikatornya 43,75%.

2. Sekretariat Daerah (Setda)

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Penunjang** untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu

Indikator ini diukur berdasarkan penyerahan LPPD Pemerintah Kabupaten Ende yang dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2023 LPPD Pemerintah Kabupaten Ende telah dikirimkan pada bulan Maret 2023 sehingga capaian kinerja atas indikator ini memenuhi target yang ditetapkan.

2) Persentase kerjasama yang aktif

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perjanjian kerja sama yang diselenggarakan dengan jumlah perjanjian kerja sama yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah perjanjian kerja sama yang diselenggarakan sebanyak 13 PKS sedangkan jumlah perjanjian kerja sama yang direncanakan sebanyak 20 PKS dengan target sebesar

100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 65% dengan capaian kinerja sebesar 65%.

- 3) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dihasilkan dengan jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dihasilkan sebanyak 91 dokumen sedangkan jumlah dokumen dan laporan koordinasi bidang fasilitasi bina mental, kesejahteraan sosial dan masyarakat yang direncanakan sebanyak 91 dokumen dengan target sebesar 100%. Indikator ini mencapai target dengan kata lain, terealisasi secara keseluruhan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) **Persentase ranperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 5 Perda sedangkan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan sebanyak 7 Ranperda dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 71,43% dengan capaian kinerja sebesar 71,43%. Capaian atas indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu faktor penghambat adalah dukungan dari Perangkat Daerah penginisiasi dan koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait baik instansi vertikal (pusat) maupun dengan Perangkat Daerah lainnya.
- 5) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang dihasilkan dengan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang dihasilkan sebanyak 24 laporan sedangkan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik pembangunan yang direncanakan juga sebanyak 24 laporan dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.
- 6) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dihasilkan dengan jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang dihasilkan sebanyak 16 dokumen sedangkan jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan monitoring BUMD, BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang direncanakan juga sebanyak 16 dokumen dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.
- 7) **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang SDA**
Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang dihasilkan dengan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang direncanakan. Pada tahun 2022 jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen sedangkan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan bidang SDA yang direncanakan juga sebanyak 1 dokumen dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.
- 8) **Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik**
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam aplikasi SPSE dengan jumlah OPD yang wajib menginput dan mengumumkan RUP dalam aplikasi SPSE. Pada tahun

2023 berdasarkan data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende jumlah OPD yang menginput dan mengumumkan RUP dalam aplikasi SPSE sejumlah 52 OPD dari target sejumlah 54 OPD. Sehingga realisasi kinerja atas indikator ini sebesar 96,30% dengan besaran capaian kinerja sebesar 96,30%.

9) **Indeks Tata Kelola Pengadaan**

Nilai berupa bobot pada indikator ini diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian oleh LKPP besaran Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk Pemerintah Kabupaten Ende sebesar 32,44 dengan kategori "Kurang". Capaian indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Rendahnya hasil penilaian oleh LKPP dikarenakan rendahnya nilai e-purchasing (katalog elektronik) dan ketersediaan SDM UKPBJ (Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) yang masih jauh dari target yang ditentukan oleh LKPP-RI.

10) **Presentase Capaian Kinerja bidang Administrasi Umum serta layanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda)**

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah capaian realisasi kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang direncanakan. Pada tahun 2023 jumlah capaian realisasi kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan dengan jumlah kegiatan administrasi umum dan pelayanan kedinasan KDH, WKDH, dan Sekda yang direncanakan sebanyak 22 kegiatan dengan target sebesar 100%. Sehingga realisasi atas indikator ini diperoleh sebesar 100% dengan capaian kinerja yang memenuhi target sebesar 100%.

3. **Inspektorat**

1) **Presentase Tindaklanjuti terhadap Rekomendasi Temuan BPK**

Pada Tahun 2023 Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sebanyak 593 temuan dari Jumlah Rekomendasi BPK sebanyak 957 temuan sehingga capaian indikatornya sebesar 61,96% sudah mencapai target dari RPJMD Perubahan sebesar 36,76%.

2) **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP**

Pada Tahun 2023 Jumlah Rekomendasi APIP Yang Ditindaklanjuti sebanyak 1689 rekomendasi dari Jumlah Rekomendasi APIP sebanyak 2874 rekomendasi sehingga capaian indikator ini sebesar 58,77% belum mencapai target dari RPJMD Perubahan sebesar 100%.

Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja di tahun 2021			
			Target	Realisasi		
				Formula	Angka	%
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	Persen	100%	Jumlah Rekomendasi BPK Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Rekomendasi BPK	593/957x 100%	61,96%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan APIP	Persen	100%	Jumlah Rekomendasi APIP Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Rekomendasi APIP	1689/2874x100%	58,77%

4. **Badan Pendapatan Daerah**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Keuangan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi ketiga, yaitu : "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi:

1) **Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD**

Target Presentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2023 dengan Target Kinerja 32 % dengan Realisasi 25,37 % dimana Capaian Kinerja diperoleh dari Perbandingan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Target Kinerja sehingga

Capaian Kinerja pada Tahun 2022 dengan nilai 79,28 % Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende secara makro pada tahun 2023 menetapkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.672.842.400 dengan realisasi Rp. 77.432.038.029,33 atau 91,45 %. Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah diperoleh dari Presentase Pendapatan Dari Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD, dimana Tahun 2023 Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 17.458.041.828,86 dengan Target sebesar Rp. 34.158.224.500 dan Realisasi Retribusi Daerah Rp. 4.023.416.163 dengan Target sebesar Rp. 6.515.400.000. Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.481.457.991,86. dibandingkan dengan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.672.842.400 maka capaian kinerja adalah 25,37 %.

5. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Keuangan** mendukung tercapainya sasaran-sasaran kinerja Misi kelima, yaitu : "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) **Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan APBD**

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja penyusunan dan penetapan APBD di lakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2) **Meningkatnya Opini BPK**

Capaian indikator meningkatnya opini BPK pada tahun 2023 target dan capaian realisasinya yaitu WTP, sedangkan untuk tahun 2023 targetnya WTP dan capaian realisasinya tidak ada karena belum di audit oleh BPK.

3) **Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**

Pada tahun 2023 capaian indikator penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah tepat waktu karena penyampaian dokumen RKBMD pengadaan disampaikan ke pengguna barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni dan di tahun 2023 dokumen RKBMD dari SKPD dilaporkan pada minggu kedua bulan Juni.

6. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja utama **Fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia** mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima yaitu : "Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat", yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

1) **Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi**

Tahun 2023 target untuk indikator ini sebesar 9,3%. Jumlah ASN yang mengikuti diklat sebanyak 474 dari Total ASN sebanyak 6.150 sehingga realisasinya sebesar 7,71%, dan capaiannya 82,87%. Indikator ini belum sampai pada target yang diharapkan karena pada tahun 2023 jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan dasar, diklat teknis fungsional dan uji kompetensi tidak banyak jumlahnya.

2) **Persentase Pelayanan Kepegawaian**

Target indikator Persentase Pelayanan kepegawaian tahun 2023 sebesar 80,2%. Jumlah pelayanan kepegawaian kepada ASN sebanyak 6.150 dari total ASN pada akhir tahun 2023 sebanyak 6.150. Sehingga realisasinya sebesar 100%, dan capaiannya 124,69%. Pada tahun 2023 selain pelayanan kepegawaian rutin, juga ada kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi data ASN yang menyebabkan seluruh ASN terlayani terkait pemutakhiran data. Hal ini menyebabkan persentase pelayanan kepegawaian sebesar 100%.

2.1.4. **Aspek Daya Saing Daerah**

2.1.4.1. **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

a. **Tingkat Konsumsi Rumah Tangga**

Persentase pengeluaran makanan dari suatu rumah tangga terhadap pengeluaran total mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi persentasenya maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Data rata-rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode Tahun 2017-

2023 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 62,39% pada Tahun 2017 menjadi 53,89% pada Tahun 2023. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran untuk kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari 37,61% menjadi 46,11% dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat.

Tabel 2.31. Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2023

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Seluruh Pengeluaran
2009	188.771 (61,35%)	118.938 (38,65%)	307.709
2010	212.714 (61,33%)	134.139 (38,67%)	346.853
2011	231.248 (59,99 %)	154.223 (40,01 %)	385.471
2012	295.873 (56,94 %)	223.715 (43,06 %)	519.588
2013	216.823 (57,91 %)	216.823 (42,09 %)	515.147
2014	327.976 (56,99 %)	247.544 (43,01 %)	575.520
2015	338.518 (57,67 %)	248.472 (42,33%)	586.990
2016	352.019 (56,63 %)	269.533 (43,36%)	621.533
2017	436.895 (62,39 %)	263.331 (37,61 %)	700.226
2018	429.670 (59,44%)	293.210 (40,56%)	722.880
2019	423.685 (58,84%)	296.403 (41,16%)	720.088
2020	468.612 (54,28%)	394.683 (45,72%)	863.295
2021	501.016 (55,53%)	401.293 (44,47%)	902.309
2022	560.519 (55,58%)	447.930 (44,42%)	1.008.449
2023	604.521 (53,89%)	517.312 (46,11%)	1.121.834

Sumber: Susenas 2009-2023 PDRB

a. Potensi Ekonomi Kabupaten Ende

Menggunakan empat metode analisis yakni Analisis *Location Qoutient* (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Shift Share*, dan Analisis Tipologi Klassen. Hasilnya akan dibandingkan antara keempat metode analisis tersebut untuk menunjukan lapangan usaha apa saja yang menjadi keunggulan maupun potensial di Kabupaten Ende.

- Analisis LQ

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah referensi. Dalam analisis ini wilayah referensi yang digunakan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Analisis LQ dilakukan terhadap dua variabel, yaitu analisis terhadap jumlah usaha dan analisis terhadap jumlah tenaga kerja. Berdasarkan jumlah usaha diperoleh beberapa kategori lapangan usaha potensial yang dapat dilakukan di Kabupaten Ende diantaranya: Pertambangan dan Penggalian (B); Industri Pengolahan (C); Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (D); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I). Sedangkan berdasarkan analisis LQ terhadap jumlah tenaga kerja dihasilkan kategori lapangan usaha potensial antara lain: kategori Pertambangan dan Penggalian (B); Industri Pengolahan (C); Pengangkutan dan Pergudangan (H); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I).

- Analisis Model Ratio Pertumbuhan

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). Hasil analisis Listing SE2016 yang dilaksanakan BPS menunjukan bahwa terdapat beberapa sektor yang berpotensi untuk Kabupaten Ende dan NTT yaitu Pengadaan Listrik dan Gas (D); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam level Kabupaten Ende namun tidak dalam konteks NTT antara lain: Industri Pengolahan (C); Pengangkutan dan Pergudangan (H); Jasa Perusahaan (M,N) dan Pendidikan (P).

- Analisis Shift Share

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori lapangan

a. Sarana Transportasi

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Guna mendukung transportasi darat, di kabupaten Ende telah dibangun jalan sepanjang 1.453,9 km yang terdiri dari jalan Negara sepanjang 130,30 km, jalan provinsi 160,30 km, jalan kabupaten 824,60 km dan jalan poros desa sepanjang 338,70 km.

Tabel 2.33 Kondisi Jalan dan Alat Transportasi di Kabupaten Ende

Uraian	2020	2021	2022
Kondisi Jalan (km)			
Baik	291,33	328,31	342,80
Sedang	5,90	82,95	62,50
Rusak	21,72	41,01	38,07
Rusak Berat	496,05	362,73	371,63
Kendaraan (Unit)			
Mobil Penumpang	11.189	11.325	11.485
Mobil Barang	3.120	3.270	3.451
Mobil Bus	203	207	212
Kendaraan Khusus	52	52	53
Sepeda Motor	54.955	56.411	58.590

Sumber: Ende Dalam Angka 2021-2023

Bila dilihat dari sisi alat angkutan, angkutan darat masih didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah pada Tahun 2021 sebanyak 56.411 sepeda motor yang terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

b. Sarana Telekomunikasi

Data Susenas menunjukkan peningkatan penggunaan alat komunikasi tertinggil pada telepon seluler sejalan dengan penggunaan telepon rumah yang semakin berkurang. Masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan telepon seluler dari sisi kepraktisan, dapat dibawa ke mana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu, telepon seluler memiliki beragam fungsi dan dapat melakukan berbagai tugas (multitasking) seperti untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, gambar atau foto, video atau film, GPS, serta dilengkapi berbagai fitur lain yang menarik.

Pada tahun 2021, sebanyak 81,24 persen penduduk di Kabupaten Ende menggunakan telepon seluler sedangkan sisanya tidak menggunakan. Namun dari angka tersebut, hanya terdapat sebanyak 46,31 persen dari total pengguna telepon seluler yang menggunakan telepon seluler milik sendiri. Sisanya yaitu sebanyak 53,69 persen tidak memiliki telepon seluler atau meminjam orang lain untuk sekadar bermain game atau mencari informasi.

Selengkapnya banyaknya penduduk di Kabupaten Ende menurut kepemilikan telepon seluler sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

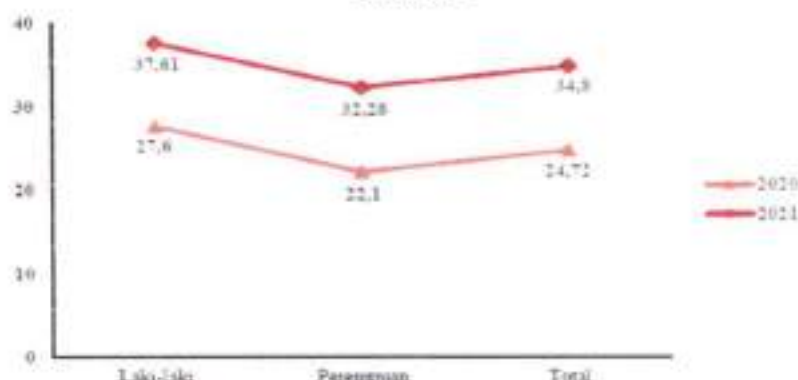
Tabel 2.34 Persentase Penduduk Menurut Penggunaan dan Kepemilikan Telpn Selular Tahun 2021

No	Kepemilikan SaranaKomunikasi	2021
1	Menggunakan Telpn Selular	81,24
2	• Memiliki Telepon Selular	46,31
3	• Tidak Memiliki Telepon Selular	53,69
4	Tidak Menggunakan Telpn Selular	18,76

Sumber data: BPS, Inkesra Kabupaten Ende Tahun 2021 (Susenas 2021)

Persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet meningkat hingga sepuluh persen, dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 24,72 persen. Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang mengakses internet pada tahun 2021 sebanyak 37,61 persen sedangkan penduduk perempuan sebanyak 32,28 persen.

Grafik 2. 1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021



Sumber: BPS, Susenas 2020-2021.

c. Perbankan

Perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2013-2015 mengalami peningkatan jumlah simpanan. Tabungan menyumbang jumlah tertinggi dari total dana bank yang tersimpan pada Tahun 2015 dengan jumlah 371.379,3 miliar rupiah, selanjutnya simpanan berjangka sebanyak 88.776,1 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari Tahun 2014. Dana Giro yang disimpan di bank pada Tahun 2015 mencapai 67.033,9 miliar rupiah meningkat dari 49.206,9 miliar rupiah pada Tahun 2014. Sementara itu, posisi tabungan ONH pada tahun 2015 sebanyak 2.774,6 juta rupiah, masih sama dengan Tahun 2014.



Posisi pinjaman yang diberikan beberapa Bank di Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2013- 2015 terus meningkat. Pada tahun 2013 posisi pinjaman bank sebanyak 479.686 miliar meningkat menjadi 527.234 miliar rupiah pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 668.652 miliar. Dilihat menurut sektor ekonomi, posisi pinjaman, yaitu: pertanian (0,18%), pertambangan (0,03) industri (0,69%), perdagangan (29,24%), dan lain-lain (69,86%).

d. Jumlah Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang teridentifikasi sebanyak 13 perusahaan, yaitu: 1) PT. Alfa Mart yang berlokasi di beberapa wilayah di Kabupaten Ende dengan nilai investasi masing-masing >Rp.500.000.000,-; 2) PT. Krisna Pratama Teknik dengan nilai investasi sebesar ± Rp.4,1 milyar;3) Toko Kembang dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 2 milyar; 4) Toko Gloria dengan nilai investasi sebesar ± Rp.4 milyar; 5) PT.Nusa Bunga dengan nilai investasi sebesar ±Rp.1,3 Milyar; 6) PT. Beta Tirta dengan nilai investasi sebesar ± Rp.900 juta; 7) PT. Gempar Cahaya Perkasa dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 800 juta; 8) PT. Firma Diva dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 2,7 milyar; 9) CV. Rahmat Raya dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 550 juta; 10) CV. Armando Jaya dengan nilai investasi sebesar ± Rp.1 milyar; 11) CV.Bintang Utama dengan nilai investasi sebesar ± Rp.2,3 milyar; 12) CV. Tifa Putra Mandiri dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 600 juta; dan 13) CV. Leon dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 1 Milyar.

e. Fasilitas Penginapan (Hotel)

Pada Tahun 2018 terdapat 58 usaha akomodasi di Kabupaten Ende, Sementara jumlah kamar yang tersedia 576 kamar dengan penambahan 111 kamar dari Tahun 2017, dan tempat tidur yang tersedia menjadi 939 tempat tidur yang tahun sebelumnya berjumlah 796 tempat tidur.

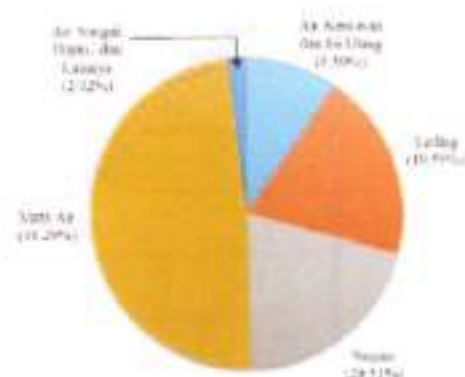
Tabel 2.35 Banyaknya Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Ende Tahun 2016-2018

[illegible]

F. Air Bersih

Di antara sekian banyak jenis sumber air, mata air merupakan sumber air yang paling banyak digunakan sebagai air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Ende. Pada tahun 2021, rumah tangga yang memenuhi keperluan air minumannya berasal dari sumber mata air sebesar 48,29 persen, diikuti sumber air leding sebesar 20,53 persen. Selain mata air dan sumur, leding juga banyak digunakan di Kabupaten Ende sebesar 19,59 persen; air kemasan dari isi ulang sebesar 9,59 persen dan persentase terkecil adalah air sungai, hujan dan lainnya sebesar 2,02 persen.

Gambar 2. 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021



Sumber data: BPS Ende, Inkesra Kab. Ende Tahun 2019

g. Listrik

Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Produksi listrik di Kabupaten Ende berfluktuasi selama periode Tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada Tahun 2019 jumlah listrik yang dibangkitkan sebesar 6.859 juta KWh, meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 79.828 juta kWh, dan kembali menurun pada Tahun 2021 menjadi 66.335 juta KWh.

Tabel 2. 36 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Ende Tahun 2019-2021

Tahun Year	Days terpapang radiasi Electricity Power (KWh)	Produk Listrik Electricity Production (MWh)	Listrik Terjual Electricity Sold (KWh)	Dipakai Sendiri for Used (KWh)	Sendi/ Bilang Shitings/ Lost (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	54.431.282	6.858.560	55.959.225	—	6.387.935
2020	63.653.810	79.628.379	63.622.814	6.487	3.265.404
2021	70.789.223	66.335.064,51	63.738.890.329	6.996.115	5.315.752.000

Sementara itu bila dilihat dari jumlah pelanggan di Kabupaten Ende, terjadi peningkatan yang signifikan selama Tahun 2017 sampai Tahun 2021, jumlah pelanggan pada PT. PLN ULP Ende pada tahun 2017 tercatat sebanyak 43.075 pelanggan, meningkat menjadi 48.545 pelanggan pada Tahun 2018, dan terus meningkat menjadi 51.403 pelanggan pada Tahun 2019, meningkat lagi menjadi 55.284 pelanggan pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 pelanggan listrik di Kabupaten Ende sedikit menurun menjadi sebanyak 54.998 pelanggan.

Tabel 2. 37 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan Subdistrik	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangapanda	2.940	2.796	2.794	2.542	2.825
Pelau Ende	1.375	1.625	1.425	1.628	1.597
Makure	2.125	1.902	1.568	1.707	1.704
Ende, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara	28.125	25.424	28.755	31.220	29.621
Nidona	-	377	986	1.063	927
Wolinara, Wolayta, Raimutu, Dhuwaki, Nidona Timur	5.046	4.668	4.706	4.738	7.382
Nidori, Lio Timur	985	1.010	1.018	1.022	1.005
Muarne	1.180	1.295	1.316	1.374	1.548
Kotabaru	-	-	-	-	-
Dhuwaki, Lijembana, Kikukur	2.838	3.532	3.541	3.546	4.436
Wewaka	1.830	2.522	3.554	4.041	4.043
Kabupaten Ende	43.075	48.545	51.403	55.284	54.998

Sumber data: BPS, Kabupaten Ende Dalam Angka 2024

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas

Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende perkara biasa dan pelanggaran. Data BPS dalam Ende Dalam Angka Tahun 2023, menunjukan bahwa pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 2.983 kasus, menurun pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.077 kasus, dan menurun drastis pada tahun 2022 menjadi sebanyak 237 kasus.

2) Demonstrasi / Unjuk Rasa

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa damai yang terjadi Pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 8 (delapan) kasus, yang dapat terdektesi dini dan difasilitasi penyelesaiannya oleh Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende.

3) Kemudahan Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan, Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor, Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pemangku kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan perijinan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi inestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dapat dilihat dari hasil pelayanan perijinan kepada masyarakat yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pelayanan perijinan yang diperoleh sebesar 100 persen, dimana dari 2.300 permohonan perijinan, semuanya terlayani.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukkan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebagian besar mempunyai ijazah tertinggi adalah Sekolah Dasar, yaitu sebesar 45,31%, diikuti yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sebesar 27,26%.

Tabel 2.38 Persentase Penduduk Kabupaten Ende 15 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019-2022

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Punya	25,00	-	-	-
2	Sekolah Dasar	27,70	50,03	47,31	45,31
3	SMP	13,51	11,92	12,10	13,19
4	SMA dan SMK	23,02	25,57	24,73	27,26
5	Diploma III/III	02,59	12,46	13,94	14,18
6	Diploma IV, Sarjana S1/S2/S3	08,15			

Sumber data: BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2020-2023

2) Tingkat Ketergantungan

Beban Ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda (0-14 tahun) dan umur tua (> 65 tahun/ golongan umur tidak produktif). Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang, Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) Sebagai indikator demografi artinya : perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila *dependency ratio* tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula, dan 2) Indikator keadaan ekonomi suatu negara artinya bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang.

Selama periode 2020-2022, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari 32,50 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 32,49 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 26,28 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 39 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2020-2022

Tahun	Ratio Beban Ketergantungan		Total
	Anak (0 – 14 Tahun	Lanjut Usia (> 65 Tahun)	
2020	25,80	6,70	32,50
2021	25,67	6,82	32,49
2022	25,55	0,74	26,28

Sumber: BPS, Ende Dalam Angka (data olahan Bappeda)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan 2023

1. Capaian Target Makro RPJMD 2019-2024

Mengacu pada target makro yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 dan kondisi capaian kinerja sampai Tahun 2023, dirumuskan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.40. Target Makro Perubahan RPJMD 2019-2024 dan Capaian sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2019	Capaian Kinerja				Target 2024
			2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	67,20	67,04	67,04	67,30	67,97	68,63
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08	-1,33	-1,33	2,13	3,09	3,87

3	Angka Kemiskinan (%)	23,18 (63,450 jiwa)	23,76 (65.220 jiwa)	23,76 (65.220 jiwa)	24,13 (66.380 jiwa)	23,00 (63.400 jiwa)	22,86 (63.100 jiwa)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,98	2,95	2,95	2,61	2,06	2,59
5	Gini Ratio (Angka)	0,304	0,341	0,341	0,298	0,306	0,275
6	Laju Inflasi (%)	5	4,98	4,98	4,98	4,96	3,27%
7	Nilai Investasi (Trilyun)	1	3,1	3,1	0,6	4,12	-
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	C	-	C	C	CC
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,44	-	95,64	95,81	95,54	88,81
10	Ratio PAD (%)	6,29	9,86	9,86	7,72	6,38	
11	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	22,29	22,13	22,44	23,21	24,83	26,47
12	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (TonCO2)	-	-	-	-	17.248.829	34,09c)
13	Prevalensi Stunting (%)	14,30	17,40	17,40	14,30	8,90	6,80

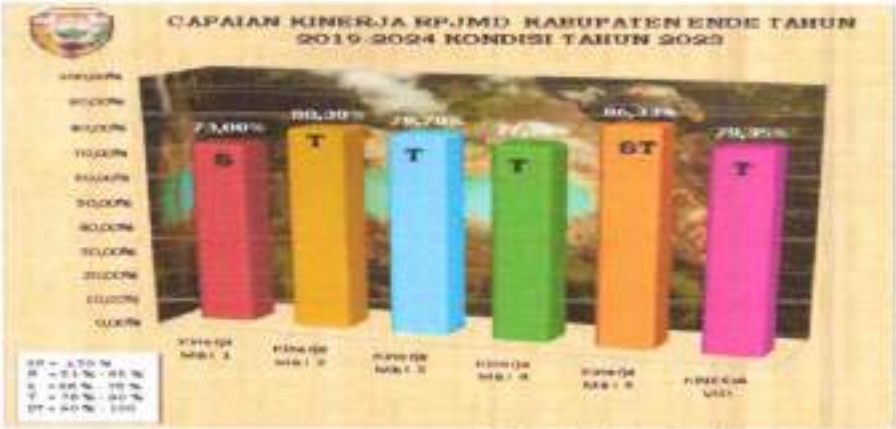
2. Capaian Pelaksanaan Program

a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2024

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Ende, yaitu: “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dengan mengemban 5 (lima) misi yang diukur dari pencapaian 273 target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian target kinerja dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Ende, sebesar 79,35% atau dalam Kategori: TINGGI, sementara untuk ringkasan capaian kinerja dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Grafik 2.2. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023)



Tabel 2.41 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2019-2024 (kondisi s/d tahun 2023)

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Visi	MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	79,35%	Tinggi	Capaian Kinerja 273 Indikator Kinerja yang ditetapkan, kondisi sampai dengan tahun 2023

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Misi 1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	73,00%	Sedang	MISI 1 : 32 Indikator Kinerja + 3 Indikator Melampaui Target + 8 Indikator Mencapai Target + 18 Indikator Belum Mencapai Target + 3 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	80,38%	Tinggi	MISI 2 : 64 Indikator Kinerja + 22 Indikator Melampaui Target + 12 Indikator Mencapai Target + 22 Indikator Belum Mencapai Target + 8 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 3	Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan	79,78%	Tinggi	MISI 3 : 82 Indikator Kinerja + 31 Indikator Melampaui Target + 12 Indikator Mencapai Target + 25 Indikator Belum Mencapai Target + 14 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 4	Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	77,28%	Tinggi	MISI 4 : 24 Indikator Kinerja + 9 Indikator Melampaui Target + 2 Indikator Mencapai Target + 7 Indikator Belum Mencapai Target + 6 Indikator Masih Jauh Dibawah Target
Misi 5	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	86,33%	Tinggi	MISI 5 : 71 Indikator Kinerja + 11 Indikator Melampaui Target + 36 Indikator Mencapai Target + 18 Indikator Belum Mencapai Target + 6 Indikator Masih Jauh Dibawah Target

b. Capaian Sasaran RPJMD 2019-2024

Capaian sasaran RPJMD 2019-2024 merupakan akumulasi hasil (*outcomes*) program/ kegiatan dan keluaran (*output*) sub kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: berdasarkan capaian masing-masing Perangkat Daerah dan masing-masing sasaran setiap misi.

Berdasarkan Perangkat Daerah diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja SANGAT RENDAH, 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja RENDAH, 7 (tujuh) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja SEDANG, 12 (dua belas) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja TINGGI dan 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja SANGAT TINGGI.

Gambaran capaian kinerja berdasarkan perangkat daerah dan sasaran selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.42. Capaian Kinerja masing-masing Nisi RPMD 2019-2024 menurut Perangkat Daerah kondisi sampai dengan Tahun 2023

VISI / MISI / SKPD		Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPMD 2019-2024										Kriteria	
		Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Masi telah dicapai target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melempai Target	% capaian kinerja		
		Program		Regulasi									
		Kultur	Organisasi	Badan	Organisasi								
"Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masyarakat yang Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan"		54	182	613	306	273	37	50	70	26	73,33%	TINGGI	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing Tinggi		5	7	14	15	32	3	18	8	8	73,00%	SEDANG
	1)	DINAS P & E	3	3	5	8	27	2	18	8	1	73,72%	SEDANG
	2)	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	1	1	5	2	1	0	1	0	0	39,32%	SANGAT RENDAH
	3)	DISPRODA	1	3	5	5	4	1	1	0	2	76,89%	TINGGI
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Tersjangkau bagi Seluruh Masyarakat		3	9	12	39	64	6	23	12	22	80,38%	TINGGI
	1)	DINKES	1	4	8	9	52	7	17	11	17	84,23%	TINGGI
	2)	RSUD	1	2	1	4	8	1	4	0	3	50,00%	RENDAH
	3)	DPMKB	1	3	3	6	4	0	1	1	2	72,42%	SEDANG
3	Percepatan Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang Kompetitif dan Berkelanjutan		8	41	54	50	82	14	25	12	33	70,78%	TINGGI
	1)	DISPAR	1	1	4	3	6	0	1	0	3	85,71%	SANGAT TINGGI
	2)	BAPENDAH	1	1	4	1	5	0	3	0	0	66,66%	TINGGI
	3)	DISKORP & URM	1	0	0	0	7	1	2	2	3	84,87%	TINGGI

Kategori / Sub / SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPMD 2015-2024										
			Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Masih Jauh di bawah target	Belum Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Kriteria
			Program		Sagukan								
			Berlin	Urusan	Berlin	Urusan							
	4)	DISPERDAGM	1	7	7	8	8	2	3	1	3	77,34%	TINGGI
	5)	DIPMPSP	1	5	8	6	6	3	1	1	2	77,72%	TINGGI
	6)	DINAS KESEHATANAN MASYARAKAT	1	4	6	6	4	1	1	0	2	73,33%	SEDANG
	7)	DINAS PERIKANAN	1	4	6	6	1	0	2	0	0	83,33%	SANGAT TINGGI
	8)	DINAS PERTANIAN	1	5	6	7	44	7	11	4	17	76,74%	TINGGI
	9)	DISTRANSAMER	1	8	7	7	8	1	2	4	1	88,48%	TINGGI
4		Membangun, Merata, dan Meningkatkan sarana dan Prasarana Pemukiman secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan	4	20	28	26	14	6	7	2	9	77,28%	TINGGI
	1)	DINAS PURN	1	7	5	9	8	1	5	0	1	91,67%	SANGAT TINGGI
	2)	DISHUB	1	2	7	4	2	1	0	1	0	65,19%	REDAH
	3)	DUH	1	7	7	8	9	3	0	1	0	73,18%	SEDANG
	4)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT	1	4	7	5	5	1	2	0	2	65,56%	SEDANG
5		Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berakuntabilitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	15	100	506	266	71	8	18	34	11	88,33%	TINGGI
	1)	DINAS/MAKAM	3	0	0	0	3	0	0	1	0	100,00%	SANGAT TINGGI

Kec / Desa / KAU			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPMD 2013-2014										
			Jumlah				Jumlah Indikator Kinerja	Materi yang dibawah target	Sesuai Mencapai Target	Mencapai Target	Melampaui Target	% capaian kinerja	Keterangan
			Program		Kegiatan								
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan							
2)	KECAMATAN	21	65	429	210	7	0	0	7	0	100,00%	SANGAT TINGGI	
3)	DISPENDU & CAPEL	1	4	4	8	6	0	1	8	5	96,88%	SANGAT TINGGI	
4)	DISKOMINFO	1	4	5	5	3	2	1	1	1	86,21%	SEDANG	
5)	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	0	1	0	2	1	0	1	0	0	71,58%	SEDANG	
6)	BAPPEDA	1	3	7	7	3	1	2	0	0	54,47%	RENDAH	
7)	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	6	3	0	2	1	0	78,86%	TINGGI	
8)	SETDA	1	2	12	8	8	0	3	5	0	94,57%	SANGAT TINGGI	
9)	BPJAD	1	1	7	6	3	0	0	3	0	0,00%	SANGAT RENDAH	
10)	INSPEKTORAT DAERAH	1	2	5	3	0	0	1	0	1	75,38%	TINGGI	
11)	BUPSIK	1	1	6	5	1	0	1	0	1	91,43%	SANGAT TINGGI	
12)	Badan Kependudukan	1	4	5	4	3	0	1	1	1	85,33%	TINGGI	
13)	SATPOL PP	1	2	5	4	3	0	8	5	0	100,00%	SANGAT TINGGI	
14)	BPBD	1	1	8	3	1	0	9	8	1	100,00%	SANGAT TINGGI	
15)	DINAS SOSIAL	1	1	7	8	0	1	2	0	0	81,82%	SANGAT TINGGI	
16)	DPMD	1	3	5	3	5	2	1	0	0	72,86%	SEDANG	
17)	DINAS PIPA	1	6	4	7	4	0	8	5	1	83,33%	TINGGI	

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Sasaran masing-masing Misi RPMD 2019-2024

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						OPD Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2019	Target Akhir RPMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi 1/2 Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI								
Sasaran	Indikator Kinerja							
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,88%	94,20%	81,20%	50,65%	55,54%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI	978	977,94	977,93	593,86	60,73%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs	817	766,41	746,61	544,97	76,82%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Literasi SD	n/a	1,91	44,42	44,62	100,45%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD	n/a	1,74	33,85	35,16	105,05%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Karakter SD	n/a	2,39	1,28	1,51	65,94%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	n/a	1,05	60,08	58,51	97,39%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	n/a	1,06	59,51	52,89	88,88%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rata-rata Kompetensi Karakter SMP	n/a	2,38	2,28	1,63	70,63%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI	110	107,53	107,53%	107,59%	100,00%	Mencapai Target	Dinas F dan K

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					OPD Penanggung Jawab	
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
	Rasio Ketermampuan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs	54	50,11	50,11%	52,85%	105,48%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104%	108,00%	109,00%	100,30%	92,02%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Seder (APS) SMP/MTs	87,00%	84,83%	85,40%	88,33%	96,75%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90,86%	98,59%	98,17%	89,39%	91,06%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	46,41%	75,70%	73,21%	66,78%	88,21%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	93,55%	96,91	96,86%	93,65%	96,68%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	79,87%	81,60	80,84%	74,23%	90,46%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	88,36%	100%	100,00%	92,38%	92,38%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0%	0,00%	0,12%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0%	0,00%	0,12%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	70,99%	60,45%	80,99%	83,74%	103,40%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	82,42%	71,81%	92,42%	92,76%	106,37%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Tenaga Pendidik SD/MI yang Mengikuti Dilat Kompetensi	14,50%	47,61%	48,98%	0,00%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					DPR Penanggung jawab	
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
	Tenaga Pendidik SMP yang Mengikuti Diklat Kompetensi	8,40%	37,18%	31,18%	0,00%	0,00%	Belum Terpenuhi Target	Dinas P dan K
	Persentase Warisan Kultural yang dilestarikan	4,23%	25,35%	18,51%	44,52%	243,15%	Mencapai Target	Dinas P dan K
	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	38,13%	78,70%	45,22%	100,00%	151,53%	Melampaui Target	Dinas P dan K
	Lakupan Legasi Budaya setiap daerah yang dilestarikan	95,24%	100,00%	100,00%	21,74%	21,74%	Belum Mencapai Target	Dinas P dan K
	Persentase Pembiayaan Perpustakaan Desa, Kel dan Desa	86,00%	100,00%	95,00%	57,56%	39,33%	Belum Mencapai Target	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
	Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,00%	40,00%	45,00%	56,51%	212,22%	Melampaui Target	Dispora
	Persentase Minusihua Muda	15,87%	63,11%	54,81%	68,47%	124,00%	Melampaui Target	Dispora
	Jumlah Atlet Yang Mempereh Medali Daerah,Olahraga Prestasi ,Olahraga Masyarakat dan olahraga Pendidikan pada Kejuriaan Tingkat Provinsi dan Nasional	50,00%	80,00%	70,00%	59,18%	84,55%	Belum Mencapai Target	Dispora
	Penyelenggaraan Pengembangan Kapabilitas Kepemudaan Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	21,43%	21,43%	Belum Terpenuhi Target	Dispora
MID 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT								
Sasaran	Indikator Kinerja							

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						DPR Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	100,00%	100,00%	86,43%	86,43%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penjangkauan Kesehatan Sitasi SD dan setingkat	100%	100,00%	100,00%	57,58%	57,58%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Keperawatan RN	77,63%	95,00%	95,00%	77,49%	83,13%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Tugas Terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%	96,15%	96,15%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja	70,00%	100,00%	95,00%	100,00%	105,20%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Jumlah Pos DKK di setiap Wilayah Puskesmas	1,00%	11,25%	9,30%	9,30%	100%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar kelompok Olahraga	50,00%	80,00%	75,00%	100,00%	133%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi (Obat, Makanan, Kosmetik)	50,00%	80,00%	75,00%	52,70%	70,27%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Rumah Tangga yang ber-P4G5	27,15	48,00%	43,72%	48,75%	111,50%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan	80,00%	100,00%	97,70%	96,75%	98,52%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						OPH Pemeranggung Jawab
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Target Realisasi (%)	Status	
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	98,26%	98,26%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Persentase Balita Gizi Buruk	0,61%	0,48%	0,46%	3,98%	11,76%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Prevalensi Balita Gizi Kurang	16,20%	14,07%	14,09%	7,39%	190,54%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Balita	42,08%	6,80%	0,10%	15,38%	90,10%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	10,50%	6,80%	0,10%	1,44%	140,02%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Persentase Desa yang Melaksanakan SWM	67,63%	93,53%	92,81%	98,57%	106,20%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat	44,20%	88,32%	84,10%	50,00%	77,76%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Sarana Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman yang Memenuhi Syarat	67,03%	100,00%	97,48%	100,00%	102,58%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Dosa/Vaksinasi Universal Child Immunization (UCI)	78,78%	100,00%	99,90%	71,94%	72,67%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Dosa/Vaksinasi Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	100,00%	100,00%	100,00%	0% (tidak ada kasus KLB)	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Pemberian dan Pemeliharaan Vaksinasi Pasifor DBO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	25,68%	38,88%	37,51%	55,16%	141,71%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					OPN Penanggung Jawab	
		Data Awal Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
	Persentase Anak Usia 1 tahun yang Diamanasi Campak Rubella	77,60%	100,00%	98,00%	80,25%	81,88%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	205,23	488,46	465,91	2562,57	548,43%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	300%	100,00%	100,00%	74,31%	74,31%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Non-Peric AFR Rate per 100.000 Penduduk	5.083,00	33,083	29,083	0,00%	0,00%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	28,00%	100,00%	88,00%	93,07%	105,76%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Angka Kejadian Malaria	0,80	0,38	0,45	2,15%	2096,94%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	17,10%	100,00%	90,00%	96,61%	107,34%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Diare yang Ditangani	40,40%	48,44%	47,11%	37,50%	68,99%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jera Berat	52,42%	100,00%	92,00%	100,00%	108,70%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,08	0,20	0,21	0,29	99,45%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Tenaga Para Medis	2,34	2,45	2,42	2,66	110,11%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	0,0098	0,01	0,01	0,09	929,99%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu per satuan Penduduk	0,0648	0,01000	0,01	0,29	3307,90%	Melampaui Target	Dinas

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						DPR Penanggung Jawab
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Tingkat Realisasi (%)	Status	
							Kesehatan
Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama	-	Ya	Ya	Ya	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Anak Balita	89,00%	100,00%	99,00%	78,13%	78,32%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	47,00%	100,00%	98,00%	54,52%	57,68%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengobatan Makenan/Minuman	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Menurunnya Kasus Kematian Ibu	146,092	18,36	36,52	0,22%	580633,00%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Kompleksi Kebidanan yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Perlindungan Perawatan di Fasilitas oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100,00%	100,00%	100,00%	73,01%	73,01%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan 64	83,52%	88,74%	87,72%	56,01%	63,83%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Nifas	95,01%	100,00%	100,00%	73,06%	73,06%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Angka Kelangkaan Hidup Bayi	10,74	2,28	3,43	11,97	38,66%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Neonatus	9,37	2,28	3,43	4,68	73,75%	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Neonatus	98,20%	100,00%	98,00%	97,19%	98,16%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						DPR Penanggung Jawab
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Tingkat Realisasi (%)	Status	
Cakupan Kunyungan Bayi	100,00%	100,00%	100,00%	95,52%	95,52%	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Neonatal Kompleksi yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	86,21%	100,00%	98,28%	96,85%	98,55%	Sesuai Mencapai Target	RSUD
Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84,57%	100,00%	87,42%	88,58%	91,51%	Belum Mencapai Target	RSUD
Bed Occupancy Rate (BOR)	68,70%	66,90%	68,30%	65,57%	69,47%	Belum Mencapai Target	RSUM
Average Length of Stay (ALOS)	3,58	4,06	3,98	3,26	81,00%	Belum Mencapai Target	RSUD
Bed Turn Over (BTO)	70,61	67,61	68,11	25,65	17,64%	Belum Mencapai Target	RSUD
Turn Over Interval (TOI)	1,61	1,50	1,50	14,43	30,53%	Belum Mencapai Target	RSUD
Gross Death Rate (GDR)	41,03	38,00	38,53	82,91	46,48%	Melampaui Target	RSUD
Net Death Rate (NDR)	33,34	30,34	31,64	51,98	40,16%	Melampaui Target	RSUD
Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	83,33%	84,50%	85,50%	100%	116,56%	Melampaui Target	DPPKB
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42,91%	46,51%	45,31%	45,31%	100%	Mencapai Target	DPPKB
Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)	30,50%	5,50%	10,50%	13,48%	0,78%	Melampaui Target	DPPKB

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						RPO Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	28	23	24	27	88,80%	Belum Mencapai Target	DPPKB
Misi 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN								
Sasaran	Indikator Kinerja							
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kab. Ende	-	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	150%	Melampaui Target	Dinas Pariwisata
	Prosentase Promosi / Pemasaran Pariwisata	100%	100%	100%	87%	86,99%	Belum Mencapai Target	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 unit	5 unit	18 unit	360%	Melampaui Target	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	172 orang	437 orang	392 orang	505 orang	143,47%	Melampaui Target	Dinas Pariwisata
	Persentase Pendapatan dan Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	28,84%	34%	32%	27,74%	86,09%	Belum Mencapai Target	Bappeda
Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Perdagangan)	Jumlah Koperasi yang Diberikan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang	121 koperasi	133 koperasi	129 koperasi	134 koperasi	103,88%	Melampaui Target	Diskop, UKM
	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	10 koperasi	20 koperasi	17 koperasi	17 koperasi	100,00%	Mencapai Target	Diskop, UKM
	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Standar Kesehatan	26 Koperasi	32 Koperasi	30 Koperasi	27 koperasi	90,00%	Belum Mencapai Target	Diskop, UKM

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						Jenis Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi 1/1 Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	66 orang	126 orang	152 orang	152 orang	139%	Mencapai Target	Dinkop, UWM
	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pembertasaan dan Perlindungan	10 Koperasi	22 Koperasi	18 Koperasi	21 Koperasi	150%	Melampaui Target	Dinkop, UWM
	Persentase UMKM yang difasilitasi dan berdaya saing	18,61%	30,56%	28,67%	1,09%	4,88%	Belum Tercapai Target	Dinkop, UWM
	Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	4.465 unit usaha	2 unit usaha	2 unit usaha	292 unit usaha	146,00%	Melampaui Target	Dinkop, UWM
	Jumlah Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Pencatatan	8 dokumen	25 dokumen	24 dokumen	217 dokumen	493%	Melampaui Target	Diperdagang
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	599 unit	636 unit	636 unit	570 unit	91%	Belum Mencapai Target	Diperdagang
	Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengalokasian Distribusi Perdagangan	13 dokumen	36 dokumen	28 dokumen	26 dokumen	100%	Mencapai Target	Diperdagang
	Jumlah Laporan Standarisasi Harga Barang dan Ketersediaan Stok Barang Keluaran Pokok dan Barang Pendag	170 laporan	495 laporan	495 laporan	356 laporan	72%	Belum Tercapai Target	Diperdagang
	Persentase Kegiatan Promosi Dagang Ekspor Yang difasilitasi	42,00%	100,00%	100,00%	1,00%	1,00%	Belum Tercapai Target	Diperdagang
	Tersedianya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	3 laporan	3 laporan	3 laporan	4 laporan	133%	Melampaui Target	Diperdagang

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						DPM Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Prosentase Realisasi (%)	Status	
	Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri	267 dokumen	49 dokumen	49 dokumen	60 dokumen	127%	Melampaui Target	Dispendag
	Jumlah Dokumen Pengendalian Lini Usaha Industri Kabupaten/Kota	6 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	8 dokumen	80%	Belum Mencapai Target	Dispendag
	Jumlah Dokumen Pengendalian Sistem Informasi	-	27 dokumen	18 dokumen	9 dokumen	100%	Belum Mencapai Target	Dispendag
Meningkatnya Investasi	Persentase lin prinsip, lin lokasi, dan lin usaha yang diindaklanjuti	-	80%	80%	8,57%	10,71%	Masih jauh di bawah Target	DPM, PPTSP
	Jumlah investor baru	-	80%	80%	30,00%	37,50%	Masih jauh di bawah Target	DPM, PPTSP
	Persentase jumlah Pemohonan izin yang beryang	-	80%	80%	100,00%	125,00%	Melampaui Target	DPM, PPTSP
	Persentase pengaduan yang terselesaikan tepat waktu	-	80%	80%	93,80%	67,31%	Belum Mencapai Target	DPM, PPTSP
	Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten Ende	-	100%	100%	537,26%	537,26%	Melampaui Target	DPM, PPTSP
	Persentase izin yang terselesaikan	-	100%	100%	100,00%	100,00%	Melampaui Target	DPM, PPTSP

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						Peta Pemanggang Isu/Isi
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Kelautan sebagai Sektor Dominan dan Penunjang Perekonomian Utama	Jumlah kelompok pangan masyarakat yang aktif	33 unit	33 unit	33 unit	31 unit	93,94%	Akum Mencapai Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Peningkatan jumlah kelompok ternak penghasil pemanfaatan peternakan	47 kelompok	52 kelompok	51 kelompok	1 kelompok	1,96%	Masih jauh Dibawah Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Peningkatan Daya/kekuatan Pangan	0 Desa/kecamatan	70 Desa/kecamatan	60 Desa/kecamatan	70 Desa/kecamatan	233,33%	Melampaui Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Persentase Pangan Segar atau sumberdaya yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	70%	80%	70%	93,75%	123,86%	Melampaui Target	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	48,50%	66,58%	61,09%	61,04%	96,37%	Akum Mencapai Target	Dinas Perikanan
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	67,21%	100,00%	93,60%	66,67%	91,77%	Akum Mencapai Target	Dinas Perikanan
	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) (Cabe Rawit, Cabe besar, Bawang merah, Bawang Putih, wortel, kentang, Kybis / Kol, Petai/Sawi, labu siam, tomat, pisang, mangga, pepaya, Alpukat, jeruk, sukun/lele, kunyit, dll)							Dinas Pertanian
	1. Cabe Rawit	1,39 Ton/ha	1,39 Ton/ha	1,39 Ton/ha	1,40 Ton/ha	100,72%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	6. Cabe Besar	1,50 Ton/ha	1,60 Ton/ha	1,59 Ton/ha	1,73 Ton/ha	108,83%	Melampaui Target	Dinas Pertanian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						Instansi Pemanggang Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	c. Sawang Merah	2,42 Ton/Ha	2,46 Ton/Ha	2,45 Ton/Ha	2,66 Ton/Ha	108,38%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	d. Sawang Putih	2,36 Ton/Ha	2,31 Ton/Ha	2,29 Ton/Ha	2,60 Ton/Ha	113,54%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	e. Wundari	0,82 Ton/Ha	0,84 Ton/Ha	0,83 Ton/Ha	0,92 Ton/Ha	110,79%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	f. Kentang	8,02 Ton/Ha	8,94 Ton/Ha	8,92 Ton/Ha	9,74 Ton/Ha	109,23%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	g. Kacab/ ked	1,49 Ton/Ha	1,49 Ton/Ha	1,49 Ton/Ha	1,65 Ton/Ha	110,77%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	h. Petak/ Sawi	1,61 Ton/Ha	1,71 Ton/Ha	1,7 Ton/Ha	1,81 Ton/Ha	106,12%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	i. Tomat	2,33 Ton/Ha	2,81 Ton/Ha	2,55 Ton/Ha	2,58 Ton/Ha	101,26%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	k. Pisang	7,78 Ton/Ha	9,41 Ton/Ha	8,55 Ton/Ha	8,56 Ton/Ha	100,00%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	l. Mangga	5,54 Ton/Ha	7,69 Ton/Ha	5,99 Ton/Ha	5,99 Ton/Ha	100,00%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	m. Pepaya	3,38 Ton/Ha	8 Ton/Ha	6,75 Ton/Ha	9,83 Ton/Ha	112,33%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	n. Jambu	12,65 Ton/Ha	12,80 Ton/Ha	12,75 Ton/Ha	13,51 Ton/Ha	105,97%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	o. Kacang	7,24 Ton/Ha	7,75 Ton/Ha	7,70 Ton/Ha	7,79 Ton/Ha	99,97%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	p. Kacang	8,05 Ton/Ha	8,30 Ton/Ha	8,15 Ton/Ha	8,15 Ton/Ha	100,00%	Melampaui Target	Dinas Pertanian

Mid / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						OPD Penanggung Jawab
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Tingkat Realisasi (%)	Status	
Capaian Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) Padi sawah, Padi ladang, jagung, Ubi Kayu, Ubi jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Sorgum:							Dinas Pertanian
a. Padi Sawah	7,10 Ton/ha	7,02 Ton/ha	7,02 Ton/ha	6,48 Ton/ha	92,33%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
b. Padi Ladang	9 Ton/ha	3,02 Ton/ha	3,02 Ton/ha	3,01 Ton/ha	99,62%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
c. jagung	4,02 Ton/ha	4,03 Ton/ha	4,03 Ton/ha	3,89 Ton/ha	96,55%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
d. Ubi Kayu	34,61 Ton/ha	27 Ton/ha	26 Ton/ha	25,47 Ton/ha	97,97%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
e. Ubi Jalar	10 Ton/ha	10,50 Ton/ha	10,4 Ton/ha	8,91 Ton/ha	85,70%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
f. Kacang Kedelai	1,70 Ton/ha	1,70 Ton/ha	1,70 Ton/ha	1,50 Ton/ha	88,24%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
g. Kacang Tanah	1,70 Ton/ha	1,70 Ton/ha	1,70 Ton/ha	1,39 Ton/ha	81,91%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
h. Kacang Hijau	1,70 Ton/ha	1,70 Ton/ha	1,70 Ton/ha	1,54 Ton/ha	90,34%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
i. Sorgum	2,00 Ton/ha	2,40 Ton/ha	2,00 Ton/ha	0,54 Ton/ha	24,64%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
Capaian Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) (Kelapa, Kopi, Kakao, Jambu Mente, Kemiri, Cengkeh, Pala)							Dinas Pertanian
a. Kelapa	0,88%	1,80%	1,20%	0,94%	77,93%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						OPN Penanggung Jawab	
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian			
					Tingkat Realisasi (%)	Status		
	b. Kakao	0,70%	1,00%	1,78%	0,83%	46,36%	Masih jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	c. Jambo Mete	1,77%	1,80%	0,80%	0,25%	31,70%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	d. Kopi	0,80%	0,80%	0,90%	-0,98%	-108,52	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	e. Kemiri	1,70%	1,90%	1,85%	0,94%	1,94%	Masih jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	f. Cengkeh	1,23%	1,50%	1,40%	0,18%	27,81%	Masih jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	g. Pala	0,51%	0,65%	0,60%	-0,02%	-3,86	Masih jauh Dibawah Target	Dinas Pertanian
	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) (Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur)							Dinas Pertanian
	a. Sapi	2,21%	2,50%	2,50%	2,01%	80,52%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	b. Kerbau	0,98%	1,00%	1,00%	1,12%	111,86%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	c. Babi	2,41%	2,00%	2,00%	2,09%	104,49%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	d. Kambing	1,77%	1,00%	1,00%	0,40%	39,91%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	e. Ayam	2,60%	3,00%	3,00%	3,16%	105,33%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	f. Telur	2,47%	2,75%	2,75%	2,79%	101,52%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	Terbangnya Penyediaan dan Pengembangan Program Pertanian	36 unit	40 unit	38 unit	35 unit	92,11%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					DPM Pemanggang Jawab	
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir KPMMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
Meningkatkan Tingkat Pengangguran	Tertelaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	100,00%	140%	140,00%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	Terkendalinya Rencana Pemukiman	100 ton/Ha	100 Ton/Ha	100 Ton/Ha	0% (tidak ada pemondasi)	00,00%	Melampaui Target	Dinas Pertanian
	Cakupan Jumlah Kelp. Tani yang meningkat statusnya	2.034 kb kel	2.044 kb kel	2.034 kb kel	58 kb kel	3,34%	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
	Besaran Pencari kerja yg mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	54,31%	54,41%	54,39%	52,98%	97,40%	Belum Mencapai Target	Ditranstasikan
	Meningkatnya kesempatan Kerja	6,15%	82,53%	82,51%	29,20%	35,39%	Belum Mencapai Target	Ditranstasikan
	Jumlah Keras Ketenagakerjaan yang direkrut	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Ditranstasikan
	Jumlah Ketersertaan Program jansintek / BPIS Ketenagakerjaan	73,03%	89,69%	80,11%	91,00%	123,60%	Melampaui Target	Ditranstasikan
	Besaran Perumahan yang melokasikan Dppn Minimum Provinsi(UMP)	9,60%	6,60%	9,60%	5,60%	58,01%	Belum Mencapai Target	Ditranstasikan
	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKP)	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Mencapai Target	Ditranstasikan
	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun/kembangkan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Mencapai Target	Ditranstasikan
	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100,00%	Mencapai Target	Ditranstasikan
Meningkatnya Pengendalian Inflasi								

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					RPD Penanggung Jawab	
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
Misi 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG KAMAH LINGKUNGAN								
Sasaran	Indikator Kinerja							
Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/tam)	52,42%	55,40%	51,80%	49,55%	96,44%	Belum Mencapai Target	Dinas PU/PH
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Limbah Tidak Tersumbat	50,55%	52,88%	52,88%	55,53%	105,01%	Melampaui Target	Dinas PU/PH
	Persentase Pembangunan Tunas di Wilayah Jalan Perhubungan dan Perumahan	25,08%	26,70%	26,34%	54,17%	194,76%	Melampaui Target	Dinas PU/PH
	Persentase Ruang Kabupaten dalam Kondisi Baik	38,66%	60,00%	56,09%	53,75%	95,83%	Belum Mencapai Target	Dinas PU/PH
	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	90,83%	95,08%	94,66%	96,68%	98,88%	Masih jauh dibawah target	Dinas PU/PH
	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	93,13%	77,70%	72,20%	67,03%	92,83%	Belum Mencapai Target	Dinas PU/PH
	Persentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	100,00%	100,00%	200,00%	94,19%	94,19%	Belum Mencapai Target	Dinas PU/PH

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status					(Instansi) Penanggung Jawab	
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Tingkat Realisasi (%)		Status
Luasan RTI publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,30%	1,40%	1,40%	1,40%	96,64%	Belum Mencapai Target	Dinas FLUP
Persentase KK Korban Bencana Alam atau bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	n/a	100%	100,00%	72,03%	72,03%	Belum Mencapai Target	Dispera, KPP
Persentase Luasan Permukiman Rumah Terbangun	51,92%	45,18%	38,16%	11,92%	31,24%	Belum Mencapai Target	Dispera, KPP
Persentase Rumah Tegal Bersantani	49,26%	52,53%	51,42%	52,01%	101,15%	Melampaui Target	Dispera, KPP
Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	71,13%	71,81%	71,75%	72,00%	100,34%	Melampaui Target	Dispera, KPP
Persentase Giling Tanah Perda yang Tersertifikat	76,62%	79,11%	78,21%	26,59%	26,33%	Belum Mencapai Target	Dispera, KPP
Persentase Pemantapan dokumen Perencanaan LH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase RS dan Limbah RS yang ditangani	50,00%	75,00%	65,00%	7,93%	12,20%	Belum Mencapai Target	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase ketasaan terhadap isu lingkungan dan isu PPLH	60,00%	100%	80,00%	100,00%	125,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						(DPM) Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2023	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penguatan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	Belum tercapai (Dibawah Target)	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga pendidikan/dunia usaha yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	500,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	60,00%	100,00%	80,00%	100,00%	125,00%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Sampah	24,00%	28,00%	27,00%	12,54%	46,41%	Belum tercapai (Dibawah Target)	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Sampah	50,00%	70,00%	60,00%	86,03%	141,39%	Melampaui Target	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks pelayanan transportasi darat	78,36%	88,43%	88,87%	26,25%	30,14%	Belum tercapai (Dibawah Target)	Dinas Perhubungan
	Persentase koordinasi pembinaan dan pengawasan layanan angkutan laut	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas Perhubungan
Misi 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEBUDUKAN MASYARAKAT								
Sasaran	Indikator Kinerja							

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						Jenis Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Meningkatnya Rintisan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Persentase Dinas yang Menyenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	32 Dinas/Badan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Minimanya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100,00%	100%	1,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	21 Kecamatan
	Persentase Penduduk berKartu Keluarga	25,95%	100%	71,98%	99,90%	138,75%	Melampaui Target	10 penduduk, Candi

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					Penanggung Jawab	
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi 6/6 Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
	Persentase Penduduk ber KTP-el	73,00%	100%	91,00%	96,50%	109,34%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Persentase anak memiliki KIA	4,30%	100%	83,00%	67,54%	81,37%	Belum Mencapai Target	Dispenduk, Capil
	Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran	15,86%	100%	85,28%	88,90%	115,97%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	-	1 dokumen	100,00%	7 dokumen	100,00%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) yang dilaksanakan	13,85%	100%	84,62%	100,00%	118,18%	Melampaui Target	Dispenduk, Capil
	Persentase diseminasi informasi publik	100,00%	100,00%	100,00%	107,55%	107,55%	Melampaui Target	DisKOMINFO
	Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi yang berfungsi baik	100,00%	100,00%	100,00%	66,04%	66,04%	Belum Mencapai Target	DisKOMINFO
	Persentase Sistem Informasi yang Terdaftar NOC dan Data Center	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Melampaui Target	DisKOMINFO
	Persentase Penyediaan Data Statistik Sekoral	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	40,00%	Belum Mencapai Target	DisKOMINFO
	Persentase pengolahan data dan informasi daerah	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	Belum Mencapai Target	DisKOMINFO
	Persentase Pengolahan Arsip secara lisan di tingkat PD dan Desa	11,00%	60%	60,00%	44,16%	73,58%	Belum Mencapai Target	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						Pihak Penanggung Jawab
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Tingkat Realisasi (%)	Status	
Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	100%	100,00%	96,71%	96,71%	Belum Mencapai Target	Bappeda
Tersedianya data dan informasi kajian ktbg yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0,00%	0,00%	Belum ada Dikawat Target	Bappeda
Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100%	100,00%	96,69%	96,69%	Belum Mencapai Target	Bappeda
Persentase kepatatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	50,00%	87,50%	75,00%	50,00%	60,07%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Dewan
Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Dewan
Persentase rapenda dalam propempda yang dibahas	29,41%	75%	60,00%	43,75%	72,92%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Dewan
Penyempulan LPPD Bupati, Pemerintah Pusat Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
Persentase penanganan permasalahan kebijakan tingkat kesejahteraan rakyat	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
Persentase rapenda yang diadopsikan menjadi peraturan daerah	61,54%	80%	75,00%	71,43%	65,74%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Daerah
Persentase kerjasama yang aktif	87,50%	100%	100,00%	65,00%	65,00%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Daerah

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					DPO Penanggung Jawab	
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Terkait Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perimbangan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pelaksanaan	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	-	100%	100,00%	96,30%	96,30%	Belum Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Persentase pemangangan pencaialahan kebijakan SDK	-	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Mencapai Target	BPKAD
	Tertepatnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP	WTP	Tepat Waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Mencapai Target	BPKAD
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	tepat waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Mencapai Target	BPKAD
	Menurunnya Jumlah Temuan BPK	12 temuan	5 temuan	100,00%	36,77%	36,77%	Belum Mencapai Target	Inspektorat
	Persentase Tindak lanjut terhadap Temuan	5,72%	10%	36,76%	61,96%	168,56%	Melampaui Target	Inspektorat
	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	7,30%	9,50%	9,30%	7,71%	82,87%	Belum Mencapai Target	BKPSDM
	Persentase Pelayanan Kepegawaian	72,80%	81%	80,20%	100,00%	124,69%	Melampaui Target	BKPSDM
	(jumlah Pembinaan Motivasi, Wawasan kebangsaan dan karakter	n/a	7	10	0	80,00%	Belum Mencapai Target	Badan Kepegawaian

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status						RPO Penanggung Jawab
		Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)	Status	
Sosial bagi Masyarakat	Jumlah							
	Jumlah Perpol yang dibina	12 perpol	12 perpol	12 perpol	12 perpol	100,00%	Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Persentase Ormas yang dibina	69,00%	44,00%	44,00%	38,96%	112,33%	Belum Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	100,00%	100%	100,00%	99,67%	99,67%	Belum Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Persentase Dukasi Diri dan pengurangan kuwatir dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100,00%	100%	100,00%	100,67%	100,67%	Mencapai Target	Badan Kesbangpol
	Tingkat Penyelidikan Pelanggaran K3 (Keselamatan, Kesehatan, Keadayaan)	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Menurunkan Kasus Konflik Sosial Yang Terjadi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Cakupan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Persentase Peningkatan PERDA	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WLMK)	62,50%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Satpol PP
	Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana	26,56%	32%	30,57%	50,87%	156,40%	Mencapai Target	BPBD
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang	100%	100%	100,00%	89,78%	89,78%	Belum Mencapai Target	Ormas

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Status						OPD Penanggung Jawab
	Data Awal Tahun 2020	Target Akhir RPMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
					Tingkat Realisasi (%)	Status	
diwujudkan							
Persentase Penerima Pelayanan kesejahteraan Sosial (PKS) yang tertangani/ diwujudkan			100,00%	52,61%	52,61%	Belum Mencapai Target	Dinas
Persentase Warga Negara Migrant Korban Tidak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SMH)	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas
Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	41,13%	42,65%	42,14%	38,89%	92,25%	Belum Mencapai Target	Dinas
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas
Persentase (%) Pemangatan Korban Bencana alam dan sosial	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas
Persentase pemerataan tanah makam pemakaman	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	96,87%	97,49%	97,29%	97,59%	100,72%	Mencapai Target	Dinas PPA
Rasio RDN	0,026%	0,02%	0,02%	0,02%	124,75%	Mencapai target	Dinas PPA

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)		Status					OPD Pemanggang Jawab	
		Data Awal Tahun 2023	Target RANR RPMD 2024	Target Tahun 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Evaluasi Capaian		
						Tingkat Realisasi (%)		Status
	Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Persentase pemberian atas layanan UPTD ITPA terhadap Korban Kekerasan	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas PTFA
	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PLHA)	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Cakupan Perlindungan Ekonomi Anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	Dinas PPPA
	Persentase Pemataan Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Mencapai Target	DPMD
	Persentase Peningkatan Kinerja Pedesaan	100,00%	100,00%	100,00%	8,79%	8,79%	Belum Mencapai Target	DPMD
	Cakupan pemerintah Desa dan satuan Permusyawaratan Desa yang terbit administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	56,62%	56,62%	Masih jauh dibawah target	DPMD
	Persentase BUMDes Berkembang	1,13%	13,54%	10,42%	10,42%	99,57%	Mencapai Target	DPMD
	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	67,86%	100%	80,95%	78,39%	96,80%	Seluruh Mencapai Target	DPMD

a. Pencapaian Target Sustainability Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 dalam Forum PBB. Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian SDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 perlu diintegrasikan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan SDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Badan dunia PBB telah mengeluarkan 169 target dan 241 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian SDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator pembangunan Kabupaten Ende.



Ringkasan status pencapaian Tujuan SDGs di Kabupaten Ende yang menjadi perhatian dalam perumusan sasaran RPD tahun 2025-2026 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2. 44 DATA CAPAIAN SDG4 KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 - 2023

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER DETAIL	AGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Kabupaten	23,18	23,76	24,13	23,00	22,86	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	41,44	39,99	43,89	48,67	98,45	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	91,49	89,59	86,63	88,09	88,45	Persen
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas perumahan dasar	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	52,19	70,65	63,62	62,82		Persen
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan: (1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik	K/L	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	88,00	87,45	82,01	80,99		Persen
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	K/L	Riskesdas 2013 dan 2018, \ SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022 (Kemendkes)	Kabupaten	35,76		27,20	0,00	1	Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	K/L	Riskesdas 2013 dan 2018, \ SSGB 2019, SSGB 2021 dan 2022 (Kemenkes)	Kabupaten			13,00	0,01	8,10	Persen
3.1.1*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	89,66	94,93	96,22	95,35		Persen
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	88,95	93,22	96,72	93,78		Persen
3.3.3*	Kejadian Malara per 1.000 orang	K/L	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Kabupaten	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	Kasus per 1000 orang
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (a) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diteliti	K/L	Kemenkes	Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	K/L	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	Kabupaten	78,76	94,88	93,77			Persen
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	24,72	25,23	25,05	29,04		Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.4.1.1a)	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten				83,13		Persen
4.4.1.1a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten				86,11		Persen
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	109,45	86,45	119,75	118,32		Persen
4.5.1*	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	129,21	122,94	138,96	105,74		Persen
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	91,11	103,55	88,46	96,43		Persen
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat: (r) tingkat tertawah/teratas	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten	109,99	97,02	118,25	107,86		Persen
4.6.1.0)	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten		70,65		98,32		Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.1.1*	Proporsi individu (usia > 5 tahun) yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS	Susenas Kor (BPS)	Kabupaten		89,58		55,91		Persen
6.2.1*	a) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	52,19	0,53	63,62	62,82		Persen
6.2.1*	(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	91,49	0,53	86,63	88,08		Persen
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS/KL	Badan Pusat Statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kabupaten			0,81	0,84		Persen
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	0,74	-0,12	1,55	2,54	2,82	Persen
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	22.293	22.456	23.209	24.631	26.471	Ribu Rupiah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten				5,88		Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER_DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	K/L	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kabupaten	96,22	98,52	99,90			Persen
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional	Kabupaten	23,18	23,76	24,13	23,00		Persen
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	Badan Pusat Statistik	Kabupaten	39,55	41,75	49,15	51,09		Persen
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelebihannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS	SUSENAS	Kabupaten	19,91	23,84				Persen
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	BPS	SUSENAS	Kabupaten	47,04	52,20				Persen
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS	SUSENAS	Kabupaten	57,30	63,94				Persen
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	RPS/KL	Kementerian Keuangan dan BPS	Kabupaten		1,55				Persen

KODE	DESKRIPSI	SUMBER	SUMBER DETAIL	DISAGREGASI	CAPAIAN DATA TAHUN					SATUAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.1.1.01	Rasio pemertasaan pajak terhadap PDB	BPS/KL	Kementerian Keuangan dan BPS			0,26				Persen
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didekai oleh pajak domestik	K/L	Kementerian Keuangan			7,78				Persen

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendasak karena berhubungan dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Prioritas Utama RPD 2025-2026. Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada subbab terdahulu. Gambaran permasalahan pokok yang masih dihadapi dan perlu mendapat prioritas sampai dengan Tahun 2025, antara lain :

1. Masih Rendahnya Derajat Pendidikan;
2. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Tingginya angka kemiskinan;
4. Tingginya angka pengangguran;
5. Potensi Pariwisata belum dikembangkan secara profesional sejalan dengan kebijakan provinsi, nasional dan trend sektor ini sebagai sektor potensial di dunia dimasa mendatang;
6. Pengembangan sektor ekonomi belum memperlihatkan aspek keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif sektor;
7. Masih terbatasnya Infrastruktur Dasar, Sosial, dan Ekonomi;
8. Pengembangan Kawasan Perdesaan belum optimal;
9. Masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian sebagai sektor dominan dan keberpihakan pada petani;
10. Pengendalian inflasi belum optimal;
11. Reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara baik;
12. Pelayanan Perijinan dan promosi untuk investasi belum optimal;
13. Belum optimalnya perlindungan Masyarakat.

2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masing-masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Perumusan masalah diuraikan dalam 2 (dua) bagian yaitu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi 2 aspek yaitu *Pengambilan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan*. Sementara Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah berkaitan dengan *permasalahan layanan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang diemban*.

Tabel 2.45. Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN			
1	Keterbacaan dan ketertarikan umum daerah	Kerja sama pemerintah dan masyarakat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak
2	Keselaran dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat serta Provinsi NTT	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak
3	Keselaran antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak
4	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Komunikasi efektif dengan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak
5	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Komunikasi efektif dengan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak
6	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak
7	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perundang-undangan	Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasak

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
8	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara penda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende	- Belum dilaksanakan secara efektif - Perlu diefektifkan konsep Uka Mbuko Tolu dan Segitiga Kekuatan Bekerja Pembangunan Kabupaten Ende sampai ke tingkat Desa / Kelurahan
9	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber lainnya	Laporan terkait pelaksanaan seluruh anggaran belum terintegrasi secara baik. Berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas dan penyediaan informasi bagi publik.
10	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat tentang kesepakatan pungutan PORD	Masih terbatasnya kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang PORD
11	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran	Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan
12	Pengelolaan potensi daerah	Kapabilitas inovasi Pemerintah Kabupaten Ende	Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan
13	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende	Pengembangan Strategi Inovasi Daerah masih dianggap belum memiliki peran yang strategis, dimana proses penelitian dan pengembangan masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah
TATARAN PELAKSANAAN KEBUAKAN			
1	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib	Belum maksimal kajian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
2	Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan	Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan	Minimnya pemahaman ASN tentang regulasi teknis terkait bidang tugas dan fungsinya
3	Tingkat capaian SPM	Review target SPM berdasarkan UU 23 Tahun 2014	Belum tersedia regulasi turunan dari UU 23 Tahun 2014
4	Penataan kelembagaan daerah	Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan wajib bagi masyarakat	Evaluasi capaian PD dalam rangka layanan publik belum dilaksanakan secara baik.
5	Pengelolaan kepegawaian daerah	Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kepegawaian	Sistem Kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi
6	Perencanaan pembangunan daerah	- Penyusunan dokumen rencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi - Diklat teknis perencana daerah - Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana PD) dengan Bappeda	- Dokumen rencana belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran - Belum meratanya kapasitas perencana pada PD
7	Pengelolaan keuangan daerah	- Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel - Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah	- Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik - Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD - Masih tingginya SILPA
8	Pengelolaan barang milik daerah	Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang	- Kapasitas SDM pengelola barang di SKPD kurang memadai - Pengelolaan administrasi belum meliputi seluruh asset milik Pemerintah Daerah (masih cukup banyak lahan/tanah yang belum memiliki sertifikat)
9	Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD	Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang dan Forum SKPD

Tabel 2.46. Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan Ekonomi	Minus 1,33%. Struktur perekonomian belum kuat dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta diperparah dengan pandemi covid 19
2	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi pedesaan dan perkotaan yang kurang seimbang
3	Inflasi	Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa
4	Kemiskinan	Angka kemiskinan masih tinggi (24,13%) dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin)
5	Pengangguran	Masih tingginya angka pengangguran (2,61 % Pengangguran terbuka)
B. PELAYANAN UMUM		
1	Urusan Pendidikan	- Masih ada anak usia sekolah yang tidak duduk dalam bangku sekolah (PAUD, SD/SMP sederajat, Pendidikan Khusus Paket A dan B); - Masih banyak anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; - Keterbatasan sarana pembelajaran, ruang belajar, perpustakaan dan laboratorium; - Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah; - Distribusi guru yang belum merata antar-daerah dan terbatasnya ketersediaan guru; - Masih Rendahnya Tata Kelola Pendidikan; - Rendahnya literasi masyarakat; - Lemahnya peran aktif Komite sekolah, pengawas, dewan pendidikan, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan; - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
2	Urusan Kesehatan	- Akses dan Pelayanan Rumah Sakit belum optimal; - Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar; - Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; - Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; - Masih tingginya kasus gizi buruk dan stunting; - Masih tingginya penyakit-penyakit menular dan tidak menular serta penyakit yang berpotensi wabah; - Masih minimnya pemahaman masyarakat akan hidup bersih dan sehat; - Partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan relatif rendah; - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.
3	Urusan Pekerjaan Umum	- Terbatasnya konektivitas antar wilayah; - Akses penduduk terhadap layanan dasar (penerangan, air bersih, rumah layak huni, sanitasi) belum 100 persen; - Ketersediaan air irigasi untuk lahan usaha pertanian masyarakat; - Terbatasnya fasilitas pembuangan sampah di perkotaan; - Kekurangan air minum pada musim kemarau; - Berkurangnya debit sumber mata air; - Berdasarkan analisa jasa ekosistem penyedia air, sebagian besar memiliki status sedang yaitu 73,4% atau 151788,95 Ha dari keseluruhan wilayah Kabupaten Ende, dan 16,8% termasuk dalam kategori sangat rendah-rendah, serta sisanya 3,5% termasuk tinggi-sangat tinggi; - Akses jalan penghubung dari ibukota kabupaten ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa masih belum memadai; - Masih terjadinya genangan air dalam kota pada musim hujan; - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih.
4	Urusan Perumahan	- Terbatasnya rumah layak huni bagi masyarakat; - Masih tingginya luasan kawasan kumuh perkotaan; - Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; - Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, jamban); - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.
5	Urusan Penataan Ruang	- Ruang terbuka hijau terbatas dan cenderung menurun luasannya akibat intervensi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; - Masih terjadinya pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam RTRW Kabupaten Ende.
6	Urusan Perencanaan	- Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan pada Perangkat Daerah belum memadai; - Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal; - Masih ditemukan inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; - Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam.

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
7	Urusan Perhubungan	➢ Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan baik kuantitas maupun kualitasnya di wilayah pedesaan dan tempat wisata; ➢ Ketersediaan sarana transportasi darat untuk daerah pedalaman dan terpencil masih terbatas; ➢ Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas para pemakai jalan dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan angkutan.
8	Urusan Lingkungan Hidup	• Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah; • Pelayanan Operasional Sampah belum maksimal; • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan Pengurangan timbulan sampah; • Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan; • Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; • Masih ditemukan sampah – sampah yang dibuang kesungai dan selokan; • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
9	Urusan Pertanahan	• Masih banyak tanah milik PEMDA dan masyarakat yang belum bersertifikat; • Belum adanya sistem pendataan tanah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat secara baik.
10	Urusan Kependudukan Dan Sipil	• Belum optimalnya kualitas pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan; • Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, politik dan pemerintahan; • Masih ada tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Belum optimalnya penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; • Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak; • Masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
12	Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	• Rendahnya peserta KB aktif dan KB mandiri; • Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB; • Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas tenaga penyuluh KB dan KS (PKKB, PPKBB, SSB PPKBB).
13	Urusan Sosial	• Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); • Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor; • Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); • Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PPKS; • Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan kepada anak, perempuan dan tindak pidana perdagangan orang; • Jumlah desa/kelurahan siaga bencana; • Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; • Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.
14	Urusan Tenaga Kerja	• Terbatasnya lapangan pekerjaan; • Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah; • Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru); • Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
15	Urusan Koperasi dan UMKM	➢ Masih adanya koperasi tidak aktif dan belum berbadan hukum; ➢ Masih rendahnya akses terhadap sumberdaya oleh koperasi dan UMKM; ➢ Rendahnya tingkat produktivitas koperasi dan UMKM; ➢ Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM; ➢ Rendahnya minat kewirausahaan dan pengembangan mutu produk UMKM; ➢ Terbatasnya sarana dan prasarana UMKM.
16	Urusan Penanaman Modal	1. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata; 2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya; 3. Lemahnya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha.
17	Urusan Kebudayaan	1) Belum optimalnya pendayagunaan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat; 2) Kurangnya promosi, even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) Masih rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan Hak Paten terhadap budaya lokal; 4) Masih rendahnya apresiasi terhadap pelaku budaya; 5) Belum optimalnya pemanfaatan peran museum dalam pelestarian budaya;
18	Urusan Pemuda dan Olahraga	1. Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga yang terstandar; 2. Kurang berkesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan stakeholders; 3. Masih rendahnya prestasi atlet pada berbagai event kejuaraan olahraga pada level provinsi, nasional maupun internasional; 4. Masih tingginya jumlah pemuda yang menganggur dikarenakan kurangnya ketrampilan

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
		dasar dan minat berwirausaha; 5. Pembinaan organisasi kepemudaan masih terbatas.
19	Urusan Kesbangpol/inmas	1. Belum kokohnya lembaga demokrasi (biaya politik yang tinggi dan partisipasi politik yang belum optimal); 2. Belum optimalnya kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik, dimana masih rendahnya skill ASN; 3. Kelembagaan belum efektif dan akuntabel; 4. Kualitas pelayanan publik belum merata.
20	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) Masih terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (sengketa tanah, perkelahian, penganiayaan, kenakalan remaja, prostitusi, kumpul kebo, miras, dan pencurian); 2) Masih terbatas kesiagaan penanganan bencana kebakaran; 3) Penegakan perda belum dilaksanakan secara baik; 4) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; 5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kambingmas.
21	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1) Rasio ketergantungan fiskal cukup besar; 2) Masih adanya SILPA; 3) Pengelolaan aset daerah belum dilaksanakan secara optimal; 4) Masih minimnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. 1) Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; 2) Belum dilakukan rencana pengembangan sumberdaya manusia ASN; 3) Sistem pembinaan jenjang karir PNS belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan. 1) Masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antar Perangkat Daerah; 2) Belum semua desa/kelurahan menyelesaikan persehatian batas wilayah administrasi desa/kelurahan; 3) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa; 4) Masih ada Perda yang belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya 1) Belum ada penggunaan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah; 2) Perlunya peningkatan sistem pengamanan data pada jaringan komunikasi dan sistem informasi. 1) Masih terbatas kajian penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan; 2) Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan; 3) Belum adanya fungsional peneliti ASN. 1) Terbatasnya tenaga fungsional pengawas yang berkompoten daengah tingginya beban obyek pemeriksaan; 2) Keterbatasan jangkauan obyek pemeriksaan.
22	Urusan Ketahanan Pangan	1. Penganekaragaman/ diversifikasi pangan masih terbatas; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi; 3. Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan akses terhadap pangan serta distribusi pangan. 4. Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten Ende masih timpang atau belum merata; 5. Kualitas dan Keamanan pangan bagi masyarakat.
23	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Masih diperlukan peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana desa; 3. Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDES belum memahami manajemen BUMDES (pelaksana teknis hingga kepala desa); 4. Rendahnya Pendapatan Asli Desa PADes, yang mengakibatkan tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer; 5. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa; 6. Belum optimal kemitraan antar lembaga dan masyarakat di tingkat desa.
24	Urusan Statistik	1) Belum semua Perangkat Daerah memiliki sistem pendataan yang baik akurat; 2) Belum ada sinkronisasi data antara Perangkat Daerah dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan bank data dalam perumusan kebijakan pembangunan; 3) Koordinasi PD dengan BPS selaku lembaga resmi penyedia data belum optimal.
25	Urusan Kearsipan	1) Pengelolaan kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah belum baik; 2) Ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan belum sesuai standar kearsipan; 3) Kurangnya tenaga arsiparis di masing-masing Perangkat Daerah.
26	Urusan Informasi dan Komunikasi	1) Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan belum optimal; 2) Belum semua Perangkat Daerah memiliki Web Site; 3) Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan website dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 4) Rendahnya kapasitas dan inovasi SDM pengelola aplikasi Pemerintah.
27	Urusan Perpustakaan	1) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan; 2) Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau semua daerah tertinggal, terluar dan terluar.

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
		3) Belum optimalnya Pustakawan dalam peningkatan 4) Terbatasnya ketersediaan perpustakaan dan bahan bacaan dipedesaan.
28	Urusan Pertanian	1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian perkebunan dan peternakan; 2. Belum adanya konsep penerapan pertanian terpadu yang berorientasi industri pengolahan; 3. Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim di Kabupaten Ende; 4. Belum optimalnya pembangunan pertanian berbasis kawasan.
29	Urusan Kehutanan	Masih terjadinya erusakan hutan dan lahan (± 139,5 Ha), serta permasalahan tapal batas kawasan hutan
30	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Belum semua masyarakat dapat mengakses listrik Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan dan merupakan pertambangan liar
31	Urusan Pariwisata	1. Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh stakeholder di bidang pariwisata secara holistik; 2. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan; 3. Masih kurangnya pengembangan wisata alam maupun wisata buatan; 4. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan kinerja sesuai potensinya; 5. Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial wisata belum sadar wisata; 6. Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan; 7. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga); 8. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif; 9. Minimnya promosi pariwisata.
32	Urusan Kelautan dan Perikanan	• Belum optimalnya kelembagaan produksi dan pemasaran hasil perikanan; • Rendahnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya dalam penguasaan teknologi; • Terbatasnya akses nelayan dan pembudidaya terhadap pemodal; • Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dibandingkan ketersediaan potensi perairannya; • Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, peralatan tangkap dan cold storage; • Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan lain-lain; • Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
33	Urusan Perdagangan	1) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; 2) Kurangnya akses sistem jaringan informasi perdagangan; 3) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok; 4) Masih banyaknya pelanggaran dalam aktivitas perdagangan; 5) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan berbasis on- line ke depan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0), dimana model distribusi pasar mengalami perubahan secara mendasar ke depannya.
34	Urusan Industri	1) Masih rendahnya jumlah dan kompetensi usaha kecil menengah; 2) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; 3) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat; 4) Rendahnya nilai tambah hasil produksi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
35	Urusan Transmigrasi	1) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi urusan transmigrasi dengan pemerintah pusat.
No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan Ekonomi	Minus 1,33%. Struktur perekonomian belum kuat dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta diperparah dengan pandemi covid 19
2	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi pedesaan dan perkotaan yang kurang seimbang
3	Inflasi	Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa
4	Kemiskinan	Angka kemiskinan masih tinggi (23,76 %) dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin)
5	Pengangguran	Masih tingginya angka pengangguran (2,95% Pengangguran terbuka)

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
B. PELAYANAN UMUM		
1	Urutan Pendidikan	Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan indikator antara lain: - Data hasil Uji Kompetensi Guru tingkat SD dan SMP menunjukkan rendahnya Kapasitas ketrampilan guru tentang metode pengajaran. - Forum/ruang belajar guru (KKG/MGMP) belum dilakukan secara periodik dan belum menjawab kebutuhan guru - Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan dan integritas untuk diserap oleh peserta didik di sekolah - Terbatasnya akses ketersediaan buku/sumber/media pembelajaran dan tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan anak (belum ramah anak) - Minimnya ketersediaan sarana belajar dan belum ada pemanfaatan materi-materi lokal yang dimanfaatkan untuk pembelajaran. - Terjadinya wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar melalui online dan belajar dari rumah. - Alokasi anggaran APBD dan APBDes belum sesuai dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 % dari alokasi APBD. Hal ini terlihat dari Neraca Pendidikan Kabupaten Ende tahun 2020 15,31 % di luar dana Transfer Daerah. - Efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan belum berfokus pada peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. - Proses rekrutmen, distribusi guru belum sesuai dan tidak merata. - Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. - Masih adanya siswa yang Putus Sekolah, khususnya pada jenjang SMA/SMK - Jumlah anak yang mengikuti PAUD masih rendah (60,86 %) - Masih ditemukan banyak sekolah yang minim sarana prasarana penunjang Pendidikan diantaranya: ruang kelas yang rusak ringan/berat dengan ketersediaan Meubeler yang minim - Data Dapodik per Desember 2020 dan pencapaian indikator Persentase Ruang Kelas sekolah yang Kondisi bangunannya Rusak Berat untuk PAUD, SD dan SMP sebesar 8,39%. - Ketidaksinkronan data dapodik dan data real di lapangan tentang Sarana dan Prasarana Sekolah
2	Urutan Kesehatan	- Kondisi topografi wilayah dengan kategori terpencil dan sangat terpencil (pedalaman) yang tidak didukung oleh ketersediaan sarana yang memadai memberikan kesulitan dalam pelayanan kesehatan. - Terjadinya PANDEMI COVID-19 yang terjadi di awal tahun, maka sangat menghambat proses pelayanan kesehatan hampir diseluruh Puskesmas terutama Program pelayanan yang sangat bersentuhan dengan masyarakat antara lain Ibu, Anak, anak Sekolah, Lansia dan Usia Produktif. - Kondisi sosial budaya dan pengetahuan masyarakat yang ditandai dengan kuatnya nilai-nilai budaya yang cenderung bertahan mengakibatkan adanya program dan kegiatan yang kinerjanya tidak mencapai target (Status Gizi Masyarakat, Tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita serta Pelaksanaan pekerjaan Fisik Pembangunan yang penyelesaiannya terhambat sesuai jadwal). - Terbatasnya tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, perawat Gigi dan tenaga Kesehatan Lainnya seperti Gizi, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Analis Laboratorium dan Farmasi) bagi Puskesmas, Pustu, Poskesdes maupun di Polindes. - Masih kurangnya ketersediaan Alat Kesehatan baik di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes yang tidak didukung dengan sistem Perencanaan yang baik dan sistem pendataan aset. - Rendahnya realisasi anggaran dimana tenaga yang mengelola anggaran adalah tenaga yang belum memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan anggaran termasuk di tingkat UPTD Kecamatan adalah tenaga kesehatan. - Rendahnya dukungan anggaran untuk Pengadaan sarana Prasarana Kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes. - Sarana prasarana gedung yang belum memadai karena rendahnya kualitas maupun kuantitas gedung / bangunan pelayanan maupun penunjang pelayanan; - Belum terpenuhinya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit karena terbatasnya peralatan kesehatan dengan standar rumah sakit Tipe C; - Pengelolaan manajemen kesehatan yang belum optimal karena belum terciptanya budaya organisasi (Team Work) yang baik serta komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan dan peningkatan pelayanan serta kurangnya sosialisasi tentang Pelayanan yang ada pada RSUD Ende; - Terbatasnya anggaran untuk mendukung operasional rumah sakit karena Pertumbuhan Pendapatan yang Fluktuatif, keterlambatan pembayaran klaim BPJS yang menyebabkan Rumah Sakit sulit untuk membiayai operasional rumah sakit serta berkurangnya subsidi dana dari Pemerintahan Daerah; - Terjadinya pandemi Global terkait wabah Virus Covid 19.
3	Urutan Pekerjaan Umum	Secara keseluruhan pencapaian kontribusi fisik dan keuangan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai 100 % dan Keuangan sebesar 82,96 % disebabkan sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) paket yang fisiknya sudah selesai dikerjakan (100%) namun pembayaran keuangannya tertunda kepada pihak ketiga antara lain: 5. Paket pekerjaan pada bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tidak dicairkan

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
		sebanyak 55 paket yang terdiri dari 40 paket reguler dan 15 paket perubahan. 40 Paket reguler sudah dilaksanakan PHO (Serah Terima Pekerjaan) tanggal 18 Desember 2020, sedangkan paket perubahan sudah selesai tanggal 31 Desember 2020. 6. Pada tahap input kelengkapan dokumen mengalami keterlambatan, sementara penutupan kas sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya penutupan kas sampai dengan tanggal 31 Desember. Hal ini menyebabkan 55 paket pekerjaan pada bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan tidak dapat dicairkan. Semua dokumen sudah lengkap untuk proses pencairan pada tanggal 31 Desember 2020. 7. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Satu Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Pompa Air Submersible untuk elevasi 300 M dan Rehabilitasi untuk mata air duku Desa Theessa Kecamatan Nangapanda pagu sebesar Rp.144.000.000,- tidak dilaksanakan karena pagu dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan paket pekerjaan tersebut. 4. Pekerjaan yang belum diselesaikan yakni lanjutan pembangunan 5 (lima) ruas jalan paralel yang masih tersisa tidak dilaksanakan lagi. Pada tahun 2020 dianggarkan untuk ruas jalan paralel yaitu Pembangunan jalan paralel Nangaba-Wologai-Maukaro dan Pembangunan jalan paralel Magekobeli Maurole, namun dana tersebut digeser untuk penanganan Covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan.
4	Urusan Perumahan	- Keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah layak huni oleh masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya swadaya masyarakat penerima bantuan, cuaca atau kondisi alam yang tidak mendukung, serta tenaga fasilitator lapangan yang kurang intens mengunjungi lokasi kegiatan. - Perhitungan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana masih mengacu pada perhitungan ketersediaan rumah layak huni secara umum dikarenakan belum adanya data riil yang terbaru, terintegrasi, memadai dan memenuhi syarat perhitungan formula indikator dimaksud - Rendahnya swadaya dan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan IPAL dan tangki septik serta persoalan pembebasan lahan
5	Urusan Penataan Ruang	- Terbatasnya dukungan dana, sehingga ada beberapa rencana program dan kegiatan yang ada tidak terealisasi. - Sumber daya aparatur yang menangani pengelolaan lingkungan hidup terbatas baik yang kuantitas maupun kualitas. - Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.
6	Urusan Perencanaan	5) Ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan belum optimal 6) Belum maksimal pemanfaatan IT dalam penyusunan dan pengolahan data dan informasi perencanaan 7) Kualitas SDM perencana belum memadai 8) Belum optimal pendampingan penyusunan dokumen perencanaan 9) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal 10) Kualitas Musrenbang pada tiap tahapan belum optimal 11) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan belum berjalan dengan baik 12) Pemanfaatan PE dalam penyusunan rencana belum berjalan secara baik 13) Belum optimal koordinasi dan Kerjasama Lintas
7	Urusan Perhubungan	➢ Masalah Internal : 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (aparatur) yang berkompeten dibidangnya baik kuantitas maupun kualitas. 3) Keterbatasan dana dalam mendukung dan menjalankan program dan kegiatan. 4) Keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas pendukung kerja aparatur. ➢ Masalah Eksternal : 1) Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas para pemakai jalan dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan angkutan. 2) Belum lengkapnya ketersediaan kelengkapan sarana pada jalan dan fasilitas lalu lintas pada ruas jalan dalam Kabupaten Ende seperti pagar pengaman (Guardrail), Rambu lalu lintas, marka jalan, zebra cross dan papan petunjuk arah, sehingga belum cukup mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan lalu lintas. 3) Keterbatasan fasilitas utama maupun pendukung pada terminal, serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya penumpang dan pengemudi angkutan umum tentang manfaat terminal. 4) Masih belum teraturnya pengaturan lalu lintas di sepanjang lokasi parkir kompleks pertokoan dalam Kota Ende. 5) Masih belum tertibnya pengemudi Angkutan Umum di Terminal Ndao yang memarkir kendaraan pada badan jalan dan berada di luar Terminal Ndao. 6) Kurangnya pemahaman pengusaha angkutan dan pengemudinya tentang pentingnya pengujian berkala secara teknis pada kendaraan yang menyangkut keselamatan dalam berkendara di jalan. 7) Kurangnya kesadaran untuk melakukan KIR dan mengurus Kartu Pengawasan yang berdampak pada PAD. 8) Belum efektifnya prosedur penyelamatan angkutan laut bagi pengguna jasa angkutan laut sehingga keselamatan penumpang kurang terjamin. 9) Belum lengkapnya data lintang perahu motor pelayaran rakyat yang berkekuatan

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Pemmasalahan
		7GT ke bawah sehingga menyulitkan dalam pemantauan dan pengawasan. 10) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung keselamatan penerbangan melalui tindakan melintasi area bandara dan membiarkan ternak peliharaan berkeliaran serta berolahraga di area bandara serta tidak menebang pohon yang menghalangi pandangan untuk penerbangan. 11) Belum adanya pembatasan tonase kendaraan sesuai dengan daya angkut yang merupakan penyebab utama kerusakan jalan dan frekuensi kecelakaan.
8	Urusan Lingkungan Hidup	• Terbatasnya dukungan dana, sehingga ada beberapa rencana program dan kegiatan yang ada tidak terakomodir. • Sumber daya aparatur yang menangani pengelolaan lingkungan hidup terbatas baik yang kuantitas maupun kualitas. • Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.
9	Urusan Pertanahan	• Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan. • Belum semua tanah masyarakat memiliki sertifikat.
10	Urusan Kependudukan Dan Sipil	• Masih lemahnya kualitas pelaksanaan sistem administrasi kependudukan serta sarana dan prasarana kurang memadai. • Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. • Pemblokiran/lemahnya jaringan pembuatan KTP dan perpindahan penduduk dari Data Centre Kementerian Dalam Negeri Jakarta sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mendapat pelayanan secara maksimal.
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Masih ada Kasus KDRT yang tidak terungkap /atau dilaporkan ke berwajib • Tidak ada data KDRT yang akurat
12	Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	• Kurangnya pemenuhan akses informasi, jangkauan, kualitas dan kuantitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB. • Rendahnya pelayanan KB akibat ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang belum bisa memenuhi kebutuhan. • Kurangnya peran petugas lapangan, penyuluh keluarga berencana dalam memberikan penyuluhan. • Ketersediaan data yang tidak akurat. • Kesadaran ber KB masyarakat yang masih rendah.
13	Urusan Sosial	• Tali asih untuk potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kurang memadai • Gedung Kantor yang tidak memadai • Perlengkapan kantor yang kurang memadai • Pagar keliling kantor yang tidak layak • Gedung Balai Latihan Kerja di Jalan Adi Sucipto Rusak Berat • Gedung Balai Latihan Kerja di Jalan Prof. W.J. Yohanes yang rusak ringan
14	Urusan Tenaga Kerja	• Belum dilakukan pendataan secara baik bagi para pencari kerja melalui penggunaan kartu pencari kerja yang ditempatkan pada suatu pekerjaan sehingga bisa diprediksi angka pendaftaran pekerja yang terdaftar dan data pekerja yang di tempatkan. • Masih kurangnya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja yang hendak bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri; • Belum terlaksananya dengan baik proses perlindungan dan peningkatan kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia serta fasilitasi untuk pelaksanaan pemulangan Jenazah dari dalam dan luar negeri; • Belum semua perusahaan menerapkan RPIS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerjanya dan menerapkan sistim Keselamatan, kesehatan kerja bagi pengusaha dan pekerja; • Masih terbatasnya sistem Pengawasan dan Pembinaan bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Ende; • Masih Terbatas Tenaga pengajar/ instruktur pada beberapa kejuruan. • Pengalokasian dana di tahun – tahun yang akan datang diharapkan lebih memadai agar dapat menjawab permasalahan di bidang ketenagakerjaan; • Masih terbatasnya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di lokasi transmigrasi lokal yaitu di desa Ekowe, Kuliwepe dan Wewaria.
15	Urusan Koperasi dan UMKM	➢ Umum : 1. Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pembina 2. Iklim usaha yang belum kondusif 3. Adanya monopoly usaha ➢ Khusus : 1. Pengelolaan kegiatan usaha dan manajemen usaha koperasi belum profesional; 2. Mekanisme manajemen koperasi seperti RAT, Audit, aktifitas bisnis dan ketaatan terhadap peraturan belum berjalan baik; 3. Partisipasi anggota dalam memenuhi hak dan kewajiban masih rendah; 4. Kinerja koperasi belum optimal dalam hal struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, penambahan asset dan peningkatan volume usaha; 5. Perilaku kewirausahaan rendah, berakibat pada rendahnya mutu produk. 6. Kemampuan bersaing UKM belum kompetitif.
16	Urusan Penanaman Modal	1. Adanya keadaan Force Mayor yaitu Bencana Covid 2019 yang melanda Negara Indonesia, yang menyebabkan banyak investasi yang tertunda. 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
		Model. 3. Keterbatasan sumber daya baik dana maupun SDM aparaturnya untuk menghitung nilai Index kepuasan, dimana untuk penghitungan harus menggunakan pihak ketiga sehingga harus membutuhkan biaya tambahan.
17	Urusan Kebudayaan	Masih rendahnya pelestarian budaya lokal
18	Urusan Pemuda dan Olahraga	6. Belum terakomodirnya program dan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga pada awal tahun, karena keterbatasan dana 7. Pendataan kelompok kepemudaan belum dilaksanakan secara rutin 8. Klub olahraga prestasi dari masing-masing cabang olahraga belum didata secara baik
19	Urusan Kesbangpolinmas	Terjadinya Refocusing Anggaran sehingga banyak kegiatan pada Badan Kesbangpolinmas tidak dilaksanakan dan Keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia serta sarana prasarana penunjang kegiatan organisasi.
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Permasalahan tingginya tingkat kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki, adanya tarik menarik dalam proses penetapan anggaran pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah sehingga cenderung tidak realistis yang mengakibatkan deviasi yang cukup besar terhadap realisasinya; Pemberian kewenangan kepada daerah dalam perpajakan (Tax Assignment) tidak selalu dapat disesuaikan dengan pemberian kewenangan dalam tanggung jawab pengeluaran (expenditure assignment); Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum dan SDM pengelola pendapatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Ketersediaan SDM dalam mendukung koordinasi perencanaan dan penganggaran Desa dan Kelurahan serta pemahaman pemanfaatan aplikasi IT dan Pemahaman tentang regulasi berkaitan dengan pemerintahan Desa dan Kelurahan serta ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat seperti pelayanan E KTP, dll. Permasalahan lokasi kegiatan inventarisasi yang terlalu luas dan berada pada topografi yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum berdampak pada keterlambatan penyampaian data atau tidak terlaksananya inventarisasi pada lokasi tersebut dan terlambatnya pelaksanaan fisik di lapangan sehingga mempengaruhi keterlambatan pengajuan pencairan yang mengakibatkan keterlambatan penginputan pada OMSPAN serta adanya kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang sering mengalami perubahan. Masih kurangnya pemahaman OPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pemahaman urusan pemerintahan kabupaten kepada Camat maupun Lurah Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional tahun anggaran 2020 bagi tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis lainnya tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19; Adanya pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang belum mengikuti diklat kepemimpinan karena keterbatasan anggaran serta beberapa jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang belum terisi karena masih dalam proses jobfit untuk mutasi internal JPTP dan proses lelang JPTP yang lowong diproses setelah mutasi internal antar JPTP. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah
21	Urusan Ketahanan Pangan	1. Kondisi alam terutama iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berdampak pada persoalan-persoalan ketahanan pangan, oleh karena itu perlu kejelian dalam menyikapi setiap perubahan agroklimat; 2. Tingkat Ketersediaan Pangan Kabupaten Ende belum mencapai target yakni kondisi dari tahun 2019 baru mencapai 85,63 % dan tahun 2020 baru mencapai 85,67 % dari target 90%; 3. Masih lemahnya sistem Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah; 4. Belum terlaksananya Sistem Penanganan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Daerah; 5. Pola Konsumsi Pangan Belum Mencapai Skor Pola Pangan Harapan, yakni baru mencapai 76,3 dari idealnya 100; 6. Masih terbatasnya sistem Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah; 7. Jangkauan Penanganan Daerah Rawan Pangan Masih Terbatas.
22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7. Pembentukan BUMDes tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sehingga BUMDes yang sudah terbentuk tidak berjalan. 8. Kajian kelayakan usaha BUMDes tidak dilakukan sehingga usaha yang ada tidak berjalan karena tidak didukung Peluang Pasar dan Potensi Sumber Daya yang ada. 9. Honor untuk Admin Siskeudes dan OM-SPAN dana Desa tidak dianggarkan dari Kabupaten. 10. 255 Desa belum menaati siklus perencanaan yang seharusnya tanggal 1 Juni s/d 30 September. 11. Peran Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang merupakan fokus pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum berfungsi secara optimal. 12. Pembangunan air minum oleh PAMSIMAS belum terintegrasi dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
23	Urusan Statistik	Belum semua SKPD memiliki sistem pendataan yang baik, sehingga sangat kesulitan menyediakan data terupdate apabila diminta. Belum semua data yang disediakan dalam buku yang dihasilkan terupdate secara baik, sehingga ada tabulasi data yang disampaikan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini.

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
24	Urusan Kearsipan	Belum optimalnya penataan arsip di PD dengan berbagai sebab, antara lain : Penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh OPD, desa dan kelurahan masih minim hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman SKPD tentang tugas dan kegiatan kearsipan yang harus dilaksanakan OPD; Perangkat Desa/Kelurahan kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan dan penataan arsip; Terbatasnya sumber daya manusia aparatur KPAD Ende dan Sarana dan prasarana kearsipan baik secara kuantitas maupun kualitas
25	Urusan Informasi dan Komunikasi	Perhatian OPD terhadap pentingnya publikasi dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan dan kemampuan mengartikulasikan kebutuhan data dan informasi untuk kepentingan masyarakat masih kurang; Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan infrastruktur teknologi informasi masih terbatas; serta belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan teknologi informasi dalam pemecahan masalah.
26	Urusan Perpustakaan	Koleksi yang tersedia pada perpustakaan umum daerah saat ini sangat terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna; Kemampuan membaca (reading literacy) anak-anak masih sangat rendah dan Minat Baca Masyarakat masih sangat rendah serta Rendahnya kualitas SDM pengelola perpustakaan
27	Urusan Pertanian	5. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor bagi perluasan areal lahan basah berupa peretakan sawah dan penyediaan infrastruktur pengelolaan air seperti perbaikan jaringan irigasi serta pembangunan jaringan irigasi permanen menjadi hambatan utama bagi perluasan areal lahan basah 6. Belum optimalnya peran kelompok P3A dalam pengelolaan pemanfaatan air irigasi sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan pada areal sawah beririgasi belum berjalan dengan baik. 7. Infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang belum memadai mengakibatkan optimalisasi pemanfaatan lahan dan perluasan areal tanam belum dapat berjalan dengan baik. 8. Penyediaan sarana produksi serta peralatan dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen yang belum memadai berakibat pada belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian. 9. Adanya gangguan hama dan penyakit tanaman dan kekurangan pada beberapa wilayah menyebabkan produksi menurun. 10. Produktivitas ternak yang masih rendah sehingga berpengaruh pada produksi daging di mana Bobot Hidup ternak yang di potong di RPH dan lokasi pemotongan tercatat lainnya belum maksimal yaitu ternak sapi baru mencapai rata-rata 175 kg, kerbau 275 kg babi 45 kg dan kambing 20 kg.
28	Urusan Kehutanan	Masih terjadinya erusakan hutan dan lahan (± 139,5 Ha), serta permasalahan tapal batas kawasan hutan
29	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Belum semua masyarakat dapat mengakses listrik Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan dan merupakan pertambangan liar
30	Urusan Pariwisata	10. Belum terpadunya pembangunan dan pengembangan pariwisata baik lintas bidang maupun lintas sektor. 11. Kurangnya database pariwisata seperti data jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke berbagai objek dan daya tarik wisatawan di Kabupaten Ende, data wisatawan yang menginap di Kabupaten Ende, data pendapatan masyarakat yang diperoleh karena adanya kegiatan perjalanan wisata dan data lainnya. 12. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana baik dari dan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) maupun di dalam ODTW. Seperti jalan raya, sarana air bersih, listrik, telekomunikasi, sarana transportasi baik transportasi udara, laut maupun darat, sarana akomodasi baik hotel maupun pondok wisata (home stay), rumah makan / restaurant serta sarana pendukung lainnya. 13. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata sehingga kurang dikenal pasar wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. 14. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pariwisata baik aparatur pemerintah, swasta (pelaku pariwisata) dan masyarakat.
31	Urusan Kelautan dan Perikanan	• Masih minimnya produksi ikan dan tingginya konsumsi ikan serta harga jual yang tinggi, sebagai bagian dari belum berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan dan Optimalisasi pemanfaatan Dermaga Ikan serta SDM Nelayan yang minim dalam penggunaan alat tangkap modern • Kapal Penangkapan belum dilengkapi sarana pendukung berbasis teknologi, sehingga upaya optimalisasi Potensi Perikanan Tangkap yang dimiliki masih sangat terbatas; • Keterbatasan Jumlah, Kemampuan serta Keahlian teknis SDM Aparatur, sehingga belum maksimalnya pelayanan tugas pendampingan pada kelompok – kelompok Nelayan / Pembudidaya yang tersebar pada wilayah pesisir pantai utara maupun selatan Kab. Ende; • Keterbatasan kualitas SDM dari masyarakat Nelayan / Pembudidaya, sehingga sangat mempengaruhi dalam penerapan Intervensi Teknologi yang diterima.
32	Urusan Perdagangan	Tingkat kesadaran pengusaha akan pentingnya kepemilikan ijin usaha yang masih rendah sehingga cukup banyak perusahaan yang belum melaksanakan pendaftaran ulang ijin perdagangan (SUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tepat waktu. Infrastruktur perdagangan masih terbatas; terutama kondisi pelabuhan laut yang tidak layak pakai karena kerusakan struktur bangunan dan sampai sekarang masih dalam tahap renovasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi arus kapal muatan barang yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan stok dan harga.

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
		Kurangnya kepedulian pedagang akan keselamatan konsumen sehingga terjadi pelanggaran perdagangan seperti penjualan barang kadaluarsa, barang yang tidak sesuai standar dan tidak prosedural.
33	Urusan Industri	Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Penguasaan teknologi masih rendah menyebabkan produktivitas yang rendah walaupun telah menggunakan teknologi baru. Jangkauan pemasaran produk industri lokal yang sempit sebagai akibat dari kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya mutu dan penampilan produk.
34	Urusan Transmigrasi	Masih cukup banyak sarana dan prasarana pada permukiman Transmigrasi dalam kondisi rusak. Pengiriman warga transmigrasi keluar daerah menunggu penetapan kuota dari provinsi. Lemahnya pengawasan dan kurangnya monitoring dari Pemerintah Desa, dan Kecamatan setempat. Masih kurangnya kesadaran masyarakat penghuni di kawasan transmigrasi dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana transmigrasi dengan baik.

Sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bab ini memuat uraian **Kondisi Ekonomi Kabupaten Ende tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan**, yang mencakup Pertumbuhan Ekonomi Daerah, sumber-sumber Pendapatan dan Kebijakan Pemerintahan Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat menuju postur APBD Kabupaten Ende yang benar-benar menggambarkan fungsinya sebagai instrumen fiskal yaitu **fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi**.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan sampai Tahun 2024

Secara umum gambaran tentang kondisi ekonomi daerah merupakan kondisi yang terjadi sebagai dampak baik langsung maupun tidak langsung dari perkembangan perekonomian global, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi makro regional Provinsi NTT.

Referensi yang digunakan diambil dari publikasi kementerian keuangan. Gambaran **proyeksi ekonomi tahun 2024 diperkirakan menguat**. Selengkapnya artikel untuk referensi disajikan berikut ini.

a. Perkembangan Perekonomian Global

Publikasi Kemenkeu pada bulan April 2024 (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>) tentang APBN kita Kinerja dan Fakta dinyatakan bahwa Perkembangan ekonomi global di 2024 diperkirakan akan tetap stabil. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Maret 2024 memperkirakan bahwa ekonomi global di 2024 akan tetap tumbuh 3,2 persen. Negara maju diperkirakan mengalami sedikit akselerasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan negara berkembang akan sedikit melambat. Inflasi global diproyeksi berada pada level 5,9 persen (avg) di 2024. Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhirakhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas terutama komoditas energi. Di sisi domestik, perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Perkembangan sektor eksternal nasional terus memperlihatkan perkembangan positif.

Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhir-akhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas, terutama komoditas energi.

Perkembangan Inflasi global dalam publikasi CNN Indonesia; Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat dan datar padatahun ini hingga 2025. Hal ini tak lepas dari inflasi di Amerika Serikat (AS), lemahnya permintaan di China dan Eropa, dan dampak ketegangan geopolitik.

IMF memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil global mencapai 3,2 persen untuk 2024-2025, naik 0,1 persen dari proyeksi yang dirilis Januari lalu. Angka 3,2 persen ini berada di tingkat yang sama seperti pada 2023. 2025"

"Perekonomian global terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan pertumbuhan yang stabil dan inflasi yang menurun, namun masih banyak tantangan yang menghadang," kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas seperti dikutip dari Reuters, Rabu (17/4). Menurutnya, potensi peningkatan konflik Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Israel dapat berdampak kuat pada pertumbuhan ekonomi.

Gourinchas menilai konflik itu akan menaikkan harga minyak dan inflasi. Alhasil, memicu kebijakan moneter yang lebih ketat dari bank sentral. Departemen Keuangan AS sedang

bersiap untuk menjatuhkan sanksi baru kepada Iran dalam beberapa hari mendatang. Sanksi itu berupa pembatasan ekspor minyak oleh negara tersebut.

Laporan Departemen Keuangan AS menggambarkan skenario buruk bahwa eskalasi Timur Tengah akan menyebabkan kenaikan harga minyak sebesar 15 persen. Pun, biaya pengiriman akan lebih tinggi. Hal ini disinyalir bakal meningkatkan inflasi global sekitar 0,7 poin persentase.

IMF memperkirakan rata-rata inflasi global cuma mencapai 2,8 persen pada akhir 2024. Angka turun dibanding tahun lalu yang mencapai 4 persen. Median inflasi global itu diproyeksikan kembali turun menjadi 2,4 persen pada 2025. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240417095656-532-1087113/imf-proyeksi-ekonomi-global-cuma-tumbuh-32-persen-di-2024-dan-2025>).

b. Perkembangan Perekonomian Nasional (kondisi Triwulan I)

Gambaran Kebijakan keuangan negara pada saat disusunnya RKPD ini, dapat dilihat pada halaman: (Publikasi Badan Kebijakan FiskalKemenkeu <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/571> - 6 Mei 2024), sebagai berikut:

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. "Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRM melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9% (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan. PKP menyumbang 1,1% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 terbesar ketiga setelah konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur turut mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi SDA yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Kinerja investasi sektor swasta juga tergambar dari realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri triwulan I yang tumbuh tinggi 22,1% (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di sisi lain, volume ekspor produk utama seperti besi baja dan bahan bakar

mineral tetap kuat, masing-masing tumbuh sebesar 35,8% dan 5,4% (yoy) pada triwulan I 2024. Sementara, impor riil juga tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara keseluruhan, kontribusi net ekspor (ekspor – impor) terhadap pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 0,2%.

Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari sub sektor industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 16,6% (yoy) pada triwulan I 2024. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 4,6% (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5% (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang menyebabkan tertundanya musim tanam.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat sebesar 15,7% (yoy) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 25,4% (yoy). Selain itu, aktivitas kegiatan Pemilu, liburan tahun baru, dan aktivitas selama bulan Ramadan mendorong tumbuhnya kedua sektor tersebut.

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%). Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023-Februari 2024 adalah Akomodasi & Makan Minum, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. Proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi yang positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik.

Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

c. Perkembangan Ekonomi Makro

Dalam sidang IMF di Washington DC tanggal 18 April 2024 kemarin, Indonesia kembali dianggap mampu menghadapi efek rambatan gejala ekonomi global. Tentu kondisi ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang bijak dan hati-hati (*prudent*). Beberapa indikator makro Indonesia hingga awal April 2024 menunjukkan kinerja positif. Sebut saja IHK (indeks harga konsumen) yang tetap terjaga di angka 3,05% (yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1%.

Pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan I tahun 2024 yang juga baik, tumbuh pada kisaran 12,40% (yoy) dengan NPL-netto (rasio kredit macet bersih) di angka 0,8% (Februari 2024). CAR (rasio kecukupan modal) perbankan pada bulan Februari 2024 juga tinggi, berada pada kisaran 27,73%.

Sementara itu, data Inflasi tetap stabil sesuai harapan Bank Indonesia (BI). Inflasi inti bulan Maret 2024 tercatat 0,23% (mtm) sehingga secara tahunan menjadi 1,77% (yoy).

Data perinci terkait Inflasi dapat dianalisis lebih jauh melalui kelompok *volatile food* (kejutan harga pada kelompok makanan) dan *administered prices* (dipengaruhi oleh kebijakan harga pemerintah). Pada kelompok *volatile food*, inflasi meningkat dari bulan sebelumnya (1,53% menjadi 2,16%—mtm). Komoditas yang berkontribusi pada peningkatan tersebut di antaranya telur dan daging ayam ras serta beras. Secara tahunan, kelompok ini telah mengalami inflasi sebesar 10,33% (yoy).

Peningkatan yang cukup signifikan. Inflasi pada kelompok *administered prices* tampak menurun (dari 0,15% bulan Februari menjadi 0,08% pada Maret 2024—mtm). Secara tahunan, kelompok *administered prices* mengalami inflasi sebesar 1,39% (yoy).

Beranjak ke indikator Cadangan Devisa (CD). Data bulan Maret 2024 menunjukkan posisi CD tetap tinggi (140,4 miliar USD). Angka ini sedikit turun dibandingkan data akhir Februari 2024 (144,0 miliar USD).

Penurunan tersebut diakibatkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, kebutuhan likuiditas valas korporasi, dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Angka CD tersebut jika merujuk pada standar kecukupan internasional (pembiayaan ± 3 bulan impor negara) masih sangat baik, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia.

Sovereign Credit Rating Indonesia.

Sovereign Credit Rating (SCR) atau peringkat utang Indonesia kembali dipertahankan lembaga pemeringkat internasional Moody's. Moody's memberikan nilai "Baa2" untuk rating utang Indonesia, satu tingkat di atas *investment grade* dengan *outlook* "Stabil" pada tanggal 16 April 2024.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diprediksi Moody's mampu tumbuh di kisaran 5,0% (2024-2025), relatif lebih tinggi dibanding negara-negara lain yang memperoleh peringkat "Baa" (hanya tumbuh pada kisaran 3%). Sejumlah faktor yang turut mendukung ekonomi Indonesia menurut Moody's.

Mulai dari reformasi struktural, perbaikan iklim investasi, peningkatan penanaman modal asing, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekspor, surplus neraca dagang, kebijakan hilirisasi (mendukung diversifikasi dan nilai tambah komoditas ekspor serta mengurangi sensitivitas harga), dan naiknya penerimaan negara.

Peringkat SCR Indonesia tersebut akan memberikan kepercayaan kepada pemodal terhadap stabilitas makro ekonomi Indonesia. Fundamental makro yang terjaga diharapkan mampu mengurangi reaksi negatif akibat efek rambatan dari meningkatnya gejala ekonomi global. Bank Indonesia sendiri memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 4,7% - 5,5%.

Potensi Efek Rambatan

Indikator ekonomi makro Indonesia secara umum memang tampak baik-baik saja, setidaknya hingga awal April 2024. Perubahan struktural pada ekonomi global pascameningkatnya ketegangan di Timur Tengah sepertinya akan memberikan efek rambatan yang meluas, termasuk pada ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut perlu direspons secara cepat dan tepat untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang potensial.

Tantangan ekonomi dan geopolitik negara-negara di dunia saat ini mencakup tiga isu. Pertama, suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate-FFR) yang masih tinggi (pada rentang 5,25%-5,5%).

Kedua, tensi geopolitik di Timur Tengah yang dikhawatirkan meluas selepas Israel dan Iran saling serang sejak awal April 2024. Ketiga, Senat Amerika yang menyetujui bantuan senilai USD 95 miliar (setara IDR 1.534 triliun) kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan pada Selasa (23 April 2024).

Bantuan tersebut berpotensi menyebabkan konflik Rusia-Ukraina semakin berlarut, termasuk di Timur Tengah (Israel-Palestina-Iran), dan ketegangan di kawasan Asia (Tiongkok-Taiwan-AS). Meskipun masih banyak faktor pemicu lain, namun ketiga isu tersebut berpotensi memberi dampak yang sangat fundamental pada perekonomian global.

Sementara itu, sikap *hawkish* The Fed yang masih mempertahankan suku bunga tinggi juga turut memperlambat pemulihan ekonomi global. Berbagai gejolak geopolitik tersebut berpotensi membawa dampak yang serius pada dua isu penting ekonomi.

Pertama, krisis pangan akibat ketimpangan rantai pasok, khususnya dari sisi *supply*. Kedua, krisis energi yang akan mendorong naiknya inflasi bahan bakar minyak (BBM), apalagi jika harga minyak dunia melewati USD 100/barel.

Inflasi bahan pangan dan BBM tentu berpotensi menciptakan guncangan baru pada struktur makro ekonomi di setiap negara. Konsekuensi akibat ketimpangan rantai pasok tersebut berpotensi merambat ke berbagai sendi ekonomi.

Sebut saja, penurunan daya beli, neto ekspor yang tergerus, peningkatan arus modal keluar, melambatnya pertumbuhan kredit, penurunan ekonomi, peningkatan pengangguran, depresiasi mata uang lokal (efek *strong-dollar* akibat *yield* di AS meningkat), hingga potensi munculnya berbagai masalah sosial. Kompleksitas tersebut tentu perlu direspons dan dimitigasi, sama seperti pada saat Indonesia merespons efek rambatan negatif Pandemi Covid-19.

Penguatan Respons Moneter.

Kebijakan Moneter menjadi salah satu instrumen penting dalam mengantisipasi berbagai efek rambatan negatif yang mungkin terjadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. BI sebagai otoritas yang berwenang untuk menjalankan kebijakan ini telah meracik ulang sejumlah instrumen moneter dalam menghadapi gejolak geopolitik tersebut.

BI pada Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) tanggal 23-24 April 2024 telah memutuskan untuk menaikkan BI-rate (BI 7-Day Reverse Repo Rate) sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility menjadi 5,50% dan Lending Facility menjadi 7,00%.

Selain merespons sikap *hawkish* The Fed, kenaikan BI-rate tersebut lebih mengarah pada upaya *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memperkuat stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi pada target 2,5±1% sesuai *stance* kebijakan moneter BI yang *pro-stability*.

Intervensi valuta asing dan langkah-langkah pencegahan lain tetap dilakukan BI untuk menjaga stabilitas moneter. BI melakukan operasi moneter dan pengelolaan aliran portofolio asing yang ramah dan pro-pasar, yang terintegrasi dengan pendalaman pasar uang untuk mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Sementara itu, Kebijakan Makroprudensial dan Sistem Pembayaran tetap mengedepankan *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan Makroprudensial longgar ditempuh untuk mendorong penyaluran kredit perbankan pada sektor riil (dunia usaha) dan rumah tangga, sementara Kebijakan Sistem Pembayaran ditujukan untuk memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

BI tampaknya juga tetap mengedepankan bauran kebijakan moneter *triple-intervention*. Intervensi moneter tersebut dilakukan BI dengan tiga cara: (1) intervensi secara tunai di pasar spot, (2) intervensi secara forward melalui instrumen DNDF (*domestic non deliverable forward*) yang relatif lebih murah dan efisien, dan (3) intervensi dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder (mengantisipasi dampak negatif keluarnya dana asing dari pasar sekunder dan menjaga likuiditas rupiah).

Khusus mengenai kebijakan DNDF. Transaksi DNDF dapat digunakan pelaku pasar untuk melakukan aktivitas *hedging* (lindung nilai) atas risiko nilai tukar rupiah. Instrumen ini juga dapat digunakan BI untuk melakukan operasi moneter. Implementasi kebijakan *triple intervention* harus didukung cadangan devisa BI yang memadai (Valas, SBN Dalam Negeri, SBN Luar Negeri, emas, dan aset finansial lainnya).

Kebijakan lain untuk menjaga stabilitas rupiah dilakukan BI dengan mendorong arus modal masuk (*capital inflow*) melalui instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia). SRBI berpotensi menarik masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio. Instrumen ini berbentuk surat berharga yang diterbitkan BI dalam mata uang rupiah (menggunakan *underlying asset* berupa SBN yang dimiliki BI).

Ahead The Curve.

Penguatan berbagai bauran kebijakan moneter diharapkan mampu meredam fluktuasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak geopolitik global. Banyak faktor yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun demikian, efek rambatan akibat sentimen (negatif) eksternal untuk saat ini lebih mendominasi. Fundamental internal yang relatif kuat menjadi nilai tambah Indonesia dalam menghadapi efek rambatan gejolak geopolitik ini.

Meskipun demikian, indikator positif tersebut jangan sampai menimbulkan bias *overconfidence* bagi para pengambil kebijakan. Perubahan ekonomi global yang sangat cepat dan dinamis harus diantisipasi dan direspon dengan cepat juga (dan diharapkan tepat).

Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB (produk domestik bruto) harus dipertahankan. Sinergi antarlembaga dan otoritas terkait menjadi kunci utama bagi implementasi bauran kebijakan yang mendukung ketahanan sistem keuangan dan ekonomi nasional terhadap ketidakpastian ekonomi global.

Sejumlah daerah di Indonesia yang mulai memasuki musim panen diharapkan turut berkontribusi dalam menekan angka inflasi kelompok *volatile food*, terutama harga beras yang terus merangkak naik.

Apa yang sedang (dan akan) dilakukan bank sentral melalui sejumlah bauran kebijakan moneternya menunjukkan konsistensi BI dalam mempertahankan stance kebijakan moneter yang *preemptive* dan *ahead the curve*.

Sebuah respons moneter yang agresif dalam mengantisipasi dan mendahului "yang lain". Kita optimis respons agresif tersebut mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah hantaman geopolitik global yang semakin brutal.

<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240426161301-14-533814/meneropong-ekonomi-indonesia-di-tengah-tekanan-geopolitik-global>

Penguatan pemulihan ekonomi terus berlangsung di kuartal I 2023, melanjutkan penguatan kinerja ekonomi di 2022. Beberapa indikator ekonomi masih menunjukkan kinerja yang positif di awal 2023. Sektor Manufaktur (PMI) Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 18 bulan berturut-turut dan pada bulan Februari 2023 tercatat 51,2. Masih kuatnya aktivitas sektor manufaktur lebih didorong oleh permintaan dalam negeri.

Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 berada pada 122,4 yang mengindikasikan masih berlanjutnya optimism masyarakat terhadap perkembangan ekonomi ke depan terus menguat. Peran APBN perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2023.

Stabilitas pasar keuangan nasional masih tetap terjaga di tengah risiko tekanan likuiditas keuangan global. Tekanan kondisi keuangan global terhadap pasar keuangan nasional relatif moderat di awal tahun 2023. Pasar saham domestik masih cukup kuat dan IHSG tercatat 6.628,14 pada 15 Maret 2023. Pergerakan nilai tukar Rupiah di Maret 2023 sedikit mengalami tekanan, namun masih terkendali. Nilai tukar Rupiah mengacu pada Jisdor tercatat sebesar Rp15.365 per USD pada 15 Maret 2023. Hingga 15 Maret 2023, rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.237 per USD, masih mengalami apresiasi sebesar 1,33 persen (ytd).

Laju Inflasi Februari 2023 tercatat 5,47 persen (yoy) atau 0,16 persen (mtm). Peningkatan laju inflasi ini dipengaruhi tekanan inflasi pangan dan melambatnya komponen inti dan administered price. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Februari 2023 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat sebesar USD140,3 miliar. Posisi cadangan devisa ini sangat positif dalam menopang daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat mampu menggerakkan sektor pariwisata nasional secara signifikan. Kondisi ini salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan secara pesat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri. Peningkatan aktivitas sector pariwisata akan mendorong aktivitas sektor pendukung lainnya seperti, makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Sektor pariwisata nasional akan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari 2023 mencapai 735,95 ribu kunjungan, naik 5 kali lipat dibandingkan kondisi pada Januari 2022. Namun, kunjungan wisman Januari 2023 ini menurun sebesar 17,78 persen lebih karena faktor musiman. Demikian pula dengan kondisi Tingkat Penghuni Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2023 tercatat 44,86 persen, naik 2,43 poin (yoy). Namun, TPK Januari 2023 mengalami penurunan sebesar 12,04 poin (mtm).

d. Perkembangan Ekonomi Makro Regional Provinsi NTT

Gambaran Ekonomi Makro Regional Provinsi NTT, disadur dari BPS NTT, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT.

Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2024 mencapai Rp 32,02 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 18,40 triliun. Ekonomi NTT Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan <https://ntt.bps.go.id> x | ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 15,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,31 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,14 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,88 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 68,13 persen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 3,99 juta orang, naik 0,08 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 2,26 persen poin dibanding Februari 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,96 juta orang, naik sebanyak 0,14 juta orang dari Februari 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,04 juta orang. Sebanyak 0,07 juta orang (25,83 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik

sebesar 0,98 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran naik sebesar 0,27 persen poin, sementara pekerja paruh waktu juga mengalami peningkatan sebesar 0,72 persen poin dibanding Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,17 persen, naik sebesar 0,07 persen poin dibanding Februari 2023.

3. Tingkat Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Maret 2023 turun menjadi 19,96 persen. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498,-/rumah tangga miskin/bulan.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,21 menjadi 13,22 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,70 tahun menjadi 7,82 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 371 ribu rupiah (4,71 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

5. **Inflasi Provinsi NTT April 2024** Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,35 persen. Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,18. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,59 persen dengan IHK sebesar 106,18 dan terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,83 persen dengan IHK sebesar 106,08. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,54 persen; kelompok transportasi sebesar 1,65 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,12 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,77 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang

mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2024 adalah sebesar 0,31 persen. Sedangkan untuk tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan April 2024 adalah sebesar 0,98 persen.

e. **Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende**

Gambaran tentang **Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ende** dapat dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Ende. Mengacu kepada data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Ende, dalam buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024, dapat diketahui bahwa **Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku 2010** untuk kondisi pada tahun 2023 mencapai 7.374,38 milyar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 581,76 milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 6.792,62 milyar rupiah. sedangkan **Nilai PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010**, nilai PDRB Kabupaten Ende pada tahun 2023 meningkat yaitu mencapai 4.457.690 miliar rupiah atau naik dari 4.291.787 miliar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan terjadi ekspansi ekonomi sebesar 3,87 persen mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang mencapai 3,09 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 11,29 persen. Lapangan Usaha ini mengalami kondisi yang terus meningkat, dimana setelah mengalami penurunan sebesar 1,46 pada tahun 2021, selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 6,75 pada tahun 2022 dan terus bertumbuh positif menjadi sebesar 11,29 persen pada tahun 2023.

Dari 17 lapangan usaha yang ada, **17 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif**, 11 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas agregat, 6 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dibawah pertumbuhan ekonomi agregat, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,60), Industri Pengolahan (8,47), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang (2,79), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (5,64), Transportasi dan Pergudangan (2,69), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,34).

Dilihat dari **Struktur Ekonomi** selama lima tahun terakhir Struktur Perekonomian Kabupaten Ende, dilihat dari peranan masing-masing Lapangan Usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, didominasi oleh 5 (lima) kategori Lapangan Usaha, yaitu: (1) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Konstruksi; dan Lapangan Usaha (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende Tahun 2023, yaitu mencapai 31,69 persen, selanjutnya Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,19 persen, Jasa Pendidikan sebesar 9,32 persen; Konstruksi sebesar 9,11 persen; dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,70 persen.

Tabel 12.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ende (persen), 2019–2023
Table 12.4 Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Ende Regency (percent), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	4,57	2,49	5,14	5,06	4,60
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,40	-1,89	0,49	1,68	2,46
C Industri Pengolahan/Manufacturing	12,41	-4,32	-0,87	3,95	8,47
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,33	10,83	1,46	6,75	11,29
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Saur/Uang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,46	6,98	6,50	4,01	2,79
F Konstruksi/Construction	4,04	-9,88	2,17	-0,79	4,25
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,13	-6,22	2,27	7,41	5,64
H Transportasi dan Perhubungan/Transportation and Storage	3,35	12,60	0,79	3,93	2,69
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	4,96	-24,94	3,72	17,05	15,24
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,28	12,29	5,48	4,42	5,12
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Finance and Insurance Activities	3,55	9,39	2,80	1,05	1,96
L Real Estate/Real Estate Activities	2,63	2,61	2,50	2,54	2,65
M, N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,38	0,23	0,19	0,19	0,19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	9,83	10,39	9,88	9,68	8,70
P Jasa Pendidikan/Education	10,34	10,78	10,36	9,76	9,32
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	1,74	1,93	1,97	1,88	1,95
R, S, T Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,44	2,05	1,91	1,88	1,85
Y					
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Data 2022 : Angka Sementara
 Data 2023 : Angka Sangat Sementara

Sementara gambaran tentang **Inflasi di Kabupaten Ende**, dapat dilihat dari publikasi BPS Kabupaten Sumba Timur tentang kondisi Inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur dan cenderung mengalami kondisi yang hampir sama dengan Kabupaten Ende. Rilis data BPS Kabupaten Sumba Timur dimaksud, bahwa Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Waingapu sebesar 2,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,25.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 8 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,9 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,77 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,79 persen; kelompok transportasi sebesar 2,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,44 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Waingapu masing-masing sebesar 0,52 dan 1,3 persen. (<https://sumbatimurkab.bps.go.id/pressrelease/2024/04/04/75/maret-2024-inflasi-year-on-year-y-on-y-kota-waingapu-sebesar-2-15-persen.html>)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) gabungan 3 Kota Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,85.

Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 2,15 persen dengan IHK sebesar 106,25 dan terendah terjadi di Maumere sebesar 0,95 persen dengan IHK sebesar 105,23

Bank Indonesia (BI) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan penyumbang utama inflasi NTT pada Maret 2024 adalah pisang. Padahal, pisang bukan merupakan komoditas utama, hal itu terjadi diakibatkan oleh banyaknya tanaman pisang yang terserang hama dan penyakit penyakit layu bakteri atau penyakit darah. Penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri *Ralstonia solanacearum* itu mengakibatkan 70 persen petani di daratan Flores dan Sumba terdampak. (<https://www.rri.co.id/daerah/636267/provinsi-ntt-alami-inflasi-sebesar-1-92-persen>)

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Ende dirumuskan dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi riil ekonomi Kabupaten Ende terkini. Sejalan dengan tema perencanaan yang diarahkan **pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrim untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan**, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan tahun 2023 telah bertumbuh positif pada angka 3,87 persen atau meningkat dari kondisi tahun 2021 sebesar 3,09 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian telah menunjukkan trend terus menuju ke arah positif. Ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Ende telah bangkit kembali, setelah dihantam wabah covid-19 pada tahun 2019 yang lalu.

Sementara untuk itu tingkat inflasi dengan merujuk kepada data Kota Waingapu sebesar 2,15 persen perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk dapat menekannya, dengan menstabilkan harga barang serta mengantisipasi factor-faktor yang menyebabkan pemicu terjadinya inflasi di Kabupaten Ende, termasuk kondisi inflasi beras dan pisang yang perlu mendapat perhatian khusus, serta kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat termasuk mengatasi kondisi tingginya harga beras, dimana inflasi beras juga dialami oleh seluruh kabupaten/kota di NTT

Sejalan dengan itu mbuhan 6 lapangan usaha yang telah mengalami pertumbuhan positif dibawah pertumbuhan ekonomi agregat, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,60), Industri Pengolahan (8,47), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang (2,79), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (5,64), Transportasi dan Pergudangan (2,69), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,34).dapat didorong untuk mengalami pertumbuhan positif diatas agregat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan, yang dilakukan melalui **penelaahan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan anggaran jangka menengah (RPJMD)**. Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 didasarkan pada data dokumen APBD, LKPJ, Laporan Keuangan, sumber-sumber relevan serta memerhatikan kebijakan anggaran pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 untuk tahun 2025 dan arah kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan pada tahun 2025, digunakan untuk mendanai 6 (enam) Program Pembangunan Daerah dan kegiatan strategis yang memiliki daya ungkit terhadap **peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrim untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan** sesuai Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target yang telah direncanakan dalam dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pengeluaran daerah (belanja wajib dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara rasional dan terukur. Perumusan proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan, didasarkan pada kertas kerja (*working paper*), yang meliputi analisis sumber-sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan, analisis pertumbuhan belanja dan neraca daerah. Dalam konteks formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) perumusan kebijakan keuangan diarahkan dalam rangka implementasi Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dirumuskan dengan skema ($A+B = C+D$) atau digambarkan sebagai berikut:



A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan **evaluasi target pendapatan RPJMD (dalam rangka menjamin konsistensi capaian kinerja), data rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan keuangan negara, asumsi ekonomi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi** yang telah dan akan dilakukan, serta memerhatikan **data-data wajib pajak dan obyek pendapatan** sesuai perkembangan regulasi keuangan yang relevan.

Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

1) Evaluasi Target Pendapatan Perubahan RPJMD 2019-2024

Realisasi Pendapatan dalam proyeksi RPJMD pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **-14,04 persen** atau terjadi **Under Target (UT) kurang lebih 14 persen**. Data menunjukkan terjadi selisih antara target RPJMD pada tahun 2024 dengan target pendapatan pada penetapan APBD 2024, dimana komponen PAD sebesar **-35,46 persen**, Pendapatan Transfer sebesar **-10,24 persen**, sementara untuk pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **-69,45 persen** dari proyeksi RPJMD.

Gambaran realisasi atau penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap target RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2024 terhadap Target RPJMD 2019-2024

U R A I A N	Target RPJMD Tahun 2024	Penetapan APBD Induk 2024	Selisih	Capaian Target (%)	Ket.
PENDAPATAN	1.477.080.000.000	1.269.738.677.856	-207.341.322.144	85,96	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.250.000.000	81.479.842.400	-44.770.157.600	64,54	
Pajak Daerah	51.490.000.000	34.158.224.500	-17.331.775.500	66,34	
Retribusi Daerah	11.450.000.000	6.522.400.000	-4.927.600.000	56,96	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.980.000.000	4.500.000.000	-480.000.000	90,36	
Lain2 PAD Yang Syah	58.330.000.000	36.299.217.900	-22.030.782.100	62,23	
PENDAPATAN TRANSFER	1.309.890.000.000	1.175.753.622.676	-134.136.377.324	89,76	
Transfer Pemerintah Pusat	1.245.030.000.000	1.137.169.532.000	-107.860.468.000	91,34	
Dana Perimbangan	1.008.120.000.000	929.185.296.000	-78.934.704.000	92,17	
Dana Desa	221.970.000.000	207.984.236.000	-13.985.764.000	93,70	
Transfer pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14.940.000.000	-	-		
Transfer Antar Daerah	64.860.000.000	38.584.090.676	-26.275.909.324	59,49	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.860.000.000	38.584.090.676	-26.275.909.324	59,49	
Bantuan Keuangan	-	-	-		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.940.000.000	12.505.212.780	-28.434.787.220	30,55	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.940.000.000	12.505.212.780	-26.488.126.900	30,55	

Sumber: RPJMD 2019-2024 dan APBD 2023 (Olahan Bappeda)

Untuk menelaah lebih jauh, dilakukan **perbandingan target tahunan** dengan melakukan evaluasi perbandingan Target Pendapatan pada APBD Induk Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024. Dari hasil analisis menunjukan secara total terdapat penurunan sebesar 118,959 Miliar dari keadaan 1,287 Trilyun pada tahun 2020 menjadi 1,168 Trilyun pada Tahun 2021, dan kembali mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen atau menjadi 1,284 Trilyun di tahun 2022, serta kembali menurun menjadi 1,185 Trilyun atau menurun sebesar 7,65 persen pada tahun 2023.

Sementara itu tinjauan masing-masing pos, menunjukan beberapa hal menarik, antara lain:

- a. Peningkatan target Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,19 %
- b. Peningkatan target Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 0,61 %
- c. Peningkatan pada pos Dana Desa sebesar 7,23 %
- d. Sementara pada pos pendapatan lainnya, mengalami penurunan

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2020-2023 dan Target Pendapatan Tahun 2023-2024

U R A I A N	Penetapan Perubahan APBD 2021	Penetapan APBD Induk 2022	Penetapan APBD Induk 2023	Penetapan APBD Induk 2024	Bertambah / Berkurang (+ / -)	% Selisih	Proyeksi/ Target Tahun 2025 (dalam Miliar)
PENDAPATAN	1.168.916.506.460	1.284.200.949.171	1.185.919.899.176	1.269.738.677.856	83.818.778.680	7,06	1.269,88
PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.226.425.187	80.445.342.400	80.672.842.400	81.479.842.400	807.000.000	1	84,57
Pajak Daerah	33.754.328.500	34.158.224.500	34.158.224.500	34.158.224.500	-	-	39,84
Retribusi Daerah	6.194.200.000	6.502.900.000	6.515.400.000	6.522.400.000	7.000.000	0,1	6,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.425.775.556	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	5,25
Lain PAD yang sah	45.852.121.131	35.284.217.900	35.499.217.900	36.299.217.900	800.000.000	2,25	32,88
PENDAPATAN TRANSFER	1.050.715.245.273	1.114.422.290.771	1.094.985.183.676	1.175.753.622.676	80.768.439.000	7,37	1.170,50
Transfer Pemerintah Pusat	1.019.940.881.000	1.085.431.957.000	1.066.401.093.000	1.137.169.532.000	70.768.439.000	6,63	1.129,37
Dana Perimbangan	820.210.213.000	889.450.786.000	859.573.366.000	929.185.296.000	69.611.930.000	8,089	933,66
Dana Insentif Daerah	-	3.106.574.000	-	-	-	-	-
Dana Desa	199.730.668.000	192.874.597.000	206.827.727.000	207.984.236.000	1.156.509.000	0,55	195,71
Transfer Antar Daerah	30.774.364.273	28.990.333.771	28.584.090.676	38.584.090.676	10.000.000.000	34,98	41,13
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.974.836.000	89.333.316.000	10.261.873.100	12.505.212.780	2.243.339.680	21,86	10,81
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.974.836.000	89.333.316.000	10.261.873.100	12.505.212.780	2.243.339.680	21,86	10,31

Sumber: APBD 2020, 2021, 2022, 2023 dan Perubahan RPJMD Kab. Ende 2019-2024

2) Analisis rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Sementara itu dari data trend pendapatan, diketahui secara **keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah** Kabupaten Ende kurun waktu 2020-2023 sebesar **-2,34 persen**, dengan rincian: PAD menurun sebesar 3,44 persen, Transfer Pemerintah Pusat menurun sebesar 2,22 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertumbuh sebesar 49,77 persen.

Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah pada Penetapan APBD Tahun 2020-2023

U R A I A N	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata2 (%)	Ket.
PENDAPATAN	1.287.876.380.500	1.168.916.506.460	1.284.200.949.171	1.185.919.899.176	(2,34)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.000.000.000	90.226.425.187	80.445.342.400	80.672.842.400	(3,44)	
Pajak Daerah	33.926.986.400	33.754.328.500	34.158.224.500	34.158.224.500	0,23	
Retribusi Daerah	6.547.506.600	6.194.200.000	6.502.900.000	6.515.400.000	(0,07)	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.356.329.700	4.425.775.556	4.500.000.000	4.500.000.000	11,18	
Lain2 PAD yang syah	46.169.177.300	45.852.121.131	35.284.217.900	35.499.217.900	(7,71)	
PENDAPATAN TRANSFER	858.219.000.000	1.050.715.245.273	1.114.422.290.771	1.094.985.183.676	8,92	
Transfer Pemerintah Pusat	1.150.115.209.000	1.019.940.881.000	1.085.431.957.000	1.066.401.093.000	(2,22)	
Dana Perimbangan	947.628.756.000	820.210.213.000	889.450.786.000	859.573.366.000	(2,79)	
Dana Bagi Hasil (DBH)	9.941.138.000	10.766.056.000	12.243.405.000	9.014.129.000	(1,45)	
DAU	670.733.963.000	586.973.668.000	587.010.907.000	622.119.754.000	(2,17)	
DAK	266.953.655.000	222.470.489.000	290.196.474.000	228.439.483.000	(2,50)	
Dana Insentif Daerah	-	-	3.106.574.000	-	-	
Dana Desa	202.486.453.000	199.730.668.000	192.874.597.000	206.827.727.000	0,81	
+ Transfer Antar Daerah	25.191.904.884	30.774.364.273	28.990.333.771	28.584.090.676	4,99	
Pendapatan Bagi Hasil	25.191.904.884	24.404.571.500	28.990.333.771	28.584.090.676	4,75	
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.608.600.000	27.974.836.000	89.333.316.000	10.261.873.100	49,77	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.608.600.000	27.974.836.000	89.333.316.000	10.261.873.100	49,77	

Sumber: APBD 2020, 2021 dan 2022, 2023 dan Analisis Bappeda

Memperhatikan hasil evaluasi target pendapatan, realisasi rata-rata pertumbuhan pendapatan, kebijakan keuangan negara, serta didasarkan pada kertas kerja (*perhitungan analisa sumber pendapatan dan kinerja realisasi pendapatan*), diproyeksikan **Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 sebesar Rp. 1,477 Trilyun**, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 126,250 Milyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1,309 Trilyun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 40,940 Milyar.

Gambaran rencana masing-masing Pos Pendapatan diuraikan sebagai berikut:

• **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- a. **Pajak Daerah** diproyeksikan sebesar ± Rp. 51.490.000.000,- atau meningkat 51 % dari target APBD 2023 sebesar Rp.34.158.224.500. Persentase peningkatan dengan memperhatikan proyeksi pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dengan mempertimbangka data rata-rata pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan membaiknya perekonomian daerah yang dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ende dari kondisi -1,33 pada tahun 2020 sebagai akibat langsung dari dampak Covid-19, namun pada tahun 2022 telah meningkat menjadi 3,03 di tahun 2023.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat sejalan dengan meningkatnya Pendapatan Daerah dari pos Pajak Daerah.

- b. **Retribusi Daerah** diproyeksikan sebesar **± Rp. 11.450.000.000,-** atau naik sebesar 76% dari target APBD 2023 sebesar Rp.6.515.400.000,-. Persentase kenaikan dikoreksi dari data rata-rata pertumbuhan dari tahun 2017-2021, sebesar 13,32 %. Sementara penetapan target kenaikan dilaksanakan, juga memerhatikan Target pos ini pada tahun 2024 dalam dokumen Perubahan RPJMD, dan potensi riil peningkatan retribusi daerah yang dapat menjadi semakin baik dengan pengelolaan fasilitas publik yang telah dibangun, dan adanya pembangunan beberapa obyek baru.
- c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** diproyeksikan sebesar **±Rp.4.980.000.000,-** atau meningkat 11 % dari keadaan Rp.4.500.000.000,- pada penetapan target APBD 2023. Proyeksi ini mempertimbangkan bahwa alokasi APBD Induk 2023 masih dalam kisaran angka capaian 2022. Pencapaian target pos ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal.
- d. **Lain-lain PAD Yang Sah** diproyeksikan sebesar **± Rp. 58.330.000.000,-** atau meningkat sebesar 64 % dari target APBD 2023 sebesar Rp. 35.499.217.900. Pos ini didominasi oleh pendapatan BLUD RSUD Ende, Jasa Giro Pemegang Kas, Giro Kas Daerah, Giro Rekening Deposito dan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Kenaikan proyeksi ini juga dengan memerhatikan kondisi realisasi pos Lain-Lain PAD Yang Sah ini, kondisi pada tahun 2022, dimana mampu terealisasi mencapai sebesar 115,06 % atau sebesar Rp.40,844 Milyar dari target sebesar Rp.35,499 Milyar.

• **Pendapatan Transfer**

Target penerimaan dari Pos Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat yang diperkirakan diterima terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara transfer antar daerah diperkirakan berasal dari pos bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi NTT.

Gambaran proyeksi penerimaan dari pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut:

a. **Transfer Pemerintah Pusat**

1) Dana Perimbangan

- **Dana Bagi Hasil (DBH)** diproyeksikan sebesar **± Rp 37.140.000.000,-** meningkatnya proyeksi pada pos ini, mempertimbangkan adanya tambahan pendapatan dari bagi hasil dari pengembangan energi panas bumi Mutubusa.
- **Dana Alokasi Umum (DAU)** diproyeksikan sebesar **± Rp.630.750.000.000,-** atau meningkat sebesar 1,4 % dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 622.119.754.000,-
- **Dana Alokasi Khusus (DAK)** diproyeksikan sebesar **± Rp.340.240.000.000,-** meningkat sebesar 49 % dari keadaan **Rp.228.439.483.000,-** pada target APBD 2023. Target DAK ini terdiri atas DAK Fisik dan Non fisik.

Sejalan dengan kebijakan DAK, diharapkan adanya peningkatan pada alokasi DAK untuk Kabupaten Ende yang diikuti dengan proses optimalisasi proses pengusulan DAK Fisik melalui Aplikasi Krisna DAK oleh Perangkat Daerah terkait, khususnya yang berkaitan dengan DAK Tematik Pertanian, Perumahan, Perikanan, dan Irigasi yang sudah tidak didapatkan lagi sejak 3 (tiga) tahun terakhir.

Sementara DAK Non fisik terdiri atas, Dana TP Guru PNSD, Dana TKG PNSD, Dana BOP PAUD, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, Dana BOKKB BOK, Dana BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan, Dana BOKKB Jaminan Persalinan, Dana BOKKB BOKB, Dana PKZUKM, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Fasilitas Penanaman Modal dan Dana Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Perencanaan pada tahun 2024 diperkirakan Kabupaten Ende akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah sebesar ± Rp. 14.940 Miliar. Kondisi ini mengingat setelah pada tahun 2022 Kabupaten Ende mampu memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 3.106.574.000,- dan jika di optimalkan dalam proses-proses inovatif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka akan diperoleh Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat.

3) Dana Desa

Dana desa diproyeksikan sebesar ± Rp. 221.970.000.000,- Proyeksi ini memerhatikan pokok kebijakan transfer dana desa dalam RKP yang mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari dan di luar transfer ke daerah. Dana desa di Kabupaten Ende Tahun 2023 pada angka 206,827 Miliar, setelah sebelumnya pada keadaan 2022 sebesar 192,874 Miliar.

b. Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan bagi Hasil, yang merupakan bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan mengalami kenaikan dengan perolehan sebesar ±Rp.64.860.000.000,-.
- 2) Bantuan Keuangan Provinsi, diperkirakan pada tahun 2024 tidak mendapat alokasi, mengingat keadaan yang sama pada tahun 2020, 2021, 2022 dan tahun 2023, sebagai implikasi penyerahan urusan/tanggungjawab provinsi kepada Kabupaten kota di bidang pendidikan dasar khususnya pembiayaan honorarium guru kontrak.

• **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Sejalan dengan perubahan Struktur Anggaran yang mengikuti perkembangan regulasi yang baru, maka untuk pos Lain-Lain PAD Yang Sah diproyeksikan Kabupaten Ende akan memperoleh alokasi sebesar ± Rp. 40.950.000.000,-. Alokasi tersebut diperoleh dari pendapatan Hibah Dana BOS dan pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

3) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan menggambarkan uraian kebijakan perencanaan pendapatan dan upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pencapaian target. Gambaran kebijakan pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta pertimbangan kebutuhan pendanaan di masa mendatang.

1) Perencanaan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2025 dilaksanakan dengan memerhatikan capaian kinerja pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan realisasi keuangan dan LKPJ Tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 pada tataran Baik, yaitu sebesar Rp. 1.092.741.753.580,03 atau 86,44 % dari target setelah Perubahan sebesar Rp. 1.264.153.155.619,00. Dari realisasi penerimaan tersebut pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai 81,57 persen, dan Pendapatan Transfer mencapai 91,04 persen.
- b. Dirumuskan dengan memerhatikan arah kebijakan fiskal dan kebijakan terkait Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2025.
- c. Pendapatan Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sejumlah Rp.1,477 Trilyun, atau meningkat sebesar ± Rp. 291,180 miliar dari pendapatan daerah pada APBD Penetapan Awal Tahun 2024.
- d. Proporsi sumber Pendapatan Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu sebesar ± Rp. 1,245 Trilyun (84,29%), diikuti PAD sebesar ± Rp. 126,250 Milyar (8,55%) dan transfer antar daerah sebesar ± Rp. 64,860 Milya (4,39 %).

2) Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah

Memerhatikan isu pokok capaian kinerja pendapatan diatas, kebijakan keuangan negara, serta mempertimbangkan kondisi riil ketergantungan fiskal daerah, diperlukan upaya-upaya terencana dan terpadu agar target pendapatan daerah dapat dicapai, antara lain:

- a. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat serta mengupayakan penganggaran-penganggaran yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan kesamaan persepsi dalam hal penyusunan anggaran terutama yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak terjadi deviasi yang cukup tinggi antara realisasi dengan anggaran/target.
- c. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- d. **Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah**, melalui pembenahan manajemen data pajak dan retribusi, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada khususnya terhadap obyek retribusi daerah pada daerah-daerah obyek wisata yang telah dibangun dan dikembangkan, menambah jenis, menaikkan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian.
- e. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh dan PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi.
- f. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh *multityplayer effect* kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah.
- g. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.
- h. Menyederhanakan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Sistem Pelayanan Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.
- i. **Tetap melakukan penyertaan modal** untuk meningkatkan bagian laba pada komponen bagian hasil Pengelolaan kekayaan daerah. Data LKPJ setiap tahun menunjukan capaian signifikan pos pendapatan ini.
- j. **Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Syah**, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, pengembalian dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN.
- k. **Koordinasi usulan DAK yang telah disampaikan melalui aplikasi Krisna DAK**, melalui penyediaan data dukung (*readiness criteria*) yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- l. **Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2024**, karena menjadi dasar perhitungan alokasi DAK Tahun 2025.
- m. **Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi** dalam rangka penyesuaian data potensi penerimaan bagi hasil.

B. Proyeksi Belanja Daerah

1) Kebijakan Keuangan Negara Tahun 2025

Gambaran kebijakan keuangan negara pada saat disusunnya RKPD ini, dapat dilihat pada halaman: (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2024/05/20/4495-pemerintah-fokus-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan-melalui-kebijakan-fiskal-2025>), sebagai berikut:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan desain kebijakan APBN pada tahun 2025 diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM yang berdaya saing, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkuat nasionalisme, demokrasi dan HAM. Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat dan kredibel. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat melalui *collecting more, spending better, dan innovative financing*.

Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan PNBPN dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan *spending better* agar belanja lebih efisien dan efektif. Upaya penguatan *spending better* ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlintas yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59% s.d. 15,18% PDB.

Defisit fiskal diperkirakan di kisaran 2,45% - 2,82% PDB. Upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable yang ditempuh, antara lain dengan: (1) mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 37,98% - 38,71% PDB; (2) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF; (3) memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian; dan (4) peningkatan akses pembiayaan bagi MBR dan UMK; serta (5) mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104-105.

Data Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 mengacu kepada laporan keuangan. Sementara Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1,260 Trilyun yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 814,24 Milyar, Belanja Modal sebesar Rp. 166,62 Milyar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7,52 Milyar, dan Belanja Transfer sebesar Rp.272 Milyar.

Tabel 3.4. Realisasi dan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 serta
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025

U R A I A N	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022	Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023	Alokasi Belanja Daerah Tahun 2024	Selisih	% Selisih	Proyeksi/ Target Tahun 2025 (dalam miliar)
BELANJA	1.219.546.343.610	1.098.396.706.066	1.193.478.332.476	1.264.738.677.856	71.260.345.380	5,97	1.260,38
BELANJA OPERASI	772.457.059.120	699.965.126.927	785.937.311.249	815.518.298.320	29.580.987.051	3,76	814,24
Belanja Pegawai	494.499.196.668	443.838.488.125	494.452.783.818	500.818.730.859	6.365.947.041	1,29	544,56
Belanja Barang dan Jasa	246.716.062.249	206.187.865.211	241.480.648.385	240.805.955.439	-674.692.946	-0,28	237,02
Belanja Bunga	-	-	1.087.500.000	-	-	-	0,00
Belanja Hibah	29.482.000.203	49.520.757.122	48.741.979.066	73.801.362.022	25.059.382.956	51,41	32,07
Belanja Bantuan Sosial	1.759.800.000	418.016.469	174.400.000	92.250.000	-82.150.000	-47,10	0,49
BELANJA MODAL	176.134.748.438	141.963.901.685	146.712.768.757	171.413.215.136	24.700.446.379	16,84	166,62
Belanja Modal Tanah	1.704.300.000	0	0	0	0	0,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.025.450.933	46.465.369.741	45.049.096.017	35.921.441.561	-9.127.654.456	-20,26	57,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.725.593.887	22.263.372.304	40.081.472.000	56.228.200.256	16.146.728.256	40,28	49,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.059.423.488	72.445.189.890	56.718.825.000	71.974.924.254	15.256.099.254	26,90	51,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.619.980.130	789.969.750	4.863.375.740	7.258.649.065	2.395.273.325	49,25	7,86
Belanja Aset Lainnya				30.000.000	30.000.000	100	
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.941.394.230	2.005.833.598	7.019.704.000	2.000.000.000	-5.019.704.000	-71,51	7,52
Belanja Tidak Terduga	7.941.394.230	2.005.833.598	7.019.704.000	2.000.000.000	-5.019.704.000	-71,51	7,52
BELANJA TRANSFER	263.013.141.822	254.461.843.856	253.808.548.450	275.807.164.400	21.998.615.950	8,67	272,00
Belanja Bagi Hasil	3.392.698.640	3.415.822.450	3.415.822.450		-3.415.822.450		3,66
Belanja Bantuan Keuangan	259.620.443.182	251.046.021.406	250.392.726.000	275.807.164.400	25.414.438.400	10,15	268,34

Sumber: Laporan Keuangan, LKPJ Tahun 2021, 2022, APBD Tahun 2023, 2024, Perubahan RPJMD Kab. Ende 2019-2024, RPD Kab. Ende Tahun 2025-2026

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025

Secara umum kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2025 diarahkan untuk mendanai program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Bupati dan Wakil Bupati dan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas terhadap pencapaian kinerja dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Belanja daerah terlebih dahulu dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Tahun 2025 diproyeksikan sejumlah Rp. 589,01 miliar yang terdiri atas komponen Belanja Pegawai sejumlah Rp. 544,66 miliar serta pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5 miliar.

Tabel 3.5. Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2025

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2025 (Miliar)	KET.
1	Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan Termasuk Operasional KDH)	544,66	
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya	39,35	
4	Pengeluaran pembiayaan (Penyertaan Modal)	5,00	
	TOTAL	589,01	

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025 disesuaikan dengan proyeksi pendapatan, asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Gambaran arah kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai (Gaji Dan Tunjangan Termasuk Operasional KDH) sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, diasumsikan mengalami kenaikan 8,74%. Hal ini didasarkan pertimbangan rata-rata pertumbuhan kurun waktu 2021 – 2024 dan kondisi riil realisasi belanja yang tidak mencapai 100% atau terdapat sisa belanja pegawai dari target yang direncanakan.
- b. Belanja Jasa kantor diasumsikan pada tahun 2025 sebesar 39,35 Milyar untuk Perangkat Daerah.
- c. Pengeluaran pembiayaan dari tahun 2021-2023 disediakan untuk Penyertaan Modal kepada Bank NTT sebesar Rp. 5 Milyar, sementara pada tahun 2024 disediakan untuk Penyertaan (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 5 milyar.

Selanjutnya selisih Penerimaan Daerah dengan alokasi Belanja Wajib dan Mengikat, yang merupakan Kapasitas Riil Keuangan Daerah sejumlah Rp 676,37 Miliar digunakan untuk mendanai kebutuhan, sebagai berikut:

- a. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas I.
 - Berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah dan Pagu Indikatif Desa/Kelurahan dianggarkan sebesar 353,53 milyar, yang diprioritaskan pendanaan untuk 6 (enam) Program Pembangunan Daerah (Propeda), yaitu:
 - 1) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, optimalisasi

ditujukan antara lain untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, karakter serta prestasi olahraga. Sedangkan di bidang kesehatan optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan tatakelola penduduk, terutama penurunan angka stunting dan gizi buruk serta AKI dan AKB. Dengan demikian ke depan akan menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang sehat, cerdas dan berkarakter dalam menghadapi era industry 4.0 dan era society 5.0.

2) PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat.

3) PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI

Program ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat guna mengendalikan inflasi daerah melalui penguatan peran dan fungsi dari Tim Penanggulangan Inflasi daerah (TPID) dan Tim Ekonomi Daerah.

4) PROGRAM KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan rantai pasok dan rantai distribusi pangan guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan melalui pertanian berkelanjutan serta revitalisasi kearifan lokal.

5) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN INVESTASI

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan menuju terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) melalui Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM birokrasi pemerintah, Optimalisasi penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, kemudahan dalam proses berinvestasi serta peningkatan sinergitas prioritas pembangunan antar level pemerintahan.

6) PROGRAM STABILISASI SOSIAL, POLITIK, KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan sosial kemasyarakatan yang merata, menciptakan iklim berpolitik yang sehat, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan kemasyarakatan dan iklim berusaha. Dalam konteks pembangunan demokrasi, program ini juga dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak politik masyarakat serta penguatan fungsi lembaga demokrasi.

- program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu dianggarkan sebesar Rp 10,76 Miliar.
- b. **Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II**, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Rincian selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.6. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 (dalam Miliar)

No	Uraian	Rencana RKPD 2024	Proporsi thd Kap. Riil (%)	Ket.
A.	Prioritas I	364,29	53,86	
1	Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor (tidak termasuk Jasa Kantor dan Gaji dan tunjangan)	10,76		
2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Propeda	353,53		
B.	Prioritas II	312,08	46,14	
1	Belanja Bansos	0,49		
2	Belanja Hibah	32,06		
3	Belanja Tidak Terduga	7,52		
4	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (Dana Desa, ADD, Tunjangan Kades/BPD, dll), Bantuan Parpol	272,01		
TOTAL (A+B)		676,37	100	

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Ende 2019-2024, Olahan Bappeda kertas kerja RKPD 2025

C. Proyeksi Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Gambaran dari proyeksi Pembiayaan Daerah pada tahun 2025, dapat digambarkan pada table 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7. Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Alokasi Tahun 2023	Alokasi Tahun 2024	Proyeksi/ Target Tahun 2025 (dalam Juta)
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.629.837.150	49.441.512.962	20.558.433.300	115.636.232.840	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.629.837.150	49.441.512.962	558.433.300	115.636.232.840	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	20.000.000.000		-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	13.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	8.000.000.000		
PEMBIAYAAN NETTO	50.629.837.150	44.441.512.962	7.558.433.300	110.636.232.840	-
SALDO	-	-	-	-	-

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Ende 2019-2024, RPD 2025- 2026, APBD Tahun 2023 dan Olahan Bappeda kertas kerja RKPD 2025

1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berkaitan dengan arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 pemerintah Kabupaten Ende tidak mengeluarkan kebijakan penerimaan, baik untuk penggunaan Silpa maupun pembiayaan lainnya.

2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dokumen RPJMD dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 masih menunggu kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025-2029.

Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dirumuskan **Skema Alokasi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025**, sebagai berikut:

Tabel 3.8. Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025

PENERIMAAN DAERAH			PENGELUARAN DAERAH		
1	Pendapatan Daerah	1.477.100.000.000	I	Belanja Wajib dan Terikat	1.008.530.000.000
A	Pendapatan Asli Daerah	126.250.000.000	1	Belanja pegawai (Gaji Dan Tunjangan Termasuk Operasional KDH)	481.570.000.000
	Pajak Daerah	51.490.000.000	2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.100.000.000
	Retribusi Daerah	11.450.000.000	3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	49.610.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.980.000.000	4	Pengeluaran pembiayaan (Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran cicilan Pinjaman Daerah)	80.000.000.000
	Lain2 PAD yang syah	58.330.000.000	5	Belanja Bunga	11.250.000.000
			6	Prioritas Utama (PROPEDA & PIDES/PIKEL)	385.000.000.000
B	Pendapatan Transfer	1.309.900.000.000	II	Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	528.570.000.000
	Tranfer Pemerintah Pusat	1.245.040.000.000	A.	Prioritas I	203.550.000.000
	Dana Perimbangan	1.008.130.000.000	1	Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor	9.720.000.000

PENERIMAAN DAERAH			PENGELUARAN DAERAH		
				(tidak termasuk Jasa Kantor dan Gaji dan tunjangan)	
	• Dana Bagi Hasil (DBH)	37.140.000.000	2	Program dan Kegiatan Perangkat daerah (Top down)	166.590.000.000
	• DAU	630.750.000.000	3	Jasa Pendukung (Kontrak Daerah)	27.240.000.000
	• DAK	340.240.000.000	B.	Prioritas II	325.020.000.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	14.940.000.000	1	Belanja Bansos	240.000.000
	Dana Desa	221.970.000.000	2	Belanja Hibah	35.000.000.000
	Transfer Antar Daerah	64.860.000.000	3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil	64.860.000.000	4	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (Dana Desa, ADD, Tunjangan Kades/BPD, dll), Bantuan Parpol	279.780.000.000
	Bantuan Keuangan	-			
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.950.000.000			
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.950.000.000			
2	Penerimaan Pembiayaan	60.000.000.000			
	SILPA	-			
	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000			
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1.537.100.000.000		TOTAL PENGELUARAN DAERAH	1.537.100.000.000

Sumber: Olahan Bappeda (Kertas Kerja RKPD 2025)

D. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende sumber pendanaan selain dari APBD Kabupaten Ende, juga diperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT, Program Kemitraan NGO Internasional dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi NTT, berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang melaksanakan program dan kegiatan dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari beberapa Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi NTT, sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi yang ada di Kabupaten Ende.

Mekanisme pengusulan program dan kegiatan untuk didanai APBN dan APBD Provinsi, dilakukan secara online melalui aplikasi e-Musrenbang. Dengan demikian khusus Perangkat Daerah yang mengusulkan program dan kegiatan untuk di danai oleh APBN dan APBD Provinsi, agar memastikan seluruh data dukung dan persyaratan teknis usulan terpenuhi serta jaminan pelaksanaan di tingkat Kabupaten Ende tidak mengalami permasalahan.

Sementara itu untuk program dan kegiatan dengan pendanaan dari NGO dan CSR, dapat diperoleh melalui partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Ende untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan Organisasi/Lembaga terkait.

Strategi lainnya untuk memperoleh pendanaan pembangunan di Kabupaten Ende, dengan memanfaatkan peluang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan tujuan:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengalihan dana swasta;
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Tugas Pemerintah adalah sebagai fasilitator, mediator dan regulator bukan hanya sebagai eksekutor. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende untuk memperoleh sumber pendanaan lainnya selain DAU, melalui CSR, DAK, Kemitraan dengan NGO dan berbagai sumber lain sebagai alternatif dalam pendanaan program dan kegiatan pembangunan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/ BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Dari gambaran kebijakan ekonomi dan keuangan, dirumuskan ringkasan **Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2025 yang secara fungsi merupakan instrumen atau alat utama dari kebijakan fiskal**. Kebijakan fiskal ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran daerah, untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi Kabupaten Ende, dengan target utama adalah pencapaian indikator RPMD. Dalam konteks yang lebih luas akan berimplikasi pada penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan ±273 ribu jiwa penduduk Kabupaten Ende.



Bab ini memuat penjelasan tentang Tujuan, Sasaran dan Prioritas yang menjadi fokus pembangunan. Mengingat bahwa pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran TAHUN PERTAMA dari RPD TAHUN 2025-2026, maka perumusan prioritas dan sasaran, diarahkan dalam rangka memantapkan seluruh sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPD. Disajikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, dan 2) Prioritas Pembangunan Daerah, yang menggambarkan prioritas pembangunan jangka menengah pada tahun rencana (2025). Perumusan Sasaran dan prioritas didasarkan pada hasil evaluasi RKPD, analisis capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan sebagaimana disajikan pada Bab II, serta memperhatikan rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang disajikan di Bab III.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional dalam rancangan teknokratik RPJPN Tahun 2025-2045 adalah **"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN."**

Diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam delapan agenda pembangunan, yaitu:

Dari agenda pembangunan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial:** untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh kehidupan dan juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.
2. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi:** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan IPTEK, inovasi, dan ekonomi produktif pada sektor-sektor berikut ini; manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, *blue economy*, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN;
3. **Mewujudkan Transformasi tata Kelola:** untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang bisa menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. **Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:** untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global, dan juga membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:** untuk memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan;
6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan:** untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi;
7. **Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan:** Poin ini menjadi salah satu faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi;

8. **Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan:** Aspek ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

4.1.2. Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2025, adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (respon terhadap perubahan iklim);
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

4.1.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat 7 [tujuh] Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhanam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.1.4. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Berdasarkan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Kemudian, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan pembangunan Provinsi NTT kurun waktu 2024-2026 tertuang dalam Pergub Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi acuan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam berpartisipasi aktif untuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Pengembangan RantaiNilai ekonomi lokal
2. Penguatan system ekonomi masyarakat
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentinganlainnya
4. Peningkatan kualitashidup masyarakat
5. Ketersediaan danpemantapan infrastruktur
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM

Sementara itu Tema Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025, yaitu: “**Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang Berkualitas**”, dengan Empat Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2025, yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi Birokrasi.

Sedangkan **target pembangunan Provinsi NTT pada tahun 2025**, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

NO	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	REALISASI 2023	TARGET RKP 2025 UNTUK PROV. NTT	TARGET NTT 2025 RKPD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,28-5,42	4,75-5,65
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 ⁴¹	2,49-2,99	2,3-3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36 ⁴¹	15,32-15,82	15,32-15,82
4.	Rasio Gini (nilai)	0,388 ⁴¹	0,319-0,324	0,319-0,324
5.	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56	0,56
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRk (%)	34,09 ⁴²	38,6	61,82

4.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025

Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, isu strategis aktual serta mengacu pada RPJPN dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPD tahun 2025-2026 ini, merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator masing-masing Sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pemetaan Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Indikator Kinerja (Strategis)		Sasaran	Indikator Kinerja (Strategis)	Kinerja Awal RPJ 2022	TARGET KINERJA					
							2024	2025	2026	Kinerja Akhir		
1. Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya sang	1.	Indeks Pembangunan Manusia	1.	Meningkatkan Abundansi Kualitas Pendidikan	1. Rasio Rata Lama Sekolah	8,09	8,23	8,31	8,40	8,40		
					2. Harapan Lama Sekolah	12,81	13,83	13,84	13,85	13,85		
					3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45,62	50	55	60	60		
2. Meningkatkan Indeks Yang Sehat	1.	Angka Gizi Harapan Hidup	2.	Meningkatnya Urutaji Kesehatan Masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup	65,36	66,21	66,45	66,59	66,69		
					2. Prevalensi Stunting	6,8 (2021)	5,9	5,4	2,9	2,9		
3. Meningkatkan kualitas Personel dan Kabupaten Ende	1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	0,3126	0,3150	0,3180	0,3181	0,3181		
					4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri, Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pengudangan)	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,521	1,528	1,521	1,535	1,535
							2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,559	16,672	16,694	16,696	16,694
			5.	Meningkatnya Investasi	1. Milik Investasi	2398 M	1 M	1 M	1 M	3 M		
			6.	Meningkatnya Ketahanan dan Ketidakterpaparan Pangan	1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	29,57	29,70	30,28	30,81	30,83		
					2. Partisipasi Sekt Rata Pangan Harapan (PPH)	16,7	27,0	27,2	27,4	27,4		
			7.	Menurunkan Tingkat Pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,06	1,85	1,54	1,33	1,33		
			8.	Menurunnya kemiskinan masyarakat	3. Persentase penduduk miskin (%)	25	22,21	22,08	21,95	21,95		
			9.	Meningkatnya Pengendalian inflasi	3. Laju Inflasi (%)	0,80%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%		

Tipe	Indikator Kinerja (Strategis)	Sasaran	Indikator Kinerja (Strategis)	Kinerja Real 2023	TARGET KINERJA				
					2024	2025	2026	Kinerja Awal	
4	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	10 Meningkatkan Pemertan Ketersediaan Infrastruktur: Jalan, Saluran Air, dan Telekomunikasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1 Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,46	56,60	58,71	60,60	60,60
			11 Meningkatkan Pemertan Pembangunan Kawasan Perkotaan	2 Indeks Tata Membangun (ITM)	0,6625 (Th. 2023)	0,6307	0,6155	0,6461	0,6461
			12 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,85	77,81	72,62	72,50	72,52
5	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	13 Meningkatkan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Inovatif	1 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (NAKPD)	12 (53,31)	8180,213	8181,42	8182,23	8182,23
				3 Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,8	2,3	2,58	2,8	2,8
				4 Indeks Kepuasan Masyarakat	8	8	8	8	8
				5 Indeks Moral Pejabat	74 (belum dihitung)	175	290	275	175
				6 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	2,7	3	3	3
				7 Persentase Pendapatan dan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD	27,84	34	36	38	38
				8 Indeks Pengawasan Keuangan	30,34	30	35	40	40
				9 Indeks Kepuasan Masyarakat kepada Lembaga DPRD	Skor 74,15	Skor 74	Skor 84	Skor 85	Skor 85

Tipe	Indikator Kinerja (Strategis)	Sasaran	Indikator Kinerja (Kebijakan)	Kinerja Awal RPJ 2022	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	Kinerja Akhir
		14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pengiriman Uang dan Kelengkapan serta Perlindungan sosial bagi Masyarakat	1. Indeks Pelayanan Sosial	82,89	85,02	85,23	85,28
				2. Indeks Keamanan dan Ketertarikan Umum	72,28	72,53	72,65	72,78
				3. Indeks Perilaku dan Partisipasi Masyarakat dan Anak	81,80	83,115	83,21	83,38
				4. Angka Efisiensi	0,000274	0,000274	0,000274	0,000274
				5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPM perempuan yg berpartisipasi pada politik dan ekonomi/IPM perempuan yg berpartisipasi pada politik dan ekonomi > 200%)	66,02	74,47	72,34	74,00

Sumber: RPJ Kabupaten Ende 2025-2026

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Sasaran Pembangunan

Sasaran dan target pembangunan daerah Kabupaten Ende pada tahun 2025, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.3 Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2025

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal RPD (2023)	TARGET KINERJA	
			2024	2025
	INDIKATOR MAJRO			
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,63	68,40	68,70
2.	Persentase penduduk miskin (%)	22,86	22,21	22,08
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,59	1,849	1,542
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,87	3,64%	3,91%
5.	PDPS per Kapita (Rp. juta) ADHK	16,00	16,497	16,900
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,273	0,2985	0,29475

4.2.2. Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025, merupakan penjabaran program pembangunan Kabupaten Ende yang disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2025. Prioritas Pembangunan memuat program unggulan daerah dan program prioritas seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemkab Ende.

Beberapa Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Ende, sebagai berikut:

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan, dirumuskan Isu Strategis Kabupaten Ende, antara lain:

1. Pemilihan Umum dan pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembanganya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatanya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum yang bersifat langsung Umum bebas dan Rahasia (LUBER) untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat

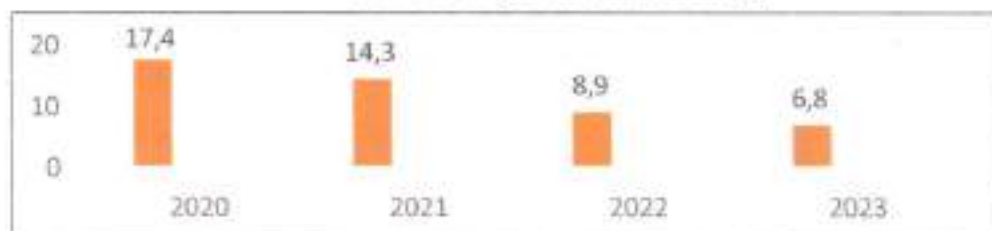
(4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Stunting, Gizi Buruk (SDM), AKI dan AKB

Kejadian balita stunting (pendek) dan Gizi buruk merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dan gizi buruk menjadi salah satu dari proyek prioritas an percepatan penurunan kematian ibu, stunting dan Gizi buruk masuk dalam daftar *Major Projects 2020—2024* dan menjadi Program Prioritas Nasional Tahun 2021 dalam RPJMN 2020 – 2024. Prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 14 % ditahun 2024. Target Penurunan Stunting Nasional tahun 2022 yaitu 21,6%.

Grafik 4. 1 Angka Prevelensi stunting



Sumber data: e-PPGBM

Realisasi penurunan prevalensi stunting Kabupaten Ende berdasarkan Data Penimbangan dan ePPGBM 2021 pada 3 (tiga) tahun terakhir angka prevalensi stunting Kabupaten Ende mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari total 14,3 % pada tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 8,9 % dan pada tahun 2023 prevalensi balita stunting menurun menjadi 6,8%.

Balita yang dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS (Kartu Menuju Sehat) dikategorikan sebagai balita gizi buruk. Pada tahun 2022 sebesar 2,69 persen atau 696 orang Balita dengan Gizi yang ditangani dari total 25.903 Balita yang ditangani.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan hal mendasar yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. AKI merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik maupun nonobstetrik. AKB adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH). Berdasarkan kesepakatan global Sustainable Development Goals (SDG's) diharapkan

target AKI dari periode Tahun 2015 sampai Tahun 2030 kurang dari 70 per 100.000 KH dan AKB kurang dari 25 per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2015).

Pada 3 (tiga) tahun terakhir kasus AKI Kabupaten Ende mengalami penurunan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, turun menjadi 7 kasus pada Tahun 2021, kembali naik menjadi 10 kasus pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Kasus AKB di kabupaten Ende juga mengalami hal yang sama yaitu pada Tahun 2020 6 kasus AKB, Tahun 2021 turun menjadi 44 kasus, Tahun 2022 naik lagi menjadi 51 kasus dan ditahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 23 kasus.

3. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pada Tahun 2020 prosentase penduduk miskin Kabupaten Ende sebesar 23,76%, sementara kondisi pada Tahun 2021 jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Ende meningkat menjadi 24,13% (66.380 jiwa) dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 23,00% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 63.400 jiwa dan di tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Ende kembali mengalami penurunan sebesar 63.100 jiwa atau sebesar 22,86%.

Tabel 4. 2 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Ende

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2020	392.591	65,22	23,76
2021	428.328	66,38	24,13
2022	473.403	63,40	23,00
2023	518.939	63,10	22,86

Sumber data: BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2024

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp.1.288.680,- per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional dengan target 0% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Ende berdasarkan hasil estimasi BPS Maret 2023 sebesar 13,53% atau sebanyak 37.130 Jiwa tergolong penduduk miskin ekstrem. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Ende maka sebanyak 0,59% penduduk miskin tergolong miskin ekstrem. Selain data yang dipublikasikan BPS, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem juga menggunakan data P3KE yang dikeluarkan Kemenko PMK RI. Berdasarkan data P3KE tahun 2023 sebanyak 99,589 Jiwa tergolong penduduk miskin ekstrem.

Tabel 4. 3. Tabel Jumlah Penduduk Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Ende

Sumber Data	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)				Keterangan
	2020	2021	2022	2023	
BPS	37,13	35,764	30,291	37,130	2020 berdasarkan SUSENAS, 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan Hasil Estimasi BPS
P3KE	NA	NA	91,161	98.589	Angka Desil 1 (Sangat Miskin) dan Desil 2 (Miskin)

Terdapat perbedaan data penduduk miskin ekstrem antara data BPS dan data P3KE sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data untuk memperoleh data penduduk miskin ekstrem yang akurat.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni dengan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Gambar 4. 1 Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem



4. Pengendalian Inflasi

Pengendalian Laju Inflasi di Daerah belum optimal. Untuk menekan laju inflasi yang fluktuasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan rapat koordinasi dan melaksanakan operasi pasar murah Untuk Menekan laju kenaikan harga bahan pokok. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak kemarau panjang yang mengakibatkan harga beras dan bahan pokok lainnya di Kabupaten Ende mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhannya dengan harga terjangkau maka pemerintah juga melakukan upaya survey pasar untuk memastikan ketersediaan/stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif dengan pelaku usaha,

5. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Belum optimalnya upaya penyediaan pangan untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk usaha mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi, maka Demi menjaga kemananan, ketersediaan, keterjangkauan serta kelancaran distribusi pangan dalam daerah, pemerintah perlu melaksanakan berbagai upaya untuk melipat gandakan

produktivitas pertanian, memastikan pertanian berkelanjutan (ekonomi hijau), mengelola keragaman genetik sumber daya pangan, dan meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan memaksimalkan kemampuan produksi pertanian dalam daerah.

6. Reformasi Birokrasi (Investasi dan Pelayanan Publik)

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ende masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

7. Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Belum kokohnya lembaga demokrasi, yang dapat dilihat dari biaya politik yang tinggi dan partisipasi politik yang belum optimal, serta belum optimalnya kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik, dimana masih rendahnya *skill* ASN, kelembagaan belum efektif dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik belum merata.

8. Sinergitas Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Ende.

Sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus di perkuat dengan penganggaran APBN, APBD, KPBU BUMN dan swasta. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mendukung Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam program, kegiatan, sub Kegiatan serta Indikator dan Target yang akan dicapai pada periode tertentu namun pelaksanaannya belum optimal.

Sejalan dengan ketentuan, tidak semua **program pembangunan daerah** dirumuskan menjadi **prioritas pembangunan**. Prioritas pembangunan menekankan pada program yang secara langsung berhubungan dengan **kinerja pencapaian sasaran RPJMD bersifat mendesak** dan memiliki **daya ungkit yang tinggi** bagi pencapaian kinerja. Program yang mengarah pada sasaran RPD, menjadi fokus utama, selain tetap memerhatikan sasaran yang telah berjalan sesuai rencana, dan mempertimbangkan kondisi saat ini dengan masih tingginya angka kemiskinan ekstrim dan masih terdapatnya kasus stunting yang terjadi.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan masing-masing program (*berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III*) dan dijabarkan oleh PD dalam rincian program dan kegiatan. Pada tataran pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi NTT.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ende, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (Rancangan RPJMD). Secara teknis perumusan **Prioritas Pembangunan Tahun 2025** didasarkan pada **hasil evaluasi kinerja RKPD dan permasalahan** (*sebagaimana disajikan pada Bab II*), memerhatikan **prioritas pembangunan nasional dan provinsi NTT** (*sebagaimana disajikan pada Bab IV.1*), serta **perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran** yang relevan.

Tahapan perumusan Prioritas Pembangunan 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Review **pencapaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD** sampai tahun berjalan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2023 dan perkiraan

sampai tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Bab II RKPD dan perkiraan maju Perangkat Daerah dalam *RKPD Tahun 2025*.

2. Telaahan **prioritas pembangunan nasional** dalam rancangan RKP 2025, **prioritas pembangunan Provinsi NTT** dalam rancangan RKPD 2025.
3. Mempertimbangkan **kemampuan keuangan daerah** sebagaimana disajikan pada bagian **rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan** (*Bab III RKPD*).
4. Review Rancangan Program Pembangunan Daerah.
5. Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.

Diagram Proses Reviu Perencanaan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025



A. Review Kinerja RKPD Masa Lalu dan RPD

Berdasarkan hasil review capaian pelaksanaan RKPD dan perkiraan maju pada RKPD 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai **dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Tahun 2025**, antara lain:

- 1) Perlunya **penyesuaian kinerja dan anggaran** untuk percepatan capaian target RPJMD yang belum maksimal. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target tetap dijaga konsistensi pencapaian sesuai arahan RPD.
- 2) Adanya **kegiatan baru (inisiatif baru)** yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian indikator, serta merupakan **arahan kebijakan nasional dan provinsi**, antara lain perubahan menu DAK yang bersifat tematik, Kemiskinan Ekstrem, dan Stunting.
- 3) Adanya usulan masyarakat melalui Pagu Indikatif Desa dan Kelurahan, Hasil Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati, Pokok-pokok Pikiran DPRD yang harus diakomodir.
- 4) Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD (**tidak ada tambahan program**)
- 5) Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian dalam RKPD Tahun 2025.

B. Telaahan RKP Tahun 2025

Telaahan RKP yang disajikan, mengacu kepada bahan Rancangan RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Tema RKP 2025: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, yang merupakan fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-

Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. RKP 2025 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

- 2) Pembangunan Nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi:
 - a. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
 - b. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
 - c. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.
- 3) Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:
 - Pertumbuhan ekonomi sebesar : 5,3%-5,6%;
 - Tingkat kemiskinan sebesar : 7%-8%;
 - Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar : 4,5%-5,0%;
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar : **104-105**
 - Rasio Gini (nilai) sebesar : 0,379-0,382;
 - Indeks Modal Manusia sebesar : 0,56;
 - Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar : 38,6%;
 - Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar : **113-115**; dan

Infografis Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025



C. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025

1) Tema RKPD Provinsi NTT tahun 2025:

Pada periode keempat pelaksanaan RPPD Provinsi NTT difokuskan pada aspek kehidupan dan penghidupan manusia "NTT yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif, berdaya saing tinggi didukung oleh SDM Berkualitas" serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 untuk periode Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi NTT menetapkan tema RKPD Tahun 2025, yaitu: "Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas".

2) Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025:

Prioritas Provinsi Tahun 2025 meliputi:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi Birokrasi.

5. Kemiskinan Ekstrem

Persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi NTT pada tahun 2022 sebesar 6,56 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen dari 6,44 persen pada tahun 2021.

Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni Sumba Tengah sebesar 19,11 persen, TTS sebesar 13,01 persen dan Sumba Timur sebesar 10,40 persen. Sementara itu, 3 (tiga) kabupaten dengan persentase terendah yakni Nagekeo sebesar 1,47 persen, Flores Timur sebesar 2,10 persen dan Alor sebesar 2,38 persen.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi NTT pada tahun 2022 sebanyak 370,46 ribu jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 11,51 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2021.

Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni TTS (61,57 ribu jiwa), Ende (30,29 ribu jiwa) dan Manggarai Barat (28,52 ribu jiwa). Sementara itu, 3 (tiga) kabupaten dengan jumlah terendah yakni Nagekeo (2,20 ribu jiwa), Alor (4,98 ribu jiwa) dan Ngada (5,04 ribu jiwa). Sama halnya dengan perkembangan persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2021-2022 Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin ekstrem sementara empat 4 kabupaten lainnya menunjukkan penurunan

6. Stunting, AKI dan AKB

Terjadi penurunan balita stunting di Provinsi NTT selama 5 (lima) tahun berturut turut dari tahun 2018-2023 dengan rata rata penurunan setiap tahun sebesar 4,4 % hingga pengukuran terakhir pada bulan timbang Agustus 2023.

Untuk mempercepat penurunan Stunting, AKI dan AKB, dibutuhkan beberapa komitmen ditingkat pemerintahan maupun masyarakat, antara lain:

- Komitmen dan Visi Kepemimpinan: Memastikan pencegahan stunting, AKI dan AKB menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;

- Kampanye, Perubahan perilaku: Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting, AKI dan AKB.
- Konvergensi program, pusat, daerah dan desa: Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
- Peningkatan akses dan kualitas layanan: Bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan bayi.
- Peningkatan Kesehatan Gender & Pemberdayaan Perempuan: Bertujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada perempuan dan kesetaraan gender.
- Ketahanan Pangan dan Gizi: Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.
- Pemantauan dan Evaluasi: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.



D. Kemampuan Keuangan Daerah

Besaran kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dirumuskan pada Bab III, yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menjawab Program Pembangunan Daerah sebesar Rp. 353,53 M.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 (dalam Miliar)

No	Uraian	Rencana RKPD 2025	Proporsi thd Kap. Riil (%)	Ket.
A.	Prioritas I	364,29	53,86	
1	Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor (tidak termasuk Jasa Kantor dan Gaji dan tunjangan)	10,76		
2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Propeda	353,53		
B.	Prioritas II	312,08	46,14	
1	Belanja Bansos	0,49		
2	Belanja Hibah	32,06		
3	Belanja Tidak Terduga	7,52		
4	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (Dana Desa, ADD, Tunjangan Kades/BPD, dll), Bantuan Parpol	272,01		
	TOTAL (A+B)	676,37	100	

E. Review Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPD

Program Pembangunan Kabupaten Ende sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 2025-2026, meliputi: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Ekonomi dan Pariwisata, yang didukung 2 program penunjang yaitu 4) **Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**; dan 5) **Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban**. Secara substansi program strategis terkait pencapaian Visi dan Misi, dan program operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan meliputi 1) Program Rutin Perkantoran dan 2) Program terkait urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). Sementara itu dalam konteks **program prioritas** diterjemahkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 6 Program Pembangunan Daerah, Kebutuhan belanja untuk memenuhi usulan masyarakat melalui alokasi Pides/Pikel, dan Belanja Wajib dan Mengikat lainnya.

Adapun 6 (enam) Program Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

1. **Program Pembangunan Daerah:** berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati, diterjemahkan ke dalam 6 (enam) Program Pembangunan Daerah (Propeda), yaitu:

1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan SDM Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, optimalisasi ditujukan antara lain untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, karakter serta prestasi olahraga. Sedangkan di bidang kesehatan optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan tatakelola penduduk, terutama penurunan angka stunting dan gizi buruk serta AKI dan AKB. Dengan demikian ke depan akan menghasilkan Generasi Muda Kabupaten Ende yang sehat, cerdas dan berkarakter dalam menghadapi era industry 4.0 dan era society 5.0.

2. PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTRIM

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan strategi yang berfokus pada upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengintegrasian seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan lintas sektor, didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat.

3. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI

Program ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat guna mengendalikan inflasi daerah melalui penguatan peran dan fungsi dari Tim Penanggulangan inflasi daerah (TPID) dan Tim Ekonomi Daerah.

4. PROGRAM KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan rantai pasok dan rantai distribusi pangan guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan melalui pertanian berkelanjutan serta revitalisasi kearifan lokal.

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN INVESTASI

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan menuju terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) melalui Peningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM birokrasi pemerintah, Optimalisasi penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, kemudahan dalam proses berinvestasi serta peningkatan sinergitas prioritas pembangunan antar level pemerintahan.

6. PROGRAM STABILISASI SOSIAL, POLITIK, KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan sosial kemasyarakatan yang merata, menciptakan iklim berpolitik yang sehat, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan kemasyarakatan dan iklim berusaha. Dalam konteks pembangunan demokrasi, program ini juga dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak politik masyarakat serta penguatan fungsi lembaga demokrasi.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, berkaitan dengan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengannya.

4.2.3. Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2025

Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada subbab 4.2.1, serta memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan (sub bab 4.1.3), ditetapkan 6 (enam) Program Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2025, yang pada prinsipnya mendukung 4 (empat) Prioritas Daerah (PD) Provinsi NTT Tahun 2023 dan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel Keterkaitan Prioritas Daerah Kabupaten Ende (PD) dengan Prioritas Provinsi (PP) dan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI
1.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan BOP PAUD	P3	P2
		Bantuan Alat Permainan Edukatif	P3	P2
		Dukungan Insentif bagi Guru Honorir Komite Sekolah	P3	P2
		Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	P3	P2
		Pelaksanaan Kejur Paket A dan Paket B	P3	P2
		Pendampingan PKH	P3	P2
		Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum	P3	P2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
		Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum	P3	P2
		Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Minimum	P3	P2
		Pengembangan Internet untuk Sekolah	P3	P2

		Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum	P3	P2
		Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Pengawas, Tenaga Pendidik dan Kependidikan	P3	P2
		Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Pengawas, Tenaga Pendidik dan Kependidikan	P3	P2
		Pelatihan membangun iklim keaman sekolah	P3	P2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
		Pelatihan membangun iklim keaman sekolah	P3	P2
		Pelatihan membangun iklim kebinekaan sekolah	P3	P2
		Pelatihan membangun iklim kebinekaan sekolah	P3	P2
		Pelatihan kurikulum merdeka belajar SD	P3	P2
		Pelatihan kurikulum merdeka belajar SMP	P3	P2
		Lomba Seni Budaya	P3	P2
		Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya	P3	P2
		Pengelolaan Cagar Budaya	P3	P2
		Lomba Seni Budaya	P3	P2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		P3
		Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya	P3	P2
		Pengelolaan Cagar Budaya	P3	P2
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	P3	P2
1.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Program dan Kegiatan terkait Pencapaian SPM berkenaan	P3	P1
		Dukungan Insentif bagi tenaga Kesehatan	P3	P1
		Koordinasi Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	P3	P1
		Koordinasi Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	P3	P1
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	P3	P1
		Penanganan Gizi masyarakat	P3	P1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
		Pemberian Makanan Tambahan	P3	P1
		Pelayanan Stunting	P3	P1
		Penyediaan Sarana Air Bersih	P3	P1
		Pengembangan Sanitasi	P3	P1
		Pelaksanaan Koordinasi Tim Penanggulangan Stunting Daerah	P3	P1
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	P3	P1
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	P3	P1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	P3	P1
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	P3	P1
2.	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Penyelenggaraan Festival Danau Kelimutu (termasuk Padi Ka Gu'a Batu Ata Mata, dan rangkaian even pendukungnya)	P3	P1
		Penyelenggaraan Parade Kebangsaan	P4	P1
		Pengembangan Geopark Kelimutu	P5	P3
		Pengembangan Taman Monumen Pancasila Lampu Lima	P4	P3
		Penataan Taman Rejang Bung Karno, Plaza, Perpustakaan Bung Karno	P4	P3
		Pengembangan Wisata Kuliner Pesisir Pantai Lode	P5	P1
		Pengembangan Wisata Gunung Meja	P5	P3

		Pengembangan Wisata Minat Khusus Paralayang Kelimara	P5	P3
2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Pelatihan dan Bantuan bagi Wirausaha Baru	P3	P2
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	P3	P2
2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	P3	P2
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	P3	P1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	P3	P1
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	P3	P1
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	P3	P2
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	P3	P2
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	P3	P2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		P3
2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Pembangunan Jalan Paralel	P3	P2
		Pembangunan Jalan Strategis	P3	P2
		Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Ende	P3	P2
		Pembangunan Jalan dan Drainase Dalam Kota Ende	P3	P2
		Pembangunan Rumah Layak Huni	P3	P2
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	P3	P2
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	P3	P2
2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Pembangunan Desa berbasis potensi unggulan	P3	P2
		Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur serta revitalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa	P3	P2
		Pembangunan Jalan Lingkungan	P3	P2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		P3
2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Peningkatan kualitas air dan udara dari zat pencemar	P3	P2
		Peningkatan kualitas air dan udara dari zat pencemar	P3	P2
		Peningkatan pengelolaan sampah melalui penanganan di TPA	P3	P2
2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM	Pengembangan Industri Kecil	P3	P2
		Pengembangan Koperasi	P3	P2
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	P3	P2
		Penguatan Koordinasi Perdagangan Komoditas Masyarakat	P3	P2
		Koordinasi Pengembangan BUMDes	P3	P2
		Pengembangan Pasar	P3	P2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN INVESTASI	Pengembangan Promosi Potensi Daerah secara online	P7	P4
		Optimalisasi Pelayanan Perijinan Online	P7	P4
4	PROGRAM KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN	Intensifikasi Lahan Usaha Tani	P1	P1
		Intensifikasi Lahan Usaha Tani	P1	P1
		Pengembangan Saprodik untuk Petani	P1	P1
		Intensifikasi Lahan Usaha Tani	P1	P1
		Peningkatan Produksi Perikanan	P1	P1
		Pengembangan dan Bantuan Bibit Unggul	P1	P1

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
5.	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	Penguatan Koordinasi TPD dan Tim Ekonomi Daerah	P1	P1
3.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN INVESTASI	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD serta Pengelolaan SIMDA Pendapatan	P7	P4
		Pengelolaan SIMDA Keuangan	P7	P4
		Penerapan E Planning	P7	P4
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas APSP	P7	P4
		Pengembangan Layanan Informasi Pemerintah secara Online (e-Government)	P7	P4
		Peningkatan Layanan Kependudukan dan Sipil (Layanan Mobile KTP)	P7	P4
		Optimalisasi RUPS	P7	P4
		Optimalisasi LPSE	P7	P4
		Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (8 Area RB)	P7	P4
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		KEGIATAN PRIORITAS		
3.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN INVESTASI	Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	P7	P4
6.	PROGRAM STABILISASI SOSIAL, POLITIK, KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan PMKS, Anak Terlantar, dll	P7	P4
		Koordinasi Komda Lansia	P7	P3
		Koordinasi Penanggulangan Permasalahan Sosial	P7	P3
		Penanganan Bencana Daerah	P7	P3
		Penguatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertarikan Lingkungan	P7	P3
		Persediaan dan Pengendalian Kelangkaan	P7	P3
		Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	P7	P3
		Koordinasi Kabupaten Layak Anak, dll	P7	P3

4.2.4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting, Angka Kematian ibu dan Angka Kematian Bayi

- Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ende, diprioritaskan pembangunan tematik infrastruktur lintas sektor terkait yang berkaitan dengan: sektor air minum, sanitasi dan perumahan dan permukiman kumuh, serta pembangunan tematik sektor perekonomian lintas sektor, yang berkaitan dengan: Pertanian, Irigasi, Kelautan dan Perikanan, Jalan dan Ketahanan Pangan.
- Sementara itu untuk mengatasi permasalahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, difokuskan pada pembangunan sektor kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan promotif, preventif, dan kuratif serta didukung dengan pembangunan infrastruktur: air minum dan sanitasi.



4.2.5. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Produk Lokal

Dalam rangka lebih menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang disebutkan dalam Inpres untuk:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp. 400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2022 sampai dengan lima persen bagi K/L dan pemda yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.

9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi K/L dan pemda untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas, adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendukung capaian Program Pembangunan Daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada BAB IV, dirumuskan rencana program dan kegiatan prioritas yang menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, Capaian dan Target Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Detail Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional dan Sasaran Daerah, Kelompok Sasaran, Perkiraan Maju, dan Perangkat Daerah Penanggung jawab.

Secara umum proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dihasilkan dalam dokumen RKPD ini, dilakukan proses entry secara online mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dilaksanakan berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri RI.

Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, secara garis besar rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2025 dirumuskan mengacu pada Kebijakan Keuangan sebagaimana telah disajikan pada BAB III.

Khusus untuk rencana Belanja program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025, setelah diproyeksikan dengan usulan masyarakat melalui Pides dan Pikel, dialokasikan total sejumlah Rp. 1.260.378.280.083,- + Pides/Pikel + Pokir, terdiri dari:

- Proyeksi total penerimaan dari Pos DAU yang dialokasikan untuk Belanja diperkirakan sejumlah Rp.672.480.000.000,- termasuk alokasi anggaran untuk menjawab Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan usulan masyarakat melalui Pides dan Pikel.
- Proyeksi dana DAK yang terjawab sesuai dengan menu usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi Krisna DAK Tahun 2025 kepada Bappenas RI dan Kementerian Keuangan RI sejumlah Rp249.740.000.000,-
- Sedangkan perhitungan anggaran Belanja lainnya diperoleh dari pos: PAD, Dana Insentif Daerah, Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Secara umum dapat digambarkan rencana proyeksi alokasi anggaran pada Tahun 2023 untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas pada masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Ende, sebagai berikut:

- **Tujuan 1** : *Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing, dialokasikan Belanja sejumlah Rp. 372,166,378,982,- atau sebesar 29,53 % dari proyeksi Belanja Tahun 2025;*

- **Tujuan 2** : Masyarakat Ende Yang Sehat, dialokasikan Belanja sejumlah Rp. 252.384.295.559,- 20,02 % proyeksi Belanja Tahun 2025;
- **Tujuan 3** : Meningkatkan Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende, dialokasikan Belanja sejumlah Rp. 65,612,198,185,- atau sebesar 5,21 % dari proyeksi Belanja Tahun 2025;
- **Tujuan 4** : Meningkatnya kualitas ketersediaan infrastruktur dasar, lingkunganhidup dan pembangunan kawasan pedesaan, dialokasikan Belanja sejumlah Rp. 128,111,872,766,- atau sebesar 10,16 % dari proyeksi Belanja Tahun 2025;
- **Tujuan 5** : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance), dialokasikan Belanja sejumlah Rp. 442,103,534,591,- atau sebesar 35,08% dari proyeksi Belanja Tahun 2025.

Anggaran Belanja untuk masing-masing Tujuan pada Tahun 2025 yang diproyeksikan ini, akan mengalami fluktuasi anggaran (naik dan turun), sangat bergantung terhadap besaran alokasi DAK untuk Kabupaten Ende pada Tahun 2025.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Langsung Tahun 2025 per Tujuan

PROPORSI BL RKPD KAB. ENDE TAHUN 2025		
TUJUAN	PROYEKSI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2025	% dari BL
TUJUAN 1	372,166,378,982	29.53%
TUJUAN 2	252.384.295.559	20.02%
TUJUAN 3	65,612,198,185	5.21%
TUJUAN 4	128,111,872,766	10.16%
TUJUAN 5	442,103,534,591	35.08%
TOTAL	1,260,378,280,083	100%

Grafik 5.1 Proyeksi Proporsi BL Tahun 2025 per Tujuan



Secara keseluruhan rincian Prioritas Program dan Kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2025 yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik Pendekatan Teknokratik Perangkat Daerah, penguatan partisipatif melalui Musrenbang, Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Prioritas Utama RPD lainnya, disajikan selengkapnya pada bagian lampiran.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Bab ini memuat gambaran tentang indikator keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci, serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan kondisi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023.

5.1 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat selama periode tertentu. Secara teknis Indikator Kinerja Daerah merupakan akumulatif dari indikator program-program pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Utama adalah sejumlah indikator makro yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan daerah, sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal RPD (2023)	TARGET KINERJA			
			2024	2025	2026	Kinerja Akhir
	INDIKATOR MAKRO					
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,63	68,40	68,70	69,01	69,01
2.	Persentase penduduk miskin (%)	22,86	22,21	22,08	21,95	21,95
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,59	1,849	1,542	1,234	1,234
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,87	3,64%	3,91%	4,19%	4,19%
5.	PDRB per Kapita (Rp. Juta) ADHK	16,00	16,497	16,900	17,303	17,303
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,273	0,2985	0,29475	0,2910	0,291

6.1.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran strategis adalah sejumlah indikator yang dirumuskan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Kinerja Awal tahun 2023	TARGET KINERJA			
			2024	2025	2026	Kinerja Akhir
	INDIKATOR KINERJA TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,63	68,40	68,70	69,01	69,01
2	Angka Usia Harapan Hidup	66,12	66,21	66,45	66,69	66,69
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,87	3,64%	3,91%	4,19%	4,19%
4	Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,65	56,82	58,71	60,60	60,60
5	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	C (44,41)	C (48,81)	CC (50,56)	CC (52,61)	CC (52,61)
	INDIKATOR KINERJA SASARAN					
1	Rata-Rata Lama Sekolah	8,20	8,23	8,31	8,40	8,40
2	Harapan Lama Sekolah	13,82	13,83	13,84	13,85	13,85
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45,62	50	55	60	60
4	Angka Usia Harapan Hidup	66,12	66,21	66,45	66,69	66,69
5	Prevalensi Stunting	6,8	5,9	4,4	2,9	2,9
6	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	0,32	0,3150	0,3166	0,3181	0,318
7	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,79	1,528	1,531	1,535	1,535
8	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,19	16,622	16,654	16,686	16,654
9	Nilai Investasi (Rp)	2398 M	1 M	1 M	1 M	3 M
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	31,69	29,70	30,26	30,83	30,83
11	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,7	77,0	77,2	77,4	77,4
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,59	1,85	1,54	1,23	1,23
13	Persentase penduduk miskin (%)	22,86	22,21	22,08	21,95	21,95
14	Laju Inflasi (%)	3,80%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
15	Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,65	56,82	58,71	60,60	60,60
16	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6025	0,6202	0,6255	0,6461	0,6461
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,85	77,61	72,62	72,92	72,92
18	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP)	CC (53,33)	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)	B (62,23)
20	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4	2,5	2,55	2,6	2,6
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B
22	Indeks Merit Sistem	195	250	275	300	300
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	2,7	3	3	3
24	Persentase Pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD	25,37	34	36	38	38
25	Indeks Pengawasan Kearsipan	20,24	30	35	40	40
26	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	Skor 74,15	Skor 79	Skor 82	Skor 85	Skor 85
27	Indeks Pelayanan Sosial	32,89	39,02	39,15	39,28	39,28
28	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72,28	72,52	72,65	72,78	72,78
29	Indeks Perlindungan Perempuan dan Anak	83,00	83,135	83,21	83,28	83,28
30	Angka Kriminalitas	0,000274	0,000274	0,000274	0,000274	0,000274
31	Indeks Pemberdayaan Gender	66,02	70,47	72,24	74,00	74,00

6.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten adalah sejumlah indikator yang dikembangkan dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai program prioritas yang berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah yang terbagi dalam Aspek Pelayanan Umum, Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2023)	TARGET KINERJA			
			2024	2025	2026	Kinerja Akhir
I.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	78,40	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,27	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	1,48	100	100	100	100
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	46,62	44,81	50,64	56,48	56,48
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	35,56	29,65	35,68	41,72	41,72
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,51	54,23	60,19	66,14	66,14
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,89	38,24	47,51	56,78	56,78
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	64,07	60,02	61,08	62,13	62,13
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	43,18	54,08	59,04	64	64
10	Iklim keamanan SD	65,87	71,05	79,83	88,61	88,61
11	Iklim keamanan SMP	67,07	70,81	77,18	83,55	83,55
12	Iklim kebinekaan SD	71,16	73,92	81,83	89,75	89,75
13	Iklim kebinekaan SMP	73,87	71,17	75,35	79,53	79,53
14	Iklim inklusivitas SD	51,81	61,99	70,74	79,49	79,49
15	Iklim inklusivitas SMP	56,15	63,49	71,47	79,46	79,46
16	Persentase Cagar Budaya Lokal yang dilestarikan	20,87	25,87	30,87	35,87	35,87
17	Cakupan Indikator SPM Bidang Kesehatan (%)	72,14	100	100	100	100
18	Persentase Penurunan Stunting (%)	6,8	5,9	4,4	2,9	2,9
19	Cakupan fasilitas Kesehatan Terakreditasi (%)	96,15	100	100	100	100
20	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	77,49	100	100	100	100
21	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,59	2,4	2,35	2,3	2,3
22	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%))	37,16	50	55	60	60
23	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	55,12	16,71	16	15,50	15,50%
24	Indeks Pembangunan Keluarga	n/a	58,2	59,2	60,2	60,2

25	Cakupan Nilai Produksi Tanaman Pangan	9,77	9,52	9,54	9,56	9,56
26	Cakupan Nilai Produksi Tanaman Perkebunan	0,28	0,40	1,81	1,97	1,97
27	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura	5,48	5,52	5,61	5,68	5,68
28	Cakupan Nilai Produksi Peternakan	1,22	1	1,24	1,26	1,26
29	Cakupan Nilai Produksi Perikanan (Berat Ikan Hasil Tangkapan X Harga Acuan Jual Ikan / Harga per kilo Ikan)	1.220.713	1.548.243	1.889.417	2.225.572	2.225.572
30	Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1
31	Presentasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22,49	22,52	22,54	22,57	22,57
32	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	76,64	77,01	77,37	77,74	77,74
33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	47,99	48,55	49,55	49,55
34	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30	35	40	50	60
35	Persentase Unit Usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	28,43 (199/700x 100%)	71,43 (500/700 x 100%)	85,71 (600/700 x 100%)	100 (700/700 x 100%)	100 (700/700 x 100%)
36	Jumlah kajian perekonomian dan Sumber Daya Alam	12	13	13	13	13
37	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	44,28	55,40	56,63	57,86	57,86
38	Persentase Kepala Keluarga dengan Rumah Layak Huni	71,14	71,14	71,91	72,68	72,68
39	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
40	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	83,27	88,815	94,37	99,95	99,95
41	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Desa yang Aktif	80	85	90	95	95
43	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,67	62,38	55,05	55,25	55,25
44	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,03	89,57	86,00	86,5	86,5
45	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	80,17	81,63	78,05	78,15	78,15
46	Persentase Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
47	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (%)	86,37	87,00	88,00	89,00	90,00
48	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika (%)	100	100	100	100	100
49	Indeks Pembangunan Statistik	1,8	2	2,2	3	3
50	Cakupan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	92	94	96	98	98
51	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan APBD	100	100	100	100	100
52	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	74,14	80	85	90	90
53	Indeks Tata Kelola Pengadaan	32,44	35	36	38	38
54	Indeks Pengawasan Kearsipan	20,24	30	35	40	40
55	Persentase penurunan K3	40,00%	20	20	20	20

56	Persentase penurunan kasus kebakaran	38,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
57	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
58	Persentase Jumlah Kenaikan Kunjungan Wisata (%)	101,875	0,07	0,14	0,18	0,39
59	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,48	1,5	1,6	1,7	1,60
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) Pelayanan Perijinan	77,68	80,00	83,00	86,00	90,00
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,7	77,2	77,4	77,6	77,6
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	31,33	33	35	37	37,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (74,80)	B (77,00)	B (78,00)	B (79,00)	B (79,00)
5	Cakupan Indikator SPM Bidang Sosial (%)	69,39	69,88	70,38	70,87	70,87
6	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (%)	56,00%	60	60	60	60
7	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak (%)	85	90	95	100	100
8	Persentase Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	60	65	70	75	75
9	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi	54,9	57,36	63,50	69,63	69,63
10	Persentase UKM yang telah menggunakan teknologi berbasis digital	30	40	50	60	60
11	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat yang Mendapatkan Pekerjaan	17,96	23,95	29,94	35,93	35,93
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pertumbuhan Omzet UMKM yang Dibina	926	956	986	1016	1016
2	Nilai Usaha Koperasi	106	110	114	118	118
3	Nilai Perdagangan Komoditi Unggul Daerah	31.672	37.000	39.000	41.000	41.000
4	Jumlah Realisasi Investasi	2398 T	1 M	1 M	1 M	3 M
5	Persentase Kemandirian Desa					
	• Desa Mandiri	20,00	20,00	16,67	14,29	14,29
	• Desa Maju	38,16	0,95	0,95	0,95	0,95
	• Desa Berkembang	14,88	0,70	0,70	0,70	0,70
	• Desa Tertinggal	66,67	50	0	0	0
	• Desa Sangat Tertinggal	70,32	71,94	73,56	75,18	
6	Persentase Kemajuan Kelurahan		100	100	100	100
7	Angka Kriminalitas yang Tertangani (per 100 kasus)	0,000274	0,000274	0,000274	0,000274	0,000274

6.1.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ende yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 6.4. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Kondisi Kinerja Awal (tahun 2023)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung				Pengaruh Dampak Pemangku Jawab
				Nilai	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Indikator Kinerja pada akhir periode	
1. Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Ende yang Berkualitas Saja										
1.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat										
		1. Rata-Rata Lama Sekolah		8,20	Tahun	8,23	8,33	8,40	8,49	
		2. Harapan Lama Sekolah		13,82	Tahun	13,83	13,84	13,85	13,86	
		3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		46,62	Angka	50	55	60	65	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dasar										
1.	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Perangutan Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah capaian indikator masing-masing kegiatan	≥ 100%	100%	%	100	100,00	100	100%	Dinas PN
		Jumlah Total kegiatan								
	Persentase Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan	≥ 100%	18,40	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas PB
		Jumlah anak usia 5 - 6 tahun								
	Persentase Warga Negara usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan	≥ 100%	1,48	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas PB
		Jumlah anak usia 7 - 15 tahun								
4.	Persentase Warga Negara usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah peserta didik kesetaraan usia 7 - 15 tahun	≥ 100%	97,33	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas PB
		Jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang belum bersekolah formal								
5.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persentase peserta didik memberikan kemampuan dalam memahami, menggunakan, mencipta, dan menggunakan beragam jenis teks baik Informatif dan teks fiksi		46,62	%	48,81%	50,04%	50,48%	50,48%	Dinas PB

6	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	15,54	%	29,85%	35,68%	41,73%	41,72%	Dinas PE
	7	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,51	%	54,13%	60,19%	66,14%	66,14%	Dinas PE
	8	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,98	%	38,24%	47,51%	56,79%	56,78%	Dinas PE
	9	Peningkatan Proporsi Jumlah Siswa PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	64,07	%	60,02%	61,08%	62,13%	61,15%	Dinas PE
	10	Iklim keamanan SD	65,87	%	71,05%	76,83%	88,41%	88,41%	Dinas PE
	11	Iklim keamanan SMP	67,07	%	70,85%	77,48%	81,55%	81,55%	Dinas PE
7	Iklim keberagaman SD	Persentase kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan	71,18	%	73,02%	81,83%	88,75%	88,75%	Dinas PE
	13	Iklim keberagaman SMP	71,87	%	71,17%	75,35%	78,52%	78,52%	Dinas PE
	14	Iklim keberagaman SD	51,80	%	61,79%	70,74%	79,49%	79,49%	Dinas PE

	15	Salah satu kejuruan SMP	Pemerataan kondisi yang diwujudkan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan kondisi istimewa dan berbakat istimewa	94,05	%	85,49%	71,47%	75,46%	75,46%	Dinas PK
	16	Proporsi guru PAUD dengan Kualifikasi SL/DA	$\frac{\text{Jumlah guru PAUD formal yang memiliki ijazah SL/DA, SD, dan SD}}{\text{Total guru di seluruh satuan pendidikan PAUD formal}} \times 100\%$	43,38	%	50,12%	51,32%	52,12%	52,12%	Dinas PK
	17	Proporsi PTK Nonselektif dan PTK	$\frac{\text{Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dengan SL/DA yang terdaftar di satuan PAUD formal dan}}{\text{Total pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang terdaftar di satuan PAUD formal}} \times 100\%$	19,10	%	20,10%	21,10%	22,10%	22,10%	Dinas PK
	18	Proporsi PTK Selektif dan PTK yang Pendidikan Dasar	$\frac{\text{Rata-rata persentase jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat}}{\text{Total guru dan kepala sekolah yang ada}} \times 100\%$	89,83	%	91,13%	91,13%	92,13%	92,13%	Dinas PK
	19	Indeks distribusi guru	Rata-rata indeks pemerataan guru per mata pelajaran berdasarkan menggunakan perhitungan tertentu jenjang PAUD, SD dan SMP	0,34	%	0,34	0,44	0,54	0,54	Dinas PK
	20	Proporsi GKR Penggerak dan Penggerak PAUD	$\frac{\text{Jumlah Guru Penggerak ditambah jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Penggerak}}{\text{Total GKR}} \times 100\%$	0,07	%	0,17	0,27	0,37	0,37	Dinas PK
	21	Proporsi PTK Penggerak	$\frac{\text{Rata-rata jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam Program Guru Penggerak}}{\text{Total guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP}} \times 100\%$	0,40	%	0,50	0,60	0,70	0,70	Dinas PK

	22	Pengalaman Pelatihan PIR	Kata-rata Proponen guru dan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan non-PMM pada pelatihan ketrampilan (ibu/orang tua) bidang pengetahuan bidang studi, pedagogi, managerial, atau pelatihan lain alkali butir masing-masing penelitian	38,15	%	38,15	48,15	44,15	42,35	Diras PK
	23	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Warisan Budaya yang ada}} \times 100\%$	85,52	%	100%	100%	100%	100%	Diras PK
	24	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	21,74	%	23,87%	85,87%	85,87%	85,87%	Diras PK
	25	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian indikator masing-masing kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100%	%	100%	100%	100%	100%	Diras, Kepemudaan dan Olahraga
	26	Persentase Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Seluruhnya}} \times 100\%$	95,43	%	95,50	94,4	95,55	95,55	Diras, Kepemudaan dan Olahraga
	27	Persentase Wirausaha Muda	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	67,57	%	64,46	68,50	68,38	69,39	Diras, Kepemudaan dan Olahraga
	28	Persentase Atlet Tingkat Memperech Medali Olahraga Prestasi (Olahraga Masyarakat dan olahraga Persediaan pada kegiatan Tingkat Provinsi dan Nasional	$\frac{\text{Jumlah Atlet yang Memperech Medali dalam Kejuaraan}}{\text{Jumlah Seluruh Atlet yang Mengikuti Kejuaraan}} \times 100\%$	39,52	%	50,00%	54,35	54,33	58,33	Diras, Kepemudaan dan Olahraga
	29	Persentase Pengorangan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan}}{\text{Rencana Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan}} \times 100\%$	16,67	%	21,42	28,86	31,25	31,25	Diras, Kepemudaan dan Olahraga

	30	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Perangkat Dalam sarana efektif dan efisien secara 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	100	Desa Perputakaan dan Keagungan
	31	Persentase judul bahan pustaka yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan}}{\text{Jumlah judul bahan pustaka yang disarankan}} \times 100\%$	99,20	%	99,47	99,47	100	100	100	Desa Perputakaan dan Keagungan
	32	Persentase Pengasngan perputakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah Pengasngan perputakaan per tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur 5-60 tahun}} \times 100\%$	39,80	%	34,32	35,50	36,85	36,85	36,85	Desa Perputakaan dan Keagungan
	33	Persentase ketersediaan layanan perputakaan Desa & kelurahan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan layanan perputakaan Desa & kelurahan}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$	11,51	%	14,04	17,63	11,22	11,22	11,22	Desa Perputakaan dan Keagungan
	34	Persentase koleksi nasional & nasional kuno yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah koleksi budaya seni dan nasional kuno yg disediakan}}{\text{Jumlah nasional kuno yg ada}} \times 100\%$	n/a	%	81,81	88,88	100	100	100	Desa Perputakaan dan Keagungan

2. Masyarakat Kade Yang Sehat

2.1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
	1. Angka Ulah Harapan Hidup		66,13	Angka	66,21	66,49	66,69	66,69			
	2. Persentase Stunting		8,8	%	5,9	6,4	2,8	2,3			
	Indikator Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah										
	3. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 3 tahun		Jumlah Capaian indikator (stunting, angka stunting, jumlah total kegiatan) x 100%	100	%	100	100	100	100	Desa Perputakaan dan Keagungan	
	4. Cakupan Persentase Pelaksanaan Gerakan Penyakit Menular (HIV, AIDS dan TB)		Jumlah Kader TB yang diberikan dan ditangani x 100%	100	%	81	71	81	81	Desa Perputakaan dan Keagungan	
			Jumlah Persentase Pasien TB dalam kurun waktu tertentu								

		Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	<100%	74,31	%	75	80	85	81	Dirusak
		Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV dalam kurun waktu tertentu								
3	Cakupan Penemuan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, ODG)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus > 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai Standar	<100%	90	%	90	99	100	100	Dirusak
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus > 15 tahun dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan angka prevalensi								
		Jumlah Penderita Hipertensi > 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai Standar	<100%	88	%	98%	99%	100	100	Dirusak
		Jumlah Penderita Hipertensi > 15 tahun dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan angka prevalensi								
		Jumlah ODG berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	<100%	100	%	100	100	100	100	Dirusak
		Jumlah Penderita ODG berat tahun dalam kurun waktu satu tahun								
	4 Pelayanan Imunisasi	Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap	<100%	92	%	94	98	100	100	Dirusak
	5 Jumlah Kemorbiditas	Jumlah Kemorbiditas Dalam 1 Tahun		3	Kapas	2	2	2	2	Dirusak
6	Pembuatan Serasa Produksi dan Distribusi Serasa Farmasi (Obat, Makanan, Kosmetik)	Jumlah Serasa Produksi PIRT yang Memenuhi Syarat	<100%	52,70	%	52,70	72,70	82,70	80,70	Dirusak
		Jumlah PIRT Yang Terselesa								
7	Pengawasan Obat Dan Makanan	Jumlah sediaan yang memenuhi syarat	<100%	n/a	%	80	85	90	90	Dirusak
		Jumlah sediaan yang diawasi per tahun								

	8	Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Jumlah Balita	$\times 100\%$	18	%	11	9	7	7	Dinkes
	9	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja Jumlah Puskesmas	$\times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinkes
	10	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga Jumlah Puskesmas	$\times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinkes
	11	Cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS	Jumlah Rumah Tangga Ber- PHBS Jumlah Seluruh Rumah	$\times 100\%$	48,75	%	43,20	48,20	53,20	53,20	Dinkes
	12	Rasio Dokter per satuan Penduduk	Jumlah Dokter Jumlah Penduduk	$\times 100\%$	0,204	%	0,2	0,25	0,30	0,30	Dinkes
	13	Rasio Tenaga Para Medis	Jumlah Tenaga para Medis Jumlah Penduduk	$\times 100\%$	2,665	%	5,29	6,79	8,29	8,29	Dinkes
	14	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	Jumlah Sarana Prasarana Level 1 Yang Tersedia Pada Instalasi IGD Jumlah Sarana Prasarana Level 1 Pada Instalasi IGD sesuai Standar	$\times 100\%$	96,85	%	92,50	94,50	96,50	98,50	RSUD
	15	Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Pasien Dengan Risiko Terinfeksi HIV dilayani Jumlah Kunjungan Pasien Dengan Risiko Terinfeksi HIV	$\times 100\%$	89,16	%	75,50	80,50	85,50	90	RSUD
	16	Bed Occupancy Rate (BOR)	Jumlah Hari Perawatan Jumlah Tempat Tidur x Jumlah Hari Periode	$\times 100\%$	45,67	%	69,96	70,00	72,50	75,5	RSUD
	17	Average Length of Stay (ALOS)	Jumlah Lama Dirawat Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)	$\times 100\%$	3,26	Hari	3,30 hari	3,31 hari	3,3 hari	3 hari	RSUD

18	Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}} \times 100\%$	25,63	kali/tahun	40,20 kali/Tahun	42,50 kali/tahun	44,50 kali/tahun	45,50 kali/Tahun	RSUD
19	Turn Over Interval (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Jumlah Hari Periode}) - \text{Jml Hari perawatan}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 100\%$	14,43	hari	1,60 hari	1,70 hari	1,90 hari	2 hari	RSUD
20	Gross Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah Pasien Mati Seluruhnya}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 100\%$	82,91	%	39,05 %	38,52 %	35,50 %	35,40 %	RSUD
21	Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah Pasien Mati > 48 Jam}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 100\%$	82,91%	%	20,34 %	20,30 %	20,2%	20,1%	RSUD
22	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100%	%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menetapkan parameter pembangunan kependudukan dan keluarga dalam perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah semua Perangkat Daerah}} \times 100\%$	56,25%	%	86%	87%	88%	88%	DPPKB
24	Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$	45%	%	46,71%	47,72%	48,74%	48,74%	DPPKB
25	Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$	13,48%	%	13%	12%	11%	11%	DPPKB

26	Menurunya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15-19 Thn)	$ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{F_{15-19}} \times K$ $B_{15-19} = \text{Jumlah Kelahiran pada kelompok umur 15 - 19 tahun}$ $F_{15-19} = \text{Jumlah Penduduk wanita pada kelompok umur 15 - 19 tahun}$	10 per 1000 kelahiran	perseribu	10 per 1000 kelahiran	10 per 1000 kelahiran	10 per 1000 kelahiran	10 per 1000 kelahiran	DPPKE
27	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga}}{\text{Jumlah Kelompok Kegiatan}} \times 100\%$	n/a	%	35%	50%	60%	60%	DPPKE
28	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	$\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita} \times \text{jumlah wanita menurut usia kawin)}}{\text{Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama}} \times 100\%$	27	tahun	26 tahun	25 tahun	24 tahun	24 tahun	DPPKE

3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende

3.1 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)

1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PORB (%)		0,32	Persen	0,3150	0,3166	0,3181	0,318	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah									
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	100%	%	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
		Jumlah Total Kegiatan x100%							
2	Persentase Daya Tarik Destinasi wisata yang memenuhi standar SA	Jumlah Daya Tarik Wisata yang memenuhi standar SA x100%	68,75%	%	81,25	87,50	100	100	Dinas Pariwisata
		Jumlah Daya Tarik Wisata Keseluruhan							
3	Persentase Pemasaran Pariwisata Optimal	Jumlah Pemasaran Pariwisata yang ditindaklanjuti Tahun n x100%	100%	%	69,23	76,92	100	100	Dinas Pariwisata
		Jumlah Pemasaran Pariwisata yang direncanakan Tahun n							

	4	Persentase Sub Sektor Ekraf yang memanfaatkan yang telah memiliki HKI	$\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekraf yang memanfaatkan produksi yang telah memiliki HKI}}{\text{total Sub Sektor Ekraf}} \times 100\%$	5,88	%	33,33	66,67	100	100	Dinas Pariwisata	
	5	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah SDM yang dikembangkan Tahun } n}{\text{Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	44,21	%	31,11	36,18	41,25	41,25	Dinas Pariwisata	
3.2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan)											
	1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB			1,79	%	1,528	1,531	1,535	1,535	
	2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)			16,19	%	16,622	16,654	16,686	16,654	
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										
	1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100%	%	100	100	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM)	
	2	Persentase Koperasi aktif yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif Yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam}}{\text{Jumlah Koperasi Usaha Simpan Pinjam Yang ada}} \times 100\%$	4%	%	88,72	88,89	89,05	89,05	Dinkop dan UKM	
	3	Persentase Koperasi Aktif yang diawasi dan diperiksa	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif yang diawasi dan diperiksa}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	167%	%	23,28	25,00	26,72	26,72	Dinkop dan UKM	
	4	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$	24,14	%	41,38	65,52	89,66	89,66	Dinkop dan UKM	
	5	Persentase SDM Pengurus Koperasi yang mengikuti diklat perkoperasian	$\frac{\text{Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang dilatih}}{\text{Jumlah SDM Pengurus Koperasi yang ada}} \times 100\%$	43,68	%	60,92	78,16	95,40	95,40	Dinkop dan UKM	

6	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan $\times 100\%$	18,10	%	21,55	25,00	28,45	28,45	Dinkop dan UKM
		Jumlah Koperasi Aktif							
7	Persentase UMKM yang difasilitasi dan berdaya saing	Jumlah UMKM yang difasilitasi dan berdaya saing $\times 100\%$	18,38%	%	1,50%	1,50%	1,50%	22,88%	Dinkop dan UKM
		Jumlah UMKM yang terdata							
8	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan $\times 100\%$	100%	%	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah Total Kegiatan							
9	Persentase Ijin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Jumlah Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Perijinan Tahun n $\times 100\%$	100%	%	0%	2	2	6	Disperdagin
		Jumlah Rekomendasi Usaha Perdagangan yang diterbitkan Tahun n							
10	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memenuhi Persyaratan pada tahun n $\times 100\%$	27,72%	%	49,3	59,65	62,28	62,28	Disperdagin
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang ada Tahun n							
11	Persentase Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Fluktuasi Harga Barang KP dan BP pada Tahun n $\times 100\%$	7,5	%	5,5	5	4,7	4,7	Disperdagin
		Rata - rata Fluktuasi Harga Barang KP dan BP per Tahun							
12	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang Terstandisasi	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/ Tera Ulang Tahun n $\times 100\%$	8,28	%	8,01	10,68	13,35	13,35	Disperdagin
		Jumlah Alat UTTP Keseluruhan Tahun n							
13	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang dilaksanakan	Perencanaan dan Pembangunan Industri yang dikerjakan $\times 100\%$	100	Persen	100	100	100	100	Disperdagin
		Perencanaan dan Pembangunan Industri yang direncanakan							

	14	Persentase Ijin Usaha Industri yang difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha yang Diterbitkan	x 100%	100	Persen	100	100	100	100	Disperdagin
			Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Yang difasilitasi								
	15	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Jumlah IKM yang memiliki Akun SIINas	X 100%	6	Persen	8	11	13	13	Disperdagin
			Jumlah IKM seluruhnya								
3.3. Meningkatnya Investasi											
1	Nilai Investasi				2398	Miliar	1	1	1	3	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan											
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	DPM/PPTSP	
		Jumlah Total Kegiatan									
2	Persentase Ketersediaan Dokumen Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Penanaman Modal yang dihasilkan pada Tahun n	X 100%	100	%	100	100	100	100	DPM/PPTSP	
		Target Dokumen Kebijakan Bidang Penanaman Modal yang dihasilkan pada Tahun n									
3	Persentase Pertumbuhan Investor	Jumlah Investor Tahun n	X 100%	100	%	100	100	100	100	DPM/PPTSP	
		Jumlah Rencana investor Tahun n									
4	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan Izin berbasis SPBE	Realisasi Layanan Perizinan yang berbasis SPBE pada Tahun n	X 100%	80	%	80	80	80	80	DPM/PPTSP	
		Permohonan Layanan Perizinan yang terfasilitasi pada Tahun n									
5	Persentase Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap SOP Bidang Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan SOP Bidang penanaman Modal pada Tahun n	X 100%	100	%	100	100	100	100	DPM/PPTSP	
		Pelaku Usaha yang dilakukan Binwasadal pada tahun n									

	6.	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi bagi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan berbasis SPBE yang dimanfaatkan pada Tahun n	X 100%	100	%	100	100	100	100	DPM/PTSP
			Realisasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis SPBE yang dikeluarkan pada Tahun n								
3.4. Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan											
	1.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)			31,69	%	29,70	30,26	30,83	30,83	
	2.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			76,7	Skor	77,0	77,2	77,4	77,4	
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										
	1.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	x 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Pertanian
	2.	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Pangan (Ton / ha) Padi sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Shorgum			9,77	Ton/Ha	9,52	9,54	9,56		Dinas Pertanian
		1. Padi / Sawah	Produksi Tanaman Padi Sawah Luas Panen Tanaman Padi Sawah	x 100%	6,48	Ton/Ha	5,02	5,03	5,04		Dinas Pertanian
		2. Padi Ladang	Produksi Tanaman Padi Ladang Luas Panen Tanaman Padi Ladang	x 100%	3,01	Ton/Ha	3,02	3,03	3,04		Dinas Pertanian
		3. Jagung	Produksi Tanaman Jagung Luas Panen Tanaman Jagung	x 100%	3,89	Ton/Ha	4,02	4,04	4,06		Dinas Pertanian
		4. Ubi Kayu	Produksi Tanaman Ubi Kayu Luas Panen Tanaman Ubi Kayu	x 100%	25,47	Ton/Ha	26	26,05	26,08		Dinas Pertanian
	3.	Cakupan Nilai Produktifitas Tanaman Hortikultura (Ton / ha) (Cabe Rawit, Cabe besar, Bawang merah, Bawang Putih, wortel, Kentang, Kubis / Kol, Petsai/Sawi, Labu siam, tomat, pisang, mangga, pepaya, Alpukat, Jeruk, bioforma(jahe, kunyit, dll			5,48	Ton/Ha	5,52	5,61	5,68		Dinas Pertanian
		a. Cabe Rawit	Produksi Tanaman Cabe Rawit Luas Panen Tanaman Cabe Rawit	x 100%	1,40	Ton/Ha	1,39	1,43	1,5		Dinas Pertanian
		b. Cabe Besar	Produksi Tanaman Cabe Besar Luas Panen Tanaman Cabe Besar	x 100%	1,73	Ton/Ha	1,60	1,65	1,66		Dinas Pertanian

	c. Bawang Merah	Produksi Tanaman Bawang Merah	x 100%	2,66	Ton/Ha	2,46	2,5	2,53		Dinas Pertanian
		Luas Panen Bawang Merah								
	d. Bawang Putih	Produksi Tanaman Bawang Putih	x 100%	2,60	Ton/Ha	2,31	2,38	2,39		Dinas Pertanian
		Luas Panen Bawang Putih								
	e. Pisang	Produksi Tanaman Pisang	x 100%	8,56	Ton/Ha	8,41	8,5	8,53		Dinas Pertanian
		Luas Panen Tanaman Pisang								
	f. Mangga	Produksi Tanaman Mangga	x 100%	6,99	Ton/Ha	6,69	6,70	6,75		Dinas Pertanian
		Luas Panen Tanaman Mangga								
	g. Alpukat	Produksi Tanaman Alpukat	x 100%	5,03	Ton/Ha	5,1	5,32	5,14		Dinas Pertanian
		Luas Panen Tanaman Alpukat								
	h. Jahe	Produksi Tanaman Jahe	x 100%	13,51	Ton/Ha	12,00	12,50	12,85		Dinas Pertanian
		Luas Panen Tanaman Jahe								
4	Cakupan Nilai produksi Tanaman Perkebunan (%) (Kelapa, Kopi, kakao, Jambu Mente, Kemiri, Cengkeh, Pala)			0,28		0,40	1,81	1,97		Dinas Pertanian
	a. Kelapa	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan (ton) pada tahun n dikurangi Produksi pada tahun n-1	x 100%	1,04	%	0,15	0,16	0,17		Dinas Pertanian
	b. Kopi			0,98	%	0,16	0,17	0,18		Dinas Pertanian
	c. Kakao			0,83	%	0,17	0,18	0,19		Dinas Pertanian
	d. Jambu Mente			0,26	%	0,05	0,06	0,17		Dinas Pertanian
	e. Pala			0,02	%	1,22	1,24	1,26		Dinas Pertanian
5	Cakupan Nilai Produksi Peternakan (%) (Sapi, Babi, Kambing, Ayam)			1,22	%	1,00	1,24	1,26		Dinas Pertanian
	a. Sapi b. Babi c. Kambing d. Ayam	Jumlah produksi ternak (Kg) pada tahun n dikurangi jumlah produksi ternak pada tahun n-1	x 100%	2,01	%	1,50	1,60	1,70		Dinas Pertanian
				2,09	%	1,00	1,02	1,04		Dinas Pertanian
				0,40	%	1,00	1,01	1,02		Dinas Pertanian
				3,16	%	1,00	1,01	1,02		Dinas Pertanian
	6	Terbangunnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah unit Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Tahun n (unit)	26	Unit	28	30	33		Dinas Pertanian
	7	Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun n (%)	100	%	100	100	100	100	Dinas Pertanian

	8	Terkendalinya Bencana Pertanian	$\frac{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang tertangani}}{\text{jumlah bencana pertanian yang terjadi}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinas Pertanian
	9	Cakupan Jumlah Kelompok Tani yang meningkat statusnya	Peningkatan Kelas kelompok tani tahun n	157	Kelompok	20	30	40		Dinas Pertanian
	10	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah Total Kegiatan							
	11	Jumlah Jumbung pangan masyarakat yang aktif / Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat}}{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten}} \times 100\%$	62,70%	%	67,70%	72,7%	79,70%	79,70%	Dinas Ketahanan Pangan
	12	Ratio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	$\frac{\text{Realisasi Skor PPH}}{\text{Target Skor PPH}} \times 100\%$	76,7	%	77,035206	77,206548	77,37789	77,37789022	Dinas Ketahanan Pangan
	13	Persentase Penanganan Desa/Kel. Rawan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel rawan pangan yang tertangani}}{\text{Jumlah Desa/Kel seluruhnya}} \times 100\%$	66,55	%	70,14	75,18	79,86	79,86	Dinas Ketahanan Pangan
	14	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	$\frac{\sum \text{Sampel Pangan aman}}{\sum \text{Sampel Pangan Yang Diuji}} \times 100\%$	76	%	76%	77%	78%	78%	Dinas Ketahanan Pangan
	15	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinas Perikanan
			Jumlah Total Kegiatan							
	16	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{\text{Total Produksi Perikanan Budidaya tahun n (Ton)}}{\text{Target Produksi Budidaya (Ton)}} \times 100\%$	9.593	%	80,97	90,69	100	100	Dinas Perikanan
	17	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap (Ton)}}{\text{Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton)}} \times 100\%$	61,04	%	66,58	69,91	72,41	72,41	Dinas Perikanan

3.5. Menurunkan Tingkat Pengangguran

1 Tingkat Pengangguran Terbuka			2,59	%	1,8494426	1,5415904	1,233523	1,233522571	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan									
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	DISTRANSKER
		Jumlah Total Kegiatan							
2	Persentase Besaran Pencari kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang Mengikuti pelatihan X 100%	52,98	%	57,36	63,50	69,63	69,63	DISTRANSKER
		pencari kerja yang terdaftar							
3	Persentase Besaran Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan X 100%	52,98	%	17,62	23,04	28,46	28,46	DISTRANSKER
		Pencari kerja yang terdaftar							
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan X 100%	5,76	%	6,72	7,68	8,64	8,64	DISTRANSKER
		Jumlah Perusahaan Keseluruhan							
5	Cakupan Perencanaan Cadangan Tanah dalam Kawasan Transmigrasi	Jumlah Cadangan Tanah yang Terealisasi pada Tahun n X 100%	0,00	%	0,00	50	100	100	DISTRANSKER
		Target Cadangan Tanah dalam Kawasan pada Tahun n							
6	Persentase tersedianya Kawasan Satuan Permukiman Baru	Luasan Satuan Permukiman baru Yang tersedia pada Tahun n X 100%	47,33	%	7,33	4,07	00	00	DISTRANSKER
		Luas Kawasan Transmigrasi Total							
7	Cakupan Peningkatan Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yang terfasilitasi penguatan kemandirian pada Tahun n X 100%	100	%	100	100	100	100	DISTRANSKER
		Satuan Permukiman Keseluruhan							

3.6. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat										
1	Persentase Penduduk Miskin (%)			22,86	%	22,21	22,08	21,95	21,95	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										
1	Besaran Pencari kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan pencari kerja yang terdaftar	X 100%	52,98	%	57,36%	63,50%	69,63%	69,63%	DISTRANSKER
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Jumlah PSKS yang diberdayakan Total PSKS	X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Total Keluarga Miskin	X 100%	76,64	%	77,01	73,37	77,74	77,74	Dinas Sosial
4	Persentase UKM yang terdaftar dalam Market Place	Jumlah UKM yang menggunakan Market Place Tahun n Jumlah UKM yang dibina Tahun n	X 100%	3,24	%	4,32	5,40	6,48	6,48	Dinkop dan UKM
5	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Jumlah kelompok kesenian Tradisional yang dilestarikan Jumlah kelompok kesenian Tradisional yang ada	X 100%	100	%	50,63%	62,63%	70,63%	70,63%	Dinas PK
6	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Potensi Lestari Perikanan Tangkap (Ton)	X 100%	61,04	%	66,58%	69,91%	72,41%	72,41%	Dinas Perikanan
3.7. Meningkatnya Pengendalian Inflasi										
1	Laju Inflasi (%)			3,80%		< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										
1	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah permasalahan kebijakan bidang perekonomian yang ditangani Seluruh permasalahan kebijakan bidang perekonomian	X 100%	100	%	100	100	100	100	SETDA

4. Meningkatnya kualitas ketersediaan infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan pembangunan kawasan Perdesaan

4.1. Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan

1 Indeks Pembangunan Infrastruktur			52,65	Angka	56,81	58,70	60,60	60,60	
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan									
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Sub Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)
2	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	panjang jalan yang di perbaiki Total panjang jalan dalam kondisi rusak X 100%	3,92	%	3,92	4,20	4,39	4,39	Dinas PUPR
3	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (primer dan sekunder) Total panjang jaringan irigasi (primer dan sekunder) X 100%	53,75	42,69	42,69	42,69	42,59	42,69	Dinas PUPR
4	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir Total luas lahan wilayah sungai rawan banjir di wilayah kab. Ende X 100%	7,81	%	8,54	9,27	9,59	9,99	Dinas PUPR
5	Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai Total panjang pantai rawan abrasi di wilayah kab. Ende X 100%	23,66	%	24,56	25,06	25,77	25,77	Dinas PUPR
6	Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga terakses Air Minum Layak Jumlah Rumah Tangga X 100%	56,68	%	64,25	67,42	70,58	70,58	Dinas PUPR
7	Persentase Drainase kota yang diperbaiki/dipelihara	panjang drainase kota yang di perbaiki Total panjang Drainase kota yang tidak berfungsi dengan baik X 100%	55,53	%	43,25	52,67	62,30	62,10	Dinas PUPR

8	Cakupan layanan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah	Jumlah penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah	X 100%	59,68	%	60,00	64,00	68,00	68,00	Dinas PUPR
		Jumlah permintaan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah dalam 1 tahun								
9	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	Jumlah ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	X 100%	94,19	%	70,00	75,20	80,00	80	Dinas PUPR
		Jumlah Total Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang yang di keluarkan dalam 1 tahun								
10	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP)
		Jumlah Total Sub Kegiatan								
11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi	X 100%	52,01	%	51,21	51,92	52,63	52,63	DPRKPP
		Jumlah Rumah Seluruhnya								
12	Persentase KK Korban Bencana Alam yang memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah KK Korban Bencana Alam yang Memperoleh RLH	X 100%	10	%	10	10	10	10	DPRKPP
		Jumlah Total KK Korban Bencana tahun n-1								
13	Persentase KK Relokasi yang memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah KK Relokasi yang Memperoleh RLH	X 100%	3	%	3	3	3	3	DPRKPP
		Jumlah Total KK di lokasi rawan bencana								
14	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Tertangani	luas permukiman kumuh tertangani	X 100%	11,92	%	11,92	11,92	11,92	11,92	DPRKPP
		total wilayah kumuh								
15	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Jumlah RLH Tahun n	X 100%	72	%	71,91	72,68	73,45	73,45	DPRKPP
		Total Jumlah Rumah Tahun n								

	16	Persentase Bidang Tanah Pemda yang Tersertifikat	Jumlah bidang tanah pemda yang disertifikasi	X 100%	23,21	%	23,57	23,75	23,93	23,93	DPRKPP
			Total bidang tanah pemda								
	17	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	Persen	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
			Jumlah Total Sub Kegiatan								
	18	Indeks pelayanan transportasi darat	Jumlah cakupan Pelayanan Transportasi Darat	X 100%	46,55	%	81,65	90,70	100,00	100,00%	Dinas Perhubungan
			Jumlah Pelayanan transportasi darat								
	19	Persentase koordinasi pembinaan dan pengawasan layanan angkutan laut	Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pelayanan Tahun N	X 100%	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
			Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pelayanan direncanakan								
4.2. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan											
	2. Indeks Desa Membangun (IDM)				0,6025		0,6202	0,62548	0,64613	0,646107854	
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										
	1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
			Jumlah Total Kegiatan								
	2	Persentase Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan desa	X 100%	100	%	100	100	100	100	DPMD
			Jumlah Desa yang diusulkan untuk dilakukan penataan desa								
	3	Persentase Peningkatan Kerjasama Pedesaan	Jumlah Desa yang didampingi	X 100%	8,79	%	20	28,57	34,17	34,17	DPMD
			Seluruh desa yang melakukan kerjasama								

	4	Cakupan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang tertib administrasi								
			jumlah desa seluruhnya X 100%	58,82	%	66,67	74,51	82,35	82,35	DPMD	
	5	Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADes	Jumlah BUMDes yang berkontribusi terhadap PADes								
			jumlah BUMDes yang sudah ada penyertaan modal X 100%	5,45	%	7,27	9,09	10,91	10,91	DPMD	
	6	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat								
			Total Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat X 100%	78,39	%	72,82	75,32	77,82	77,82	DPMD	
4.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup											
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				73,85		77,61	72,62	72,92	72,92		
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan											
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan									
		Jumlah Total Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)		
2	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	Jumlah dokumen perencanaan LH Yang Dimanfaatkan									
		Jumlah dokumen LH yang disusun X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)		
3	Persentase Pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	cakupan pencegahan + cakupan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
		2 X 100%	20	%	25	30	40	40	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)		
4	Persentase B3 dan Limbah B3 yang ditangani	Jumlah unit usaha yang berpotensi menghasilkan B3 dan Limbah B3 Yang memenuhi persyaratan penyimpanan sementara									
		Jumlah seluruh unit usaha yang berpotensi menghasilkan B3 dan Limbah B3 X 100%	13	%	17	20	30	30	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)		

5	Persentase ketaatan terhadap persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya	$\times 100\%$	8,16	%	46,61	69,39	100	100	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		Jumlah usaha/kegiatan berdampak lingkungan yang menjadi target pembinaan dan pengawasan								
6	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat di Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk LK di Kabupaten	$\times 100\%$	0	%	29,55	70,45	100	100	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		Jumlah kelompok masyarakat sasaran								
7	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberikan penghargaan	Jumlah Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	$\times 100\%$	0	%	29,55	63,64	100	100	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		Jumlah Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH								
8	Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	$\times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		jumlah pengaduan lingkungan hidup								
9	Persentase Pengolahan Sampah	Volume sampah yang ditangani + yang dikurangi	$\times 100\%$	60,62	%	60,75	60,89	61,03	61,03	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		volume sampah yang dikelola								

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)

5.1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

1 Opini BPK

WTP

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP)	CC (53,33)	Nilai	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)	B (62,23)		
	3	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,4	Scor	2,5	2,55	2,6	2,6		
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	Nilai	B	B	B	B		
	5	Indeks Merit Sistem	195	Angka	175	250	275	275		
	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	Angka	2,7	3	3	3		
	7	Persentase Pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD	25,37	%	34	36	38	38		
	8	Indeks Pengawasan Kearsipan	20,24	Angka	30	35	40	40		
	9	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	Skor 74,15	Angka	Skor 79	Skor 82	Skor 85	Skor 85		
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan									
	1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan							
			Jumlah Total Kegiatan x 100%	100	%	100	100	100	100	SETDA
	2	Persentase Perangkat Daerah dengan dokumen AKIP Berkualitas	Jumlah PD dengan dokumen kinerja yang berkualitas x 100%	86,79	%	90,57	94,57	100	100	SETDA
			Jumlah Perangkat Daerah							
	3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Anjab, ABK	Jumlah Perangkat yang Melaksanakan Anjab ABK x 100%		%	32,08	66,04	100	100	SETDA
Jumlah Perangkat Daerah										
4	Persentase Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik dengan mutu pelayanan B	Jumlah Perangkat Daerah /Unit Pelayanan Publik dengan mutu pelayanan B x 100%		%	100	100	100	100	SETDA	
		Jumlah Perangkat Daerah /Unit Pelayanan Publik yang melakukan SKM								
5	Persentase Pelayanan Kedinasan kepada KDH/WKDH serta Sekretaris Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan kepada KDH/WKDH serta Sekretaris Daerah yang dihasilkan x 100%		%	100	100	100	100	SETDA	
		Jumlah Pelayanan Kedinasan kepada KDH/WKDH serta Sekretaris Daerah yang direncanakan								
6	Persentase Pemenuhan Isian Indeks Capaian LPPD Kabupaten	Jumlah Isian Indeks LPPD Kabupaten yang terpenuhi x 100%	86,3	%	100	100	100	100	SETDA	
		Jumlah seluruh isian Indeks LPPD Kabupaten								

7	Persentase Perangkat Daerah Pengampu SPM dengan Capaian Minimal Kategori Tuntas Muda	Jumlah Perangkat Daerah Pengampu SPM Kategori Minimal Tuntas Muda	X 100%	71,4	%	80	85	90	90	SETDA
		Jumlah seluruh Perangkat Daerah Pengampu SPM								
8	Persentase kerjasama yang aktif	Jumlah kerjasama yang disepakati	X 100%	65	%	80	85	90	90	SETDA
		Total kerjasama yang dikaji/dibahas								
9	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan masyarakat dari OPD dan pihak lainnya yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya yang ditindaklanjuti	X 100%	100	%	100	100	100	100	SETDA
		Jumlah rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya yang diusulkan								
10	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi produk hukum daerah yang dihasilkan	X 100%	71,43	%	96	98	100	100	SETDA
		Jumlah fasilitasi produk hukum daerah yang direncanakan								
11	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan	X 100%	94,4	%	96	98	100	100	SETDA
		Jumlah produk hukum daerah yang diundangkan								
12	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan	X 100%	100	%	100	100	100	100	SETDA
		Jumlah permasalahan hukum yang diterima								
13	Persentase koordinasi penyampaian rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD serta Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD dan pihak lainnya yang ditindaklanjuti	X 100%	100	%	100	100	100	100	SETDA
		Jumlah koordinasi rumusan kebijakan dari OPD dan pihak lainnya bidang perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD dan pihak lainnya yang diusulkan								

14	Persentase Realisasi Pembangunan fisik dan non fisik yang tepat waktu	Jumlah pekerjaan fisik dan non fisik dengan Realisasi Tepat Waktu	X 100%	80	%	100	100	100	100	SETDA
		Jumlah pekerjaan fisik dan non fisik seluruhnya								
15	Capaian pemanfaatan sistem pengadaan	Rata-rata pemanfaatan sistem pengadaan	X 100%	47,6	%	48,00	48	49	49	SETDA
16	Nilai tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa	Nilai tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa	X 100%	n/a	%	33,33	44	56	56	SETDA
		Nilai tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa yang direncanakan								
17	Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa	Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa	X 100%	11,67	%	23,52	29	35	35	SETDA
		Jumlah SDM kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai standar yang berlaku								
18	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		Jumlah Total Kegiatan								
19	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rerata Capaian Indikator Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	X 100%	96,71	%	100	100	100	100	Bappeda
20	Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan	Tersedianya Dokumen Kajian Penelitian	X 100%	0	Penelitian	1	1	1	5	Bappeda
21	Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rerata Capaian Indikator Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		96,69	%	100	100	100	100	Bappeda

	22	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	BPKAD
			Jumlah Total Kegiatan							
	23	Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Penyusunan dan Penetapan APBD Tepat Waktu sesuai Regulasi	Tepat Waktu	Kriteria	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
	24	Meningkatnya Opini BPK	Kategori Opini BPK yang diperoleh	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	25	Kepatuhan terhadap Implementasi transaksi Non Tunai	Jumlah Belanja Transaksi Non Tunai X 100%	n/a	%	100	100	100	100	BPKAD
			Jumlah Realisasi Belanja							
	26	Penyelesaian administrasi Pengelolaan Keuangan tepat waktu	Ketepatan waktu penyelesaian administrasi Pengelolaan Keuangan	Tepat Waktu	Kriteria	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
	27	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah Tepat Waktu sesuai Regulasi	Tepat Waktu	Kriteria	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
	28	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	BAPPENDA
			Jumlah Total Kegiatan							
	29	Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	Realisasi Retribusi dan Pajak X 100%	25,37	%	33%	35%	37%	37%	BAPPENDA
			TotaPendapatan Asli Daerah							
	30	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	BKPSDM
			Jumlah Total Kegiatan							
	31	Persentase Pelayanan Kepegawaian	Jumlah ASN yang menerima pelayanan kepegawaian X 100%	80,2	%	89,05	90,33	90,61	90,61	BKPSDM
			Jumlah ASN Yang membutuhkan pelayanan Kepegawaian							
	32	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat X 100%	7,71	%	10,88	11,03	11,18	11,18	BKPSDM
			Jumlah ASN yang memenuhi syarat Diklat							

	33	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Inspektorat
	34	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK}} \times 100\%$	61,96	%	100	100	100	100	Inspektorat
	35	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi APIP}} \times 100\%$	58,77	%	100	100	100	100	Inspektorat
	36	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai evaluasi SPIP hasil Quality Assurance (QA) BPKP	level 2	Kategori	level 3	level 3	level 3	level 3	Inspektorat
	37	Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil penilaian BPKP	level 2	Kategori	level 3	level 3	level 3	level 3	Inspektorat
	38	Persentase Capaian Nilai MCP Kabupaten	Hasil penilaian KPK	52%	%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
	39	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100	%	94	96	98	98	Dispenduk Capil
	40	Persentase Penduduk berKartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KK}}{\text{Jumlah penduduk yang harus Memiliki KK}} \times 100\%$	81,05	%	95	96	98	98	Dispenduk Capil
	41	Persentase Penduduk ber KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Total jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	99,30	%	92	95	98	98	Dispenduk Capil
	42	Persentase anak memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah penduduk dibawah 17 tahun yang memiliki KIA}}{\text{Total penduduk usia di bawah 17 tahun}} \times 100\%$	63,88	%	55	65	75	75	Dispenduk Capil
	43	Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk 0-18 tahun}} \times 100\%$	92,34	%	85	90	95	95	Dispenduk Capil

44	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Target Inovasi}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dispenduk Capil
45	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Kependudukan yang Tersedia	1-	Dokumen	1	1	1	1	Dispenduk Capil
46	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Kegiatan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
47	Persentase diseminasi informasi publik	$\frac{\text{Jumlah Informasi publik yang Disebarluaskan}}{\text{Target jumlah informasi publik yang harus disebarluaskan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Diskominfo
48	Indeks Capaian Kinerja E - Government (Domain Kebijakan + Domain Tata Kelola SPBE + Domain Manajemen SPBE + Domain Layanan SPBE)	$\frac{\text{Indeks Capaian Kinerja E - Government (Domain Kebijakan Internal + Domain Tata Kelola SPBE + Domain Manajemen SPBE + Domain Layanan SPBE)}}{\text{Jumlah Indikator Domain SPBE}} \times 100\%$	23,25	Nilai	-	39	47		Diskominfo
49	Persentase Perangkat daerah yang memiliki akses internet dan terhubung jaringan intra Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$	35,85	%	-	60	100	100	Diskominfo
50	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dan terpublikasi secara elektronik}}{\text{Jumlah data statistik sektoral yang harus tersedia dan terpublikasi secara elektronik}} \times 100\%$	40	%	37,50	68,75	100	100	Diskominfo
51	Persentase Pengamanan Data dan Informasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah data dan informasi daerah yang diamankan}}{\text{Jumlah data dan informasi daerah yang harus diamankan}} \times 100\%$	100	%	100	100	100	100	Diskominfo
52	Persentase Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah dan Desa secara Baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang mengelola Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Ende}} \times 100\%$	44,16	%	41,94 %	53,94 %	61,94 %	61,94 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

53	Persentase pembinaan arsip Perangkat Daerah dan Desa secara Baku	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang membina Arsip secara Baku Jumlah Perangkat Daerah dan Desa Di Kabupaten Ende	X 100%	29,50 %	%	30,77 %	34,11 %	37,48 %	37,48 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
54	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan Petanggungjawaban	Jumlah Arsip yang dilindungi Dan diselamatkan Jumlah arsip seluruhnya	X 100%	na	%	20,00%	22,00%	23,00%	23,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
55	Persentase Pengguna Layanan Arsip	Jumlah perijinan pengguna arsip tertutup selama satu tahun Jumlah Arsip Tertutup	X 100%	na	%	3,34 %	4,0 %	4,68 %	4,68 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
56	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	SETWAN
57	Persentase Ranperda yang disetujui bersama	Jumlah Raperda yang dibahas pada Tahun n Jumlah Raperda yang diajukan dan dibahas pada Tahun n	X 100%	60	%	100	100	100	100	SETWAN
58	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama pada Tahun n Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang seharusnya dibahas dan disetujui bersama pada Tahun n	X 100%	100	%	100	100	100	100	SETWAN
59	Persentase Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pada Tahun n Jumlah Kegiatan Pengawasan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun n	X 100%	75	%	71,42	85,71	100	100	SETWAN
60	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende

71	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Jumlah Total Kegiatan								
72	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Jumlah Total Kegiatan								
73	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Tengah
		Jumlah Total Kegiatan								
74	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Jumlah Total Kegiatan								
75	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Jumlah Total Kegiatan								
76	Persentase Kemajuan Kelurahan (PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting)		X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
77	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Jumlah Total Kegiatan								
78	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Jumlah Total Kegiatan								
79	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Selatan
		Jumlah Total Kegiatan								
80	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Jumlah Total Kegiatan								
81	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
		Jumlah Total Kegiatan								

	82	Persentase Kemajuan Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan (PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting)	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
	83	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
			Jumlah Total Kegiatan								
	84	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
			Jumlah Total Kegiatan								
	85	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
			Jumlah Total Kegiatan								
	86	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Timur
			Jumlah Desa yang ada								
	87	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
			Jumlah Total Kegiatan								
	88	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
			Jumlah Total Kegiatan								
	89	Persentase Kemajuan Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan (Bebas Stunting)	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
	90	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
			Jumlah Total Kegiatan								
	91	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
			Jumlah Total Kegiatan								
	92	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
			Jumlah Total Kegiatan								

	93	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ende Utara
			Jumlah Desa yang ada							
	96	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
			Jumlah Total Kegiatan							
	97	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
	98	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
			Jumlah Total Kegiatan							
	99	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
			Jumlah Total Kegiatan							
	100	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
			Jumlah Total Kegiatan							
	101	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Pulau Ende
			Jumlah Desa yang ada							
	102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
			Jumlah Total Kegiatan							
	103	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
			Jumlah Total Kegiatan							
	104	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
			Jumlah Total Kegiatan							

	105	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
			Jumlah Total Kegiatan								
	106	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
			Jumlah Total Kegiatan								
	107	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dolrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Nangapanda
			Jumlah Desa yang ada								
	108	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona
			Jumlah Total Kegiatan								
	109	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona
			Jumlah Total Kegiatan								
	110	Persentase Kemajuan Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan (PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting)		X 100%	100	%	100	100	100	Kecamatan Ndona
	111	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona
			Jumlah Total Kegiatan								
	112	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona
			Jumlah Total Kegiatan								
	113	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona
			Jumlah Total Kegiatan								
	114	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dolrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona
			Jumlah Desa yang ada								

115	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Total Kegiatan							
116	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Total Kegiatan							
117	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Tingkat Kemajuan Kelurahan (PKC Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting) X 100%	100	%	100	100		100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Total Kegiatan							
		Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenngar dan Pelaporan Tepat Waktu X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
118	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Total Kegiatan							
119	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Total Kegiatan							
120	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenngar dan Pelaporan Tepat Waktu X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detusoko
		Jumlah Desa yang ada							
121	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	00	00	00	00	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Total Kegiatan							
122	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Total Kegiatan							
123	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Total Kegiatan							
124	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Total Kegiatan							
125		Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Total Kegiatan							

126	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Total Kegiatan								
127	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kelimutu
		Jumlah Desa yang ada								
128	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Jumlah Total Kegiatan								
129	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Jumlah Total Kegiatan								
130	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Jumlah Total Kegiatan								
131	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Jumlah Total Kegiatan								
132	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Jumlah Total Kegiatan								
133	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Detukeli
		Jumlah Desa yang ada								
134	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
		Jumlah Total Kegiatan								

	135	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
			Jumlah Total Kegiatan							
	138	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
			Jumlah Total Kegiatan							
	139	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
			Jumlah Total Kegiatan							
	140	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokreggar dan Pelaporan Tepat Waktu X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolowaru
			Jumlah Desa yang ada							
	141	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
			Jumlah Total Kegiatan							
	142	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
			Jumlah Total Kegiatan							
	143	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
			Jumlah Total Kegiatan							
	144	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
			Jumlah Total Kegiatan							
	145	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
			Jumlah Total Kegiatan							

146	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lepembusu Kelisoke
		Jumlah Desa yang ada								
147	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
148	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
149	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
150	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
151	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
152	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Desa yang ada								
153	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
154	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole
		Jumlah Total Kegiatan								
155	Persentase Kemajuan Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan (PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting)	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maurole

	156	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
	157	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
	158	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
	159	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu Jumlah Desa yang ada	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Lio Timur
	160	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kota Baru
	161	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kota Baru
	162	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kota Baru
	163	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kota Baru
	164	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kota Baru
	165	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu Jumlah Desa yang ada	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Kota Baru

166	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Jumlah Total Kegiatan								
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Jumlah Total Kegiatan								
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Jumlah Total Kegiatan								
169	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Jumlah Total Kegiatan								
170	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Jumlah Total Kegiatan								
171	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Maukaro
		Jumlah Desa yang ada								
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Jumlah Total Kegiatan								
173	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Jumlah Total Kegiatan								
174	Persentase Kemajuan Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan (PKK Aktif, Posyandu Aktif, LPM Aktif, Bebas Stunting)	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
175	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Jumlah Total Kegiatan								
176	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
		Jumlah Total Kegiatan								

	177	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
	178	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu Jumlah Desa yang ada	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wolojita
	179	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wewaria
	180	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wewaria
	181	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wewaria
	182	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wewaria
	183	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wewaria
	184	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokrenggar dan Pelaporan Tepat Waktu Jumlah Desa yang ada	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Wewaria
	185	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
	186	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan Jumlah Total Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur

187	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Jumlah Total Kegiatan								
188	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Jumlah Total Kegiatan								
189	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Jumlah Total Kegiatan								
190	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndona Timur
		Jumlah Desa yang ada								
191	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndori
		Jumlah Total Kegiatan								
192	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndori
		Jumlah Total Kegiatan								
193	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndori
		Jumlah Total Kegiatan								
194	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Program Koordinasi	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndori
		Jumlah Total Kegiatan								
199	Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndori
		Jumlah Total Kegiatan								
200	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	X 100%	100	%	100	100	100	100	Kecamatan Ndori
		Jumlah Desa yang ada								

5.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan serta Perlindungan Sosial bagi Masyarakat											
	1. Indeks Pelayanan Sosial			32,89		39,92	29,15	29,28	29,28		
	2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			72,28		72,52	72,65	72,78	72,78		
	3. Indeks Perlindungan Perempuan dan Anak			83		83,135	83,21	83,28	83,28		
	4. Angka Kriminalitas			0,00027417		0,00027417	0,00027417	0,00027417	0,00027417		
	5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPM perempuan yg berpartisipasi pada politik dan ekonomi)/IPM perempuan yg berpartisipasi pada politik dan ekonomi x 100%)			66,02		70,471337	72,235021	73,9987	73,99870424		
	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										
	1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan x 100%	100	%	100	100	100	100	Satpol PP	
			Jumlah Total Sub Kegiatan								
		2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Jumlah kasus K3 pada tahun n – Jumlah kasus K3 pada tahun n-1 x 100%	-40	%	-20	-20	-20	-20	Satpol PP
				Jumlah Kasus K3 pada tahun n-1							
3		Persentase Penegakan PERDA	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan x 100%	100	%	100	100	100	100	Satpol PP	
			Jumlah Perda dan Perkada yang ada								
4		Persentase Penurunan Kasus Kebakaran	Jumlah kasus Kebakaran pada tahun n -Jumlah kasus Kebakaran pada tahun n-1 x 100%	-38	%	-20	-20	-20	-20	Satpol PP	
			Jumlah kasus Kebakaran pada tahun n-1								
5		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Realisasi Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) x 100%	100	%	100	100	100	100	Satpol PP	
			Realisasi Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai standar								
6		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan x 100%	100	%	100	100	100	100	BFBD	
			Jumlah Total Sub Kegiatan								

7	Persentase Desa Tangguh bencana pada kawasan rawan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana X 100%	50,87	%	35,29	36,08	36,86	36,86	BPBD
		Jumlah Desa Rawan Bencana							
8	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Jumlah Total Sub Kegiatan							
9	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan							
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) X 100%	5,39	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti seluruhnya							
11	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Jumlah korban bencana							
13	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	Jumlah TMP yang dipelihara X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Jumlah TMP yang ada							
14	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan X 100%	100	%	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Total Sub Kegiatan							

	15	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$	97,99	%	98,79	99,22	99,67	99,67	Dinas PPPA
	16	Ratio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	0,02	%	0,022	0,035	0,008	0,008	Dinas PPPA
	17	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	$\frac{\text{Jumlah UPTD yang melaksanakan Layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah UPTD PPA seluruhnya}} \times 100\%$	100 %	%	100	100	100	100	Dinas PPPA
	18	Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak		Dokumen	2	2	2	2	Dinas PPPA
	19	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif}}{\text{Total Lembaga Pemenuhan Hak anak}} \times 100\%$	100	Persen	100	100	100	100	Dinas PPPA
	20	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	$\frac{\text{Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah Total Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak}} \times 100\%$	100	Persen	100	100	100	100	Dinas PPPA
	21	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan}}{\text{Jumlah Total Sub Kegiatan}} \times 100\%$	100	Persen	100	100	100	100	Kesbangpol
	22	Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa di tahun n}}{\text{Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa yang direncanakan di tahun n}} \times 100\%$	62,50	%	67,00	68,00	69,00	69,00	Kesbangpol
	23	Persentase Parpol penerima hibah yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah parpol penerima hibah yang menyelesaikan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Parpol penerima hibah}} \times 100\%$	91,5	%	95,00	96,00	97,00	97,00	Kesbangpol

	24	Persentase Ormas yang dibina	Jumlah Ormas yang dibina	38,96	%	45,00	46,00	47,00	47,00	Kusbangpol
			Jumlah Ormas yang terdaftar $\rightarrow \times 100\%$							
	25	Persentase Penanganan Potensi Konflik berbasis ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Potensi Konflik yang berbasis ekonomi, sosial dan budaya yang terselesaikan di tahun n $\rightarrow \times 100\%$	66,00	%	57,00	68,00	69,00	69,00	Kusbangpol
			Jumlah Potensi Konflik yang berbasis ekonomi, sosial dan budaya yang ada di tahun n							
	26	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial di tahun n $\rightarrow \times 100\%$	75,00	%	76,00	77,00	78,00	78,00	Kusbangpol
			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial yang direncanakan di tahun n							

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, dengan tema **"PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM UNTUK Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan"**. Tema ini dimaksudkan bahwa fokus pembangunan yang dilaksanakan ditekankan pada upaya-upaya untuk Peningkatan Kualitas SDM, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dimana Penurunan Kemiskinan Ekstrem yang secara nasional ditargetkan pada tahun 2024 mencapai nol persen, dan upaya-upaya konkrit demi mendukung pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan.

Sejalan dengan ketentuan, penyusunan RKPD 2025 telah memastikan keselarasan dan sinergisitas perencanaan dan penganggaran. Perumusan prioritas program dan kegiatan, dilaksanakan secara lebih terukur dan didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjamin kualitas pelaksanaan musrenbang, yang tidak lain merupakan proses bersama merumuskan alokasi Pagu Indikatif bagi desa dan kelurahan dalam prioritas pembangunan.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 serta kebijakan pusat dan provinsi NTT, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Ende tahun 2025 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende tahun 2025, RKPD Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan seluruh pihak (partisipatif). Oleh karena itu diperlukan suatu langkah strategis yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende Tahun 2025.
2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh perangkat daerah dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam regulasi yang mengaturnya.
3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN serta sumber-sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus membuat Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui

upaya koreksi, dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende.

5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya.
7. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RPKD Tahun 2025 tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Ende untuk terus mendorong peran serta aktif dari seluruh pihak, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Selain itu optimalisasi reformasi birokrasi, melalui upaya-upaya kreatif dan inovatif oleh masing-masing perangkat daerah teknis terkait, harus terus didorong sehingga terjadi perubahan signifikan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RPKD Kabupaten Ende Tahun 2025 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.

Ende, 25 Juni 2024
Bupati Ende

AGUSTINUS G. NGASU



PARADE KEBANGSAAN 1 JUNI 2024